



UNIVERSITAS INDONESIA

**PRODUKSI WACANA ANCAMAN BAHAYA KOMUNISME
OLEH NEGARA ORDE BARU SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP PENGETAHUAN MASYARAKAT**
(Studi Wacana Film Pengkhianatan G30/PKI)

SKRIPSI

HARYA PRATAMA

0905050176

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

DEPOK

JANUARI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**PRODUKSI WACANA ANCAMAN BAHAYA KOMUNISME
OLEH NEGARA ORDE BARU SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP PENGETAHUAN MASYARAKAT**

(Studi Wacana Film *Pengkhianatan G30/PKI*)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**

HARYA PRATAMA

0905050176

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

DEPOK

JANUARI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk,
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Harya Pratama

NPM : 0905050176

Tanda Tangan : 

Tanggal : 5 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Harya Pratama
NPM : 0905050176
Program Studi : Sosiologi
Judul Skripsi : PRODUKSI WACANA ANCAMAN BAHAYA
KOMUNISME OLEH NEGARA ORDE BARU
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
PENGETAHUAN MASYARAKAT

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Arie Soesilo, M.sc.



Penguji : Drs. Ganda Upaya, M.A.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Departemen Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Erna Karim selaku ketua Program Sarjana Sosiologi dan pembimbing akademik;
2. Drs. Arie S. Soesilo, M.Sc. selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan direpotkan oleh penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung;
3. Ganda Upaya M.A. selaku dosen penguji;
4. Mbak Putu Chandra atau yang akrab dipanggil dengan mbak Dolly sebagai sekretaris Program Sarjana Sosiologi yang memberikan banyak masukan mengenai proses penyusunan skripsi;
5. Seluruh Dosen Sosiologi FISIP UI;
6. Mama tercinta Hj. Suhartini dan Ayah tercinta Drs. H. Arya Nanda, MM. yang tak henti-hentinya memberikan bantuan dukungan material dan moral serta doa yang tidak pernah berkurang sedikitpun sampai tulisan ini selesai;
7. Adik-adik tersayang Harya Pradhitya, Amd. dan Annisa Fita Nanda yang telah memberikan dukungannya secara langsung maupun tidak langsung;
8. Semua informan yang sudah bersedia untuk diwawancarai (Edward Nimrot, Jalu Bayu Adhi, Henry Suropati, Tomi Nugroho, dan Sopar Peranto);

9. Teman-teman dari Sosiologi FISIP UI, khususnya angkatan 2005 (maaf tidak bisa diabsen satu per satu) yang banyak memberikan semangat dan dukungannya, serta bahan-bahan perkuliahan sampai tulisan ini selesai;
10. Teman-teman dari Akuntansi Ekstensi FEUI angkatan 2008;
11. Teman-teman kosan LALOLO2 kutek yang telah membantu penulis meminjamkan kamarnya untuk beristirahat setelah lelah beraktifitas maupun sekedar bercengkerama bahkan sampai *nge-jam* bareng melepaskan penat;
12. Laptop yang penulis pakai saat proses penulisan berlangsung mulai dari ketumpahan kopi sampai kehujanan sehingga tulisan ini selesai walaupun jadi agak tersendat;
13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Harya Pratama

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harya Pratama
NPM : 0905050176
Program Studi : S1 Reguler
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PRODUKSI WACANA ANCAMAN BAHAYA KOMUNISME OLEH
NEGARA ORDE BARU SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
PENGETAHUAN MASYARAKAT**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya :

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Januari 2011

Yang menyatakan



(Harya Pratama)

ABSTRAK

Nama : Harya Pratama

Departemen : Sosiologi

Judul : PRODUKSI WACANA ANCAMAN BAHAYA KOMUNISME
OLEH NEGARA ORDE BARU SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP PENGETAHUAN MASYARAKAT

Penelitian ini membahas tentang wacana seputar ancaman bahaya komunisme pada konteks Orde Baru dan era Reformasi. Adapun wacana yang digunakan bersumber dari sebuah film produksi Orde Baru yang disutradarai oleh Arifin C. Noor dan pada masa rezim Suharto setiap tahunnya selalu ditayangkan distasiun televisi nasional dan televisi swasta, yakni film Pengkhianatan G30S/PKI yang menjadi data primer. Film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan salah satu media yang digunakan oleh Orde Baru dalam memberikan pengetahuan masyarakat mengenai ideologi komunisme dan peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan enam perwira tinggi dan seorang perwira Angkatan Darat. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penggambaran negara Orde Baru mengenai komunisme, peristiwa G30S, dan Partai Komunis Indonesia pada film tersebut. Selain itu penelitian ini mencoba membahas mengenai bagaimana wacana komunisme pada konteks Reformasi seperti sekarang ini setelah film tersebut dihapuskan dengan menggunakan menggunakan data sekunder berupa wawancara serta wacana-wacana seputar komunisme yang muncul.

Kata kunci :

Wacana, Orde Baru, Film Pengkhianatan G30S/PKI

ABSTRACT

Name : Harya Pratama

Department : Sociology

Title : DISCOURSE PRODUCTION OF COMMUNISM DANGER
THREAT BY THE NEW ORDER STATE AND THE EFFECT
ON THE SOCIETY KNOWLEDGE

This study discusses about communism discourse in the context of New Order and Reform era. The discourse that used are come from a production film of the New Order, and directed by Arifin C. Noor and in every year this film always aired on national television (TVRI) and other private television, Pengkhianatan G30S/PKI movie become the primary data in this research. Film Pengkhianatan G30S/PKI is one of the medium that used by the New Order in giving the public knowledge about the ideology of communism and the events of 30 September 1965 that killed six officers and one Army officer. This study focuses on how the New Order state describe about communism in Indonesia, G30S events, and the Indonesian Communist Party from film. In addition, this study tries to discuss about how the discourse of communism in the context of the Reformation after this film was written off by using secondary data in the form of interviews and discourses about the communism that emerged.

Keywords : Discourse, New Order, Film Pengkhianatan G30S/PKI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Perumusan Masalah	8
I.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
I.4 Tujuan Penelitian	11
I.5 Signifikansi Penelitian	11
 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
II.1 Tinjauan Pustaka.....	12
II.2 Kerangka Teori	15
II.2.i. Film Sebagai Wacana.....	15
II.2.ii Film Sebagai Bentuk Komunikasi Massa	16
II.2.iii Konstruksi Sosial Kekuatan Dari Media.....	19
II.2.iv Wacana dan Kekuasaan.....	20
II.2.v Negara	23
II.3 Model Analisis	27

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 CDA (Critical Discourse Analysis).....	28
III.2 Jenis Penelitian	31
III.3 Obyek Penelitian	31

BAB IV TINJAUAN HISTORIS MENGENAI KOMUNISME DI INDONESIA DAN PRODUKSI WACANA KOMUNISME MELALUI FILM OLEH NEGARA ORDE BARU

IV.1 Komunisme di Indonesia.....	33
IV.1.1 Kelahiran Gerakan Revolusioner.....	33
IV.1.2 Kemunculan Partai Komunis Indonesia	35
IV.1.3 Konteks Politik Internasional dan Nasional tahun 1965	41
IV.1.4 Militer dan PKI	51
IV.1.5 Peristiwa G30S/PKI dan Transfer Kekuasaan di Indonesia	54
IV.1.6 Tentara dan Rezim Orde Baru di Indonesia.....	71
IV.1.7 Dwifungsi ABRI	75
IV.2 Pengabdian Peristiwa G30S Melalui Film Pengkhianatan G 30 S/PKI.....	79
IV.2.1 Jenis dan Genre.....	79
IV.2.2 Produksi	80
IV.2.3 Perusahaan Umum Produksi Film Negara	80
IV.2.3.1 Pendirian perusahaan Film Milik Negara	80
IV.2.3.2 Perkembangan Perusahaan Film Milik Negara.....	81
IV.2.4 Produser : Gufron Dwipayana.....	81
IV.2.5 Sutradara : Arifin C. Noer.....	83
IV.2.6 Editor : Prof. DR. Nugroho Notosusanto	84
IV.2.7 Sinopsis Film Pengkhianatan G 30 S PKI.....	85
IV.2.7.1 Penggambaran Atheis	94

IV.2.7.2	Penggambaran Biadab.....	97
IV.2.7.3	Penggambaran Penghasut	104
IV.3	Anggapan Masyarakat Mengenai Penggambaran Komunisme dalam Film Pengkhianatan G30S/PKI.....	106
 BAB V ANALISIS		
V.1	Negara dan Kekuasaan Orde Baru	119
V.2	Produksi Wacana Orde Baru.....	122
V.2.i	Undang-Undang	126
V.2.ii	Pidato Kenegaraan.....	127
V.2.iii	Buku	129
V.2.iv	Penataran P4.....	133
V.2.v	Film	135
V.3	Sinema Indonesia dalam Periode Orde Baru	136
V.4	Peran Negara Orde Baru Pada Film Pengkhianatan G30S PKI	139
V.5	Film, Otoritas Negara, dan Reproduksi Wacana Ancaman Bahaya Laten Komunis.....	152
V.6	Wacana G 30 S Pada Era Reformasi.....	156
 BAB VI KESIMPULAN		164
DAFTAR REFERENSI		172

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang Masalah

Demokrasi Indonesia saat ini setelah keruntuhan era Orde Baru mengalami berbagai perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan demokrasi yang dialami pada kekuasaan Suharto. Hal ini dapat dilihat dari praktik demokrasi yang dijalankan melalui pemilu di era reformasi ini. Salah satu perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari era Orde Baru dan era reformasi, khususnya terkait dengan pesta demokrasi (Pemilu), adalah pada konsep kepartaian. Jika ditelaah, konsep Tripartai yang dianut oleh kepemimpinan Suharto dengan satu partai besar yang dominan agaknya telah ditinggalkan saat ini, mengingat penyelenggaraan pemilu pada era reformasi ini memunculkan banyak sekali partai dengan berbagai visi dan misi serta tujuan yang dibawa partai untuk masuk ke dalam legislatif. Situasi dan kondisi kepartaian pada saat ini mengingatkan kita pada sebuah era dimana demokrasi yang diterapkan saat itu dilandaskan pada konsep multipartai, seperti yang diterapkan pada masa kepemimpinan Sukarno. Dengan kondisi multipartai yang diterapkan pada era Orde Lama, Sukarno menjalankan pemerintahannya dengan demokrasi terpimpin. Pada era ini terdapat partai besar yang cukup mendominasi dan memiliki massa yang cukup besar sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia yang juga banyak memberikan dukungannya bagi pemerintahan Sukarno. Selain itu, partai ini memberikan pengaruh yang cukup besar juga bagi keberhasilan pemerintahan Sukarno pada masa itu. Partai tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada pemerintahan Suharto menjadi partai yang telah dilarang di Indonesia karena dinilai membawa kekacauan bagi stabilitas keamanan negara dan juga partai yang disebut-sebut sebagai faktor yang meruntuhkan kepemimpinan Sukarno sebagai orang nomor satu di Indonesia dan memunculkan sebuah orde yang membawa kemajuan Indonesia dalam hal pembangunan di segala bidang, yakni era Orde Baru.

Jika melihat kembali ke belakang, periode Demokrasi Parlementer ditandai dengan ketidakstabilan politik sebagai akibat persaingan antar partai serta

pemberontakan-pemberontakan. Jumlah partai politik sangat banyak dengan perbedaan ideologi antara satu partai dengan partai lainnya. Peranan partai politik yang besar dianggap Presiden Sukarno sebagai penyebab kemacetan sistem politik (Daniel S. Lev. 1988. Hal:92). Kemudian, bulan Juli 1959 Presiden Sukarno, atas dukungan militer, memberlakukan kembali UUD '45. Dan sejak saat itu selesailah era Demokrasi Parlementer di Indonesia (Feith, Herbert. 1966).

Periode Demokrasi Terpimpin di Indonesia ditandai dengan peningkatan peran politik Presiden Sukarno, peningkatan peran politik Partai Komunis Indonesia, serta merosotnya peranan partai-partai politik di luar PKI. Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR menolak anggaran belanja negara yang diusulkan Presiden. Presiden Sukarno juga mengangkat Ketua DPR sebagai menteri, ikut campur dalam bidang legislatif dan yudikatif, serta membiarkan diri diangkat sebagai Presiden seumur hidup Budiarjo, Miriam. 1983. Hal:71).

Selain krisis politik, periode Sukarno juga ditandai oleh krisis ekonomi. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka. Dalam banyak hal Sukarno cenderung mengabaikan pembangunan ekonomi dan menekankan program-program politik yang bersifat revolusioner. Sukarno bahkan membatalkan program-program ekonomi pada tahun 1963. Krisis moneter menjadi tidak terhindarkan lagi dan utang luar negeri menjadi semakin besar (*Buletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*, Februari 1967).

Krisis ekonomi dan politik pada masa itu mengundang ketidakpuasan militer atas kekuasaan sipil. Sejak awal, militer di Indonesia memang berakar pada situasi revolusi fisik. Sebagai akibatnya, militer mempersepsikan diri sebagai

kekuatan yang harus ikut serta dalam kehidupan politik. Sejak tahun 1954, Nasution telah membentuk Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) sebagai upaya untuk ikut serta dalam politik, minimal dalam Pemilihan Umum 1955 (Sundhaussen, Ulf. 1986. Hal:89). Pada pertengahan tahun 1950an militer juga mulai mencoba mengelola sumber-sumber ekonomi di luar anggaran pemerintah (Luthfi, Tubagus. 1992). Sampai menjelang Demokrasi Terpimpin, kedudukan militer dalam politik sudah sedemikian kuat sehingga mampu bersaing dengan Sukarno maupun dengan Partai Komunis Indonesia. Melihat konteks kompetisi antara Sukarno, militer, dan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1960an, kemunculan militer dalam panggung politik tinggal masalah waktu saja.

Sebagai salah satu kekuatan dalam panggung politik Orde Lama, PKI (Partai Komunis Indonesia) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI menyatakan mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung, juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Agaknya dengan jumlah massa yang cukup banyak menjadikan PKI sebagai partai yang cukup diperhitungkan apalagi ditambah dengan dukungan Presiden Sukarno terhadap partai tersebut.

Selanjutnya, pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit Presiden sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan

PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kompetisi antara Sukarno, PKI, dan militer kemudian berujung pada tanggal 30 September 1965, dimana pada malam 1 Oktober 1965 enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Kemudian, Mayjen Suharto mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Isu Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Sukarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Sukarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Sukarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.

Keenam perwira tinggi yang dibunuh tersebut adalah (http://organisasi.org/daftar_nama_pahlawan_revolusi_korban_kekejaman_peristiwa_gerakan_30_september_pki_1965_g_30s_pki_gestipu_sejarah_indonesia):

- Jenderal. Anumerta TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
- Letjen. Anumerta TNI Raden Suprpto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
- Letjen. Anumerta TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
- Letjen. Anumerta TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
- Mayjen. Anumerta TNI Donald Ifak Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
- Mayjen. Anumerta TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Kapten CZI Anumerta Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Aksi dramatis yang dilancarkan PKI pada bulan September 1965 tersebut memicu militer untuk benar-benar tampil sebagai pemegang kendali kekuasaan. Dalam peristiwa tersebut – yang kemudian dikenal dengan Gerakan G30S – sejumlah perwira tinggi militer tewas secara menyedihkan. Militer pun segera memiliki alasan kuat untuk mematahkan PKI secara total sekaligus mengkooptasi kepemimpinan Sukarno. Sejak peristiwa G30S tersebut, militer semakin mantap menapaki tangga kekuasaan politik sampai di anak tangga terakhir.

Dengan perkembangan politik empiris seperti disebutkan di atas, maka Orde Baru memiliki legitimasi untuk menyatakan diri sebagai kekuatan korektif. Legitimasi tersebut harus terus dijaga dan dijadikan dasar bagi kekuasaan Orde Baru. Sesuai dengan latar belakangnya, legitimasi Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaannya adalah dengan sikap anti-komunisme. Peristiwa G30S serta PKI secara keseluruhan selalu dijadikan dasar bagi Orde Baru untuk mengoreksi penyimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi pada masa sebelumnya.

Sikap anti-komunisme bagi Orde Baru harus dipahami dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki persepsi yang sama tentang komunisme. Persamaan persepsi tersebut secara logika kekuasaan akan mendukung kelanjutan suatu kekuasaan. Suatu cara menyamakan persepsi adalah dengan mengkomunikasikan apa yang dikehendaki Orde Baru kepada masyarakat (G. Gerbner. 1979.Hal:39). Penyampaian pesan, dalam hal ini pesan politik, dalam masyarakat modern harus memperhitungkan jarak serta kecepatannya (Smythe, Dallas W. Hal:25). Sebagai konsekuensinya adalah kebutuhan media massa sebagai jembatan penyampai pesan semakin meningkat, seperti yang dikatakan Gould dan Kolb :

Mass media is all the impersonal means of communication by which visual and/or auditory messages are transmitted directly to audiences. Included among the mass media are television, radio, motion pictures, newspapers, magazines, books and billboard (G. Gerbner. 1979.Hal:39).

Kehadiran media massa – bukan hanya dalam konteks politik tapi juga secara keseluruhan – semakin hari semakin penting bahkan menjadi salah satu kekuatan masyarakat modern, bahu membahu dengan kekuatan teknologi industri (L.A. Dexter dan D.M. White (Eds). 1964. Hal:3). Perkembangan media massa kemudian melahirkan sejumlah aspek sosial, antara lain dengan apa yang kemudian dikenal sebagai *media exposure*. Sebagai ilustrasi, demokrasi yang mula-mula berkembang di Yunani pada awalnya sangat mengandalkan komunikasi langsung. Ini terlihat dari model pidato, pengumpulan massa, dan pemungutan suara di suatu tempat. Kini segala aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan berbagai saluran komunikasi yang lebih canggih, orang bisa mengikuti pidato lewat televisi atau radio. Dengan demikian, ada pihak ketiga berupa media massa dengan segala teknologinya menyampaikan pesan, dan pada tingkat tertentu memberi gambaran tentang apa yang ditampilkan.

Salah satu media massa yang penting dan juga akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah film. Tampaknya terdapat kesamaan pendapat diantara ilmuwan sosial bahwa terdapat hubungan antara film dengan tingkah laku manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Franklin Fearing, *“motion pictures achieve their effects because they help the individual to cognize his world”* (Fearing Franklin.Hal:11). Pada masyarakat modern seperti sekarang ini, film berperan sebagai media penerangan, pendidikan, dan hiburan (Susanto, Astrid. 1977. Hal:45). Dalam konteks proses komunikasi, film berada dalam kategori saluran untuk menyampaikan pesan, proses komunikasi merupakan suatu sistem atau sumber yang mempengaruhi sasaran yang lain dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol yang dapat dikirimkan melalui saluran-saluran yang menghubungkannya (Schram, Wilbur. 1974. Hal:12). Sebagai suatu saluran, film memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan saluran komunikasi lain,

misalnya surat kabar atau radio. Adapun kelebihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (M. Alwi Dahlan. 1980) :

1. Bersifat audio-visual
2. Diterima oleh segala lapisan masyarakat
3. Dapat dinikmati oleh berbagai bangsa melalui bahasa
4. Dapat diputar berulang-ulang
5. Penyajian melalui gambar yang hidup
6. Memiliki daya visual

Dengan kelebihan tersebut film lebih menonjol sebagai media massa yang memberi definisi dan citra realitas sosial bagi individu maupun kelompok dan masyarakat secara kolektif (McQuail, Denis. 1987. Hal:3. Sebagai saluran komunikasi maka film secara potensial memiliki peluang yang sangat besar untuk mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat. Secara teoritis perubahan sosial itu dapat terjadi apabila individu dalam kesatuan kolektif memiliki citra tertentu tentang realitas tertentu yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, dapat dikatakan film memberikan pesan kepada individu tentang sesuatu yang memang perlu disampaikan (Everet M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker. 1971. Hal:11).

Tampaknya potensi film untuk mempengaruhi citra realitas bukan hanya diakui oleh ilmuwan sosial, tetapi juga oleh rezim, istilah rezim penulis gunakan untuk mengacu pada orang/sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dengan jaringannya dan menjalankan logika kekuasaan tersebut (J.P. Mayer. 1972. Hal:72). Sebagai gambarannya, dalam ketetapan MPRS No.II/1960 disebutkan bahwa "*film bukan semata-mata barang dagangan melainkan alat pendidikan dan penerangan*". Pada masa Orde Baru gambaran tersebut kemudian diperkuat lagi dengan menyebutkan bahwa film memiliki kesanggupan untuk mempengaruhi selera, sikap, nilai-nilai pengertian, dan kesadaran manusia mengenai dirinya, masyarakat, bangsanya, dan arti kehidupan, baik dalam arti positif maupun negatif (Dewan Film Nasional. 1980. Hal:17). Dengan potensi tersebut, tidak heran apabila film menjadi instrumen dalam jaringan komunikasi politik yang pada gilirannya akan mempunyai akibat politis atau berpengaruh terhadap perilaku politik (M. Alwi Dahlan. 1990. Hal:2-8). Hampir setiap unsur film memiliki

hubungan dengan khalayak dan pada gilirannya berhubungan juga dengan penggambaran realitas.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka tidak dipungkiri apabila negara Orde Baru memiliki kepentingan dalam dunia perfilman. Cakupan kepentingan disini meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Demi menjaga kepentingannya itu, negara akan berusaha menciptakan dan melembagakan aparatus. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya mengarah pada suatu upaya yang sangat strategis, yaitu mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks negara Orde Baru, yang ingin ditanamkan khalayak adalah nilai-nilai yang sejalan dengan ideologi negara. Adapun ideologi yang tersamar seperti pada konteks perfilman, misalnya, dapat dilihat dari pedoman-pedoman penyensoran film yang dapat berubah dan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan negara. Secara lebih sempit lagi, penanaman ideologi lewat film dapat diartikan sebagai penanaman *idea of the ruling class* (Lapsley, Robert dan Michael Westlake. 1988. Hal:3). *Idea of the ruling class* mendapat legitimasi dari ideologi formal negara, dimana kelahiran ideologi negara memiliki akar historis maupun sosiologis. Dengan demikian negara Orde Baru dapat menggunakan saluran media massa dalam bentuk film untuk menyampaikan ideologi negara dengan segala legitimasinya. Jadi, asumsi dasar yang hendak dibangun pada latar belakang masalah ini menunjukkan bahwa film memiliki posisi sangat penting dan strategis apabila dikaitkan dengan kepentingan negara dalam hal menanamkan ideologi negara dalam benak masyarakat. Penanaman ideologi tersebut dimungkinkan mengingat film memiliki potensi yang sangat besar untuk menampilkan gambaran atau citra terhadap realitas tertentu.

1.2 Perumusan Masalah

Secara empiris, dengan merunut pada sejarah perfilman Indonesia, film tidak pernah dapat melepaskan diri dari politik. Sejak zaman penjajahan Belanda film telah digunakan untuk mempengaruhi masyarakat supaya mendukung pemerintahan kolonial (Krisna, Sen. 1987). Demikian pula pada masa penjajahan Jepang, film menjadi media propaganda politik. Pada masa Orde Lama, film

menjadi ajang politik terutama di bawah slogan “Politik adalah panglima”. Dari sini kita melihat bahwa film-film di Indonesia telah banyak digunakan untuk alat propaganda politik dalam mempengaruhi masyarakat, dan salah satu keberhasilan rezim Orde Baru adalah mewariskan ketakutan akan bahaya laten komunis. Cara yang terbukti sangat efektif adalah melalui film, salah satunya yakni melalui film Pengkhianatan G30S/PKI. Film berdurasi empat jam penuh, arahan sutradara Arifin C. Noer itu, dengan mudah melekatkan ketakutan permanen. Apalagi selama belasan tahun sempat menjadi tontonan wajib setiap tanggal 30 September. Penulis mencoba mengajak pembaca untuk mengingat kembali peristiwa yang digambarkan lewat film tersebut. Hingga menjelang kebangkrutan rezim Orde Baru di tahun 1998, film Pengkhianatan G30S/PKI adalah menu wajib yang selalu diputar di setiap tanggal 30 September di TVRI juga seluruh televisi swasta.

Pada intinya film ini berusaha menjelaskan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) lah yang bertanggungjawab atas peristiwa 30 September 1965 yang lalu. PKI yang bertanggungjawab atas tewasnya 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat yang saat ini kita kenal sebagai pahlawan Revolusi. Peristiwa 30 September 1965, dalam film tersebut, dikatakan sebagai upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI yang bekerjasama dengan pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa adalah pasukan khusus pengawal Presiden Sukarno saat itu. Upaya ini kemudian digagalkan oleh Mayjen Suharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad.

Sampai saat ini terdapat berbagai kontroversi yang berkaitan dengan peristiwa yang diceritakan dalam film ini terutama tentang pro dan kontra keterlibatan PKI pada 30 September 1965. Berbagai spekulasi dan pendapat muncul, akan tetapi harus dapat diakui bahwa film ini, selama wajib diputar di stasiun TV Indonesia, telah memberikan gambaran yang kuat akan segala sosok yang ditampilkan di film tersebut. Sebagai bukti bahwa hingga saat ini PKI masih dianggap sebagai pelaku peristiwa tersebut, masih terdapat diskriminasi terhadap anggota keluarga mantan PKI, dan sebagian besar masyarakat masih sebegitu *paranoia*-nya sehingga banyak aliansi atau organisasi anti komunis di Indonesia.

Pada masa Orde Baru bahkan buku-buku yang diduga kiri disingkirkan beserta pengarangnya. Salah satu yang banyak dikenal adalah Pramudya Ananta Toer yang bahkan mungkin saja tidak pernah terlibat dengan PKI. Untuk itulah hingga kini banyak orang yang merupakan keluarga anggota PKI tidak berani mengakui asal-usulnya atau bahkan menghapus catatan sejarahnya bahwa ia memang keturunan anggota PKI.

Kuatnya pengaruh film ini terhadap penilaian masyarakat tentang PKI menjadi alasan mengapa tema ini diangkat pada tulisan ini. Selain itu, sepertinya pada saat ini masyarakat Indonesia telah melupakan berbagai macam sejarah yang terkait dengan partai yang telah membesarkan nama mantan Presiden Sukarno pada masa kepemimpinannya itu. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema ini sekaligus untuk mengingat kembali bagaimana komunisme telah mempengaruhi dalam pembentukan sejarah Indonesia. Dan seperti diketahui juga, pada masa pemerintahan Suharto anggapan masyarakat tentang komunisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, telah banyak dipengaruhi oleh konstruksi yang dibuat oleh rezim orde baru dalam mengemas kekejaman dan kekacauan yang dilakukan oleh PKI ke dalam sebuah film berjudul G30S/PKI. Lebih lanjut lagi, tulisan ini berusaha menganalisis secara kritis muatan apa saja yang dikonstruksikan oleh film ini sedemikian rupa sehingga stigma PKI sedemikian buruk di mata masyarakat untuk kemudian berimbas pada bentuk diskriminasi. Selanjutnya, hendak diketahui apakah pada masa reformasi ini anggapan masyarakat didasari tentang PKI ini masih menjadi sebuah ancaman yang menakutkan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran negara yang digambarkan dalam film G30S/PKI?
2. Bagaimana ancaman bahaya komunisme yang digambarkan melalui film Pengkhianatan G30S/PKI?
3. Bagaimana keberadaan wacana G30S/PKI pada periode pasca reformasi di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana peran negara yang diungkapkan dalam film G30S/PKI.
2. Mendeskripsikan bagaimana ancaman bahaya komunisme yang digambarkan melalui film Pengkhianatan G30S/PKI.
3. Mendeskripsikan bagaimana keberadaan wacana G30S/PKI pada periode pasca reformasi di Indonesia.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam membongkar penggambaran ancaman bahaya komunisme di Indonesia yang ditampilkan film, baik dalam bentuk pencitraan yang digambarkan melalui adegan serta dialog-dialog yang muncul dalam film. Selain itu penelitian ini dapat berfungsi bagi para sineas film untuk lebih memahami bahwa film dapat dijadikan sebagai alat propaganda suatu rezim yang membentuk mainstream masyarakat akan keberadaan partai komunis di Indonesia.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

II.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang didasarkan pada analisis sebuah film agaknya juga sudah cukup banyak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, hal inilah yang menjadi acuan untuk penulis dalam membahas tema yang sama dengan penggunaan film sebagai alat analisis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizky Sofyadi melalui skripsinya yang berjudul “*Hyperreality* atas Hak Perempuan dalam Film Indonesia : Studi Analisa Wacana Kritis terhadap Film Arisan dan Pasir Berbisik, ia mencoba untuk menampilkan media sebagai agen sosialisasi yang dikuasai oleh kaum laki-laki sehingga penggambaran perempuan yang ditampilkan media cenderung menampilkan realitas yang semu (*hyperreality*). Studi literatur yang menggunakan metode analisa CDA oleh Norman Fairclough terhadap film arisan dan pasir berbisik ini, penulis tersebut mengungkapkan bahwa kedua film sama-sama menyuguhkan cerita tentang kehidupan perempuan yang memiliki perbedaan *package* dari ide cerita. Adapun perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan *stock of knowledge* yang dimiliki oleh kedua perempuan yang ada dibalik film tersebut. Arisan menggunakan teknik penceritaan yang menggunakan banyak dialog seperti dalam film kebanyakan, sedangkan pasir berbisik menggunakan teknik penceritaan yang *lack of dialogue* sehingga film ini banyak menggunakan bahasa visual seperti penggunaan teknik sinematografi untuk menyampaikan sebuah pesan. Terjadinya perubahan tentang bagaimana sineas film memandang sebuah film, serta struktur sineas yang mengalami perubahan kearah profesionalitas sehingga memungkinkan munculnya film berkualitas. Selain itu perubahan regulasi dari pemerintah membebaskan perfilman nasional dari politik praktis. Sedangkan posisi perempuan walaupun secara sepiintas terlihat negara mulai memperhatikan tentang perempuan seperti melalui perundang-undangan kekerasan terhadap perempuan dan penandatanganan anti diskriminasi terhadap perempuan namun hal tersebut masih

diragukan. Posisi perempuan masih berada dibawah cengkeraman budaya patriarki.

Hyperreality yang dibentuk oleh film tidak hanya menyangkut persoalan hak perempuan namun identitas ke-Indonesia-an juga mengalami *hyperreality*. Ini diperlihatkan dengan bagaimana film ini menampilkan gambaran mengenai komunitas atau kelas sosial yang bukan merupakan komunitas yang mewakili Indonesia secara keseluruhan bahkan gaya hidup yang ditampilkan jauh dari apa yang ada dalam realitas sebenarnya. Selain itu film melalui *hyperreality*-nya memberikan imajinasi atau khayalan kepada penontonnya, sehingga makin baik sebuah khayalan ditampilkan oleh film maka semakin disukai penonton.

Produsen selaku aktor yang memproduksi media tidak memiliki kebebasan yang sempurna. Hal ini disebabkan adanya peran aktor antara lain dalam proses produksi tersebut. Negara sebagai '*the ruling class*' dari sebuah masyarakat mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi proses kerja produksi dari film, selain itu negara melalui mekanisme lembaga sensor melakukan kontrol terhadap isi yang dikandung oleh film. Kandungan film tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, sehingga lembaga sensor menjadi penjaga moral masyarakat dari pengaruh film. Selain itu kondisi globalisasi yang terjadi mengakibatkan ruang informasi dan pengetahuan menjadi tidak terbatas, ini berpengaruh bagi *stock of knowledge* yang dimiliki oleh salah satu aktor namun dimanfaatkan sebab kekuatan ini ada dalam setiap bentuk interaksi antar aktor. Dengan tersebarnya kekuatan dalam proses interaksi menimbulkan adanya negosiasi atau proses tawar antar aktor sehingga aktor mana yang dapat menggunakan kekuatan yang ada dengan maksimal maka aktor tersebut akan memenangkan proses tawar yang terjadi.

Kemudian terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Ucu Aditya Gana yang mengemukakan tentang Penggambaran Komunisme dalam Film : Kajian Politik Film "Pengkhianatan G30S/PKI" dan "Operasi Trisula". Dalam studinya ini ia berusaha mengaitkan antara politik dengan film. Film dipandang sebagai suatu media massa yang sangat penting dalam menyampaikan pesan politik.

Namun dalam sudut pandang studi ini, pesan yang disampaikan oleh suatu film dianggap tidak netral karena ada ideologi yang hendak dipertahankan dan disebarluaskan. Proses penyampaian pesan yang ideologis itu dapat diletakkan dalam konteks hegemoni ideologi negara. Karenanya kepentingan negara dalam film adalah kepentingan ideologis.

Orde baru memiliki keunikan baik dari segi sejarah kelahirannya maupun praktek-praktek kenegaraannya. Secara historis dan politis, orde baru selalu akan mengangkat peristiwa G30S/PKI sebagai titik tolak kemunculan orde baru. Oleh karenanya, sangat masuk akal jika orde baru mendapat legitimasi dari peristiwa tersebut. Dari segi komunikasi politik, maka penggunaan film untuk menggambarkan peristiwa G30S/PKI tersebut menjadi suatu proses hegemoni ideologis karena orde baru memiliki kepentingan untuk menampilkan citra komunisme menurut sudut pandang orde baru itu sendiri.

Film yang diteliti adalah “Pengkhianatan G30S/PKI” dan “Operasi Trisula”. Kedua film tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis isi secara kualitatif. Hasilnya adalah ternyata ada dua kategori utama yang selalu mendominasi isi film, yaitu komunis dan atheis. Komunis yang biadab dan komunis yang penghasut. Ketiga kategori tersebut ternyata sangat relevan dengan sifat dan sikap negara orde baru (dengan militer sebagai aktor utamanya) secara historis maupun secara hubungan negara dengan kekuatan-kekuatan politik yang lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ucu adalah pada penelitian ini mencoba menganalisis film Pengkhianatan G30S/PKI dengan menggunakan metode *critical discourse analysis* untuk melihat penggambaran film sebagai sebuah bentuk penanaman ideologi Orde Baru akan sebuah peristiwa dengan melihat aspek sejarah dan kondisi sosial dan politik pada sebuah era dan juga menafsirkan setiap penggambaran komunisme di Indonesia berdasarkan film dan berbagai anggapan para tokoh. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menggambarkan bagaimana anggapan masyarakat umum yang telah menonton film tersebut pada masa Orde Baru dalam menafsirkan film Pengkhianatan G30S/PKI sehingga penonton memiliki pengetahuan tertentu akan peristiwa

pemberontakan 30 September 1965 dan pandangan mereka akan ancaman bahaya komunisme di Indonesia.

Berdasarkan acuan tersebut di atas, pada penelitian ini juga memfokuskan pada analisis film, khususnya film Pengkhianatan G30S/PKI yang diproduksi pada masa Orde Baru sebagai bentuk antipati terhadap Komunisme di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji kembali bagaimana peran negara Orde Baru dalam mempresentasikan ideologi komunisme di Indonesia, khususnya dalam membentuk anggapan umum masyarakat pada saat itu, pada sebuah film yang digarap oleh sutradara kawakan Arifin C. Noor. Selanjutnya, penelitian ini juga mencoba untuk melihat anggapan masyarakat di era Reformasi mengenai film tersebut.

II.2 Kerangka Teori

II.2.1 Film Sebagai Wacana

Wacana (*discourse*) bila dikaitkan dengan proses komunikasi dapat diasumsikan dengan penyapa (*addressor*) dan pesapa (*addressee*) (John Fiske. Hal:35). Sehingga sebuah wacana dapat dikategorikan menjadi wacana tulis dan wacana lisan. Dalam konteks wacana yang seperti ini *addressor* adalah penulis dan *addressee* adalah pembaca. Penyapa disini menuangkan ide dan gagasannya dalam sebuah tulisan yang kemudian akan dibaca dan ditafsirkan oleh pesapa (Drs. Bustanul Arifin. S.H., M.Hum, Drs. Abdul Rani. M.Pd. Hal:4). Adapun wacana dalam bentuk lisan merupakan proses komunikasi yang berupa ujaran. Ujaran dalam wacana lisan terkait dengan konteks yang ada, selain itu wacana ini tidak bersifat kekal sehingga penafsiran dilakukan saat ujaran diucapkan (Drs. Bustanul Arifin. S.H., M.Hum, Drs. Abdul Rani. M.Pd. Hal:4).

Dalam kamus *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, *discourse* diartikan sebagai sebuah komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi ide-ide atau gagasan, konversasi atau percakapan, bentuk komunikasi umum, risalat tulis (*Webster's New Twentieth Century Dictionary, Second Edition. 1983. Hal:522*). Definisi ini cenderung menunjukkan wacana sebagai sebuah tulisan, sehingga arti wacana menjadi sempit. Suatu wacana bisa berbentuk selain dari tulisan asalkan

memiliki dua unsur seperti kesatuan (*unity*) dan kepaduan (*coherence*) (Drs. Alex Sobur, M.Si. 2004. Hal:10). Kedua unsur ini menjadi penting sebab dalam proses berpikir seseorang sangat erat kaitannya dengan ada atau tidaknya kesatuan dan koherensi di dalam tulisan yang disajikan (Praktiko, Riyono. 1984. Hal:69).

Pada perkembangannya, lingkup wacana diperluas oleh lakon atau sandiwara (dalam konteks penelitian ini dapat diwujudkan ke dalam sebuah film-*pen*) merupakan sebuah bentuk wacana, bahkan laporan ilmiah pun adalah wacana (Drs. Alex Sobur, M.Si. 2004. Hal:10). Bila mengaitkan sebuah bentuk wacana dengan bahasa yang mengandung makna didalamnya, maka diperlukan unsur situasi dan konteks dari penggunaan bahasa (Drs. Alex Sobur, M.Si. 2004. Hal:10). Konteks dan situasi membawa hubungan antara teks (bahasa) dengan proses produksi, penggunaan serta penerimaan, sehingga membawa sebuah objek yang digambarkan dari sebuah teks menjadi bermakna (Nelson Philips, Cynthia Hardy. Hal:3).

Selanjutnya Mills mencoba mengelompokkan wacana menjadi tiga, yaitu : wacana dilihat dari level konseptual teoritis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan (Drs. Alex Sobur, M.Si. 2004. Hal:1). Level konseptual teoritis merujuk pada wacana sebagai domain umum dari semua pernyataan yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata. Wacana dalam konteks penggunaan diartikan sebagai sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu, dan terdapat suatu struktur dalam wacana; wacana ditekankan untuk dapat mengidentifikasi struktur tersebut, sedangkan pada metode penjelasan, wacana dinyatakan sebagai suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.

II.2.ii Film Sebagai Bentuk Komunikasi Massa

Film merupakan alat komunikasi, dengan dasar ini dapat didefinisikan apa itu film. Film adalah media komunikasi massa dengar pandang (*audio visual*) yang dibuat berdasarkan asas sinematografi, dengan menggunakan bahan baku *celluloid* dalam berbagai ukuran melalui proses kimiawi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik

(Budi Sampurno. 1992. Hal:80). Dalam perkembangannya, film diartikan sebagai rekaman gambar dan atau gambar bergerak, lukisan dan suara yang menggunakan film, video tape, video disket yang dapat dipertunjukkan (Budi Sampurno. 1992. Hal:80). Kemudian juga dalam definisi lain menjelaskan film sebagai sebuah bentuk hiburan yang berisikan cerita dengan serangkaian gambar yang bergerak (<http://www.wordreference.com/definition/film>).

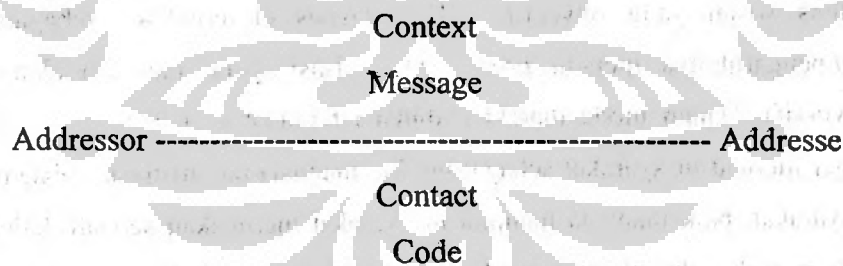
Film merupakan sebuah bentuk komunikasi dengan tanda karena dalam proses produksinya, film menciptakan tanda (*sign*) dan simbol dengan makna tertentu. Dimana simbol dan tanda itu terkait dengan bahasa. Dalam prosesnya, film layaknya sebuah bahasa yang dirangkai dalam bentuk simbol dan tanda yang membawa pesan didalamnya (Larry Gross. <http://astro.temple.edu/~ruby/wava/worth/sintro.html>). Sehingga film dapat dilihat sebagai penerimaan sinyal (*signal*) melalui penerimaan visual, dan juga bisa perlakuan sebagai pesan dengan menarik pesan yang ada didalamnya. Pernyataan Defelur dan Dennis Malvin memperkuat pernyataan ini dimana mereka mengatakan bahwa film dari sisi produksi dapat dikatakan sebagai wahana untuk menuangkan ekspresi yang dapat mempengaruhi ataupun menghibur. Bahkan sebuah film dapat dijadikan media penyampaian pernyataan politik dan sosial.

Makna yang dimiliki oleh film bukan berasal dari film itu sendiri melainkan dari hubungan antara pembuat film dengan penikmat atau penonton film itu sendiri (Larry Gross. <http://astro.temple.edu/~ruby/wava/worth/sintro.html>). Pemaknaan film dibentuk dalam proses produksi dari sebuah film, bila dikaitkan dengan model komunikasi Jakobson, maka proses produksi dari sebuah film terkait dengan pemberi pesan, dimana proses produksi ini akan menentukan bagaimana pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Dalam pembuatan film, pembuat film mengemas film sehingga mampu untuk menarik penerima pesan secara emosional, bahkan sebuah film dalam mencapai tujuan tersebut mengambil realitas masyarakat yang diyakini sebagai 'kebenaran' untuk menjadi landasan film (Edward Jay Whetmore. 1989. Hal:229). Pemberian pesan ini bisa melalui bagaimana

pengambilan gambar baik dalam *camera shot* atau yang disebut dengan *cadame* atau melalui proses *editing shot* atau *edame* . Dalam proses ini pesan lebih akan terlihat dalam bentuk visual atau gerak. Pesan dalam bentuk teks atau bunyi (audio) terkait dengan proses pembuatan skenario serta editing bahasa.

Dalam model komunikasi Jakobson, dilihat bahwa sebuah film mengandung unsur komunikasi karena selain terkait dengan aktor utama komunikasi yaitu *addressor* (pembuat film) dan *addressee* (penonton), film juga dapat dilihat memiliki pesan tersendiri, baik berupa pesan yang memberikan informasi ataupun hal lainnya. Selain itu, film juga memiliki konteks atau acuan terhadap realitas, karenanya tak jarang bila dilihat film mengisahkan sebuah realitas sosial dalam masyarakat. Bentuk hubungan antara aktor ini pun terjalin dalam proses menikmati film, karena tak jarang penonton larut dalam film dan seolah-olah ikut atau benar-benar mengalami hal yang diceritakan dalam film tersebut. Hal terakhir yang dapat dikaitkan dengan model komunikasinya Jakobson adalah bahwa film memiliki sistem makna tersendiri dimana dengan sistem makna tersebut pesan yang ada dalam film dapat dikomunikasikan.

Model Komunikasi Jakobson



Dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh sebuah film, terdapat pesan yang ingin dikirimkan antara pembuat dengan penonton. Pesan yang dikirimkan tersebut dalam konteks komunikasinya Jakobson adalah *message* (pesan). Pesan yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana sebuah film memberikan pesan mengenai sebuah Partai Komunis Indonesia terkait dengan pemberontakan yang dilakukan pada 30 September 1965.

II.2.iii Konstruksi sosial kekuatan dari media

Menurut Peter L. Berger, teori konstruksi sosial berada dalam dua kutub teori yang berbeda, pada satu sisi terdapat teori fakta sosial (yang dikemukakan oleh Durkheim) dan di lain sisi terkandung unsur teori definisi sosial dari alirannya Weberian (Margaret N. Poloma.1984. Hal:308-310). Pemikiran yang diambil dari sisi fakta sosial adalah bahwa struktur sosial sangat penting, sehingga dinyatakan bahwa manusia adalah produk dari masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap tindakan dan persepsi manusia, dimana kedua hal tersebut ditentukan oleh struktur yang ada dalam masyarakat (Margaret N. Poloma.1984. Hal:308-310).

Berbeda dengan teori definisi sosial, dimana dijelaskan bahwa manusia adalah yang membentuk masyarakat, manusia memiliki kekuatan sehingga manusia mampu membentuk realitas, menyusun institusi dan norma yang ada. Berdasarkan pernyataan Margaret M. Poloma yang merujuk pada bukunya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang berjudul *The Social Construction of Reality*, menunjukkan bahwa posisi teori konstruksionis berada diantara dua teori tersebut.

“pemikiran berger melihat realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subyektif dan obyektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalitas, sebagaimana ia mempengaruhinya melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subyektif). Dalam mode dialektis, dimana terdapat tesis, antitesis, dan sintesis, berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat, baik manusia maupun masyarakat merupakan sebuah dialektis dan tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk.” (Peter L. Berger, Thomas Luckmann. 1966. Hal:13)

Penjelasan tentang realitas sosial dalam buku Berger dan Luckmann dimulai dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Kenyataan (realitas) oleh Berger dan Luckmann dijelaskan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri, sedangkan pengetahuan

adalah kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik secara spesifik.

"...to define reality as a quality appertaining to phenomena that we recognize as having a being independent of our own volition (we cannot 'wish them away'), an to define knowledge as the certainty that phenomena are real and that they proses specific characteristic." (Peter I. Berger, Thomas Luckmann. 1966. Hal:13)

II.2.iv Wacana dan Kekuasaan

Michel Foucault adalah seorang pemikir poststrukturalisme yang menggagas teori wacana dengan melampaui pemikiran strukturalisme tentang bagaimana sebuah wacana terbentuk. Jika menurut strukturalisme, sebuah wacana terbentuk dari keterkaitan yang baik antara kohesi dan koherensi dalam kalimat, maka menurut Foucault, sebuah wacana merupakan produk dari relasi kekuasaan dengan pengetahuan. Untuk itu, penulis akan memulai pembahasan teori wacana dari asumsi Foucault tentang kekuasaan.

Michel Foucault menjelaskan definisi fenomenal dari wacana beserta dengan potensi politis dan kaitannya dengan kekuasaan "Diskursus atau wacana adalah elemen taktis yang beroperasi dalam kancah relasi kekuasaan"(Foucault, Michel. 1990. hal:102). Antara wacana dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, seperti yang dikatakan Foucault, 'Elemen Taktis' ini sangat terkait dengan kajian strategis dan politis, tapi tentu saja istilah politik disini tidak selalu berarti faktor-faktor pemerintahan, segala sesuatu yang meng-hegemoni baik itu secara kultural maupun secara ideologis sebenarnya memiliki konstruksi politisnya sendiri.

Dari definisi yang diberikan Foucault, terungkap bahwa wacana adalah alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya dan ilmu pengetahuan. Distribusi wacana ketengah masyarakat pada era post-moderen ini, dilaksanakan secara strategis melalui media, baik itu media cetak maupun elektronik.

Selanjutnya Michel Foucault kembali menambahkan bahwa wacana atau diskursus sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh sebagian orang, dimana

keberagaman wacana masih dianggap terikat oleh kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Kita seharusnya tidak menganggap dunia wacana itu terpisah-pisah antara mana wacana yang diterima secara sosial dan mana yang ditolak, atau pengkelasan wacana seperti ada wacana dominan dan ada pula wacana yang termarginalkan, akan tetapi sebenarnya segala bentuk kompleksitas wacana atau diskursus adalah merupakan elemen-elemen yang sering dibicarakan dan sering muncul dalam kehidupan, dimana itu semua bermain secara strategis (Foucault, Michel. 1990.hal 100).

Disini Foucault menjabarkan bahwa keseluruhan diskursus memiliki potensi strategis, baik itu wacana dominan maupun yang tidak. Bahkan Foucault juga mencoba mengeliminir pengkelasan diskursus ini. Hal itu disebabkan karena setiap wacana atau diskursus bisa bermain secara strategis, berdasarkan kepentingan tertentu. Wacana secara sosial didistribusikan ke tengah masyarakat, dan wacana-wacana tersebut membawa beragam ideologi, pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat yang menjadi objek dari proses penyebaran wacana itu.

Secara tradisional, kekuasaan kerap dipandang sebagai kemampuan atau kekuatan pihak tertentu untuk menguasai yang pihak lemah. Misal saja kekuasaan raja atau pemerintah kepada rakyatnya. Kekuasaan di sini tentu bersifat negatif. Namun Foucault, seperti yang ditulis Melani Budianta, justru memandang kekuasaan bersifat produktif :

“Berbeda dengan konsep kekuasaan yang umum, yakni yang dimiliki oleh pihak-pihak yang kuat terhadap yang lemah, kekuasaan bagi Foucault seperti yang diuraikan dalam bukunya *Power/ Knowledge* bukanlah merupakan suatu entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu orang atau lembaga, melainkan dapat diibaratkan dengan sebuah jaringan yang tersebar dimana-mana. Jadi kekuasaan tidak datang secara vertikal dari penguasa terhadap yang ditindas, dari pemerintah ke rakyat, melainkan datang dari semua lapisan masyarakat, ke segala arah” (Budianta, Melani. Hal:49).

Penulis memahami bahwa kekuasaan menurut Foucault tidak lagi dimaknai secara vertikal dari atas ke bawah, atau dari institusi penguasa kepada individu yang dikuasai, melainkan bahwa kekuasaan datang dari semua lapisan tetapi ia menyebar secara kompleks kepada segenap individu sebagai subjek yang kecil, dan menyebabkan praktik kuasa ada di mana-mana.

Foucault kemudian mengaitkan bahwa praktik kekuasaan inilah yang kemudian mempengaruhi pengetahuan manusia tentang 'kebenaran'. Dalam artian, apa yang manusia anggap sebagai 'kebenaran', merupakan hasil dari relasi-relasi kekuasaan yang membentuk sistem pengetahuan manusia tentang 'kebenaran' itu sendiri.

Penjelasan di atas penulis pahami bahwa lewat relasi kekuasaan yang menyebar itulah manusia membuat atau memproduksi sistem atas suatu pengetahuan tertentu yang tidak lagi dipertanyakan orang, hingga dianggap sebagai suatu 'kebenaran'. Maka jelas bahwa kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan manusia, dan produksi pengetahuan manusia sesungguhnya memuat rezim 'kebenaran'. Dalam rangka inilah Foucault menempatkan wacana (*discourse*; diskursus) sebagai praktik yang terbentuk dari relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan.

Melani Budianta menulis bahwa, "Menurut Foucault, kekuasaan mewujudkan diri melalui wacana dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah melalui prosedur menyeleksi atau memisahkan mana yang dianggap layak dan yang tidak layak; dengan memberlakukan sejumlah pelarangan terhadap beberapa jenis wacana dengan membedakan apa yang disebut benar dan salah". (Budianta, Melani. Hal:48).

Mengenai kaitan antara kekuasaan dengan pengetahuan dalam sebuah wacana, Eriyanto juga berkomentar demikian:

"Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran disini, oleh Foucault tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit...akan tetapi, ia diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak

digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Di sini, setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan.” (Eriyanto. 2001. Hal:66-67).

Hal tersebut penulis pahami bahwa kebenaran atau pengetahuan manusia yang tercermin dalam sebuah wacana, sangat ditentukan dari praktik-praktik kekuasaan yang melingkari manusia itu sendiri. Apa yang dianggap benar dan yang dianggap salah oleh manusia, merupakan wacana sebagai hasil dari relasi kekuasaan dengan pengetahuan. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa wacana merupakan cara menghasilkan pengetahuan, praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di baliknya, dan kesaling-berkaitan di antara semua aspek ini. Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya suatu realitas yang ada tidak sepenuhnya muncul berdasarkan fakta yang sebenarnya, namun realitas tersebut dapat saja muncul melalui efek kuasa dari berbagai lapisan masyarakat. Kekuasaan tersebut pada akhirnya mempengaruhi penciptaan realitas berdasarkan latar belakang kepentingan dari berbagai pihak dengan tujuan yang bermacam-macam. Contohnya dapat berupa pengaruh dari aktor-aktor politik maupun penguasa dalam membuat produk realitas yang bertujuan untuk mengontrol setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga masyarakat memahaminya sebagai suatu realitas yang absah.

II.2.v Negara (*State*)

O'Donnell menjelaskan bahwa terdapat empat karakteristik dalam negara birokratik-otoriter (Suwarsono, Alvin Y. So. 2006. Hal:151). Pertama, posisi-posisi puncak pemerintahan biasanya dijabat oleh orang-orang yang sebelumnya telah berhasil ketika mereka berada dalam organisasi birokrat, misalnya organisasi militer, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan swasta besar. Bahkan dalam kenyataannya tidak jarang dijumpai keadaan bahwa pemerintah hampir

sempurnya dikendalikan oleh militer, sebagai sebuah lembaga yang bekerja sama dengan teknokrat sipil.

Kedua, dalam NBO (Negara Birokratik Otoriter) akan selalu ada pembatasan partisipasi politik yang ketat (*political exclusion*). NBO akan memotong dan menutup saluran penyampaian aspirasi politik yang diperlukan oleh masyarakat banyak. Ini biasanya dilakukan dengan tindakan politik yang represif pada partai politik dan atau kelompok oposisi, dan atau dengan memunculkan organisasi baru yang dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah (*corporatisme*).

Ketiga, dalam NBO (Negara Birokratik Otoriter) juga terdapat pembatasan yang ketat dalam partisipasi ekonomi (*economic exclusion*). Negara mengurangi atau menunda dalam batas waktu yang tidak tertentu perumusan dan pelaksanaan ide-ide ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya persoalan pemerataan pembangunan. Negara bersama para pengusaha domestik dan masyarakat usaha internasional hampir sepenuhnya mengendalikan ekonomi negara.

Keempat, negara mengembangkan kebijaksanaan depolitisasi dan demobilisasi massa. Persoalan politik yang muncul ke permukaan diterjemahkan hanya sebagai persoalan teknis, oleh karena itu cukup dapat diselesaikan dengan perencanaan yang rasional dari para birokrat negara. Kebijakan perumusan dan pengambilan keputusan politik lebih bersifat teknokratis dan birokratis, oleh karena itu lebih berkecenderungan untuk tidak secara hati-hati memperhatikan kepentingan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat.

Lebih lanjut lagi, menurut Mohtar Mas'ood dengan menggunakan konsep NBO (Negara Birokratik Otoriter) yang dikembangkan oleh O'Donnell dan menggabungkannya dengan konsep korporatisme, bahwa lahirnya bentuk negara otoriter di Indonesia pada awal orde baru disebabkan oleh warisan krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an (Suwarsono, Alvin Y. So. 2006. Hal:157). Struktur politik yang ditinggalkan oleh masa sebelumnya memiliki kecenderungan untuk memberikan kekuasaan yang berlebihan pada pemerintah. Lebih dari itu, pada masa tersebut Orde Baru hendak berusaha secara cepat memperoleh legitimasi politiknya, karena menurutnya, Soekarno masih

memiliki pengaruh yang tidak kecil dan pendukung yang tidak sedikit. Ini didesak lagi oleh kenyataan adanya ekonomi negara yang sudah hampir runtuh.

Mas'ood juga menyebutkan bahwa koalisi intern Orde Baru yang memaksa untuk segera melakukan restrukturisasi ekonomi secara radikal juga menyebabkan lahirnya NBO (Negara Birokratik Otoriter) di Indonesia. Orde baru memilih untuk dengan segera melakukan kebijaksanaan stabilisasi ekonomi yang memberikan peluang yang besar kepada modal domestik dan modal internasional untuk terlibat, sekalipun kebijaksanaan ini dibayar dengan harga mahal, dengan adanya keterpaksaan untuk meninggalkan sebagian pendukung lainnya.

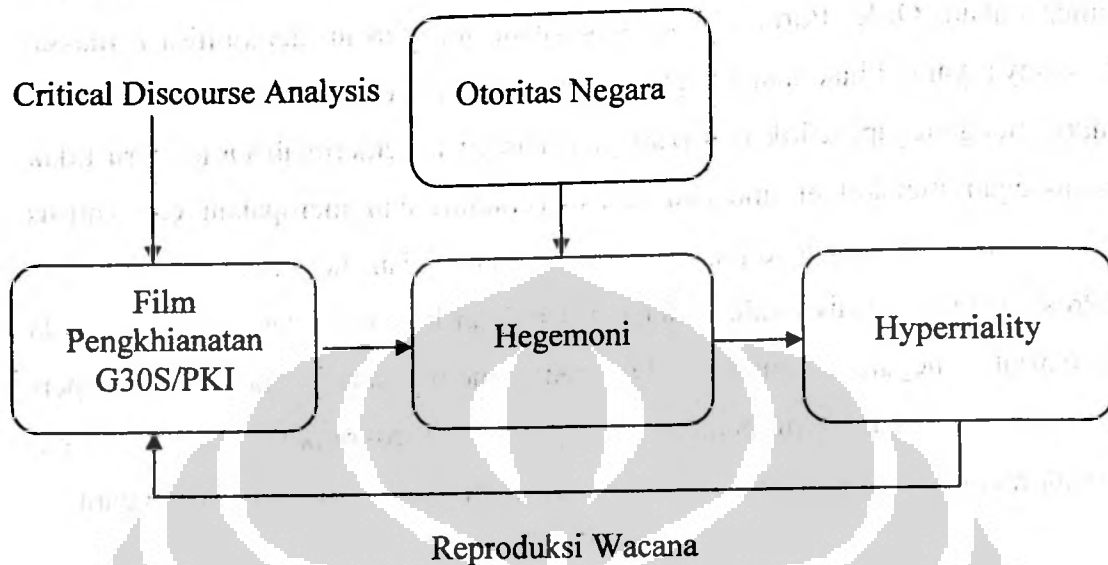
Orientasi ekonomi keluar yang dirumuskan oleh Orde Baru pada masa akhir tahun 1960-an, disebutkan juga oleh Mas'ood sebagai faktor yang mendesak pemerintah untuk memilih bentuk NBO (Negara Birokratik Otoriter). Dengan faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, Mas'ood menyimpulkan bahwa mengharapkan adanya bangunan politik demokratis pada awal Orde Baru merupakan harapan yang tidak realistis. Adapun yang perlu diperhatikan dari hasil kajian ini adalah adanya kenyataan, bahwa sebenarnya Mas'ood menyadari sepenuhnya faktor-faktor yang dijelaskannya itu sebagai bertanggung jawab terhadap lahirnya sistem politik otoriter di Indonesia berbeda dengan faktor yang diajukan oleh O'Donnell. Karena pada waktu itu pendalaman industrialisasi, kebijaksanaan integrasi vertikal, belum terjadi di Indonesia, bahkan situasi ekonomi Indonesia masih dalam tahap awal pemulihan dari kehancuran. Secara jelas nampaknya Mas'ood melihat bahwa untuk kasus Indonesia, faktor krisis politik lebih bertanggung jawab terhadap lahirnya pemerintah yang otoriter dari Orde Baru dibanding variabel ekonomi. Pada studinya ini, Mas'ood berusaha untuk menunjuk satu karakteristik sistem politik orde baru yang berbeda dengan apa yang telah dirumuskan oleh O'Donnell dengan NBO (Negara Birokratik Otoriter)-nya. Pertama, pemerintah Orde Baru hampir dapat dikatakan berada di bawah kendali militer secara organisatoris yang bekerja sama dengan teknokrat sipil. Kedua, modal domestik swasta besar yang memiliki hubungan khusus dengan negara, dan modal internasional memiliki peran ekonomis yang menentukan. Ketiga, hampir seluruh bentuk kebijaksanaan pembangunan yang

dilahirkan, sejak dari proses perencanaan sampai pada evaluasinya sepenuhnya berada ditangan birokrat dan teknokrat. Keempat, ada kecenderungan kuat dalam pemerintahan Orde Baru, secara terencana, melakukan demobilisasi massa, khususnya yang dilakukan dengan kebijaksanaan yang mengambang. Kelima, dalam menganggapi kritik dan para penentangannya, pemerintah Orde Baru tidak segan-segan melakukan tindakan tegas. Terakhir, dan merupakan ciri khusus untuk Indonesia, dapat dijumpai pada otonomi dan besarnya peran kantor kePresidenan, yang diwujudkan dengan demikian luas wewenang yang ada pada sekretariat negara dimana Mas'ood menyebutnya dengan "super-birokrasi". Namun menurut penulis, konsep Negara Birokratik Otoriter yang lebih banyak menekankan pada tindakan fisik, ekonomi, dan penguasaan aset negara.

"...the practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and maintain it later." (Simon. 1982. Hal:23)

Pernyataan tersebut dapat mengandung arti bahwa hegemoni dapat dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini lah yang tidak dijelaskan dalam Negara Birokratik Otoriter dalam mendefinisikan sebuah negara Orde Baru karena negara yang memiliki kepentingan untuk mengontrol masyarakat tidak selalu menggunakan aparturnya sebagai alat, justru negara menggunakan hegemoni ideologi agar pemikiran masyarakat sejalan dengan negara. Dalam hal ini, negara menjadi sebuah institusi yang reproduksionis dan akan terus menerus memproduksi dirinya sendiri melalui hegemoni ideologi. Kemudian merujuk pada konsep Negara menurut Gramsci, dalam sebuah negara integral, kombinasi kompleks antara "kediktatoran dan hegemoni" atau seluruh kompleks aktivitas praktis dan teoritis dimana kelas berkuasa, tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominasinya, tetapi juga berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai. Pada konsep ini negara menjalankan kebijakan koersif dan juga *hegemonic* sekaligus.

II.3 Model Analisis



Berdasarkan model analisis di atas, penelitian ingin mencoba menganalisis sebuah film dengan menggunakan metode *Critical Discourse Analysis* untuk menerjemahkan setiap konteks yang terkait dengan wacana ancaman bahaya komunisme di Indonesia sesuai dengan Peristiwa 30 September 1965. Penelitian ini kemudian mencoba untuk menganalisis bagaimana sebuah film diproduksi oleh negara yang memiliki otoritas dalam pemanfaatan strukturasi negara, seperti pada pengawasan terhadap Perusahaan Film Negara, khususnya dalam memproduksi film, oleh Departemen Penerangan sebagai institusi yang menaunginya sampai pada penyampaian kepada masyarakat dalam upaya menghegemoni pengetahuan masyarakat. Kemudian penulis juga beranggapan bahwa hegemoni pengetahuan yang dilakukan oleh negara dengan menggunakan film sebagai medium penyampaian wacana seperti merupakan sebuah simulasi pertentangan antara realitas dengan kenyataan dimana pada akhirnya realitas yang mendominasi menciptakan sebuah realitas yang semu (*hyperriality*) bagi masyarakat. Kemudian dengan kekuasaan yang ada dan keunggulan film yang dapat diputar berulang-ulang, wacana komunisme di Indonesia direproduksi untuk mempertahankan wacana seperti yang diwujudkan oleh Orde Baru dalam menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI setiap tahunnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagaimana telah disebutkan, penelitian ini akan memfokuskan diri pada film produksi negara Orde Baru yang menunjukkan legitimasi ideologi Orde Baru. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan kepentingan legitimasi ideologi Orde Baru dibatasi dalam hal kepentingan untuk menyampaikan citra realitas Komunisme dan Partai Komunis Indonesia melalui film cerita layar lebar. Orde Baru sengaja dipilih sebagai periode penelitian ini karena Orde Baru menunjukkan sejumlah perbedaan penting dan menarik. Pertama, Orde Baru lahir pada masa pasca 1965. Dengan kata lain, Orde Baru tidak lagi berada dalam atmosfer revolusi fisik atau revolusi kemerdekaan. Kedua, Orde Baru menunjukkan sikap antipati yang sangat jelas terhadap ideologi komunisme dan penekanan terhadap ideologi formal Pancasila. Sikap ini lahir sebagai konsekuensi konflik ideologis masa-masa sebelumnya. Ketiga, kelahiran Orde Baru didahului oleh peristiwa yang sangat dramatis yaitu G30S (Gerakan 30 September). Dengan demikian secara ideologis peristiwa tersebut akan terus dijadikan landasan legitimasi bagi bertahannya negara Orde Baru. Keempat, negara Orde Baru ditandai dengan tampilnya militer sebagai kekuatan yang secara riil memegang dan mengelola kekuasaan. Kelima, sebagaimana ditunjukkan oleh Feith, negara Orde Baru memiliki ciri dominasi negara terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat (Feith, Herbert dan Lance Catles. 1988. Hal:xxvii). Dengan demikian negara Orde Baru memiliki karakteristik yang spesifik dan unik.

III.1 CDA (*Critical Discourse Analysis*)

Diskursus (*discourse*) merupakan sebuah tindakan sosial yang didalamnya terdapat dialog (berupa lisan maupun tulisan) yang bersifat sosial (Birowo, M. Antonius, M.A. 2004. Hal:67). Dalam hal ini pernyataan yang dibuat, kata-kata yang digunakan bergantung dimana dan pada keadaan pada pernyataan tersebut dibuat (Macdonell, 1986). Dengan kata lain diskursus dibentuk secara sosial dan secara historis yang berakibat pada terdapatnya perbedaan diskursus tergantung

dari institusi dan praktek sosial yang membentuknya, dan dengan posisi siapa yang berbicara serta ditujukan kepada siapa. Dengan memperhatikan kenyataan bahwa diskursus tidak pernah netral, maka implikasi penelitian dengan analisis diskursus berguna dalam menyibak permasalahan ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat (ketidaksetaraan kelas, ras, gender, dan agama).

Merujuk pada pernyataan Fairclough, terdapat beberapa hal penting yang sebaiknya dilakukan dalam melakukan penelitian tentang analisis diskursus, yaitu pertama, analisis diskursus membutuhkan metode analisis yang multidimensi dimana dimensi-dimensi yang ada memungkinkan terjadinya hubungan antara diskursif dengan perubahan sosial dan hal-hal yang mendetail tentang teks yang dihubungkan secara sistematis dengan hal-hal sosial dari peristiwa diskursif sebagai praktek sosial (Birowo, M. Antonius, M.A. 2004. Hal:68). Kedua, dengan model multidimensi, *critical discourse analysis* membutuhkan analisis yang multifungsi. Perubahan dalam praktek diskursus berperan dalam terjadinya perubahan dalam pengetahuan, hubungan sosial, dan identitas sosial. Ketiga, *critical discourse analysis* membutuhkan metode untuk analisis historis. Analisis diskursus menitikberatkan kajian pada konstruksi teks dan selanjutnya pada tatanan diskursus (*order of discourse*). Pada tingkat teks, penting untuk melakukan proses intertekstualitas; yaitu teks dikonstruksi melalui teks lain yang diartikulasi melalui cara tertentu, serta bergantung dan berubah sesuai dengan lingkungan sosialnya. Pada tingkat tatanan diskursus (*order of discourse*), hubungan dan batas-batas antara praktek diskursus dalam sebuah institusi atau masyarakat yang lebih luas dapat berubah mengacu pada perubahan sosial yang terjadi. Keempat, *critical discourse analysis* membutuhkan metode kritis. Hubungan antara diskursif, sosial, dan perubahan budaya kadangkala tidak tampak secara jelas, untuk itu adanya metode kritis ini bermaksud untuk memperlihatkan hubungan dan sebab yang tersembunyi tersebut. Hal ini lah yang membedakan konsep wacana yang dijelaskan oleh Fairclough dengan Foucault, dimana wacana menurut Foucault lebih kepada relasi antara wacana dan kekuasaan, dalam hal ini wacana adalah alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan juga dijelaskan oleh

Foucault bahwa kekuasaan yang terdapat pada sebuah wacana merupakan kekuasaan yang menyebar bukan kekuasaan yang bersifat menekan secara vertikal. Adapun kegunaan kedua konsep wacana ini pada penelitian adalah melalui konsep yang dipaparkan oleh Fairclough penelitian ini mencoba menganalisis sebuah film melalui teks ataupun simbol yang dimunculkan dan menghubungkannya dengan analisis historis dan kritis serta melihat perubahan dalam pengetahuan dalam masyarakat. Kemudian konsep wacana yang dijelaskan oleh Foucault digunakan untuk membuktikan bagaimana relasi wacana dan kekuasaan yang dipraktikkan oleh negara Orde Baru.

Jadi pada dasarnya CDA itu sendiri dapat diaplikasikan pada wacana praktis, sebagai contoh dalam hal wacana berita media, CDA berguna dalam mengkritisi segala aspek yang berkenaan dengan wacana yang dimunculkan media tersebut. Lebih lanjut lagi, CDA banyak membantu analisis-berita dalam mengungkapkan berbagai isu-isu sosial, budaya, dan politik yang dihasilkan media. Contoh yang lebih konkritnya lagi ketika terdapat suatu wacana dengan isu seperti isu *global warming*, dimana disini media lebih banyak menampilkan sebab dan akibat dari isu tersebut yang menyatakan bahwa perihail tersebut muncul karena faktor kelalaian manusia dan perkembangan industri pada umumnya. Namun jika ditelaah kembali dengan menggunakan wacana tersebut sebagai unit analisis dengan CDA sebagai metodenya, wacana tersebut bisa saja memunculkan pemahaman ataupun berbagai asumsi baru seperti kenapa wacana tersebut muncul, apa aspek historis yang melatarbelakanginya, ataupun adakah unsur kepentingan yang memunculkan wacana tersebut. Sehingga dengan begitu, CDA mencoba untuk menguak asal-usul keberadaan suatu wacana dan mengkritisinya berdasarkan pemahaman orang tertentu yang menganalisisnya. Hal ini sesuai dengan dilakukan pada penelitian ini, yakni untuk menganalisis wacana ancaman bahaya komunisme pada film Pengkhianatan G30S/PKI dan melihat aspek historis apa yang melatarbelakanginya atau adakan unsur kepentingan atau kekuasaan yang memunculkan wacana tersebut.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan melihat bagaimana proses

makna dalam sebuah film dikonsumsi masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Creswell, bahwa penelitian kualitatif menekankan pada proses. Selain itu, Creswell juga menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan ini berusaha menggambarkan sebuah proses, pemaknaan dan pemahaman atas suatu gejala (John W. Creswell. 1994. Hal:145).

Persamaan antara pendekatan kualitatif dengan analisis *discourse* adalah bahwa keduanya mencoba melihat makna dari kehidupan sosial. Penelitian kualitatif mengasumsikan kondisi sosial dan kemudian melihat lebih dalam untuk memahami makna dari kondisi sosial tersebut, sedangkan analisis *discourse* mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana ide dibuat oleh kondisi sosial dan bagaimana ide tersebut dipertahankan dan dilihat dari waktu ke waktu (Nelson Phillips, Cynthia Hardy. 2000. Hal:5).

III.2 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan melihat bagaimana proses makna dalam sebuah film dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini tidak hanya menafsirkan teks dalam sebuah wacana akan tetapi telah memasukkan tahapan dalam memahami sebuah teks yaitu tahapan produksi, distribusi, dan tahapan konsumsi.

III.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah film produksi negara Orde Baru yang memuat legitimasi ideologis Orde Baru. Karenanya secara metodologis film-film yang masuk kriteria ini adalah film-film produksi negara yang menggambarkan ideologi komunisme dan atau partai komunis Indonesia serta peristiwa G30S/PKI. Penarikan semacam ini akan merujuk pada film yang diproduksi oleh perusahaan film negara (PPFN) yang memang menjadi aparaturnya dalam produksi film. Pada gilirannya yang dijadikan pusat perhatian penelitian ini adalah film Pengkhianatan G30S/PKI. Selama Orde Baru berjalan, film ini menggambarkan ideologi komunisme, partai komunis Indonesia, dan peristiwa G30S/PKI. Film

G30S/PKI penulis gunakan sebagai data primer untuk dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis dimana penulis mencoba untuk mengungkap setiap simbol dan wacana yang muncul pada film tersebut melalui gambar, prolog, dialog, monolog ataupun tulisan. Baik simbol maupun wacana yang muncul didasarkan pada penggambaran ancaman bahaya komunisme seperti penggambaran atheis, penggambaran biadab, dan penggambaran penghasut. Adapun penulis melihat setiap penggambaran tersebut secara verbal (prolog, monolog, dan dialog) maupun non-verbal (gambar dan tulisan) seperti yang ditampilkan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

Pada penelitian ini juga digunakan pendapat-pendapat para tokoh dan studi literatur lainnya yang terkait dengan peristiwa 30 September 1965 melalui hasil wawancara yang terdapat pada artikel-artikel maupun buku untuk melihat lebih mendalam aspek sejarah peristiwa tersebut. Kemudian untuk mengetahui anggapan masyarakat umum mengenai Film Pengkhianatan G30S/PKI, digunakan juga hasil wawancara dengan lima informan yang memiliki berbagai latar belakang dan pernah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di era Orde Baru. Adapun alasan pemilihan informan didasarkan pada pernah tidaknya informan menonton film tersebut pada era Orde Baru, serta pemahaman informan akan peristiwa 30 September 1965 sesuai dengan penggambaran film Pengkhianatan G30S/PKI. penggunaan informan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana film Pengkhianatan G30S/PKI yang diputar tiap tahunnya pada masa Orde Baru mempengaruhi pandangan masyarakat akan peristiwa 30 September 1965 dan penggambaran Partai Komunis Indonesia.

BAB IV

TINJAUAN HISTORIS MENGENAI KOMUNISME DI INDONESIA DAN PRODUKSI WACANA KOMUNISME MELALUI FILM OLEH NEGARA ORDE BARU

IV.1 Komunisme di Indonesia

IV.1.1 Kelahiran Gerakan Revolusioner

Ide perjuangan revolusioner bisa dikatakan ide yang baru bagi model perjuangan kaum pribumi di Hindia Belanda. Ide ini dibawa ke Hindia Belanda oleh Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Ia tiba di Hindia Belanda tahun 1913 sebagai sekretaris perusahaan dagang di Semarang (Ensiklopedia Indonesia, N.V. Penerbitan W. Van Hoeve Bandung, Gravenhange, t.t. hal. 1264). Dulu ia adalah anggota *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (SDAP). Di negeri Belanda. Pada tahun 1914, ia membuat *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) dengan bantuan kaum sosialis Belanda, yaitu H.W. Dekker, Bergsma, dan Brandsteder (Kahin, 1995 : 92).

Begitu terbentuk, pendirian para anggota ISDV langsung terpecah mengenai tujuan organisasi ini. Sebagian kecil anggota menghendaki agar organisasi ini tidak mencampuri politik dalam negeri Hindia Belanda karena prinsip revolusioner dianggap tidak banyak berguna di negeriyang masih terbelakang seperti Hindia Belanda. Oleh karena itu, mereka menginginkan ISDV cuma sekedar pemantau situasi, khususnya ekonomi Hindia Belanda, bagi kepentingan politik parlementer SDAP di Belanda.

Meskipun ada sedikit halangan dari beberapa anggotanya yang lebih moderat, organisasi Sneevliet makin banyak anggotanya dan makin radikal marxismenya. Bagaiamanapun juga segera menjadi jelas, pemimpin Eropa itu, mampu menarik sedikit orang Indonesia sehingga hanya memperoleh sedikit dukungan massa. Sneevliet menyadari bahwa tanpa dukungan semacam itu, keberhasilan suatu revolusi yang bertujuan memperoleh kemerdekaan politik dan suatu organisasi sosialis tidak akan pernah berhasil. Dukungan semacam itu perlu

didapat untuk memperoleh bantuan kaum pribumi bagi dasar ajaran Marxisme yang revolusioner.

Untuk bisa berperan dalam masyarakat Hindia Belanda, ISDV terus harus mampu bergabung dengan organisasi pergerakan yang besar di kalangan bumiputera. Upaya bergabung ini ternyata tidak mudah, baik karena pecahnya perang dunia kesatu maupun karena bubarnya Internationale II dalam praktek. Oleh karena itu, pada tahun-tahun pertama, selain giat di bidang pembahasan teoritis, ISDV hanya mampu menerbitkan surat kabar *Vrije Woord* Oktober 1915 (Parakitri, 1995 : 261).

Melihat kenyataan tersebut, maka Sneevliet membangun hubungan dengan para pemimpin yang cenderung sosialis dari Sarekat Islam (SI), tergabung dalam ISDV, dan dengan penuh semangat menarik anggota bagi ISDV. Menjelang tahun 1917, tampak suatu gelombang revolusioner dalam SI dengan pembicara Semaoen dan Darsono. Keduanya pemimpin SI Cabang Semarang yang paling berhasil menambah anggota ISDV (L.L. Sitorus, 1983 : 23).

Perembesan ke dalam cabang-cabang SI oleh organisasi Sneevliet sama sekali bukan hal yang kebetulan. Bahkan perlu diperhatikan makin dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di Rusia (Untuk lebih detail mengenai kejadian-kejadian di Rusia, lihat Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Kanisius, 1990. Hal. 37-38). Sneevliet mengakui bahwa SI yang kerakyatan dan tumbuh dengan pesat itu merupakan perantara yang ideal bagi kelompoknya untuk bekerja hingga tuntas dengan maksud membangun hubungan agar memperoleh dukungan dari massa pribumi. Peraturan pemerintah yang memaksa SI secara organisasi terpecah belah sehingga keadaan itu memudahkan proses penetrasi tersebut (Shiraishi, 1997 : 92-94). Dengan peraturan tersebut, cabang-cabang SI merupakan organisasi yang otonom dimana hubungan antara cabang dengan pusat bukanlah hubungan yang vertikal. Karena itulah SI pusat disebut sebagai Central Sarekat Islam (CSI)). Persoalan mengapa organisasi Sneevliet bisa leluasa merembes ke dalam tubuh SI akan menjadi jelas jika melihat bahwa di periode ini siapa saja yang mengibarkan bendera

revolusioner akan mendapatkan pasaran di kalangan kaum radikal, kaum yang menunggu dengan tidak sabar atas perubahan-perubahan yang mereka harapkan.

Dalam periode ini tidak sulit menemukan adanya tokoh dengan tiga keanggotaan sekaligus dari tiga organisasi radikal waktu itu. Haji Misbach adalah aktivis SI, lalu ikut dalam gerakan-gerakan *Indische Partij* dan sekaligus ikut ISDV. Juga Musso, manusia yang senang *amuk-amukan* membagi-bagi kesetiaan politiknya dengan ISDV, SI, dan Insulinde (Soe Hok Gie, 1997 : 5-7). Maka pada periode ini aktivitas SI yang berideologi Islam dengan aktivitas ISDV yang berideologi Marxisme sulit terbedakan.

IV.1.2 Kemunculan Partai Komunis Indonesia

Perbedaan antara ISDV dan SI bisa menjadi jelas ketika ISDV, yang biasa disebut SI sayap kiri, berupaya untuk mendirikan federasi serikat buruh di bawah naungan SI. Dalam kongres Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) pada Mei 1919 di Bandung, Sosrokatdono, Alimin, Semaoen, dan Bergsma mengajukan rencana pembentukan federasi buruh tersebut. Mereka menegaskan bahwa federasi tersebut harus bersifat 'sosialis revolusioner' untuk mengaitkannya dengan perkembangan baru komunisme di Rusia. Menurut mereka, federasi tersebut juga akan merupakan Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang sejati. Rencana ini sangat masuk akal, karena ISDV tahu akan sangat sulit baginya mendirikan organisasi buruh sendiri, lepas dari perlindungan SI.

Federasi buruh tersebut berhasil dibentuk dalam rapat bersama antara SI dan ISDV di Yogyakarta pada 25 Desember 1919, setelah Kongres CSI ke-IV yang diadakan di Surabaya pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 2 November 1919. Mestinya federasi buruh tersebut mengandung embel-embel 'sosialis revolusioner'. Tapi banyak anggota tidak menghendakinya karena hal itu berarti mereka menjadi bagian dari Bolshevisme. Meski penolakan itu mengagetkan sayap kiri SI, tetapi Alimin justru tetap bersikukuh agar tidak memakai embel-embel tersebut, kendati secara pribadi ia sangat suka dikaitkan dengan Bolshevisme. Daripada kalah dalam pemungutan suara, Semaoen terpaksa menerima kenyataan tersebut, dan organisasi buruh itu disebut Persatuan

Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) dan lebih dikenal sebagai *Vakcentrale* (Simbolon : 296).

Apa yang tak diperoleh dalam serikat buruh, ISDV mendapatkannya dalam perubahan ISDV menjadi Perserikatan Komunis di (H)India. Perubahan ini tidak hanya didorong oleh pertimbangan mendasar, seperti ideologi. Tetapi juga karena soal-soal praktis, seperti nama organisasi. Seharusnya sejak 1919 ISDV sudah ganti nama seandainya pemimpin yang Belanda tidak diusir, atau Semaon dan Darsono tidak dipenjarakan. Karena kedua peristiwa tersebut, baru pada bulan Januari 1920 ISDV bisa menyelenggarakan kongresnya yang ke-6. Berlangsung buru-buru, maka kongres tersebut dianggap sebagai persiapan untuk kongres ke-7. Kongres ini diselenggarakan di bulan Mei 1920 di Gedung Sarekat Islam Semarang (Simbolon : 297).

Kebetulan pada masa itu Baars sudah kembali dari Belanda karena di sana ia tidak menemukan revolusi maupun pekerjaan. Dalam kongres ke-7 ISDV itu ia mengusulkan agar dicari nama organisasi baru yang jelas-jelas membedakannya dari sayap kanan dan jelas juga terkait dengan Komintern. Usul ini mendapat dukungan. Maka dalam kongres tersebut, 23 Mei 1920, ISDV resmi bernama Perserikatan Komunis (H)India, dan kemudian disebut *Partij Komunist Indonesia* (PKI), partai komunis pertama di Asia di luar USSR. Semaon terpilih sebagai ketua, Darsono sebagai wakil ketua, Bergsma sebagai sekretaris, dan H.W. Dekker sebagai bendahara (Kahin : 95). Partai baru tersebut mengembangkan hubungan akrab dengan Komintern, dan bergabung dengan organisasi itu pada akhir tahun 1920. Sneevliet yang sudah mengangkat dirinya sendiri menjadi wakil Indonesia pada kongres kedua Komintern (diadakan pada tahun 1920), kemudian membangun hubungan dengan PKI lewat Shanghai.

Dengan lahirnya PKI dari kandungan SI-ISDV, maka sebenarnya hanya tinggal PPKB yang mengikat CSI dan PKI. Namun setelah kongres CSI di Madiun yang meresmikan terbentuknya Partai Sarekat Islam (PSI) memutuskan garis disiplin partai yang melarang anggota SI Merah atau PKI menjadi anggota SI. Dengan demikian, tercapailah bentuk akhir polarisasi pergerakan dalam Islam dan Komunisme (Simbolon : 305).

PKI mengadakan kongres luar biasa di Bandung dan Sukabumi, 4 dan 6 Maret 1923, untuk menentukan sikap terhadap hasil kongres CSI. Diramaikan oleh sekitar 3 ribu pengunjung, kongres itu diikuti para delegasi dari 15 cabang SI, 13 SI Merah, dan 13 serikat buruh (Simbolon : 305). Suasana kongres tersebut sarat dengan rasa dongkol terhadap SI Putih. Para pemimpin PKI, termasuk Semaoen dan Darsono, dengan pedas mengecam, bahkan bersifat bermusuhan terhadap Tjokroaminoto. SI *a la* Tjokro disebut mendukung kapitalisme atau munafik dalam sikap terhadapnya karena kapitalisme di Barat disebut berdosa (*zondige*) tapi kapitalisme sendiri tidak. Serangan yang paling telak adalah resolusi bahwa PKI merupakan pembela Islam tetapi sekaligus musuh besar bagi SI Tjokro. Sebagai musuh bagi SI Tjokro, PKI harus membentuk organisasi tandingan di mana saja ada SI Tjokro. Untuk membedakannya, organisasi tersebut bernama Sarekat Rakyat (SR) yang langsung berada di bawah PKI (Shiraishi : 328-331).

Kongres kelima Komintern (Juni-Juli 1924) menekankan bahwa prioritas utama tujuan partai-partai komunis adalah mengenai pergerakan persatuan dagang. Komintern berpendapat bahwa, tanpa itu, revolusi tidak akan berhasil. Tesis ini diperkuat oleh *International Pan-Pasific Labour Conference* yang diadakan dengan bantuan Komintern pada bulan Juni 1924, dan dihadiri oleh dua pemimpin komunis Indonesia yang penting yaitu, Alimin dan Boedi Soetjitra. PKI dengan sepenuhnya dan secara ekstrim menanggapi tujuan tersebut, sehingga hampir melumpuhkan dasarnya yang didukung kaum tani. Di samping kenyataan bahwa pada rapat PKI yang sebelumnya, kaum tani sudah diakui sebagai dasar massa yang sangat diperlukan, maka pada rapat bulan Desember 1924, Aliarcham, sekretaris PKI, mengajukan suatu resolusi yang menginginkan agar Sarekat Rakyat dibubarkan dan diganti dengan persatuan-persatuan dagang sebagai dasar massa PKI.

Pendapat Aliarcham diserang keras dan akhirnya tercapailah suatu penyelesaian yang bersifat kompromi. Pembubaran Sarekat Rakyat pada prinsipnya dapat diterima. Tetapi, proses pembubaran tersebut harus dilaksanakan setahap demi setahap agar tidak memperlemah PKI. Sambal melepaskan Sarekat

Rakyat, PKI mendasarkan kekuatannya pada pergerakan persatuan dagang. Di samping itu, disetujui bahwa kader-kader PKI harus berdisiplin dan mutunya ditingkatkan sehingga mampu mengadakan revolusi secara efektif. Akhirnya, program yang digariskan menentukan pembentukan suatu Republik Sovyet Indonesia (Kahin : 100).

Sebelum tahun 1925, aktivitas PKI di kalangan persatuan dagang sangat meningkat, baik dalam lingkungannya maupun dalam sifat agresifitasnya. Lebih banyak persatuan yang berhasil dikuasai dan pemogokan sering dilakukan. Unsur-unsur yang telah mengekstrim dalam PKI berada di bawah pengawasan Dachlan dan Soekra, dua pemimpin yang menolak untuk tunduk patuh kepada kepemimpinan yang tetap. Mereka terus menghasut dicetuskannya revolusi dan memakai metode-metode teoritis dengan maksud menguasai partai tersebut.

Dalam usahanya mereka didukung oleh dua pemimpin penting yang sudah mapan, Alimin dan Musso. Kelompok ini berhasil menguasai suatu rapat komisi pelaksana partai tersebut dan para pemimpin persatuan-persatuan dagang pokok di bawah pengawasan komunis yang diselenggarakan di Candi Prambanan pada pertengahan Oktober 1925. Sebagai hasilnya, revolusi ditetapkan akan dilakukan segera. Suatu pemogokan umum selanjutnya akan dikembangkan ke arah revolusi yang bertujuan menggulingkan kekuasaan Belanda dan menggantikannya dengan pemerintahan partai komunis. Agar revolusi tersebut berhasil, dirasa perlu untuk memperoleh bantuan Moskow dan dari pemimpin komunis Indonesia termasuk yang terpaksa tinggal di luar negeri.

Dari semua ini, dukungan Tan Malaka - agen Komintern untuk Asia Tenggara dan Australia - dirasa sangat penting. Partai itu menyadari bahwa meminta bantuan Moskow tanpa dukungan Tan Malaka akan janggal. Agar punya waktu untuk memobilisasi bantuan ini dan membuat persiapan yang perlu di Indonesia, revolusi ditetapkan akan dilancarkan pada tanggal 18 Juni 1926 (Kahin : 104).

Rencana-rencana untuk revolusi segera disiapkan di dalam negeri dan kelihatan bahwa rencana ini tidak begitu lancar jalannya. Sementara itu, Belanda makin keras tindakannya. Bulan Januari 1926 Belanda memutuskan untuk

menangkap Musso, Boedi Soetjito, dan Soegono. Tetapi ketiganya telah menghilang. Mereka lari ke Singapura dan di sana bersama Alimin dan Subakat ditambah dengan Sanusi dan Winata merundingkan lagi keputusan Prambanan. Alimin diutus ke Manila untuk menemui Tan Malaka. Di dalam pertemuan ini Tan Malaka menentang keputusan Prambanan dengan alasan: *pertama*, situasi revolusioner belum ada. *Kedua*, PKI belum cukup berdisiplin. *Ketiga*, seluruh rakyat belum berada di bawah PKI. *Keempat*, tuntutan/semboyan yang kongkret belum dipikirkan. Dan *kelima*, imprealis internasional bersekutu melawan komunisme (Soe Hok Gie : 10).

Sementara itu, aktifitas-aktifitas PKI selama masa persiapan ini ternyata tidak berkembang seperti direncanakan. Mungkin sebagai reaksi terhadap begitu meningkatnya jumlah pemogokan kecil dan meningkatnya kekerasan bersenjata kecil-kecilan, dan mungkin juga sudah mengetahui rencana jangka panjang PKI, atau keduanya, maka pada tanggal 28 November 1925 pemerintah mencabut hak mengadakan pertemuan hampir di seluruh Indonesia untuk PKI, Sarekat Rakyat, dan kebanyakan organisasi buruh yang berada di bawah pengawasan PKI.

Pemerintah yang merasa terpukul hebat oleh desakan pemogokan ini, menahan hampir semua pemimpin buruh yang terlibat, di samping tiga dari sisa pimpinan tertinggi PKI yang masih tinggal di Indonesia, yaitu Darsono, Aliarcham, dan Mardjoha (Kahin : 104). PKI makin lama makin terpaksa bekerja di bawah tanah sementara kehilangan pemimpin-pemimpinnya yang paling hebat. Kegiatannya makin lama makin kurang terkoordinasi. Selama sepuluh bulan pertama tahun 1926, makin banyak lagi pemimpin PKI yang ditahan. Kontak antarorganisasi makin lama makin kacau dan itu terbukti oleh pecahnya tindakan kekerasan secara sporadis dan tidak terkoordinasi di tempat-tempat yang sangat terpisah-pisah di seluruh Jawa.

Cepatnya perpecahan organisasi PKI itu dibarengi oleh cepat hilangnya kontak dengan kaum tani yang dahulu mendukungnya. PKI menunda tanggal revolusi sehingga baru pecah pada malam tanggal 12 November 1926. Kericuhan yang kemudian muncul dalam partai itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa meskipun menurut rencana, revolusi itu akan dicetuskan pertama kalinya di

Padang, pantai barat Sumatera, ternyata pecah untuk pertama kalinya di Batavia dan pemberontakan di daerah Padang itu sendiri malah baru mulai 1 Januari 1927 dan dalam waktu empat hari sudah bisa diatasi.

Dalam pemberontakan keseluruhan, hanya dua orang Eropa yang mati, satu di Jawa dan satu di Sumatera. Tetapi 13 ribu bumiputera yang terlibat ditangkap, 5 ribu diantaranya di tahan, 4.500 dipenjarakan setelah diadili dan beberapa di tembak mati (Simbolon : 318). Kegagalan pemberontakan menimbulkan kepanikan di kalangan tokoh-tokoh PKI. Setelah kegagalan pemberontakan, Semaoen datang kepada Hatta. Waktu itu Semaoen terlihat panik sekali. Setelah mereka berdiskusi akhirnya mereka membuat konvensi bersama. Konvensi tersebut hanya berisi 4 pasal singkat. Dalam saat-saat dimana pemerintah Hindia Belanda sedang melancarkan tekanan-tekanan kepada PKI, Semaoen atas nama PKI menerima kepemimpinan Perhimpunan Indonesia (PI)¹ dalam gerakan nasionalis, berjanji untuk bekerjasama dan menawarkan alat-alat percetakan PKI di Indonesia agar dipakai oleh PI (Konvensi tersebut merupakan persetujuan pribadi antara Hatta dan Semaoen, tanpa diketahui oleh pengurus PI maupun oleh pihak Komintern. Lihat John Ingleson, 1983 : 30).

Atas tekanan Komite Eksekutif Komintern, konvensi ini kemudian dibatal setahun kemudian (19 Desember 1927). Nasib tokoh-tokoh PKI tidaklah bahagia. Musso kemudian sekolah lagi di Rusia sebagai petugas Komintern. Semaoen sendiri dibuang ke Asia Tengah. Alimin mengembara sebagai petugas Komintern dan beberapa tahun ditempatkan bersama-sama kaum komunis Cina di Yenan dan kemudian Chungking. Darsono setelah melihat praktek-praktek Stalinist, kemudian berubah pikiran dan hidup dalam pengasingan di Jerman sampai 1933 dan setelah itu di negeri Belanda (Soe Hok Gie : 16).

Tanah Hindia Belanda kembali menjadi tentram. Pemberontakan PKI yang tidak terencana dengan baik itu tidak hanya menentukan nasib PKI, tapi juga nasib pergerakan pada umumnya. Tetapi walaupun demikian, ketika Soekarno dengan PNI yang dibentuknya ketika mau menanamkan pengaruhnya di

¹ Sebuah organisasi yang didirikan di Belanda oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia pada tahun 1908.

lingkungan organisasi buruh harus mengklaim sebagai penerus PKI sebagai legitimasi mendapatkan massa (Ingleson : 72).

IV.1.3 Konteks Politik Internasional dan Nasional tahun 1965

Berbicara mengenai konteks politik Indonesia dan nasional 1965 tentunya terkait dengan berbagai latar belakang peristiwa sejarah, salah satunya adalah Perang Dingin. Sebagai pemimpin di area domino yang sangat strategis pada waktu itu, Sukarno didekati oleh para pemimpin dari kedua blok Perang Dingin. Namun dalam hal ini, ia menerapkan kebijakan non-blok yang merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia sebagai negara yang masih baru untuk mendapatkan bantuan dari Timur dan Barat. Tiga bulan setelah pidatonya di Kongres Amerika, Sukarno kemudian mengunjungi Cina dan Uni Soviet. Hal ini kemudian ditafsirkan oleh Amerika sebagai menyebrang ke blok Komunis. Perang dingin perlu untuk diketahui atau diungkapkan agar kita memahami apa yang terjadi pada masa pemerintahan Sukarno. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pramoedya Ananta Toer² dimana ia mengatakan bahwa jika bicara tentang Orde Lama tanpa berbicara soal Perang Dingin merupakan hal yang korup.

“saya sudah memberikan ketentuan, bicara tentang Orde Lama tanpa bicara tentang Perang Dingin itu korup. Kenapa? Karena Sukarno itu mau mendirikan negara yang mandiri, dan bukan menjadi bagian dari hemisphere negara lain. Dan jangan lupa, untuk Amerika Serikat di zaman Perang Dingin negara yang tidak mau ikut dengan Barat berarti Komunis.” (Wardaya, 2001: 50-51).

² Pramoedya Ananta Toer dilahirkan di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 sebagai anak sulung dalam keluarganya. Pramoedya menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya, dan kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Secara luas dikenal sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan kerap ditempatkan di Jakarta pada akhir perang kemerdekaan. Ia menulis cerpen serta buku di sepanjang karir militernya dan ketika dipenjarakan Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1949. Pada 1950-an ia tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya, dan ketika kembali ke Indonesia ia menjadi anggota Lekra, salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia.

Perang Dingin pada dasarnya merupakan perseteruan antara blok Amerika Serikat melawan Blok Komunis. Disebut Perang *Dingin* karena kedua Blok menghindari perang bersenjata langsung antara Negara Raksasa Nuklir Amerika Serikat dan Negara Raksasa Nuklir Uni Sovyet/Republik Rakyat Tiongkok. Tetapi disebut Perang, karena memang ada polarisasi politik tajam dan kedua Blok menggunakan pelbagai rekayasa, bahkan dengan men-supply/menggunakan senjata dalam upaya memperebutkan pengaruh di banyak negara di seluruh dunia. Seperti pada tahun 1950 Republik Rakyat Korea Utara menyerang Korea Selatan, Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya mengirimkan senjata dan pasukannya ke sana. Lalu tentara Republik Rakyat Cina membantu Korea Utara dan perang Korea, tanpa melampaui batas Korea, berlangsung sampai 1953. Hasilnya adalah pengembalian *status quo* perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan seperti pada tahun 1950. Di Vietnam Selatan campur tangan bersenjata A.S dimulai segera setelah Perancis meninggalkan bekas jajahannya karena pada tahun 1954 kalah perang kolonial. Pada tahun itu, berdirilah Republik Rakyat (Komunis) Vietnam-Utara dan Republik Vietnam-Selatan (non-komunis). Tetapi di Vietnam Selatan, gerilya komunis Vietkong aktif, dan A.S.mengirim beberapa ratus “penasehat-militer” ke sana. Jumlah “penasehat-militer” yang setiap tahun bertambah banyak. Pada akhir tahun 1960-an, jumlahnya lebih dari 500.000 orang.

Pada masa itu, pengaruh ideologi komunis yang cukup kuat di Indonesia menjadi bahan pertimbangan bagi Amerika Serikat untuk mengguling pemerintahan Sukarno dan menurut Pramoedya Ananta Toer itulah sebabnya Amerika mendukung gerakan PRRI/Permesta yang kontra terhadap pemerintahan Sukarno. Dengan alasan Sukarno yang tidak mau masuk Blok Barat, terdapat kurang lebih tujuh kali percobaan pembunuhan terhadap Sukarno (Wardaya, 2001 : 51). Pada tahun 1963-1965, Amerika mengalami kesulitan dengan perangnya di Vietnam, oleh karena itu politik Barat secara regional dilaksanakan oleh Inggris dan Sukarno pada waktu itu melawannya dengan melakukan konfrontasi. Disisi lain, Inggris tetap ingin menguasai wilayah yang kemudian dinamai Malaysia karena ia harus membayar hutang kepada Amerika. Disini Inggris telah berhutang

alat-alat perang dengan Amerika melalui perjanjian *Lend-lease* dan pada waktu itu Inggris mengalami kebangkrutan sehingga Malaysia dijadikan ladang uang oleh Inggris. Dalam hal ini, secara politis Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris, namun sumber ekonominya tetap dikuasai oleh Inggris. Sukarno, pada waktu itu menganggap Malaysia merupakan ancaman bagi Indonesia dan dalam peristiwa PRRI/Permesta, senjata Amerika dikirim melalui wilayah Malaysia. Terkait dengan Perang Dingin dan penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi di Asia Tenggara, Pramoedya Ananta Toer kemudian menambahkan tentang visi gerakan kiri pada waktu itu untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Gerakan kiri cukup kuat pada waktu itu. Hal ini menyebabkan makin dibenarkannya politik Sukarno, berikut kerjasama antara Sukarno dan golongan kiri. Sukarno sendiri adalah seorang Marxis. Dulunya, Hatta juga seorang Marxis, waktu di negeri Belanda, waktu di Perhimpunan Indonesia. tapi waktu itu dia kalah dalam pemilihan ketua dan digantikan oleh Abdul Majid – anak tiri R.A. Kartini yang komunis itu – dia langsung menjadi anti-komunis. Jadi, dulunya Hatta itu Marxis. Ia Marxis, tapi bukan komunis.” (Wardaya, 2001 : 53)

Pemerintah Amerika Serikat, baik dari partai Republik maupun dari partai Demokrat, bertekad mencegah perluasan daerah kekuasaan komunis. Menurut teori domino, kalau sebuah negara jatuh ke tangan komunis maka, negara tetangganya mungkin menyusul. Karena itu pemerintah Amerika Serikat, awal tahun 1958, membantu secara subversif, melalui CIA, Angkatan Darat dan Angkatan Laut-nya, pemberontakan PRRI/Permesta di Indonesia. Pimpinan PRRI/Permesta adalah sejumlah panglima-panglima daerah dan tokoh-tokoh partai Masyumi dan PSI yg anti-komunis dianggap lebih pro-Barat daripada Sukarno, seorang nasionalis yang menganggap Amerika Serikat, sebagai neo-kolonial. Konferensi Asia-Afrika yang pertama di-Bandung (1955) yang juga dihadiri oleh Republik Rakyat Cina antara lain bertujuan membendung dominasi Amerika Serikat di dunia. Perlawanan bersenjata besar-besaran PRRI/PERMESTA dapat ditundukkan dalam waktu beberapa bulan meskipun

aksi gerilya pemberontakan ini terus berlangsung sampai 1961. Setelah sebuah kapal terbang pembom Amerika yang mau membantu pemberontak ditembak jatuh di pertengahan 1958, pemerintah A.S. secara resmi mengutuk segala intervensi, dan menawarkan bantuannya kepada Angkatan Darat Indonesia. Terhitung sejak tahun itu, bantuan 20 juta dollar/tahun diberikan kepada Angkatan Darat untuk melawan komunisme, agaknya tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia. Berlainan dengan para pemimpin militer PRRI/PERMESTA yang setelah menyerah diberi amnesti, P.S.I. dan Masyumi, karena keterlibatannya pada pemberontakan tahun 1960 di atas justru dibubarkan dan sejumlah tokoh PSI (Sjahrir) dan tokoh Masyumi (antara lain Mohammad Roem dan Prawoto) sejak 1962 dipenjarakan tanpa suatu pemeriksaan oleh Pengadilan.

Kemudian, atas desakan KASAD, Jenderal AH. Nasution, pada tahun 1959, Sukarno mendekritkan pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD'45 yang memudahkan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Berikut ini merupakan tanggapan Pramoedya Ananta Toer mengenai Dekrit 5 Juli 1959 apakah hal tersebut merupakan tekanan dari Nasution :

“bukan ditekan, tapi dimanfaatkan. Nasution ini kan tujuannya juga menggeser Sukarno. Jadi semua keputusan politik yang menguntungkan militer dimanfaatkan oleh Angkatan Darat. Kalau ngomong tentang militer itu sebaiknya diperjelas menjadi Angkatan Darat. Bukan Angkatan Udara, bukan Angkatan Laut.” (Wardaya, 2001 : 60)

Menurut pandangan AH. Nasution, UUD'45 lebih baik, karena pemerintahan presidensil tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, seperti terlalu sering terjadi di Indonesia. Lagipula AH. Nasution menginginkan agar juga ABRI di beri fungsi sosial-politik di samping fungsi militernya. UUD'45 memberi peluang untuk ABRI, sebagai golongan fungsional menempatkan wakil-wakilnya di lembaga negara tertinggi (DPR, MPR dan DPA). Sejak 1957, Presiden Soekarno mengemukakan gagasannya bahwa demokrasi parlementer tidak cocok dengan kepribadian Indonesia dan harus diganti dengan sistim demokrasi

terpimpin. Tetapi waktu itu beliau masih menolak saran Jenderal AH Nasution untuk menggunakan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Sebagaimana juga beliau menolak, pada tahun 1952, desakan Jenderal AH Nasution, untuk membubarkan parlemen. Dengan berlakunya UUD'45 dan demokrasi terpimpin, sistem pemerintahan otoriter, dengan dukungan penuh pimpinan Angkatan Darat menggantikan pemerintahan parlementer. Campur tangan militer di bidang politik dan ekonomi sejak diumumkan keadaan darurat perang (1957) sudah besar dan kini bertambah besar. Tetapi Bung Karno dapat membatasi ketergantungannya dari militer.

Beliau membubarkan parlemen hasil pemilihan umum pertama di Indonesia (1955) serta membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dengan penunjukan anggota-anggota yang menjamin dukungan terhadapnya (1960). Dengan kemampuan demagoginya beliau memobilisasi sokongan luas masyarakat dalam kegiatan politik menurut "ajaran-ajarannya" sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Beliau menjadikan "penyelesaian revolusi menuju sosialisme Indonesia" sebagai tujuan politik. Dan sebagai sarana ialah: "demokrasi dan ekonomi terpimpin" (dalam akronim MANIPOL/USDEK) dan NASAKOM (yakni, kerja sama antara aliran politik Nasionalis, Agama dan Komunis di bawah pimpinannya sebagai Pemimpin Besar Revolusi). Juga hukum dan peradilan mesti tunduk kepada revolusi. Karenanya, azas pemisahan kekuasaan negara (Trias Politica) dihapus. Sikap anti-imperialisnya-pun makin dinyatakan.

Salah satu tahap "penyelesaian revolusi" Soekarno adalah pembebasan Irian-Barat (bagian bekas Nederlands-Indie yang enggan diserahkan oleh Belanda). Upaya ini mendapat prioritas agar tanah-air Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 menjadi utuh. Hampir satu setengah milyar dollar AS (pinjaman dari Uni Sovyet) dipergunakan untuk pembelian kapal-kapal perang dan pesawat terbang, termasuk penambahan persenjataan dan personalia angkatan darat dan angkatan bersenjata pada umumnya, serta latihan, pasukan relawan. Akhirnya perjuangan "pembebasan" Irian-Barat berhasil tanpa pertempuran besar-besaran.

Belanda meninggalkannya dan PBB meyerahkannya kepada Indonesia.(1963). Dalam pada itu, kondisi ekonomi yang diabaikan, makin memburuk. Pelaksanaan "penyelesaian revolusi" nampak terutama dalam bentuk verbal : indoktrinasi ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi, MANIPOL USDEK dan NASAKOM yang diwajibkan untuk diajarkan di lembaga-lembaga pengajaran, politik dan pemerintahan. Dalam siaran radio, koran-koran dan penerbitan lain, orang berlomba-lomba menunjukkan lafal ajaran-ajaran itu. Akan tetapi kesatuan pikiran dalam masyarakat hanyalah di permukaan dan semu. Pertentangan kepentingan antara berbagai kekuatan politik malah meruncing. Pembebasan Irian-Barat dapat dikatakan mendapat dukungan seluruh masyarakat. Tetapi terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat Indonesia sendiri untuk menuju pembagian hak milik dan hasil usaha secara lebih merata, sebagai pelaksanaan keadilan sosial atau sosialisme Indonesia, tidak tercapai karena pertentangan di antara pelbagai golongan dan partai politik. Kaum tidak berpunya, kaum buruh, proletar dan marhaen, mendambakannya. Tetapi orang yang bermodal, orang yang memiliki tanah luas menolaknya. Polarisasi ini diperuncing oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Ini nampak dalam penyusunan UUPA (Pokok Agraria) dan UUBH (Bagi Hasil) oleh DPR-GR (1959-1960), serta lebih-lebih dalam praktek perubahan pemilikan dan bagi hasil di bidang pertanian menurut undang-undang tersebut. Setelah di UUPA diundangkan, pelaksanaannya justru macet. Pegawai pemerintah yang bertugas di bidang ini tampaknya kurang berhasil. Sejak semula PKI melancarkan kampanye pelaksanaan "land-reform", dengan penerangan, penelitian dan publikasi. Setelah pada tahun 1963 ada paceklik, maka 'aksi sepihak' dilaksanakan yakni memimpin serta mendampingi tindakan-tindakan tani kecil dan buruh tani untuk memaksakan pelaksanaan UUPA/UUBH, dengan menduduki tanah pertanian dan menahan sebagian hasil serta menuntut retooling pegawai pemerintah yang gagal. Aksi-aksi sepihak yang dijalankan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali dan sebagai akibat menimbulkan konflik-konflik sosial. Meskipun di banyak tempat pemerintah daerah mencoba menyejukkan keadaan, umumnya mereka memihak pemilik-pemilik tanah. Pertentangan keras, bahkan dengan penggunaan senjata tajam, terjadi di Jawa

Tengah dan Jawa Timur antara organisasi komunis dengan organisasi NU. Sedangkan di Bali, komunis bertentangan keras dengan PNI. Keadaan menjadi gawat sehingga sewaktu Presiden Soekarno berada di luar negeri, pejabat presiden Leimena mengeluarkan instruksi penghentian aksi sepihak pada pertengahan tahun 1964. Bung Karno dalam pidato kenegaraannya tahun itu memberikan dukungan tidak langsung kepada aksi sepihak dengan menunjukkan simpati pada buruh tani dan mengecam kelambanan pelaksanaan UUPA/UUBH.

Pertentangan terus meruncing hingga terjadi penembakan mati tiga buruh tani oleh polisi di Boyolali. Kemudian, bulan desember 1964, dilakukan musyawarah di Istana Presiden di Bogor yang dihadiri perwakilan dari semua partai. Aksi sepihak itupun dibicarakan. Hasil musyawarah, antara lain, menyerukan agar masalah-masalah nasional seperti pelaksanaan UUPA dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Diserukan juga bahwa pejabat dan petani diwajibkan untuk musyawarah tanpa menggunakan ancaman kekerasan dan senjata. Kedua belah pihak dalam pertentangan tentang tanah menafsirkan deklarasi Bogor sebagai kemenangan dan aksi sepihak lambat laun dihentikan. Akan tetapi di bawah permukaan saling benci dan dendam membara.

Sementara itu tahun 1961 Inggris dan negara Malaya (merdeka tahun 1957) dengan dukungan A.S mempersiapkan pembentukan federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura dan bekas jajahan Brunei, Sabah dan Sarawak di Kalimantan Utara. Rencana ini ditentang RRT. Juga Bung Karno memandangnya suatu proyek Nekolim yang mesti dilawan. Tetapi keberatan RRT dan Indonesia tidak digubris dan pembentukan Federasi dilaksanakan tahun 1963. Bung Karno lalu memproklamasikan Konfrontasi mengganyang Malaysia. Meskipun dengan mulut didukung oleh militer dan semua partai, konfrontasi ini jauh lebih sedikit disokong ketimbang operasi pembebasan Irian-Barat. Khususnya di kalangan Angkatan Darat ada kekhawatiran terhadap petualangan perang terbuka dengan Inggris. Itu sebabnya pimpinan Angkatan Darat mengrongrong dan mencegah Laksamana Udara Omar Dhani yang diangkat Presiden sebagai Panglima Komando-Siaga melawan Malaysia untuk secara efektif menggunakan Angkatan-Darat. Bahkan sejak 1964, Angkatan-Darat juga

melakukan perundingan rahasia dengan Malaysia dan Inggris, agar perang besar terbuka jangan pernah terjadi. Perundingan ini dilakukan pertama kali oleh Jenderal Yani dan kemudian dilanjutkan dibawah tanggung jawab Jenderal Soeharto yang menugaskan Let.Kol. Ali Murtopo (Kepala OPSUS) untuk memelihara hubungan rahasia dengan Malaysia/Inggris. Dari semua partai politik, PKI-lah yang paling kuat mendukung Konfrontasi, antara lain dengan tuntutanya mengadakan latihan relawan dan pembentukan Angkatan (bersenjata) ke-V, demi pengganyangan Malaysia. Sukarno sendiri makin sengit menyerang Nekolim dan Imperialisme dalam pidato-pidatonya. Kemudian, agaknya kondisi Perang Dingin juga mempengaruhi pemikiran Sukarno, hal ini diungkapkan oleh Joesoef Isak³ yang menyatakan :

“ini dimulai dengan konsep Bung Karno mengenai Asia-Afrika. Pada waktu itu banyak negara Asia-Afrika sudah merdeka, tapi masih banyak juga yang belum, terutama di Afrika. Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung itu dimaksudkan untuk membantu membebaskan negara-negara yang belum merdekaini. Disini masuk pengaruh Perang Dingin. Gerakan Asia-Afrika itu kan anti-kolonialisme, anti-imperialisme. Tapi dalam perkembangannya, muncul konsep-konsep dari negara-negara yang secara langsung terlibat Perang Dingin itu. Khrushchew, misalnya, melahirkan konsep ‘peaceful-coexistence’. Padahal banyak negara Asia-Afrika masih bertarung untuk kemerdekaan, dan untuk itu mereka mendukung prinsip ‘armed struggle’, perjuangan bersenjata untuk merebut kemerdekaan.”

“gerakan Asia-Afrika yang kemudian menjadi Gerakan Non-Blok itu pada awalnya kan anti-imperialis, revolusioner. Tapi dengan adanya interupsi macam pemikiran Khrushcov itu tadi di dalam Non-Blok pun lantas timbul kelompok yang

³ Joesoef Isak (lahir di Petojo, Jakarta, 15 Juli 1928 – meninggal di Jakarta, 15 Agustus 2009 pada umur 81 tahun) adalah seorang penerbit Indonesia, penerjemah, dan intelektual sayap kiri. Dia adalah seorang penganjur kebebasan berbicara selama pemerintahan otoriter Presiden Soeharto, dan dipenjarakan selama 1967-1977 tanpa pengadilan. Pada tahun 1980, ia mendirikan dan menjadi pemimpin penerbit Hasta Mitra, yang menerbitkan buku-buku Pramodya Ananta Toer seperti Tetralogi Buru.

anti-revolusioner. Kelompok ini melahirkan konsep 'remo' singkatan Revisionisme Modern. Akibatnya banyak negara Afrika dirugikan. Kalaupun merdeka, negara-negara ini merdeka karena hasil kompromi, bukan merdeka secara mutlak.” (Wardaya, 2001 : 77-78)

Menurut pernyataan dari Joesoef isak, Sukarno pada akhirnya membagi negara-negara di dunia dalam 'nefos' (negara-negara baru dan progresif) dan 'oldefos' (negara-negara lama yang nekolim atau konservatif). Tahun 1964, beliau mengucapkan *"go to hell with your aid"* terhadap Amerika Serikat. Amerika memang menghentikan bantuannya pada Indonesia sejak tahun 1964, kecuali bantuan langsung kepada Angkatan-Darat yang justru digandakan. Sepanjang Demokrasi Terpimpin, beberapa kali dibentuk persekutuan/organisasi untuk membendung pertumbuhan pesat pengaruh PKI dalam kehidupan politik-sosial, antara lain Liga Demokrasi atas prakarsa PSI, Masyumi (1960), Manifesto Kebudayaan (Manikebu) oleh sekelompok sastrawan yang membela nilai-nilai humanisme dalam sastra dan kebudayaan umumnya vs. pemihakan revolusioner LEKRA (komunis) dan LKN (nasionalis) (1963) dan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) oleh Adam Malik dan wartawan lain yang menjabarkan pikiran politik Soekarno tetapi melawan pengaruh politik komunis (1964). Tetapi setiap kali usaha-usaha di atas kandas karena Presiden Soekarno mem-veto-nya. Sering ditandaskan oleh Bung Karno, bahwa dalam sosialisme Indonesia tidak ada tempat untuk komunistofobi. Hanya Angkatan Darat yang anti-komunis bertahan secara kuat. Karena itu bagi banyak orang yang menolak otoriterisme Demokrasi Terpimpin dan pengaruh komunisme, Angkatan Darat menjadi harapan, namun mereka pada saat sama melupakan peranan Angkatan Darat dalam pembentukan dan pengisian sistim Demokrasi Terpimpin, khususnya kemandirian Angkatan Darat yang tumbuh subur di dalamnya dan bahaya besar militerisme .

Keadaan ekonomi Indonesia makin merosot dengan inflasi yang menjulang. Sedangkan suhu ketegangan politik justru naik dalam tahun 1965. Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Bulan berikutnya, 21 surat kabar anti komunis dilarang terbit. Angkatan Darat langsung menerbitkan dua

surat kabar sendiri. Semangat anti-Amerika dipanaskan oleh berita-berita tentang peningkatan pemboman dahsyat Vietnam oleh Amerika dan perusahaan A.S. diduduki oleh serikat-serikat buruh kiri. Angkatan Darat mengambil alih pengelolaan perusahaan asing tersebut. Bulan April 65, Menteri Luar-Negeri RRT berkunjung ke Jakarta dan mendukung saran Aidit⁴ untuk membentuk angkatan bersenjata kelima di samping AD, AU, AL dan Kepolisian. Angkatan ini akan diisi oleh relawan yang dipersenjatai untuk menyerang Malaysia. Usulan ini didukung juga oleh AU, Partindo dan PNI.

Sukarno menyatakan bahwa PKI adalah contoh teladan kekuatan revolusioner. Dalam perayaan meriah H.U.T.ke-45 PKI, bulan Mei 1965, beliau memuji-muji PKI. PKI yang dalam pemilihan umum tahun 1955 menjadi partai besar ke-empat, memang paling menonjol dukungannya pada Sukarno, sebagai Pemimpin Besar Revolusi. PKI semakin banyak anggotanya, juga karena banyak pengikut Sukarno menggabungkan diri dengan PKI. Mereka menyeberang bukan karena tertarik pada ideologi komunis tapi mengingat keberpihakan PKI pada rakyat kecil (lebih nyata daripada PNI). Tahun 1965, Sukarno jatuh sakit sehingga timbul desas-desus bahwa ia akan meninggal. Bahkan dokter-dokter dari RRT datang untuk mengobatinya sampai sembuh. Pada pidato 17 Agustus 1965, beliau mengumumkan terbentuknya Poros Anti-Imperialis: Jakarta-PnomPenh-Hanoi-Beijing, suatu keterikatan Republik Indonesia dengan 4 negara komunis, dan menyerukan agar rakyat dipersenjatai. Keadaan ekonomi semakin parah pada kuartal terakhir tahun '65, harga beras 9 kali harga pada permulaan tahun dan harga dolar dipasar gelap menjulang dari Rp 5100 menjadi Rp 50.000. Desas-desus kemungkinan Kudeta, baik oleh Angkatan Darat maupun oleh PKI dibisikkan secara luas. Tanggal 27 September Jenderal Ahmad Yani menyatakan Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima.

⁴ Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan nama D.N. Aidit, dilahirkan di Pulau Bangka 30 Juli 1923. Beliau menjabat sebagai ketua CC-PKI. Memperoleh pendidikan di sekolah Belanda dan mengenal ideologi komunis sejak bergabung dengan Asosiasi Demokrasi Sosial Hindia Belanda yang kemudian berganti nama menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia). memimpin PKI pada usia 31 tahun. Hanya dalam waktu 1 tahun, Aidit berhasil melambungkan PKI dalam kategori empat partai besar di Indonesia pada Pemilu 1955. (Tempo. 1997. Seri Buku TEMPO: Orang Kiri Indonesia Aidit. Jakarta : Kompas Gramedia. Hal : 7-11)

IV.1.4 Militer dan PKI

Peristiwa gerakan 30 September 1965 di Indonesia telah mengakhiri persaingan politik antara TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat) dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Namun sampai saat ini peristiwa tersebut masih menjadi misteri dalam sejarah Indonesia modern. Pihak TNI-AD menyebut peristiwa tersebut sebagai GESTAPU (Gerakan September 30) dan memandangnya sebagai peristiwa makar yang dilakukan oleh PKI. Berbagai kajian akademik telah dilakukan terhadap peristiwa tersebut. Ada sementara kalangan yang setuju dan ada yang tidak setuju tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Tulisan ini akan mengkaji berbagai perspektif tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan perubahan-perubahan politik yang menyertainya pasca peristiwa tersebut di Indonesia. Tulisan ini juga akan mengkaji tentang militer Indonesia yang setelah peristiwa GESTAPU tahun 1965 yang muncul sebagai kekuatan yang memerintah. Dalam konteks ini TNI-AD memberi nama pemerintahan yang diusungnya dengan istilah “Orde Baru”. Tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk mempertahankan wujudnya nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu pemerintahan Presiden Soekarno dicap sebagai kekuatan “Orde Lama” yang oleh pemerintahan Orde Baru digambarkan sebagai kurun waktu yang penuh dengan kegelapan, keterbelakangan, serta penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan legitimasi politik dari masyarakat, pemerintah Orde Baru menyelenggarakan PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1971 yang hasilnya dimenangkan oleh kekuatan politik dukungan pemerintah, yakni GOLKAR (Golongan Karya).

Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) pada tahun 1965 yang menewaskan tujuh perwira Angkatan Darat senior masih menjadi hal yang misterius dalam politik Indonesia. TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat) menamakan peristiwa tersebut bukan sebagai GESTOK (Gerakan 1 Oktober) seperti yang disebutkan oleh Presiden Soekarno. Namun nama gerakan itu kemudian dinamai oleh TNI-AD menjadi sinonim dari Gestapu. Untuk membuktikan keterlibatan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada gerakan

Gestapu, TNI-AD mengubah istilah Gestapu menjadi G30S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia). TNI-AD melayangkan tuduhan akan keterlibatan PKI dalam gerakan itu, namun bagaimanapun juga, memunculkan banyak tanda tanya besar seperti berikut ini :

Pertama, jika PKI yang terlibat dengan tujuan untuk membentuk sebuah pemerintahan Komunisme di Indonesia, mengapa anggota Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung mayoritas adalah dari pejabat senior TNI-AD? Apakah TNI-AD sengaja bergabung dalam Dewan Revolusi Gestapu supaya PKI merasa benar-benar yakin bahwa Angkatan Darat mendukung Gestapu? Walaupun begitu, TNI-AD telah memiliki alasan rasional untuk menghancurkan PKI dan menyatakan keterlibatan perwira senior Angkatan Darat di Dewan Revolusi hanya kamufase PKI. Beberapa mantan anggota Dewan di rezim Orde Baru banyak duduk di dalam posisi penting pemerintah seperti dalam Kabinet Menteri. Selain itu, Presiden Soeharto memberikan Umar Wirahadikusumah, yang juga salah satu anggota *ex-senat*, duduk sebagai Wakil Presiden dalam 1982-1987.

Kedua, hanya dalam 9 jam, RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat atau Pasukan Khusus Angkatan Darat) bisa mendominasi posisi strategis yang diduduki oleh pelaku Gestapu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemberontakan Gestapu tidak terencana dan tidak memiliki kekuatan militer yang cukup. Pasukan yang digunakan dalam pemberontakan adalah pasukan penjaga keamanan Presiden TjakraBirawa (bukan pasukan tempur). Ada batalyon infantri hanya dua yang berasal dari KODAM (Komando Daerah Militer atau Komando Daerah Angkatan Darat) Brawijaya Jawa Timur (Batalyon 530) dan KODAM Diponegoro Jawa Tengah (Batalyon 454). Batalyon tersebut di atas tidak memiliki persiapan untuk berperang, karena mereka datang ke Jakarta untuk menghadiri ulang tahun ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Republik Indonesia Pasukan) pada 5 Oktober 1965. Sebelum 1 Oktober, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Panglima Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kepala Strategis Angkatan Darat) memeriksa kesiapan batalyon 530 dan 454 pasukan dalam menghadiri ulang tahun.

Ketiga, Untung, yang merupakan pemimpin kudeta (revolusi), adalah tokoh asing dalam Angkatan Darat dan masyarakat sipil. Mantan duta besar dari Amerika Serikat (Amerika Serikat) untuk Indonesia, Marshall Green, menulis dalam bukunya yang berjudul *From Sukarno to Suharto*, bahwa Untung tidak terkenal karena dia baru saja pindah dari Jawa Tengah untuk memimpin batalyon pertama petugas pengamanan Presiden "Resimen Tjakrabirawa" (Green, 1991:251). Dalam setiap revolusi yang dilakukan oleh Angkatan Darat di banyak negara, pemimpin revolusi biasanya perwira senior Angkatan Darat yang akrab di masyarakat luas dan memiliki pengaruh yang besar terhadap internal Angkatan Darat. Namun, Untung adalah seorang perwira Angkatan Darat junior yang selalu setia Soekarno dan tidak pernah mengerti tentang politik, sehingga banyak pihak dilihat bahwa Untung hanya dilengkapi dan dikorbankan untuk tujuan sisi lain. Sangat menarik untuk dicatat bahwa Mayor Jenderal Soeharto mengenal baik Untung. Dia pernah menjadi pemimpin Untung ketika bekerja di Solo, Jawa Tengah. Untung telah bersama-sama dengan Soeharto memperjuangkan kemerdekaan Papua (Irian Barat) dari Belanda pada tahun 1962. Karena Untung adalah seorang perwira junior di Tentara yang memiliki ideologi radikal kiri membuat Soeharto menyimpulkan bahwa Gestapu adalah revolusi kelas ekstrim kiri (Roeder, 1969:13). Banyak pihak meragukan tuduhan Soeharto bahwa Untung adalah seorang komunis. Di pengadilan, tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa Untung adalah seorang agen Partai Komunis (Crouch, 1984:115).

Keempat, ada pandangan yang berbeda tentang Gestapu antara pemimpin Angkatan. KASAU (Kepala Staf Angkatan Udara atau Panglima Angkatan Udara) Omdani mengatakan bahwa Gestapu bertujuan untuk menyelamatkan revolusi dan pemimpin besar revolusi, Presiden Soekarno, dari sebuah gerakan subversif CIA (Central Intelligence Agent), karena itu, Angkatan Udara akan mendukung setiap gerakan progresif revolusioner dan sebaliknya akan menghancurkan setiap upaya yang akan berbahaya bagi revolusi Indonesia (Pusat Sejarah TNI, 2000:228). Kecurigaan muncul dari kalangan Angkatan Darat. TNI-AD menyalahkan Angkatan Udara yang mendukung Gestapu/PKI, dan sebaliknya

dengan banyak alasan Angkatan Udara menyalahkan TNI-AD. Sampai saat ini, sejarah Gestapu masih menjadi tulang belakang di Sejarah militer Indonesia.

IV.1.5 Peristiwa G30S/PKI dan Transfer Kekuasaan di Indonesia

Banyak teori yang datang dari pengamat politik dan peneliti sejarah di Indonesia tentang Gestapu, beberapa orang percaya dan yang lain tidak. Benedict R.O 'G. Anderson dan Ruth T. McVey pada Januari 1966 membuat sebuah tulisan (dirilis hanya pada tahun 1977). Mereka menyatakan bahwa PKI tidak terlibat dalam revolusi Gestapu (Anderson & McVey, 1971). Beberapa peneliti dari Cornell University menyatakan sebuah hipotesis alternatif bahwa PKI adalah masalah internal TNI-AD di mana banyak Kolonel Angkatan Darat tidak puas, kecewa, dan memberontak terhadap Jenderal yang tidak mendukung konfrontasi ke Malaysia. PKI bukan promotor coup d'état karena hanya akan merugikan PKI. Tempat PKI pada saat yang begitu nyaman di bawah Rezim Presiden Soekarno. Kapan pun terjadi perubahan, maka hal tersebut tidak akan bermanfaat bagi PKI dan strategi terbaik untuk PKI adalah untuk bertahan pada status quo (Brackman, 2000 : 226-227).

Revolusi dari kelompok Untung bukan yang asli. Keadaan ini dimanipulasi oleh sisi kanan, TNI-AD dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto untuk menghentikan musuh mereka dari sisi pusat Letnan Jendral Ahmad Yani dan teman-teman, sehingga dengan begitu, jalan terbuka untuk sisi kanan (sisi Soeharto) untuk menghancurkan PKI yang sudah lama direncanakan dan kemudian membangun sebuah diktator Angkatan Darat pada periode berikutnya (Scott, 2001 : 101).

CIA juga dituduh menjadi dalang dibalik Gestapu oleh banyak pihak, dengan melakukan persekongkolan dengan pejabat senior TNI-AD (Harsutejo, 2000). Amerika Serikat memiliki kepentingan hubungan luar negeri untuk menyelamatkan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, agar tidak didominasi oleh pemerintah Komunisme (Singh, 1996). Amerika Serikat merasa lebih aman apabila pemerintah sipil dipimpin oleh Angkatan Darat, karena mereka adalah kekuasaan satu-satunya di Indonesia yang dapat menghancurkan PKI. Politik luar

negeri Indonesia pada waktu itu dekat dengan negara-negara komunis (Cina dan Uni Soviet) dan melawan kapitalis (USA). Satu-satunya cara untuk mengakhiri PKI adalah Amerika Serikat harus bekerja sama dengan perwira senior Angkatan Darat yang menentang PKI dan yang berani menentang Presiden Soekarno. Sejak tahun 1950-an, Amerika Serikat sering kali menggunakan Angkatan Darat yang menentang Sukarno, untuk membunuhnya tapi selalu gagal (Widjanarko, 1988 : 108-117). Amerika Serikat juga mendukung dan memberi bahan bantuan dan senjata kepada kelompok pemberontak di banyak wilayah di Indonesia yang menentang Presiden Soekarno (Djiwandono, 1996). Keterlibatan Amerika terbukti nyata dengan kecelakaan pesawat yang digunakan oleh pasukan Permesta (Perjuangan Semesta) di Ambon, pada 18 Mei 1958. Pilot yang menerbangkan pesawat tersebut adalah seorang Amerika, Alleen Paus. Dia kemudian mendapatkan hukuman mati oleh Pengadilan Indonesia, namun, melalui diplomasi Amerika Serikat, Alleen Paus akhirnya dibebaskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 Juli 1962.

Pada awal 1950-an, banyak pejabat senior Angkatan Darat Indonesia mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, dan pada tahun 1951 sampai 1957 terdapat sekitar 200 petugas senior yang belajar di Amerika Serikat dan kebanyakan dari mereka adalah dari TNI-AD. Pada pertengahan tahun 1958, jumlah tentara yang belajar di Amerika Serikat adalah 300 orang (Mrazek, 1997 : 30). Data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat sampai 30 Juni 1963, tidak kurang dari 2.050 pejabat senior belajar dan berlatih banyak keterampilan di Amerika (Bachtiar, 1982).

Banyak pemimpin politik di Washington, seperti perencanaan CIA, percaya bahwa untuk waktu yang lama politik perlawanan komunis di Indonesia akan terjadi dengan menghancurkan rezim Presiden Soekarno dan PKI (Scott, 2001 : 32). Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green, di bukunya menulis bahwa TNI-AD dan kelompok yang tidak Komunis di Indonesia adalah keberuntungan, karena Mayor Jenderal Soeharto tidak dibunuh oleh komplotan Gestapu. Ini mungkin karena ia bukan termasuk staf langsung Letnan Jenderal Ahmad Yani atau garis komando di atasnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kebahagiaan USA adalah dengan keberhasilan Soeharto dalam menghancurkan Komunisme di Indonesia. Meskipun Soeharto tidak terlibat dalam politik dan tidak mendapatkan pendidikan militer di USA seperti Letnan Jendral Ahmad Yani dan Jenderal AH (Abdul Haris) Nasution, tetapi Soeharto bukanlah orang asing bagi diplomat Amerika Serikat. Situasi ini diperkuat dengan asumsi bahwa Soeharto dan Amerika (CIA) telah melakukan kerjasama karena mereka sama-sama di posisi menguntungkan. Soeharto tidak benar-benar terkenal dan berarti sebelum 1 Oktober 1965. Soeharto berasal dari keluarga miskin di Jawa Tengah (Roeder, 1969 : 7). Setelah gerakan G30S/PKI, bintang pada bahu Soeharto terus ditambahkan. Karir militer dan politiknya terus bersinar.

Hal ini juga menarik untuk dicatat bahwa Malaysia mendukung kehancuran komunisme di Indonesia dengan memberikan perlindungan politik kepada politikus yang menentang Soekarno, seperti Des Alwi dan Sumitro Joyohadikusumo⁵. Pemimpin Malaysia juga membuat kerjasama secara diam-diam dengan perwira senior TNI-AD. Sejak konfrontasi Indonesia dan Malaysia, para perwira TNI-AD senior diam-diam mengambil tindakan yang berbeda dengan Presiden Soekarno dan pendukungnya. Para pemimpin Tentara dan Angkatan Laut Angkatan tidak setuju untuk melakukan konfrontasi terhadap Malaysia, sehingga mereka membuat sabotase bahwa tidak ada perang dengan Malaysia (Crouch, 1984 : 228).

Pemimpin Angkatan Udara mendukung konfrontasi, terkait dengan hubungan politik Presiden Soekarno dan PKI (Brackman, 1969 : 35). Pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut berpikir bahwa konfrontasi dengan Malaysia akan hanya menguntungkan PKI dan kekuasaan Komunis diperkuat di Asia Tenggara. PKI berada di depan baris dalam konfrontasi melawan Malaysia (Djiwandono, 1996 : 192-193). Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul

⁵ Des Alwi lahir di Banda Neira, Maluku. Dia adalah anak adopsi Sutan Syahrir dan Mohamad Hatta. Sementara itu Sumitro Joyohadikusumo lahir di Jawa Tengah 26 Mei 1917. Ia mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Rotterdam, dan duduk sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 1950-1955. Dia juga terkenal sebagai ahli ekonomi di Indonesia dan menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Syahrir.

Rahman Putra menyatakan bahwa negara-negara Melayu tergantung pada Indonesia, jika sukses mendominasi politik komunis di Indonesia, bangsa Melayu lainnya di Asia Tenggara hanya akan menunggu waktu untuk ditaklukkan oleh Komunis (Singh, 1996). Tanpa disadari Soekarno, pemimpin TNI-AD meminta Des Alwi, yang memiliki hubungan dekat dengan politisi Malaysia untuk memberikan jalan negosiasi perdamaian antara Indonesia dan Malaysia (Pour, 1997 : 328)⁶. Negosiasi perdamaian antara Indonesia dicapai setelah pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1966/1967.

Setelah pemberontakan Gestapu, terdapat demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil dalam rangka perjuangan tiga tuntutan yang dikenal sebagai TRITura (Tiga Tuntutan Rakyat atau Tiga Tuntutan Rakyat), dengan isi memaksa Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI, menurunkan harga barang dan membubarkan Kabinet DWIKORA (Dwi Komando Rakyat)⁷. Presiden Soekarno menolak tuntutan. Dalam pertemuan Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) pada tanggal 15 Januari 1966 di Bogor, ia menuduh bahwa tindakan siswa dipengaruhi oleh NEKOLIM (Neo Kolonialisme dan Imperialisme), terutama oleh CIA (Central Intelligence Agency). Dalam demonstrasi, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, tertembak mati oleh tentara. Situasi ini membuat Jakarta panik, kerusuhan terjadi di mana-mana di Indonesia. Sampai saat ini, tidak ada informasi jelas yang menewaskan Arif Rahman Hakim. Presiden Soeharto pada buku biografinya, tidak ada penjelasan eksplisit mengenai siapa yang menembak Arif Rahman Hakim (Dwipayana & Ramadhan K.H., 1998 : 163).

Menanggapi tindakan mahasiswa yang melawannya, Presiden Soekarno dan pendukungnya mendirikan sebuah organisasi bernama Barisan Soekarno. Banyak siswa yang muncul untuk mendukung organisasi itu, termasuk Organisasi Mahasiswa Universitas Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Presiden

⁶ Ketika belajar di Inggris, Tengku Abdul Rahman Putra, Tunku Abdul Razak dan Senu Abdul Rahman adalah teman kuliah Sutan Syahrir dan Des Alwi. Pemimpin Malaysia tersebut belajar ide-ide kemerdekaan dari Sutan Syahrir yang juga merupakan ayah angkat Des Alwi.

⁷ Konsep Tritura disusun oleh mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di Jakarta yang juga didukung oleh Angkatan Darat.

Soekarno memiliki pendukung cukup banyak yang setuju dengan ide-ide nya berjuang melawan Neo Kolonialisme yang dibuat oleh negara-negara super power. Setelah pemberontakan itu, masih banyak orang yang percaya Soekarno dan berharap bahwa ia bisa membuat perubahan pada krisis politik dan ekonomi di Indonesia. Demonstrasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa yang menentang Presiden Soekarno tidak sendirian; siswa mendapat perlindungan dari TNI-AD, dinyatakan oleh Soeharto pada biografinya, "*Saya terus menerus membuat hubungan dengan mahasiswa, saya mendengarkan ide, keinginan dan harapan mereka*" (Dwipayana & Ramadhan KH, 1998).

Ketika Presiden Soekarno memberi instruksi dalam pertemuan dengan Menteri di Istana Negara di Jakarta pada 11 Maret 1966, di luar istana terdapat banyak sekali pasukan bersenjata tanpa seragam tentara, pasukan tersebut berada di bawah komando Kolonel Kemal Idris. Presiden Soekarno kemudian menghentikan pertemuan dan bersama staf penerbangannya dengan helikopter menyelamatkan diri ke Istana Presiden di Bogor. Penempatan Tentara yang tidak berseragam di sekitar Istana Negara oleh Letnan Jenderal Soeharto adalah jenis tekanan psikologis kepada Presiden Soekarno. Letnan Jenderal Soeharto sengaja menggunakan TNI-AD yang mendukung dia untuk menekan Presiden Soekarno.

Soeharto lalu mengajak tiga perwira senior Angkatan Darat untuk meminta Presiden Soekarno memberikan surat resmi pemindahan kekuasaan untuk menyelamatkan keamanan nasional kepada Soeharto. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari saksi sejarah dan peneliti politik di Indonesia tentang surat pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto yang dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Soeharto, tanpa memberitahu Presiden Soekarno, kemudian menyebarkan kabar tentang PKI dan menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang di Indonesia. Tindakannya tersebut didukung oleh banyak mahasiswa dan organisasi sipil seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), GPA (Gerakan Pemuda Anshor), PMK (Persatuan Mahasiswa Kristen), dan seterusnya.

Setelah kehancuran PKI, organisasi tersebut dengan perlindungan TNI-AD, menuntut untuk mendobrak Rezim Presiden Soekarno.

Letnan Jenderal Soeharto, pada banyak laporan resminya dia terus berkata untuk mendukung dan melindungi Presiden Soekarno, tetapi diam-diam ia mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan Presiden Soekarno. Situasi ini bisa dipahami, jika Soeharto secara terbuka menyatakan oposisi terhadap Presiden Soekarno akan ada telah antipati dari orang-orang dan tentara yang masih setia dan terhormat Presiden Soekarno. Namun, Soekarno di mata Indonesia tidak hanya sebagai Presiden tetapi juga sebagai pemimpin karismatik (Dakhidae, 2003:264)⁸.

Terdapat banyak sekali pendapat para ahli yang beredar mengenai sejarah terjadinya peristiwa G30S/PKI, tentunya hal ini memberikan banyak variasi informasi seputar peristiwa tersebut. Disini penulis mencoba mengulas beberapa tulisan lainnya berupa pendapat dan kesaksian dari beberapa ahli yang menulis tentang sejarah peristiwa G30S/PKI. Pernyataan pertama datang dari kesaksian Dr. H. Soebandrio (Dr. H. Soebandrio. *Kesaksianku tentang G30S*. 18-9-2000), beliau merupakan seorang ahli bedah yang pernah menjadi dokter di Semarang pada masa pemerintah kolonial. Pada tahun 1940, beliau menjadi wakil ketua PSI dan pada tahun 1946 ia ditunjuk oleh Presiden Sukarno menjadi wakil pemerintah Indonesia di Inggris yang berkedudukan di London. Kemudian pada tahun 1954 Presiden Sukarno menariknya dari London dan memindahkannya ke Moscow (resmi menjadi Duta Besar RI untuk Uni Sovyet). Setelah dua tahun di Moscow, Dr. Soebandrio diperintahkan pulang ke Jakarta, setibanya di tanah air ia kemudian ditunjuk oleh Presiden menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri menggantikan Ruslan Abdulgani. Sedangkan Ruslan Abdulgani menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Ali Sastroamijoyo. Setahun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri, kemudian Presiden Sukarno menunjuknya menjadi Perdana Menteri. Sepanjang menjadi pejabat tinggi negara,

⁸ Karismatik adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kualitas khusus dari diri seseorang, di mana ia dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa tidak seperti yang lain. Kekuatan ini diyakini berasal dari Tuhan (Hadiah Allah), dan berdasarkan keyakinan tersebut (irasional) seseorang dipercaya untuk menjadi pemimpin.

terdapat beberapa tokoh PKI yang dekat dengan Dr. Soebandrio. Sebagai pejabat ia akrab dengan pimpinan PKI, D.N. Aidit dan juga beberapa tokoh PKI lainnya. Menurutnya, pada saat itu PKI adalah partai besar, mereka tentunya memiliki ambisi politik tertentu sehingga mereka tidak hanya mendekati Dr. Soebandrio, tetapi juga pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Presiden Sukarno. Beberapa tokoh PKI juga ada yang masuk ke dalam jajaran kabinet dan banyak juga di ABRI. *"PKI pada saat itu memang partai besar dan legal. Jadi, wajar kalau tokohnya duduk di kabinet dan ABRI."* Kemudian ia juga menyebutkan :

"sebagai gambaran, salah satu partai besar saat ini (tidak perlu disebutkan namanya) menempatkan tokohnya di jajaran kabinet. Bahkan, ada yang masuk ke jajaran ABRI, bukankah itu hal yang wajar? Dan, kalau para pimpinan partai itu mendekati pimpinan puncak, presiden dan orang-orang terdekatnya, juga wajar. Kondisinya berubah menjadi tidak wajar setelah partai tersebut dinyatakan sebagai partai terlarang. Itulah PKI."

Pada saat G30S meletus, Dr. Soebandrio tidak berada di Jakarta. Ia melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut Turba (Turun ke Bawah). Pada 28 September 1965 ia berangkat ke Medan, Sumatera Utara. Beberapa waktu sebelumnya ia keliling Jawa Timur dan Indonesia Timur. Saat ke Medan rombongannya berangkat bersama rombongan Laksamana Muda Udara Sri Muljono Herlambang. Misinya adalah mematangkan Kabinet Dwikora. Pada 2 Oktober 1965 beliau ditelepon oleh Presiden Sukarno dan diberitahu kejadian sehari sebelumnya, pada hari itu juga ia diperintahkan untuk segera ke Jakarta. Sehari sebelumnya, peristiwa hebat terjadi di Jakarta. Tujuh perwira AD diculik yang kemudian dibunuh pada dini hari. Beliau mendapat laporan dari para kolega dan para intel anak buahnya di BPI. Adapun rangkaian informasi yang diterimanya tentang kejadian seputar 30 September 1965 hingga pembunuhan para jenderal itu sebagian ia catat, sebagian tidak.

"Saya masih ingat hampir seluruhnya. Semua informasi yang saya terima, termasuk berbagai gejala yang sudah saya ketahui sebelumnya, dapat saya ungkapkan di sini. Namun paparan saya akan terasa kurang menimbulkan kenangan yang kuat jika tidak dibandingkan dengan sejarah versi Orde Baru. Itu sebabnya, di beberapa bagian saya kutip sebagian cerita versi Soeharto sebagai pembanding."

Berdasarkan tulisannya tentang peristiwa G30S/PKI, pada tanggal 29 September 1965 pagi hari, Panglima AU Umar Dhani⁹ melaporkan kepada Presiden Sukarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta.

"Beberapa waktu sebelumnya, saya melaporkan kepada Bung Karno adanya sekelompok perwira AD yang tidak puas terhadap Presiden - yang menamakan diri Dewan Jenderal - termasuk bocoran rencana Dewan Jenderal membentuk kabinet. Saya juga melapor tentang Dokumen Gilchrist. Semua laporan bertumpuk menjadi satu di benak Bung Karno. Dengan akumulasi aneka laporan yang mengarah pada suatu peristiwa besar itu, saya yakin Bung Karno masih bertanya-tanya, apa gerakan yang bakal terjadi."

Namun G30S sebagai suatu kekuatan sebenarnya sudah ditentukan jauh sebelum peristiwanya meletus. Dari perspektif Soeharto, masa hidup gerakan ini tidak ditentukan oleh kekuatannya melainkan oleh masa kegunaannya. Setelah para jenderal dibantai, maka habislah masa kegunaan G30S. Dan sejak itu pula masa hidupnya harus diakhiri. Meskipun Untung, Latief dan Soepardjo¹⁰ berupaya ingin mempertahankan kelanggengan G30S, tetapi umurnya hanya beberapa jam saja. Setelah itu pelakunya diburu dan dihabisi. Soeharto dengan melikuidasi

⁹ Marsekal Madya TNI Purn. Omar Dhani adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara periode 1962-1965. Terkait dengan peristiwa 30 September 1965, ia dituduh membiarkan dan memberikan tempat berlatih bagi Gerwani dan yang di tuduh PKI di kawasan Halim yang merupakan daerah kekuasaannya pada masa itu.

¹⁰ Soepardji Rustam adalah seorang tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada masa Kabinet Pembangunan V. Ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia (1972-1974) dan Gubernur Jawa Tengah (1974-1982).

G30S menimbulkan kesan bahwa ia setia kepada atasannya, Yani dan teman-teman jenderal yang dibunuh. Ia tampil sebagai pahlawan.

Soal Mengapa Dewan Jenderal diculik, bukan dihadapkan ke Presiden, ada pengakuan dari salah satu pelaku penculikan. Menurut Serma Boengko¹¹ (Komandan Peleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan) yang memimpin prajurit penjemput Mayjen MT Haryono, di militer tidak ada perintah culik. Yang ada adalah tangkap atau hancurkan.

“Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Cakra Bhirawa Tawur dan Komandan Batalyon Untung adalah tangkap para jenderal itu”, kata Boengko¹¹ setelah ia bebas dari hukuman.

Namun MT Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperbolehkan masuk rumah oleh istri MT Haryono. Sang istri curiga, suaminya dipanggil Presiden kok dini hari. Karena itu pintu rumah tersebut didobrak dan MT Haryono tertembak. Tidak jelas apakah Haryono langsung tewas di tempat atau dibunuh kemudian setelah semua jenderal dikumpulkan di Pondok Gede (Lubang Buaya). Pernyataan ini agaknya penulis anggap tidak sesuai seperti yang digambarkan pada film Pengkhianatan G30S/PKI, karena pada saat penculikan MT Haryono, tidak terdapat penggambaran dimana istri MT Haryono tidak memperbolehkan rombongan pasukan masuk rumah. Malahan pasukannya sendiri dengan inisiatif masuk karena istri MT Haryono membiarkan pintu rumahnya terbuka.

Sedangkan saat dijemput oleh sejumlah pasukan di rumahnya, Letjen A Yani terkejut. Bukan karena penjemputnya pasukan berseragam loreng, tetapi karena pada hari itu ia memang dijadwalkan untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka, pada pukul 08.00 WIB. Presiden sedianya akan bertanya kepada Yani soal Angkatan Kelima. Yani menolak ide Presiden tentang Angkatan Kelima sejak beberapa waktu sebelumnya. Malah sudah beredar isu bahwa Yani

¹¹ Serma Boengko¹¹ adalah Komandan Peleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang berada di bawah Letkol. Untung.

akan digantikan oleh wakilnya yaitu Gatot Subroto. Hal ini sesuai dengan yang diilustrasikan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI dimana Ahmad Yani memang menolak adanya pembentukan Angkatan Kelima. Namun pernyataan ini tidak memberikan alasan mengapa Yani tidak setuju seperti yang diilustrasikan di dalam film.

Dengan dijemput tentara dini hari mungkin Yani merasa pertemuan dengan Presiden Soekarno diajukan beberapa jam. Ia dibangunkan dari tidurnya oleh istrinya dan masih mengenakan piyama. Meskipun kedatangan tentara penjemputnya menimbulkan kegaduhan di keluarga Yani yang terkejut, namun Yani menurut. Ia menyatakan kepada penjemputnya akan ganti pakaian. Tetapi ketika tentara penjemputnya menyatakan Tidak perlu ganti baju, jenderal, maka seketika Yani menempeleng tentara tersebut. Perkataan prajurit seperti itu terhadap jenderal memang sudah luar biasa tidak sopan. Lantas Yani masuk ke kamar untuk ganti pakaian. Yani diberondong tembakan.

"Untuk penculikan para jenderal yang lain mungkin cerita saya mirip dengan yang sudah banyak ditulis di berbagai buku, baik versi Orde Baru maupun buku yang terbit setelah Soeharto tumbang. Kurang lebih mirip seperti itu sehingga tidak perlu saya ceritakan lagi."

Menurut Dr. Soebandrio, yang penting peristiwa berdarah di pagi buta pada tanggal 1 Oktober 1965 (G30S) itu sampai kini masih ditafsirkan secara berbeda-beda, baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi jelas substansi peristiwa itu tidak seperti mitos yang dibuat AD yakni percobaan kudeta yang didalangi oleh PKI.

"Versi AD ini sama sekali tidak benar!"

Lebih lanjut lagi, Dr. Soebandrio mengatakan peristiwa itu merupakan provokasi yang didalangi oleh jenderal-jenderal fasis AD didukung dengan baik oleh imperialisme internasional. Peristiwa itu adalah provokasi yang dimanipulasi

secara licik dan efektif serta dikelola secara maksimal oleh seorang fasis berbaju kehalusan feodal Jawa yang haus kekuasaan dan harta. Dialah Panglima Kostrad Mayjen Soeharto.

Pada sisi intern, peristiwa itu bukan hanya merupakan puncak manifestasi konflik antara pimpinan AD dan PKI, tetapi juga pertentangan antara pemimpin politik konservatif dengan aspirasi kapitalisme yang pembangunannya bergantung pada imperialisme internasional di satu pihak, melawan PKI dengan prinsip politik anti-imperialisme dengan aspirasi negara yang merdeka penuh dan demokrasi berkeadilan sosial di pihak lain.

Peristiwa itu adalah puncak kemunafikan para pemimpin politik konservatif yang mengklaim sebagai paling demokrat dari sistim demokrasi parlementer. Mereka berhadapan dengan kemajuan-kemajuan pesat PKI yang dicapai secara damai dalam sistim demokrasi liberal. Dari konflik tersebut para pimpinan AD dan sekutunya lantas mencabut hak hidup PKI dengan cara mambantai anggota dan keluarganya, lantas membubarkan PKI.

Dari kacamata internasional - terutama disebarakan oleh mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones - peristiwa itu adalah spontan kekejian rakyat yakni penyembelihan rakyat yang dilakukan PKI. Sebaliknya ini adalah bagian dari intrik berdarah yang direncanakan secara seksama di Mabes Kostrad pimpinan Soeharto.

Selanjutnya, menurut sejarawan John Roosa dalam bukunya, *Dalih Pembunuhan Massal: G.30.S dan Kudeta Soeharto*, ia mengatakan tanpa informasi baru mengenai G30S, orang hanya dapat mengunyah ulang fakta-fakta yang sudah diketahui umum yang tidak memuaskan dan menambah spekulasi yang sudah demikian banyak. Kendati demikian, perdebatan masih saja mempersoalkan siapa dalang pembunuhan jenderal dan sibuk menuduh tanpa dilengkapi bukti kuat, kecuali serangkaian asumsi yang nilai kebenarannya masih perlu dikaji lagi. Sementara itu, sebagian besar masyarakat (dan sebagian elite) terlanjur percaya pada monoversi Orde Baru yang menjadikan PKI satu-satunya dalang.

Roosa berpendapat bahwa Orde Baru adalah rezim yang setia kepada sesuatu yang bukan peristiwa, melainkan kepada suatu fantasi yang dibuatnya sendiri. Sebuah "Kesetiaan kepada citra khayali (simulakrum)," tulis Roosa, mengutip filsuf Alain Badiou. Sehingga "kebenaran" dalam narasi versi Orde Baru diupayakan agar bisa menjadi seolah-olah menyerupai peristiwa yang sesungguhnya. Dan itulah yang selama bertahun-tahun disebarluaskan dan diajarkan kepada masyarakat secara berulang-ulang sampai pada titik kebohongan itu menjadi kebenaran yang tak bisa lagi digugat bahkan dipertanyakan.

Setelah itu terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Ben Anderson mengenai matinya para perwira tinggi Angkatan Darat pada peristiwa 30 September 1965 (*diakses melalui <http://www.scribd.com>*). Menurut Ben Anderson, terdapat sebuah laporan yang disusun oleh sebuah tim terdiri dari lima orang ahli kedokteran forensik, yang telah memeriksa mayat-mayat enam orang jenderal (Ahmad Yani, Suprpto, S. Parman, Sutojo, Harjono, dan D.I. Pandjaitan), dan seorang letnan muda (Piere Tendean) yang terbunuh pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Laporan mereka yang lugas merupakan lukisan paling obyektif dan tepat yang pernah dimiliki, tentang bagaimana tujuh orang itu mati. Mengingat kontroversi yang telah lama tentang masalah ini, dan berita-berita yang disajikan oleh surat kabar dan majalah umum berlain-lainan, maka Ben Anderson memandang perlu menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya untuk kepentingan kalangan ilmiah.

Bagian atas setiap *visum et repertum* (otopsi) menunjukkan bahwa tim tersebut bekerja pada hari Senin tanggal 4 Oktober, atas perintah Mayjen Suharto selaku Komandan KOSTRAD ketika itu, kepada kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Tim terdiri dari dua orang dokter tentara (termasuk Brigjen Roebono Kertopati yang terkenal itu), dan tiga orang sipil ahli kedokteran forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di antara ketiga orang ini yang paling senior ialah Dr. Sutomo Tjokronegoro, ketika itu ahli paling terkemuka dalam kedokteran forensik di Indonesia. Tim bekerja sama selama 8 jam, yaitu dari pukul 4.30 sore tanggal 4 Oktober sampai 12.30 lewat tengah malam tanggal 5 Oktober, bertempat di Kamar Bedah RSPAD. Jelas mereka harus

bekerja cepat, oleh karena dari berita-berita pers kita ketahui mayat-mayat itu baru bisa diangkat dari lubang sumur di Lubang Buaya (di mana para pembunuh telah melemparkannya) menjelang siang tanggal 4 Oktober, lebih 75 jam setelah pembunuhan terjadi.

Dalam jangka waktu itu, dalam iklim tropis bisa diperkirakan mayat sudah sangat membusuk. Dan sesudah hari siang, Selasa tanggal 5 Oktober, mayat-mayat itu dimakamkan dengan upacara militer di Taman Pahlawan Kalibata. Satu hal yang pasti patut diperhatikan. Mengingat bahwa otopsi itu dilakukan atas perintah langsung Mayjen Suharto, maka kiranya tidak akan mungkin jika laporan para dokter tersebut tidak segera disampaikan kepadanya, segera setelah tugas dilaksanakan.

Tujuh buah laporan itu masing-masing disusun menurut bentuk yang sama, pernyataan adanya perintah Mayjen Suharto kepada lima orang ahli itu;

1. identifikasi atas mayat;
2. deskripsi tubuh, termasuk pakaian atau hiasan-hiasan badan;
3. uraian rinci tentang luka-luka;
4. kesimpulan tentang waktu dan penyebab kematian;
5. pernyataan di bawah sumpah dari kelima ahli itu,
6. bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sepenuh-penuhnya dan sebagaimana mestinya.

Karena gambaran umum tentang matinya tujuh tokoh itu, seluruh masyarakat pembaca di Indonesia tahun 1965, harus banyak bersandar pada apa yang diberitakan oleh dua surat kabar tentara, yaitu *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*, serta dinas informasi ABRI yang memasok surat kabar-surat kabar tersebut. Walaupun ada beberapa surat kabar non-militer yang tetap terbit, namun pers kiri telah ditindas pada petang hari tanggal 1 Oktober, sedangkan radio dan televisi yang dikuasai negara, dan telah ada di tangan militer sepenuhnya menjelang 1 Oktober, tidak mengudara.

Karena itu perlu diperbandingkan berita-berita yang disajikan oleh surat kabar-surat kabar tentara tersebut, dengan ini laporan dari para ahli kedokteran yang ditunjuk militer yang selesai tersusun pada hari Selasa tanggal 5 Oktober, yang bisa kita simpulkan dari dokumen-dokumen lampiran itu. Mengingat bahwasanya dua surat kabar tersebut adalah harian-harian pagi, sehingga edisi 5 Oktober mereka mungkin sudah "ditidurkan" sementara para dokter masih menyelesaikan pekerjaannya, maka tidak aneh bila pemberitaan mereka tentang hari itu barangkali tergesa-gesa, tanpa memanfaatkan informasi yang panjang lebar itu. *Angkatan Bersenjata* memuat beberapa buah foto kabur mayat-mayat yang telah membusuk, dan menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai "perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan". Berita Yudha yang selalu lebih garang, mengatakan bahwa mayat-mayat itu penuh dengan bekas-bekas penyiksaan. "Bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh pahlawan kita." Mayjen Suharto sendiri dikutip menyatakan, "jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala (jenazah-jenazah itu), betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan 'Gerakan 30 September'".

Suratkabar itu meneruskan dengan menggambarkan saat-saat terakhir kehidupan Jendral Yani, mengatakan bahwa sesudah ditembak rubuh di rumahnya, ia dilemparkan hidup-hidup ke dalam sebuah truk dan terus menerus disiksa sampai "penyiksaan terakhirnya di Lubang Buaya." Bukti-bukti tentang penyiksaan ini ditunjukkan dengan adanya luka-luka pada leher dan mukanya, dan kenyataan bahwa "anggota-anggota tubuhnya tidak sempurna lagi". Apa yang dimaksud oleh kata-kata yang agak kabur itu menjadi lebih jelas pada hari-hari berikut. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober, *Angkatan Bersenjata* menyatakan bahwa "matanya (Yani) dicungkil". Berita ini dikuatkan dua hari kemudian oleh *Berita Yudha* dengan menambahkan bahwa muka mayat itu ditemukan terbungkus dalam sehelai kain hitam. Pada tanggal 7 Oktober itu juga *Angkatan Bersenjata* melukiskan lebih lanjut, tentang bagaimana Jendral Harjono dan Jendral Pandjaitan tewas oleh berondongan tembakan senjata api di rumah masing-

masing, lalu mayat mereka dilempar ke dalam sebuah truk yang menghilang dalam kegelapan malam dengan "deru mesinnya yang seperti harimau haus darah". Sementara itu *Berita Yudha* memberitakan tentang bekas-bekas siksaan pada kedua tangan Harjono.

Pada tanggal 9 Oktober *Berita Yudha* memberitakan, bahwa meskipun muka dan kepala Jendral Suprpto telah dihancurkan oleh "penteror-penteror biadab", namun ciri-cirinya masih bisa dikenali. Pada Letnan Tendean terdapat luka-luka pisau pada dada kiri dan perut, lehernya digorok, dan kedua bola matanya "dicungkil". Harian ini pada hari berikutnya mengutip saksi mata pengangkat mayat bulan Oktober itu, yang mengatakan bahwa di antara kurban beberapa ada yang matanya keluar, dan beberapa lainnya "ada yang dipotong kelaminnya dan banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan dan di luar perikemanusiaan." Dalam penjelasan paragraf-paragraf sebelumnya, informasi mengenai korban peristiwa G30S melalui surat kabar agaknya memiliki persamaan mendasar seperti yang dijelaskan pada film Pengkhianatan G30S/PKI. Hal ini dilihat dari penjelasan bagaimana jenderal-jenderal tersebut dibunuh secara sadis dengan melakukan penembakan, melakukan pemotongan alat vital bahkan sampai adegan pencungkilan mata.

Pada tanggal 11 Oktober *Angkatan Bersenjata* menulis panjang lebar tentang matinya Tendean, dengan menyatakan bahwa ia mengalami siksaan luar biasa di Lubang Buaya, sesudah diserahkan kepada para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Ia dijadikan benda "permainan jahat" perempuan-perempuan ini, digunakan sebagai "bulan-bulanan sasaran latihan menembak sukwati Gerwani."

Begitu surat kabar-surat kabar tentara memulai, maka yang lain pun segera serta merta mengikuti. Misalnya *Api Pantjasila*, orang partai IPKI yang bernaung di bawah militer, pada tanggal 20 Oktober memberitakan, bahwa "alat pencungkil" yang digunakan untuk jendral-jendral itu telah ditemukan oleh pemuda-pemuda anti komunis, ketika mereka menyerbu gedung-gedung Partai Komunis, di desa Harupanggang di luar kota Garut. Walaupun tanpa diterangkan, mengapa partai tersebut memandang desa itu cocok untuk menyimpannya.

Pada tanggal 25 Oktober surat kabar ini juga memuat pengakuan seseorang bernama Djamin, anggota organisasi pemuda Partai Komunis, Pemuda Rakyat, yang mengatakan telah menyaksikan bagaimana Jendral Suprpto telah disiksa "di luar batas kesusilaan" oleh anggota-anggota Gerwani.

Pengakuan-pengakuan serupa itu dimuat berturut-turut, dan memuncak pada cerita menarik tentang Nyonya Djamilah, disiarkan pada tanggal 6 Oktober oleh Dinas Penerangan ABRI kepada seluruh kalangan pers. Nyonya Djamilah diceritakan sebagai hamil tiga bulan, pimpinan Gerwani dari Pacitan berumur lima belas tahun, mengaku bahwa ia dan kawan-kawannya di Lubang Buaya telah menerima pembagian pisau kecil serta silet dari anggota-anggota pasukan Gerakan 30 September.

Lalu mereka, yang seluruhnya berjumlah seratus orang itu, mengikuti perintah orang-orang itu pula, mulai memotong dan menyayat-sayat kemaluan jendral-jendral yang telah mereka tangkap itu. ("Dibagi-bagikan pisau kecil dan pisau silet... menusuk-nusuk pisau pada kemaluan orang-orang itu. *Api Pantjasila*, 6 November 1965).

Malahan tidak berhenti di situ saja. Antara yang telah dikuasai militer itu, pada tanggal 30 November melukiskan bagaimana orang-orang Gerwani itu dengan mudahnya telah menyerahkan tubuh mereka kepada para personel AURI yang ikut serta dalam Gerakan 30 September. Sementara itu pada tanggal 13 Desember *Angkatan Bersenjata* melukiskan mereka bertelanjang menarikan "Tarian Bunga Harum" di bawah pimpinan Ketua Partai Komunis Dipa Nusantara Aidit, sebelum terjun dalam pesta pora massal bersama para anggota Pemuda Rakyat.

Di dalam cerita-cerita yang memenuhi surat kabar selama bulan-bulan Oktober, November dan Desember ini - sementara itu pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Partai Komunis terus berjalan -- terkandung dua hal yang sangat menarik diperhatikan. Pertama, ditiup-tiupkan bahwa tujuh kurban itu mengalami siksaan yang mengerikan - khususnya dicungkil mata dan dipotong kemaluan mereka; kedua, ditonjolkan bahwa pelaku-

pelaku kejahatan adalah orang-orang sipil dari organisasi yang berafiliasi dengan komunis.

Apakah yang diberitakan kepada kita oleh laporan para ahli forensik pada tanggal 5 Oktober itu? Pertama, dan terutama, bahwa tidak ada satu biji mata pun dari para kurban yang telah dicungkil, dan bahwa semua kemaluan mereka pun masih utuh. Kepada kita bahkan diberitakan bahwa empat berkhitan dan tiga tidak berkhitan. Kecuali itu, barangkali perlu kurban-kurban itu dibagi ke dalam dua golongan: mereka yang dengan sebagian besar bukti non-forensik menunjukkan telah dibunuh dengan ditembak selagi masih di rumah oleh para penculik mereka, yaitu Jendral Yani, Jendral Pandjaitan, dan Jendral Harjono; dan mereka yang dibunuh sesudah dibawa ke Lubang Buaya, yaitu Jendral Parman, Jendral Suprpto, dan Jendral Sutojo, serta Letnan Tendean. Berita paling lengkap tentang kematian mereka terbit jauh sesudah peristiwa terjadi: tentang Yani dalam *Berita Yudha* tanggal 5 Desember; Pandjaitan dalam *Kompas* tanggal 25 Oktober; *Berita Yudha* Minggu tanggal 21 November, dan *Berita Yudha* tanggal 13 Desember; dan Harjono dalam *Berita Yudha* Minggu tanggal 28 November. Semua pemberitaan menunjukkan, bahwa jendral-jendral itu telah dibunuh dengan mendadak dan seketika di rumah dengan berondongan tembakan yang dilakukan oleh anggota-anggota Resimen Kawal Cakrabirawa, di bawah pimpinan operasi Lettu Doel Arief. Laporan para ahli forensik pada paragraf ini menggambarkan bahwasanya mayat para jenderal yang dibunuh ternyata tidak terdapat hasil visum yang menyatakan mereka disiksa seperti dicungkil matanya atau dipotong kemaluannya. Sepertinya laporan dari para ahli forensik ini tidak sesuai dengan penggambaran bagaimana para jenderal dibunuh seperti yang diilustrasikan dalam film. Sehingga informasi antara laporan para ahli forensik dengan informasi yang dimunculkan dalam film menjadi bertentangan.

Gambaran demikian hanya sebagian saja dibenarkan oleh laporan forensik. Para ahli forensik itu menyatakan bahwa luka-luka pada tubuh Yani sajalah yang merupakan sepuluh luka tembak masuk dan tiga tembus. Pandjaitan mengalami tiga luka tembak pada kepala, serta luka robek kecil di tangan. Pada luka-luka yang dialami Harjono timbul tanda tanya, karena tidak disebut-sebut sebagai

akibat tembakan. Penyebab kematiannya rupanya adalah torehan panjang dan dalam pada bagian perut, luka yang lebih mungkin disebabkan oleh bayonet ketimbang pisau lipat atau silet. Sebuah luka serupa yang tak mematikan terdapat pada punggung korban. Cedera lain satu-satunya digambarkan "pada tangan dan pergelangan tangan kiri, luka-luka disebabkan oleh barang tumpul."

Tak ada cara lain yang lebih tepat untuk menafsirkan luka-luka ini kecuali harus mengatakan, bahwa luka-luka tersebut tidak mungkin karena siksaan - jarang penyiksa memilih pergelangan kiri dalam melakukan pekerjaan mereka - dan luka itu barangkali karena mayat itu dilempar ke dalam sumur di Lubang Buaya yang 36 kaki dalamnya

IV.1.6 Tentara dan Rezim Orde Baru di Indonesia

TNI-AD menamakan pemerintahannya secara politik dengan Orde Baru. Tujuan pemerintah Orde Baru, menurut Presiden Soeharto, adalah untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Nasution, 1984:435). Sementara itu Orde Lama oleh pemerintah Orde Baru digunakan untuk menggambarkan sebagai periode yang penuh kegelapan, keterbelakangan dan penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Soeharto, di awal Orde Baru juga menduduki kepala Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Pemimpin ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Kekuasaan yang luas dan kuat Jenderal Soeharto membuatnya sukses mendominasi seluruh Angkatan Darat. Presiden Soeharto menyadari bahwa tanpa mendominasi kekuasaan Angkatan Darat, ia akan menghadapi banyak kesulitan dalam menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi pembangunan di Indonesia. Alasan mengapa ada banyak masalah politik terjadi di era Presiden Soekarno adalah karena Soekarno gagal mendominasi Angkatan Darat. Angkatan Darat di era Presiden Soekarno membuat banyak ketidaktaatan terhadap politik kebijakannya yang dianggap mendukung pertumbuhan Komunisme di Indonesia. Angkatan Darat juga merupakan aktor dibalik setiap tindakan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno (Sofhian, 1991; Bhakti, 1999; dan Honna, 2002).

Pada awal pemerintahan Orde Baru, berbagai cara pandang terjadi di antara perwira senior TNI-AD tentang pendirian Orde Baru. Kelompok pertama menginginkan berdirinya Orde Baru dimulai dengan pemenuhan utama yang diperlukan dan tidak untuk melakukan pembangunan politik. Hal ini didasarkan pada pengalaman era Presiden Soekarno dimana politik adalah prioritas; dan sebagai hasilnya, ekonomi dan perkembangan pendidikan tertinggal. Namun, kelompok kedua ingin pembangunan diterapkan di semua bidang, terutama dalam mentalitas, politik, birokrasi dan penegakan hukum (untuk menghancurkan korupsi di Indonesia). Ide ini muncul di kalangan intelektual dan idealis seperti Jenderal A.H. Nasution yang tidak ingin pemerintah Orde Baru menjadi pemerintahan otoriter dan militer yang lekat dengan korupsi (Nasution, 1984; dan Koonings & Kruijtit, 2002). Terdapat juga banyak celah-celah di antara Jenderal TNI-AD tentang konsep pengembangan Orde Baru. Kritik umum lainnya dimulai ketidaksetujuan dengan Soeharto untuk terus memperpanjang kekuatan politik. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan beberapa pejabat senior yang tidak setuju dengan kebijakan Orde Barunya.

Untuk memperkuat kekuasaan politiknya, Pemilihan Umum atau Pemilu pada tahun 1968 tertunda oleh Presiden Soeharto sampai 1971 (Nasution, 1984:386). Jika Pemilihan Umum telah dilakukan pada waktu itu, Soeharto akan sulit untuk dipilih sebagai Presiden. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan seperti berikut ini :

Pertama, Jenderal Soeharto tidak memiliki partai politik yang mendukungnya, sehingga Soeharto membutuhkan lebih banyak waktu untuk dapat menemukan pihak yang kuat yang dapat mengakomodasi kepentingan Angkatan Darat dan dirinya sendiri.

Kedua, meskipun Soekarno telah menjadi tahanan politik, pengaruh Soekarno masih kuat di Angkatan Darat dan masyarakat. Presiden Soekarno bisa saja hancur secara politis, tapi secara kultur pengaruh Soekarno masih kuat di masyarakat dan militer. Dengan kekuatan TNI-AD, Soeharto berusaha untuk menghancurkan kekuasaan politik Soekarno dalam partai, seperti PKI (Partai

Komunis Indonesia) dan PNI (Partai Nasional Indonesia atau Partai Nasional Indonesia).

Ketiga, Jenderal A.H. Nasution, ketua MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) masih memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Simpati dari banyak Partai Islam untuk Jenderal A.H. Nasution setelah Gestapu sangat tinggi. Jenderal A.H. Nasution dipandang memiliki pemahaman Islam yang jelas. Berbeda dengan Presiden Soeharto yang dikelilingi dan dipengaruhi oleh beberapa Jenderal muslim yang tidak benar-benar mengikuti persepsi Islam. Jenderal A.H. Nasution tidak siap untuk calon dirinya sebagai Presiden, karena jika dia menggantikan Soekarno sebagai Presiden, isu reformasi oleh Dewan Umum terhadap Soekarno pasti akan dilakukan oleh masyarakat (wawancara dengan Abdul Kadir Besar, 2004/05/10). Jenderal A.H. Nasution juga memiliki konflik yang berakar dengan banyak perwira senior TNI-AD dan Presiden Soekarno. Ia dinilai sebagai seorang pejabat intelektual yang memiliki ambisi politik tinggi, terbukti dengan peristiwa 17 Oktober 1952 dan Dekrit Presiden 5 Juni 1959, di mana Jenderal AH Nasution memiliki keterlibatan yang besar di dalamnya.

Presiden Soeharto pada tahun 1966 membangun kelompok baru politik yang dikenal sebagai Bantuan Swasta (Aspri atau Asisten Pribadi). Mayor Jenderal Alamsyah Ratu Prawiranegara menjabat sebagai kepala Aspri. Salah satu tugas Aspri utama adalah untuk mengurus banyak hal, seperti politik dan intelijen nasional, intelijen politik luar negeri, moneter dan Pemilihan Umum. Peran Aspri dalam awal Orde Baru sangat penting dan memiliki banyak tugas. Banyak orang mengatakan Staf Aspri dengan idiom negatif Super Kabinet, karena *over acting* yang dilakukan dari beberapa staf Aspri.

Mahasiswa memandang bahwa Bantuan Swasta banyak melakukan intervensi cabinet tugas menteri. Presiden Soeharto yang pada waktu itu memerlukan dukungan politik dari mahasiswa, harus setuju dengan tuntutan siswa untuk menetapkan Aspri. Mayor Jenderal Ali Murtopo dan Mayor Jenderal Sudjono Humardani masih dipertahankan oleh Presiden Soeharto sebagai Aspri dengan alasan untuk menghancurkan kekuatan partai-partai oposisi (Crouch,

1984:11). Mayor Jenderal Ali Murtopo dan Mayor Jenderal Sudjono Humardani bekerja sama dengan para ilmuwan CSIS (Pusat Studi Strategis dan Internasional) yang didirikan pada tahun 1971. Pada awalnya, CSIS menjadi tempat untuk penyusunan berbagai keputusan penting (*think tank*) yang akan dilakukan oleh pemerintah Orde Baru (Nasution, 1984:283; Penders & Sundhaussen, 1985; dan Dhakidae, 2003).

Mayor Jenderal Ali Murtopo dengan operasi khususnya berhasil mendapatkan dukungan dari perwira senior Angkatan Darat, birokrasi, sipil, dan kelompok ilmuwan untuk mendirikan organisasi yaitu GOLKAR (Golongan Karya). GOLKAR meski tadinya berfungsi sebagai partai politik, pemerintah Orde Baru tidak menyatakan Golkar sebagai partai politik (Bhakti, 1999:32). Partai politik oleh pemerintah Orde Baru dikeluarkan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan cenderung menyebabkan kerusakan. Meskipun ideologi GOLKAR adalah sekuler (Pancasila) yang sama dengan ideologi Angkatan Darat Indonesia (militer) (Sapta Marga dan Sumpah Prajurit), tetapi anggota GOLKAR dan pemerintah harus menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk mencari dukungan dari kelompok Islam (Suryadinata, 1982:15). Para prajurit TNI-AD memiliki kewenangannya sejak tahun 1965, tetapi mereka tidak punya konsep dalam menata bangsa ini. Apakah mereka mengatur bangsa ini melalui pemerintahan militer atau partai politik yang akan berdiri di atas kepentingan tentara? Para prajurit kemudian memilih menggunakan GOLKAR untuk mewakili kepentingan mereka (Suryadinata, 1982:25-26).

Untuk membuat GOLKAR sebagai partai besar dan kuat dalam waktu dekat, Presiden Soeharto menggunakan Komando Teritorial di TNI-AD dari tingkat desa untuk mendukung GOLKAR. Masyarakat Indonesia yang masih dalam ketakutan akan pembunuhan anggota PKI oleh prajurit memilih untuk mengikuti keinginan politik Angkatan Darat. Tentara sering menuduh masyarakat sipil yang tidak memilih GOLKAR sebagai PKI (Sulistyo, 2000). Rezim Orde Baru dengan menggunakan kekuatan TNI-AD mencoba untuk melemahkan partai-partai politik sipil untuk tumbuh dalam waktu yang lama dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Indonesia (Crouch, 1984:285-291). Partai

dengan ideologi keagamaan yang telah dilarang oleh Presiden Soekarno karena memberontak terhadapnya seperti partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) juga dilarang oleh Presiden Soeharto. Para anggota partai Masyumi telah berjasa besar dalam menghancurkan PKI dan menciptakan pemerintah Orde Baru (Yayasan Piranti Ilmu, 1992:29-33).

Presiden Soeharto dan pendukungnya yang umumnya dari bukan Tentara dengan pengaruh agama yang kuat sangat takut dengan munculnya partai ideologi agama (Islam). Mereka memandang kekuatan Islam sebagai ancaman yang berbahaya, setelah PKI. Kekuatan Politik Islam bersama-sama dengan Angkatan Darat menghancurkan PKI, mulai ditinggalkan oleh rezim Orde Baru. Di sisi lain, Kristenisasi di Indonesia menjamur dan mendapat perhatian besar dari negara-negara Timur Tengah (Nasution, 1984:302; dan Yayasan Piranti Ilmu, 1992).

Pemilihan Umum atau PEMILU (Pemilihan Umum) Hasil tahun 1971 menunjukkan bahwa GOLKAR sebagai partai baru yang didirikan oleh pemerintah Soeharto berhasil mengumpulkan suara mayoritas (62,8%). Menurut majalah Tempo, 28 Mei 1977, kemenangan GOLKAR dalam pemilihan itu dipandang oleh banyak pihak sebagai akibat dari kerja keras Angkatan Darat dengan menggunakan kekerasan dan cara *unfired*. Jenderal Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden melalui musyawarah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2 Oktober 1972 (Liddle, 1994; dan Feith, 1999).

IV.1.7 Dwifungsi ABRI

Konsep dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dahulu dikatakan oleh kepala staf TNI-AD, Letnan Jenderal A.H. Nasution, pada HUT Akademi Militer Nasional di Magelang pada 12 November 1958. Letnan Jenderal AH Nasution menyatakan bahwa Indonesia Tentara tidak harus mengikuti sikap politik Angkatan Darat di negara-negara Amerika Latin yang mengambil alih kekuasaan politik pemerintahan sipil. Tapi, Indonesia Angkatan Darat juga tidak harus sama seperti Angkatan Darat di Eropa Barat yang pasif politik. Indonesia Angkatan Darat harus mengambil jalan tengah dari kedua sikap

politik, TNI (Angkatan Darat) tidak akan mengambil kekuasaan politik secara keseluruhan melalui reformasi dan tidak akan hanya menjadi penonton di arena politik (Nasution, 1965; dan Bhakti, 1999:48).

Pada era Orde Baru, konsep ganda ABRI berfungsi memberikan kesempatan untuk TNI-AD menjadi tokoh utama pemerintah Orde Baru (Dwipayana & Ramadhan K.H., 1998:369). Melalui konsep kerja (bagian dari berfungsi ganda konsep ABRI), pemimpin Tentara Angkatan Darat menempatkan anggotanya pada pekerjaan pemerintah sipil, diplomasi dan legislatif. Meskipun jumlah Tentara di Parlemen tidak mayoritas, pemimpin Angkatan Darat seharusnya berperan dalam menentukan pemilihan Presiden, Gubernur, dan Bupati. Partai politik memilih untuk mendukung calon yang ditunjukan oleh ABRI, mereka tidak ingin mengambil resiko menentang politik ABRI.

Dalam menyusun Kabinet, Angkatan Darat digunakan untuk diberikan Menteri pekerjaan, bahkan meskipun mereka tidak memiliki keanggotaan pada posisi yang mereka tempati. Penempatan para perwira senior Angkatan Darat dalam kabinet kementerian didasarkan pada pentingnya otoritas politik Orde Baru, tidak didasarkan pada keanggotaan yang mereka miliki. Misalnya, Mayor Jenderal M. Jusuf, yang tidak memiliki keanggotaan dalam bisnis diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Industrialisasi dan Perdagangan pada Kabinet Pembangunan I (Kabinet Pembangunan I). Dalam Kabinet, dari 23 Menteri terdapat 8 (24%) Menteri dari Angkatan Darat. Dalam Kabinet Pembangunan II, ada enam menteri yang Angkatan Darat. Dalam Kabinet Pembangunan III, 15 menteri berasal dari Angkatan Darat. Dalam Kabinet Pembangunan IV, ada 17 Menteri yang Angkatan Darat. Dalam Kabinet Pembangunan V, 14 Menteri adalah Angkatan Darat. Dan, dalam Kabinet Pembangunan VI, 10 Menteri adalah Angkatan Darat. Dalam Era Orde Baru, posisi Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Koordinator, harus dijabat oleh tentara (Bachtar, 1982; Honna, 2002; Singh, 1996).

Komando Teritorial di era Orde Baru tidak berberfungsi sesuai fungsi utamanya sebagai penjaga daerah wilayah pertahanan. Sudah jauh dilakukan intervensi wilayah politik dan birokrasi pemerintah daerah. Kepala Komando

Teritorial memiliki wewenang dalam menentukan posisi Gubernur dan Bupati. Hal ini juga memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah calon parlemen dari partai mungkin calon sendiri dalam Pemilihan Umum (Astoeti, 1993). Parlemen anggota atau calon pemimpin sipil, sebelum mengikuti Pemilu, harus diselidiki oleh Komando Teritorial, apakah keluarganya atau dirinya sendiri telah terlibat dalam organisasi terlarang seperti organisasi ekstrim (PKI) atau kanan (Islam radikal). Calon parlemen yang dituduh keterlibatannya dalam organisasi yang oleh Komando Teritorial, tidak akan tepat bagi politik di Indonesia (memilih dan dipilih dalam Pemilu).

Di era Presiden Soeharto, konsep dua kali lipat berfungsi ABRI yang diterbitkan banyak perdebatan dari pensiunan kritis Angkatan Darat dan ilmuwan internal atau asing. Jenderal A.H. Nasution yang merupakan pemikir jalan tengah dilihat bahwa fungsi dua kali lipat harus dilakukan dalam kondisi tanpa jaminan. Dalam situasi normal, ABRI harus meninggalkan konsep dan memberikan kekuasaan politik kepada sipil pemerintah. Sri Bintang Pamungkas menentang keras konsep tersebut, jumlah ABRI hanya 500.000 orang atau 0,3% dari penduduk Indonesia. ABRI tidak harus mendapatkan kapasitas 20% dari anggota parlemen. Menurut dia, dwi fungsi ABRI adalah kelemahan demokrasi. Itulah sebabnya Tentara dominasi dalam sistem politik harus dihentikan. Indonesia harus mengikuti negara-negara seperti Amerika Latin, Rusia, Korea Selatan dan Thailand (Astoeti, 1993; dan Rourke, 2003).

Bilveer Singh, yang telah melakukan banyak studi tentang Angkatan Darat di Indonesia, mengatakan bahwa gagasan meninggalkan dwi fungsi tidak pernah terpikir pada otak ABRI. Berfungsi ganda ABRI telah menjadi kesepakatan perwira senior Angkatan Darat. Hal ini terjadi karena rasa khawatir terhadap ancaman keamanan nasional jika pasukan memberikan perannya dalam politik kepada sipil (Singh, 1996 : 137).

Harold Crouch menyatakan bahwa di ABRI ada dua kelompok, yaitu dwifungsi struktural dan dwifungsi mental. Dwifungsi Struktural memiliki gagasan bahwa perwira Angkatan Darat senior harus duduk dibanyak posisi sipil penting, jika Angkatan Darat meninggalkan posisi, akan mengancam keamanan

nasional. Dwifungsi Mental melihat konsep "fungsi ganda" lebih kepada suatu konsep menjaga hak bangsa, bukan strategi pendukung posisi politik. Tentara tidak boleh menduduki jabatan sipil, tapi mereka harus selalu menjaga sikap yang benar sehingga mereka akan siap jika kadang-kadang mereka dibutuhkan untuk duduk dalam posisi sipil (Crouch, 1984 : 179).

Kelompok perwira Angkatan Darat senior yang mendukung dwifungsi menyatakan bahwa dalam melihat konsep, Angkatan Darat tidak boleh menggunakan tampilan demokrasi liberal karena hanya akan membawa konflik kebangsaan (Nasution, 1992). Dwifungsi adalah konsep politik yang mendukung tentara sebagai kekuatan defensif, kekuatan keamanan, dan kekuatan sosial-politik. Sistem demokrasi parlemen atau liberal mengaku konsep supremasi sipil pada Perang Angkatan (supremasi sipil). Keterlibatan Tentara dalam politik dipandang menentang konstitusi. Disisi lain, dalam sistem politik demokrasi Pancasila, Angkatan Darat memiliki hak untuk terlibat dalam politik (Astoeti, 1993 : 189).

Keterlibatan sipil dalam politik selama pemerintahan Orde Baru sangat terbatas. Orang-orang tidak punya hak untuk memutuskan dan memilih pemimpin politik. Pemimpin politik dimulai dari Desa, Kabupaten, Propinsi dan Pusat diputuskan oleh beberapa politikus yang datang dari keluarga besar ABRI (KBA, Keluarga Besar ABRI atau Keluarga Besar ABRI), Birokrasi, dan GOLKAR (Anggota politik). Hasil diskusi dari ketiga kekuatan menghasilkan pemimpin politik. Partai oposisi seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai partai Islam, dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia), penggabungan dari pihak yang mengaku kebangsaan, dan ideologi sekuler Kristen, lebih setuju dengan politik keputusan yang dihasilkan oleh diskusi ABRI, Birokrasi dan GOLKAR.

Karl D. Jackson melihat pemerintah Orde Baru sebagai pemerintahan birokrasi, dimana masyarakat sipil tidak berhak dalam menentukan dan mempengaruhi politik keputusan di negara ini. Keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Pada 1970, otoritas Orde Baru diarahkan secara sistematis untuk menjadi Soeharto sebagai Personal Power (seperti dikutip oleh Dhakidae, 2000:237).

IV.2 Pengabdian Peristiwa G30S Melalui Film Pengkhianatan G30S/PKI

Pada pertengahan dekade 1950-an, elit politik nasional mulai kehilangan homogenitasnya dan rasa akan tujuan bersamanya (Elit politik nasional bercirikan dengan domisili dikota, terpelajar, jumlahnya sedikit, dan sejak era kemerdekaan telah diikat oleh ikatan personal yang menjembatani ‘konflik ideologi dan kepentingan’. Feith, Herbert. 1962. Hal:330). Kemudian kemunculan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berkali-kali melancarkan kudeta militer dan gerakan-gerakan kedaerahan, agaknya semakin mengacaukan kepemimpinan politik nasional dan akhirnya memuncak pada 1 Oktober 1965, yang kemudian mengubah sistem perpolitikan di Indonesia. Malam sebelum tanggal 1 Oktober 1965, atau lebih tepatnya tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa penculikan beberapa jenderal dan perwira di kediamannya oleh oknum-oknum terkait yang diduga merupakan anggota PKI. Serangkaian peristiwa tersebut, pada era Orde Baru diabadikan melalui film dokumenter yang bertajuk Pengkhianatan G30S/PKI dan diputar setiap tahun pada tanggal 30 September untuk mengingat kembali tragedi berdarah yang menjatuhkan banyak korban tersebut, walaupun setelah lengsernya Orde Baru film ini tidak ditayangkan kembali di layar kaca. Pada pembahasan selanjutnya, penulis mencoba mengulas kembali film Pengkhianatan G30S/PKI berdasarkan *content* dan aspek historis pembuatan film tersebut.

IV.2.1 Jenis dan Genre

Film G30S/PKI merupakan jenis film dokumenter dan bergenre film perjuangan. Hal ini karena film ini berusaha menampilkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Tokoh-tokoh dan cerita yang ditampilkan bukan fiksi sehingga film ini berusaha menceritakan kembali peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Walaupun keakuratan fakta yang ditampilkan masih dipertanyakan.

Film ini juga menjadi bagian dari film revolusi yakni film-film yang dikategorikan sebagai bagian dari upaya mencapai dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Berdasarkan pembagian film oleh Salim Said, “Pengkhianatan G30S/PKI” merupakan jenis film dokudrama (Said, Salim. 1991). Menurut Salim Said film yang berjenis dokudrama memiliki

tujuan untuk mengawetkan kisah atau kejadian sejarah dan heroik. Film-film yang dikatakan sebagai dokudrama memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Film yang termasuk dalam katagori ini berusaha untuk mengawetkan kejadian historis dan heroik.
2. Merupakan upaya konstruksi terhadap heorisme kelompok militer, dalam film ini khususnya angkatan darat.
3. Melanggengkan citra dan peran militer dalam menentukan nasib negara Indonesia.

IV.2.2 Produksi

Film G30S/PKI diproduksi oleh Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN). Naskah film ini ditulis dan disutradarai oleh Arifin C. Noer. Beberapa pemain dalam film ini adalah Umar Kayam, Didi Sadikin, Kies Slamet, Sofia WD, Wawan Wanisar. Dan film ini diproduseri oleh Gufron Dwipayana (sumber : film Pengkhianatan G30S/PKI).

IV.2.3 Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN)

IV.2.3.1 Pendirian perusahaan Film Milik Negara

Cikal bakal berdirinya perusahaan film milik negara ini diawali dengan pendirian perusahaan perfilman oleh Albert Ballink pada tahun 1934 (Sen, Krishna. 1994. Hal:91). Perusahaan ini bernama Java Pasific Film namun pada tahun 1936 namanya berubah menjadi Algemeene Nederlands Indiesche Film (ANIF). Perusahaan ini memfokuskan diri pada pembuatan film cerita dan film dokumenter. Peristiwa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 disertai dengan pengambilalihan seluruh kekayaan yang berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda oleh pihak Jepang, salah satunya adalah Algemeene Nederlands Indiesche Film (ANIF). Setelah terjadinya peristiwa tersebut, Jepang kemudian mendirikan sebuah perusahaan perfilman yang diberi nama Nippon Eiga Sha yang berada di bawah pengawasan Sendenbu. Film yang diproduksi Eiga Sha pada umumnya bertujuan sebagai alat propaganda politik Jepang.

IV.2.3.2 Perkembangan Perusahaan Film Milik Negara

Perkembangan Perum PFN diawali dengan terbentuknya BFI yang dilatarbelakangi oleh adanya gerakan karyawan film yang bekerja pada Nippon Eiga Sha (Sen, Krishna. 1994. Hal:92). Adanya peristiwa penandatanganan draft persetujuan penyerahan Nippon Eiga Sha kepada perwakilan Indonesia pada tanggal 6 Oktober 1945 semakin mempermudah gerak para karyawan BFI untuk melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah. Pada tahun 1950, BFI berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) namun penyempurnaan EYD membuat namanya berubah kembali menjadi Perusahaan Film Negara (PFN). Pergantian nama perusahaan kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 55. B/MENPEN/1975 pada tanggal 16 Agustus 1975.

Berdasarkan surat keputusan ini maka secara resmi PFN berubah menjadi Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Pergantian nama kembali terjadi seiring dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan dan agar perusahaan dapat dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memberikan keuntungan bagi negara serta mampu untuk mandiri. Agar dapat mencapai hal tersebut maka PPFN merubah statusnya menjadi Perum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1988. Dengan demikian resmilah PPFN berganti nama menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN).

IV.2.4 Produser : Gufron Dwipayana

Gufron Dwipayana lahir di Jember, Jawa Timur, 12 Desember 1932 atau lebih dikenal dengan nama G. Dwipayana adalah salah satu sutradara televisi Indonesia dan juga mantan Direktur PPFN (<http://www.majalah.tempointeraktif.com/id/mbm.19800503.id.html>). Karya karya film baik di layar lebar maupun televisi yang pernah dibuatnya antara lain adalah Si Unyil, Pengkhianatan G30S/PKI, Serangan Fajar, Aku Cinta Indonesia (ACI) dan Si Huma. Sebelum terjun di bidang film, Dia adalah mantan anggota militer

angkatan darat dengan pangkat Brigadir Jenderal. Sebagai mantan militer, ia dekat dengan Soeharto. G. Dwipayana merupakan sosok yang menghormati bahkan cenderung "manut" kepada Soeharto.

Hal tersebut digambarkan dalam percakapan yang ditulis Ramadhan antara Soeharto dan G. Dwipayana ketika Soeharto mengundurkan diri dari kursi Presiden tahun 1998 :

Dalam salah satu kesempatan Ramadhan, si penulis mempertanyakan kalimat Suharto berikut kepada Dwipayana, "Mengenal kesalahan, saya berpikir, 'Siapa yang mengukur salah itu? Siapa yang menyalahkan?' Sekarang, misalnya, pekerjaan saya sudah saya laksanakan, berjalan baik dan berhasil, menurut ukuran saya. Tetapi kalau ada orang lain yang melihat hasil pekerjaan saya itu dari segi yang lain, lalu menilai salah atau gagal, maka saya akan berkata, 'Itu urusan mereka'. Saya percaya, bahwa apa yang saya kerjakan, setelah saya memohon petunjuk dan bimbingan-Nya, itu adalah hasil bimbingan Tuhan" (Soeharto 1989:563).

Maka Dwipayana menjawab, *"Begitulah Pak Harto. Dan pemimpin Jawa tidak boleh kelihatan cacatnya di depan rakyat"* (Ramadhan/Chambert-Loir 1999:59). Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi isi media yakni : faktor individual, rutinitas media, organisasi, ekstra media, dan ideologi (J. Shoemaker, Pamela dan Stephen D. Reese.1996).

Dalam sumber yang sama disebutkan juga bahwa G. Dwipayana memaksa Ramadhan untuk menuliskan riwayat Soeharto.

Ketika Ramadhan menjawab mau pikir-pikir untuk menuliskan riwayat Suharto, maka Birgjen G Dwipayana menyatakan, "...saya tidak mau dengar Pak Ramadhan menolak!" Sang penulis pun seperti terpaksa mengingat isterinya sebagai pegawai negeri, "...Mau coba-coba melawan keinginan Presiden Soeharto waktu itu?" Selanjutnya "...di tengah suasana yang sudah mencekam terbentuk menakutkan kalau kita melawannya". Pada penutup penuturannya Ramadhan menyatakan, "Waktu pekerjaan saya rampung sudah dan bukunya terbit, bukan main senang saya...".

IV.2.5 Sutradara : Arifin C. Noer

Arifin C. Noer Dilahirkan di Cirebon tanggal 10 Maret 1941. Ia adalah sutradara teater dan film yang beberapa kali memenangkan Piala Citra untuk penghargaan film terbaik dan penulis skenario terbaik (www.tamanismailmarzuki.com/tokoh/arifin.html). Alasan dan motif keterlibatannya dalam pembuatan film G30S/PKI ini tidak berhasil penulis temukan. Namun, di salah satu sumber (Majalah Tempo) menyebutkan bagaimana Arifin dan timnya bekerja dan memproduksi tokoh Aidit dalam film ini. Menurut keterangan Embie C. Noer, yang bertindak sebagai direktur musik film itu, kata-kata Arifin saat mendeskripsikan film yang akan mereka buat (G30S) dengan sangat singkat, hanya dengan mengatakan *"Ini film horror, Mbi."*

Kemudian menanggapi adanya diskusi tentang tokoh Aidit yang bukan perokok Embie mengatakan *"Mas Arifin sedang tidak merekonstruksi fakta, melainkan menyodorkan sebuah diskusi politik,"* kata Embie. Ia prihatin melihat berbagai diskusi yang muncul saat itu tentang pencitraan Aidit, dan film itu secara umumnya, yang hanya ditakar dari sisi estetika, bukan secara substantif. *"Banyak yang gagal membaca film ini,"* keluh Embie. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo 23 tahun silam, Arifin mengatakan bahwa niatnya membuat film ini adalah sebagai *"film pendidikan dan renungan tanpa menawarkan kebencian"* (Tempo edisi 6/14, 7 April 1984). Sedangkan Jajang C. Noer, istrinya (dari sumber yang sama) mengatakan ihwal Aidit yang merokok. Saat itu Arifin merasa merokok sebagai representasi dari *The Thinker*. *"Secara visual terlihat lebih bagus penggambaran seseorang yang berpikir keras itu lewat rokoknya,"* ulas Jajang. *"Itu sebabnya ada adegan di mana layar hanya dipenuhi asap rokok sebagai metafor sumpeknya suasana politik Indonesia."*

Pernyataan ini sungguh bertolak belakang dengan apa yang ditampilkan di film tersebut. Untuk sebuah film sejarah dimana masyarakat akan meyakini film tersebut sebagai satu-satunya informasi tentang G30S yang memang sangat minim script, penggambaran tokoh dan cerita tidak hanya bisa didasarkan pada estetika, tapi juga etika dan fakta. Untuk seorang sineas besar macam Arifin seharusnya ia mengetahui hal tersebut. Dugaan penulis adalah Arifin mengalami tekanan ketika

menggarap film tersebut. Hal itu bisa terlihat dari produser yang mendanai film ini yang merupakan mantan anggota militer. Sebagai seorang sineas nasib Arifin kala itu pasti amat tergantung pada PFFN yang masih menguasai produksi dan distribusi film. Monopoli ini yang mungkin saja menjadi alasan Arifin untuk mau tidak mau membuat film sesuai pesanan penguasa.

Jika memang apa yang digambarkan dalam film ini adalah benar adanya, mengapa setelah kebebasan berpendapat terjadi (setelah jatuhnya Soeharto) banyak buku yang mencoba men-counter apa yang ditampilkan, baik tentang Aidit, PKI, maupun peristiwa 30 September itu sendiri.

IV.2.6 Editor : Prof. DR. Nugroho Notosusanto

Nugroho Notosusanto (lahir di Rembang, Jawa Tengah, 15 Juli 1930 – meninggal di Jakarta, 3 Juni 1985 pada umur 54 tahun) adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1985) selain juga sebagai Rektor Universitas Indonesia (1982-1983) (www.tamanismailmarzuki.com/tokoh/notosusanto.html). Sejak periode tahun 1970an hingga awal 1982 Brigjen TNI Nugroho Notosusanto (Tituler¹²) menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI (Pusjarah ABRI). Selain itu ia juga terkenal sebagai sastrawan, yang oleh H.B. Yassin digolongkan pada Sastrawan Angkatan 66. Nugroho dikenal sebagai penulis produktif. Di samping sebagai sastrawan dan pengarang, ia juga aktif menulis buku-buku ilmiah dan makalah dalam berbagai bidang ilmu, dan terjemahannya yang diterbitkan berjumlah dua puluh satu judul. Buku-buku itu sebagian besar merupakan lintasan sejarah dan kisah perjuangan militer. Wawasan yang mendalam tentang sejarah perjuangan ABRI menyebabkan ia mampu mengedit film yang berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI*. Sebagai seorang sejarawan, pada era Orde Baru Nugroho menulis sejarah menurut versi pihak-pihak tersebut. Pada 1964 ABRI menggunakan Nugroho untuk menyusun sejarah militer menurut versi militer karena khawatir bahwa sejarah yang akan disusun oleh pihak Front Nasional yang dikenal sebagai

¹² Pangkat Tituler merupakan pangkat kemiliteran yang diberikan kepada kalangan sipil yang direkrut menjadi anggota militer karena dibutuhkan oleh militer.

kelompok kiri pada masa itu akan menulis Peristiwa Madiun secara berbeda, sementara militer lebih suka melukiskannya sebagai suatu pemberontakan pihak komunis melawan pemerintah.

Ketika diangkat sebagai menteri pendidikan pada 1984, Nugroho menggunakan kesempatan itu untuk menulis ulang kurikulum sejarah untuk lebih menekankan peranan historis militer. Pada tahun ini pula Nugroho ikut menulis skenario untuk film *Pengkhianatan G 30 S/PKI* yang memuat versi resmi Orde Baru tentang tragedi tersebut (www.tamanismailmarzuki.com/tokoh/notosusanto.html). Film ini kemudian dijadikan tontonan wajib untuk murid-murid sekolah di seluruh Indonesia, dan belakangan diputar sebagai acara rutin setiap tahun di TVRI pada malam tanggal 30 September hingga tahun 1997.

IV.2.7 Sinopsis Film Pengkhianatan G30S/PKI

Film G30S/PKI wajib ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September sebelum televisi swasta hadir. Setelah televisi swasta nasional muncul, dikenakan pula aturan yang sama dan baru dihentikan penayangannya pada tahun 1997. Dasar cerita dari film *Pengkhianatan G30S/PKI* ini ditulis oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto dengan dibantu oleh beberapa orang staf. Dari dasar cerita itu kemudian disusun oleh Arifin C. Noor ke dalam sebuah skenario sebelum dituangkannya ke dalam bentuk film. Secara menyeluruh, menurut penulis, film ini bisa dibagi menjadi tiga bagian/segmen cerita. Pada bagian pertama, film tersebut bercerita tentang kondisi Indonesia menjelang tahun 1965. Di awal cerita, film ini dibuka dengan latar belakang lagu “Bis Sekolah” yang dinyanyikan oleh band tempo dulu, Koes Bersaudara melalui sebuah piringan hitam. Kemudian musik dihentikan dan setelah itu dibakar. Selain itu juga ditampilkan benda-benda lain yang ikut dibakar seperti buku-buku dan sampul piringan hitam “The Beatles”.

Seperti yang terlihat pada adegan pertama film, kemudian diikuti juga dengan pengambilan gambar Monumen Lubang Buaya beserta narasinya. Setelah itu terdapat sebuah pernyataan yang muncul seperti berikut :

"Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini"

Pernyataan tersebut memiliki pesan tersembunyi dimana perjuangan pahlawan revolusi dalam menegakkan keutuhan dan kemurnian Pancasila tidak akan sia-sia walaupun mereka menjadi korban dalam peristiwa 30 September 1965. Selain itu pernyataan tersebut juga dapat berarti bahwa ideologi Pancasila tidak akan pernah dapat digantikan dengan ideologi lain. Adapun penulis juga mencoba mengartikan lain, dimana secara implisit pernyataan tersebut dapat juga berarti bahwa siapapun yang menentang ideologi Pancasila akan berhadapan dengan negara dan aparaturnya, dan juga pernyataan tersebut mencoba menggambarkan bagaimana peristiwa 30 September 1965 telah menyebabkan perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban kekejaman PKI dikubur di sumur lubang buaya.

Setelah itu, pada adegan ketiga menampilkan penyerbuan PKI ke dalam masjid di daerah Kediri pada tanggal 13 Januari 1965. Dimana pada waktu subuh, ribuan anggota PKI menyerang dan melakukan pemukulan kepada kiyai dan jamaah lainnya, serta menginjak-injak kitab suci Al-Qur'an. Pada adegan berikutnya, ditampilkan juga beberapa aksi PKI di berbagai daerah melalui *shoot* kliping-kliping koran disertai juga narasinya. Adegan berikutnya ini mengilustrasikan kekejaman PKI di beberapa tempat seperti pada tanggal 15 Januari 1965 masih di daerah Kediri, dimana ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah, kepala desa yang mencoba meleraikan ikut dikeroyok pula. Dari kedua peristiwa di Kediri terdapat sebuah ungkapan "ribuan anggota PKI menyerang", hal ini menurut penulis terlalu dilebih-lebihkan oleh sang narator film tersebut dan terkesan setiap melakukan perlawanan yang mengatasnamakan anggota PKI selalu melibatkan massa yang banyak dan juga selalu mengakibatkan kekacauan dimana-mana. Selain di Kediri, kemudian dinarasikan juga pada tahun yang sama di daerah Sumatera Utara mengenai aksi sepihak PKI terkait dengan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah padahal masalah tersebut telah diselesaikan secara baik-baik, namun para petani dihasut oleh orang-orang PKI untuk menduduki

tanah tersebut secara sepihak melawan petani. Peristiwa di daerah Sumatera Utara ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandar Betsy yang menewaskan Peltu Sudjono dari aksi yang dilakukan oleh PKI tersebut. Berdasarkan ketiga peristiwa di berbagai tempat ini, agaknya film Pengkhianatan G30S/PKI ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana kekacauan yang dilakukan oleh PKI pada masa itu di berbagai wilayah di Indonesia dan selalu menimbulkan korban jiwa akibat aksi-aksinya itu.

Setelah narasi mengenai aksi-aksi PKI diberbagai wilayah, terdapat narasi yang menjelaskan bahwa pada tahun 1964 terungkap dokumen rencana perebutan kekuasaan oleh PKI, namun oleh PKI dinyatakan sebagai dokumen palsu dan malah menuduh balik lawan politisnya Chairul Saleh dan Sukarno. Dan dokumen semacamnya pernah juga tersebar sebelum pemberontakan di Madiun tahun 1948 yang lagi-lagi disanggah oleh PKI namun pada akhirnya terbukti benar. Berdasarkan narasi tersebut, khususnya mengenai dokumen-dokumen perebutan kekuasaan, sepertinya film ini mencoba untuk memberikan gambaran bahwa pada dasarnya PKI memang ingin melakukan kudeta dan merebut kekuasaan secara penuh dan jika menurut penulis, pernyataan tersebut masih perlu diulas kembali kebenarannya karena dalam film tersebut tidak dicantumkan bukti-bukti otentik mengenai keberadaan dokumen terkait dan kalau pun benar adanya apa benar dokumen tersebut milik PKI dan dibuat sendiri oleh PKI. Selanjutnya, terdapat juga narasi dimana dalam rangka perebutan kekuasaan negara, PKI membentuk biro khusus pada tahun 1964 yang menyusun gerakan 30S.

Selanjutnya, pada bagian pertama film ini menyajikan beberapa peristiwa penting dan menentukan menjelang tahun 1965. Pada masa itu Partai Komunis Indonesia sudah tumbuh menjadi kekuatan politik yang besar. Kemudian setelah itu terdapat narasi yang mengatakan bahwa atas saran Perdana Menteri RRC, Zhou En Lai, PKI melancarkan tuntutan Angkatan Kelima agar buruh tani dipersenjatai. Namun hal tersebut dikatakan oleh narator tidak mendapat dukungan, kecuali dari pimpinan AURI Menteri Panglima Angkatan Udara Umar Dhani. Setelah itu narator juga menjelaskan :

"Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolak karena menurutnya akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia."

"Gagasan ini tidak lepas dari kesanggupan Zhou En Lai yang menjanjikan seratus ribu pucuk senjata ringan secara cuma-cuma."

Setelah itu terdapat sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pada kenyataannya pembentukan Angkatan Kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata ringan secara cuma-cuma dari Republik Rakyat Cina tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata oleh PKI yang digunakan pada peristiwa G30S/PKI. Pernyataan ini memberikan kesan bahwa ternyata andil dari Republik Rakyat Cina dalam mensuplai pucuk senjata ringan kepada PKI telah mendukung terjadinya gerakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Dan sebagai negara komunis, Republik Rakyat Cina digambarkan sebagai negara yang mendukung penuh Partai Komunis Indonesia untuk dapat melakukan gerakan revolusi. Lebih lanjut lagi, karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai Pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan selalu merintangi perjuangan PKI sebagaimana perjalanan-perjalanan sebelumnya sejarah peristiwa Madiun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan kup.

Selanjutnya adegan pindah dengan setting Istana Bogor terkait dengan pemeriksaan kesehatan Presiden Sukarno. Pada adegan tersebut muncul pemeranan tokoh seperti Brigjen Sobur, D.N. Aidit¹³, Tim Dokter dari RRC, Tim Dokter Kepresidenan, dan tentu saja Presiden Sukarno sendiri. Menurut Profesor Hu, salah seorang dari tim dokter RRC melalui bahasa mandarin yang kemudian pernyataannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh seorang penerjemah kepresidenan, setelah ditanyai oleh Aidit ia mengatakan bahwa kondisi kesehatan Presiden Soekarno dalam keadaan kritis dan bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh, namun yang terburuk terdapat kemungkinan lumpuh atau meninggal

¹³ Dipa Nusantara Aidit, atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit adalah Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia.

dunia. Setelah mendengar pernyataan tersebut, pada film digambarkan Aidit yang terlihat cemas akan kondisi kesehatan Presiden Sukarno pada saat itu. Keadaan kesehatan Presiden Soekarno agaknya membuat PKI merasa kuatir, selain itu PKI juga melihat bahwa persaingan PKI dengan pihak militer semakin memuncak apabila dikaitkan dengan sakitnya Presiden. Dengan kata lain, kondisi kesehatan Presiden Soekarno akan sangat menentukan kemenangan PKI dalam persaingannya dengan militer. Di sisi lain, PKI merasa militer tengah bersiap-siap untuk merebut kekuasaan dengan cara membentuk perkumpulan Dewan Jenderal. Keberadaan isu Dewan Jenderal kemudian diangkat oleh PKI sebagai dasar penemuan mereka atas dokumen rahasia di rumah Bill Palmer. Dokumen tersebut menyatakan adanya usaha-usaha militer dan CIA dalam rangka merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Pada dokumen tersebut terdapat sebuah kalimat yang cukup *familiar* dengan kata-kata “*our local army friend*” yang diartikan sama dengan Dewan Jenderal menurut penuturan narator. PKI memperkirakan bahwa usaha kup yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal tidak akan lama lagi mengingat kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang semakin memburuk. Selain itu, PKI juga memperhitungkan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun TNI akan digunakan untuk melancarkan kup tersebut.

Setelah adegan dengan latar Istana Bogor, kemudian diselipkan dengan sebuah adegan dimana masyarakat sedang mengantri minyak dimana sebagian besar merupakan masyarakat kecil. Adegan tersebut mencoba menggambarkan bagaimana terpuruknya perekonomian pada waktu itu sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan-bahan pokok untuk kehidupannya sehari-hari. Setelah itu terdapat dialog antara bapak dengan ibu yang penulis simpulkan dari sebuah keluarga Pegawai Negeri Sipil.

Ibu :

“*beras mahal sekali pak!*”

Bapak :

"lalu apa saya mesti menjual harga diri saya dengan beras? masuk SOBSI? ikut-ikutan ber-NASAKOM? biar naik pangkat? naik golongan" (dengan nada tinggi)

Ibu :

"Iho koq, marah? Saya cuma bilang beras sekarang mahal sekali. Kalo jatah beras kita terus menerus disabung dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju ini"

Bapak :

"yang penting halal, soal beras, soal dunia, soal kedudukan, soal dunia. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini kita harus lebih dekat kepada Allah dan jangan biarkan kita hanya mengeluh, iman justru harus kita teguh, jangan mudah terbujuk oleh apapun, juga jangan takut kepada ancaman komunis, SOBSI..."

"sekarang bukan kita yang memenangkan peperangan ini, insyaallah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran di negeri ini, saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur dimana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong, seperti putera Nabi Nuh. Insyaallah yang akan menjadi seseorang diantara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini...membersihkan negara negeri ini, yang kotor oleh kemunafikan, oleh kiri, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan pikiran, astagfirullah!"

Dari dialog di atas penulis mencoba mengartikan bahwa situasi dan kondisi yang sulit pada masa itu dan pada umumnya terkait dengan kebijakan-kebijakan Orde Lama, dimana disinggung soal SOBSI dan Nasakom oleh bapak. Maksudnya disini adalah kondisi perekonomian dan perpolitikan pada waktu itu yang kacau akibat dari kebijakan Orde Lama yang menerapkan asas Nasakom di negeri ini dan agar masyarakat, khususnya pegawai negeri, dapat bertahan dalam

situasi tersebut SOBSI dan Nasakom menjadi jawaban untuk mengatasi kesulitan tersebut. Selain itu dari pernyataan yang dikeluarkan oleh bapak dalam dialog tersebut, terdapat sebuah pesan dimana ideologi komunis adalah ideologi yang menyesatkan bangsa, yang mengotori negeri ini dengan kemunafikan. Melalui pernyataan-pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kemunculan adegan dialog antara bapak dan ibu ini pada film Pengkhianatan G30S/PKI mencoba menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian dan perpolitikan yang kacau pada masa itu serta mencoba memberikan pencitraan terhadap ideologi komunis yang dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan suatu keharusan untuk mematikan ideologi komunis di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila dan lebih banyak mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat. Kemunculan simbol-simbol agama menurut penulis menerjemahkan bahwa pada dasarnya masyarakat tidak perlu kuatir akan semua ancaman selama memiliki keyakinan kepada Sang Khalik, namun di sisi lain kemunculan simbol agama disini justru menurut penulis terkesan menggambarkan komunis yang anti-Tuhan dan tidak berlandaskan agama.

Selanjutnya, pada film ini juga digambarkan kondisi lubang buaya yang digunakan sebagai tempat pelatihan senjata dan baris-berbaris oleh Sukwan dan Sukwati. Sukwan merupakan anggota Pemuda Rakyat, sedangkan Sukwati adalah anggota Gerwani yang dilatih secara militer di lubang buaya. Pada saat situasi latihan baris berbaris terdapat sebuah pernyataan dari seorang komandan peleton.

Komandan Peleton :

"masi juga salah, lha wong baris aja masi ga becus lha kok mau ngganyang nekolim goblok!"

Terdapat sebuah arti khusus yang penulis tangkap melalui perkataan komandan peleton tersebut, menurut penulis kata-kata yang digarisbawahi semacam sebuah pernyataan bahwa nekolim adalah musuh utama PKI dan sebagai anggota PKI harus melawan semua yang terkait dengan nekolim. Adapun perkataan tersebut juga terkesan sarkastik sehingga mengesankan kekasaran komandan peleton

secara khusus, namun disisi lain juga dapat menggambarkan karakteristik anggota PKI secara umum dalam menerjemahkan kalimat tersebut. Selain itu dapat ditafsirkan juga bahwa kata nekolim dalam kalimat tersebut dapat terkait dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi pada tahun 1962-1966¹⁴. Menurut majalah Angkasa Edisi 2006, tercatat sekitar 2000 pasukan Indonesia tewas dalam pertempuran di belantara kalimantan.

Kemudian pada adegan berikutnya, terdapat penggambaran rapat-rapat yang dilakukan oleh PKI dan banyak juga membicarakan mengenai strategi partai mereka. Dalam rapat-rapat tersebut terdapat dialog-dialog yang cukup berbobot, contohnya seperti perkataan Aidit yang menyebutkan bahwa ada saat-saat untuk berpikir, ada saat-saat untuk berbicara, dan ada saat-saat untuk bertindak. “Dan hari-hari mendatang adalah saat-saat untuk bertindak”, tutur Aidit. Adapun rapat-rapat tersebut pada akhirnya memunculkan sebuah hasil kesepakatan bahwa aksi penculikan akan dilakukan tanggal 1 Oktober 1965 pukul 04.00 pagi.

Pada bagian kedua film ini, lebih banyak menggambarkan proses penculikan atas perwira-perwira militer Angkatan Darat oleh pasukan Cakrabirawa¹⁵ yang dikomandoi oleh Untung¹⁶. Penggambaran ini dikemas dengan peristiwa-peristiwa yang sangat dramatis dan juga mendetail, mulai dari pengepungan rumah para Jenderal, penangkapan, pembunuhannya, sampai penyiksaan yang berakhir dengan pesta pora anggota-anggota PKI di Lubang Buaya dengan diiringi lagu *genjer-genjer*.

Selanjutnya, pada bagian ketiga film difokuskan pada situasi dan kondisi setelah terjadinya peristiwa penculikan dan pembunuhan para Jenderal di Lubang

¹⁴ Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan Manila Accord, sehingga keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Sukarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai “boneka Inggris” merupakan kolonialisme dan imperialisme baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia (Witton, Patrick; Mark Elliott. 2003. Hal:94).

¹⁵ Cakrabirawa adalah resimen yang merupakan pasukan gabungan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia Pada zaman Pemerintahan Sukarno.

¹⁶ Letkol Untung adalah Komandan Batalyon I Cakrabirawa, sebelumnya ia pernah menjadi komandan Batalyon 454/Banteng Raiders yang berbasis di Srandol, Semarang.

Buaya. Di bagian ini pihak militer mencium bahwa PKI ada di balik aksi penculikan ini. Militer juga membantah soal isu Dewan Jenderal. Menurut militer Dewan Jenderal itu tidak ada. Bahkan sebenarnya PKI-lah yang hendak mengadakan kup.

Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan para Jenderal yang dilakukan PKI, pihak militer segera mengambil tindakan. Pada gambaran film ini, mula-mula militer memberbaskan Radio Republik Indonesia dari tangan PKI. Kemudian militer – dalam hal ini Soeharto – berusaha menenangkan rakyat dan memberikan penegasan bahwa semua kemelut yang ada disebabkan oleh ulah PKI. Setelah menguasai RRI, militer bergerak ke arah Lubang Buaya untuk melumpuhkan PKI dan Mencari jenazah para perwira militer.

Dan pada akhir cerita film ini mengisahkan bagaimana jenazah perwira militer ditemukan di Lubang Buaya. Kemudian Soeharto menyaksikan pengangkatan jenazah¹⁷ sambil berpidato panjang. Film ini kemudian ditutup dengan pemakaman kembali jenazah para perwira dengan iringan pidato dari A.H. Nasution.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat tiga tingkatan cerita yang mendominasi film ini. Secara teknis, film ini mengandung struktur cerita yang cukup rumit. Film ini menggabungkan cerita utama dengan narasi penggambaran sisi historisnya. Narasi tersebut tampak pada saat pembahasan mengenai Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Kemudian pada saat pembahasan mengenai klip-kliping koran yang mengulas aksi-aksi PKI di berbagai tempat. Kemudian, film ini menggabungkan tokoh-tokoh nyata dengan tokoh-tokoh fiktif. Tokoh fiktif disini contohnya digambarkan dalam sebuah keluarga yang memiliki anak lelaki yang sekolah di bidang pertanian, kemudian juga Ibu dan anak gelandangan, dapat dilihat bahwa tokoh fiktif ini selalu datang dari lingkungan masyarakat sipil. Tokoh-tokoh sipil –fiktif tersebut seolah-olah menyaksikan dan menjadi saksi dari suatu peristiwa bersejarah. Bahkan tokoh-tokoh tersebut memberi penilaian sendiri atas kondisi sosial politik pada saat itu.

¹⁷ Terkait dengan peristiwa 30 September 1965, pengangkatan jenazah para perwira tinggi di Lubang Buaya dilakukan oleh KKO (Korps Komando Angkatan Laut).

Setiap unsur yang ada digambarkan secara *flashes*, yaitu kamera bergerak melompat-lompat dan melintas dengan berbagai *frame*. Dari setiap penjelasan pada paragraf ini, ketiga tingkatan cerita yang ada pada film Pengkhianatan G30S/PKI tidak berjalan lurus, tetapi selalu diselingi oleh alur lain yang bersifat fiktif tanpa mengurangi alur utamanya.

Berdasarkan pengamatan penulis setelah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI, terdapat penggambaran dominan yang coba dimunculkan dalam film tersebut. Adapun penggambaran itu penulis mendefinisikan ke dalam tiga penggambaran penting, yakni penggambaran Atheis, penggambaran Kebiadaban, serta penggambaran Penghasut atas *image* Partai Komunis Indonesia berdasarkan film tersebut.

IV.2.7.1 Penggambaran Atheis

Verbal

Secara verbal, film Pengkhianatan G30S/PKI sangat sedikit menunjukkan bahwa PKI itu atheis. Pada bagian awal film di adegan ketiganya diperlihatkan ribuan massa PKI menyerbu orang-orang Islam yang sedang melaksanakan solat di masjid, dan yang menarik dari adegan tersebut adalah terdapat sebuah narasi yang mengatakan :

Narasi :

"Pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center Pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang Kiyai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Qur'an."

Pada bagian lainnya, sifat atheisme orang-orang PKI secara verbal digambarkan oleh seorang tokoh sipil-fiktif dimana tiba-tiba muncul seorang ibu tua dengan seorang anak kecil. Kedua tokoh tersebut diilustrasikan sebagai penduduk desa yang akhirnya pergi ke ibukota karena tanah pertaniannya direbut oleh PKI. Di dalam perjalanannya anak tersebut bertanya kepada ibunya :

Anak :

"Kenapa sawah kita direbut orang Mak?"

Ibu :

"Mereka orang-orang jahat, tidak beragama!"

"Tidak berbudi!" (sambil menangis) Yaa Allah!!"

Tokoh Fiktif :

"Bapak orang baik, mantri air yang baik."

Anak :

"Siapa yang membunuh Bapak..Mak?"

Ibu :

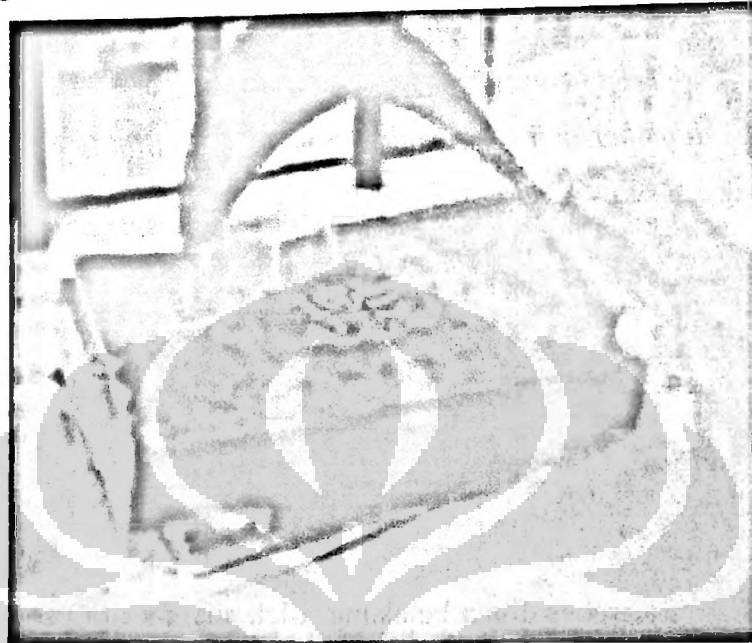
"PKI! Komunis! Jahat mereka"

Dialog-dialog tersebut dilatarbelakangi oleh suara-suara pengajian. Suara pengajian tersebut beserta adzan muncul kembali menjelang akhir film Pengkhianatan G30S/PKI, yakni ketika pasukan RPKAD menyerbu Lubang Buaya. Penyerbuan tersebut dilatarbelakangi oleh suara adzan yang terdengar sangat jelas. Tidak terdapat sebuah penjelasan khusus mengenai adanya suara adzan di tengah-tengah penyerbuan tersebut. Namun, jika ditelaah kemunculan suara adzan pada saat penyerbuan memiliki kesan bahwa penyerbuan terhadap orang-orang PKI tersebut merupakan tindakan yang suci dan berlandaskan agama.

Non Verbal

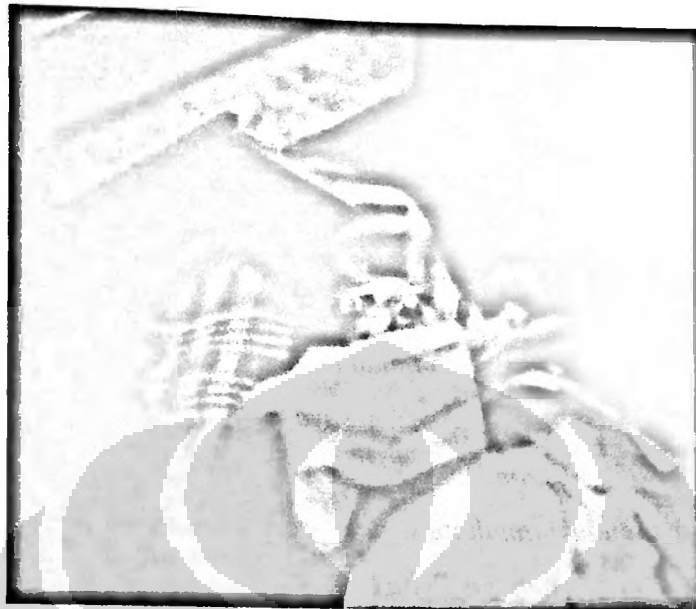
Dari sisi non verbal, penggambaran PKI sebagai bagian dari golongan atheis lebih dominan. Pada adegan kedua, penggunaan simbol penyerbuan masjid menjadi penggambaran yang cukup mengena. Sebelum penyerbuan dimulai, pagi-pagi buta orang-orang PKI diilustrasikan mengambil arit dari atas tumpukan buku-buku seperti "Kumpulan Tulisan" dan "V. I. Lenin". Kemudian arit tersebut digunakan untuk membunuh kiyai kemudian untuk mencabik-cabik kitab suci Al-Qur'an. Pengrusakan Al-Qur'an dengan arit ditampilkan secara jelas dan sangat dekat. Kemudian pembunuhan orang-orang Islam juga dilengkapi dengan simbol-

simbol ke-Islam-an lain seperti suasana perkampungan Islam dan spanduk-spanduk yang menunjukkan kegiatan Pelajar Islam Indonesia.



Gambar Perusakan Kitab Suci Al-Qur'an
(Sumber Film Pengkhianatan G30S/PKI)

Selain disimbolkan oleh penyerbuan masjid, pembunuhan kiyai, dan penghancuran Al-Qur'an, sikap anti agama PKI disimbolkan dengan pembunuhan seorang tokoh Mantri Air dalam konteks film ini adalah seorang Mantri Air yang Santri. Ini disimbolkan oleh tokoh-tokoh yang ditampilkan pada saat kematian Mantri Air. Selain dikerumuni oleh para santri, kematian Mantri Air juga diiringi oleh kegiatan pengajian.



Gambar Penganiayaan terhadap seorang Kiyai
(Sumber Film Pengkhianatan G30S/PKI)

IV.2.7.2 Penggambaran Biadab

Verbal

Secara keseluruhan film, tidak dapat disangkal lagi bahwa penggambaran kebiadaban PKI ditampilkan sangat dominan dalam film ini. Sejak adegan kedua – yakni setelah adegan pembakaran piringan hitam Koes Ploes – muncul gambar serta narasi tentang Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Pada kemunculan Monumen Pancasila Sakti tersebut seorang narator menyebutkan bahwa :

Narator :

Monumen ini dipersembahkan bagi Tujuh Pahlawan Revolusi korban kebiadaban Gerakan Tiga Puluh September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti.

Setelah adegan tersebut, kekejaman PKI selanjutnya secara verbal ditampilkan saat membahas aksi-aksi PKI di desa-desa sebelum bulan September 1965.

Narator :

“Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965 di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala Desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsy. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan dengan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI/PKI untuk menduduki tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sudjono tewas karena dikeroyok dan dianiaya.”

Selanjutnya, penggambaran verbal mengenai kebiadaban PKI juga dimunculkan pada akhir cerita film Pengkhianatan G30S/PKI, yaitu pada saat pidato Mayjen. Soeharto di Lubang Buaya.

Mayjen Soeharto :

“Kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita – dengan satu perwira pertama – dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum, bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamaken Gerakan 30 September... Bilamana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini...”

Pada pernyataan Suharto ini dalam pidatonya, beliau selain mendeskripsikan Gerakan 30 September sebagai tindakan yang biadab, sekaligus secara implisit mencoba memaparkan tentang pelaku 30 September sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang pada hal ini adalah PKI.

Kemudian oleh Suharto dan kawan-kawan, menurut John Roosa, dijadikan dalih untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya dan menyebabkan terjadinya pembunuhan massal dengan korban lebih dari setengah juta jiwa.

Pada adegan paling akhir film ini, Jenderal A. H. Nasution mengantar penguburan kembali para perwira Angkatan Darat sambil berucap :

Nasution :

“Hari ini Hari Angkatan Bersenjata kita yang selalu gemilang tapi yang kali ini dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh pengkhianatan dan dihinakan oleh penganiayaan.”

Berdasarkan pernyataan Nasution di atas, penulis mencoba menginterpretasikan pernyataan tersebut sebagai sebuah ungkapan yang mengandung makna peristiwa 30 September 1965 yang menyebabkan terbunuhnya enam Jenderal dan Perwira Angkatan Darat merupakan hinaan bagi tubuh Angkatan Darat. Dan dapat dikatakan juga aksi yang terjadi pada dini hari menjelang 1 Oktober 1965 tersebut terdapat andil dari oknum militer yang berkhianat dan mencoba memfitnah kubu militer akan aksi yang dilakukannya itu. Penulis mengasumsikan bahwa keterlibatan Kolonel Untung dan oknum militer lain dalam aksi tersebut dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap militer dengan pengkhianatan dan penganiayaan yang dilakukannya itu, sehingga menurut Nasution hal ini lah yang mencoreng nama baik Angkatan Bersenjata.

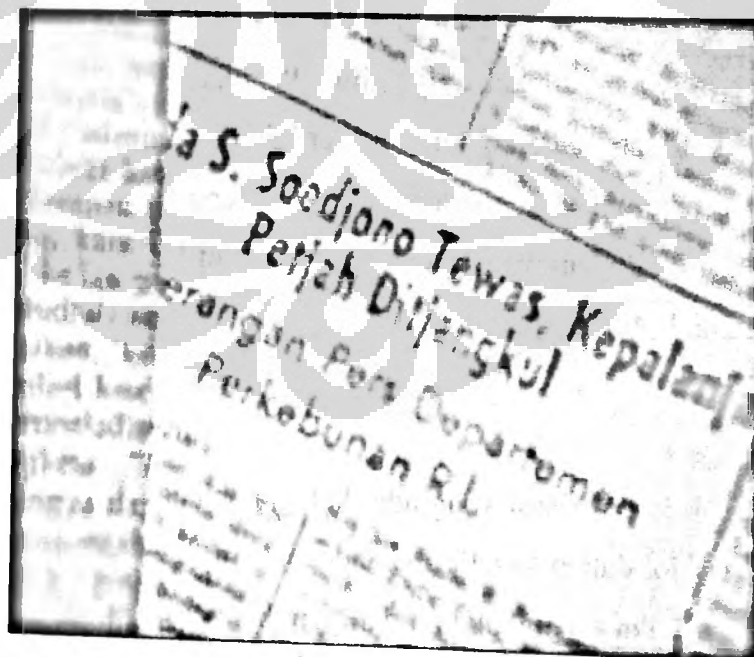
Non Verbal

Dari seluruh kategorisasi yang ada, kategori biadab adalah kategori yang dirasa paling menonjol dalam keseluruhan adegan film Pengkhianatan G30S/PKI. Setelah adegan pembuka – pembakaran dan penghentian lagu Koes Bersaudara – adegan Monumen Pancasila Sakti langsung muncul dengan iringan musik yang menimbulkan kesan seram serta tegang. Penggunaan musik yang ekspresif disertai dengan sorot kamera ke arah detail ornamen tersebut melukiskan penyiksaan-penyiksaan. Selain itu, tiba-tiba kamera berhenti agak lama ke arah sebuah

ornamen buku bertuliskan NASAKOM sambil kemudian bergerak melanjutkan pelukisan saat-saat penyiksaan di Lubang Buaya.

Kemudian setelah adegan tersebut, layar disesaki dengan adegan suasana sebuah perkampungan di pagi buta. Perkampungan tersebut merupakan sebuah perkampungan yang memiliki basis Islam yang kuat. Setelah itu muncul adegan sekelompok orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Secara sekilas tampak gerak orang-orang yang bergegas mengambil arit dari tumpukan buku-buku karangan Lenin. Tiba-tiba muncul orang-orang PKI menyerbu dan melukai jamaah. PKI digambarkan menyerang dan memukul para jamaah yang tidak bersenjata.

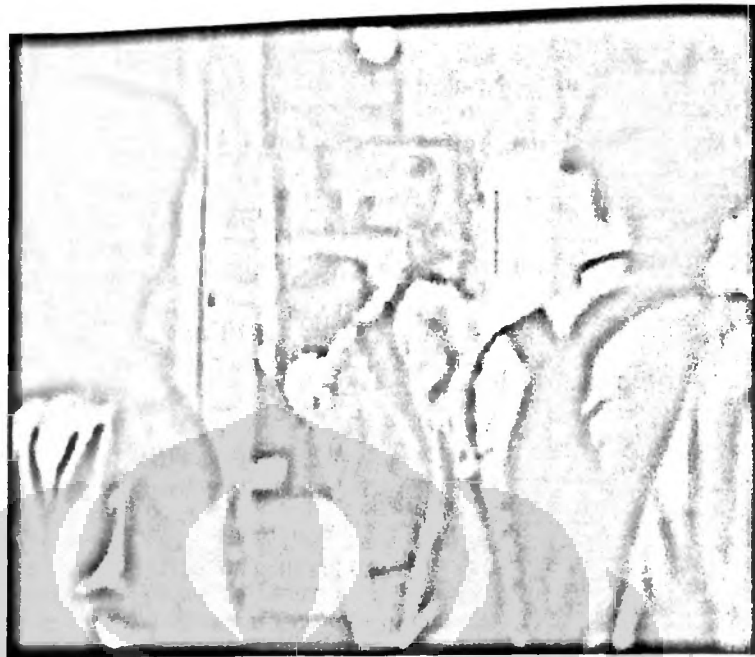
Adegan tersebut diikuti dengan adegan dimana terdapat kliping-kliping koran yang ditampilkan dalam jarak dekat. Berita koran yang ditampilkan tersebut menggambarkan aksi-aksi PKI di beberapa desa. Headline kliping tersebut secara mencolok menuliskan kekejaman PKI, seperti "*Peltu S. Soedjono tewas kepala petjah ditjanguk*". Cuplikan kliping-kliping koran masih disertai iringan musik yang menimbulkan kesan seram.



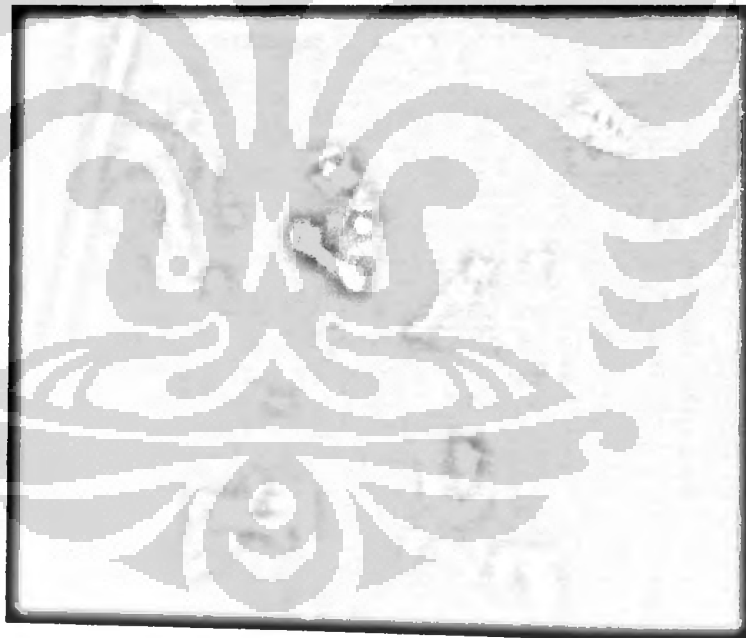
Gambar Kliping Koran
(Sumber Film Pengkhianatan G30S/PKI)

Setelah adegan kliping koran, adegan berikutnya terdapat di seputar suasana sakitnya Presiden Soekarno dan kekhawatiran PKI soal kemungkinan militer akan mengambil alih kekuasaan lewat Dewan Jenderal. Kemudian muncul kondisi sosial pada saat itu melalui penampilan keluarga sipil-fiktif yang membicarakan masalah antri beras. Dengan selingan dua adegan tersebut, layar dipenuhi kembali dengan penggambaran PKI saat membunuh seorang Mantri Air. Kekejaman pembunuhan digambarkan dengan penampilan sebuah arit yang berlumuran darah sedang dibersihkan dengan lembaran daun pisang.

Adegan berikutnya yang penuh dengan penggambaran kekerasan tentunya pada saat Pasukan Tjakrabirawa mengepung kediaman Jenderal-Jenderal dan menculik mereka. Penembakan atas Jenderal Ahmad Yani pada film ini digambarkan sangat dramatis, dimana terdapat pecahan kaca-kaca yang berantakan, darah yang berceceran, serta tubuh yang meregang. Penculikan atas Jenderal Nasution – yang berhasil meloloskan diri – disertai dengan terkenanya tembakan seorang putri Nasution yang bernama Ade Irma Suryani Nasution. Demikian juga adegan tewasnya Albert Naiborhu, seorang kerabat Jenderal Pandjaitan, dan penembakan terhadap Jenderal M.T. Haryono. Kejadian yang paling dramatis lagi dalam peristiwa penculikan tersebut adalah pada saat penculikan Jenderal Panjaitan dimana pada saat berdoa di teras rumahnya, Jenderal Panjaitan ditembak kemudian diseret dan dibawa pergi oleh Pasukan Tjakrabirawa. Setelah penembakan tersebut dan Panjaitan dibawa pergi terdapat sebuah adegan dimana seorang putri dari Jenderal Panjaitan berlari menuju teras rumah tempat dimana Panjaitan dibunuh dan darah yang berceceran dilantai teras tersebut kemudian diraup dan diusap-usap ke wajahnya tersebut.

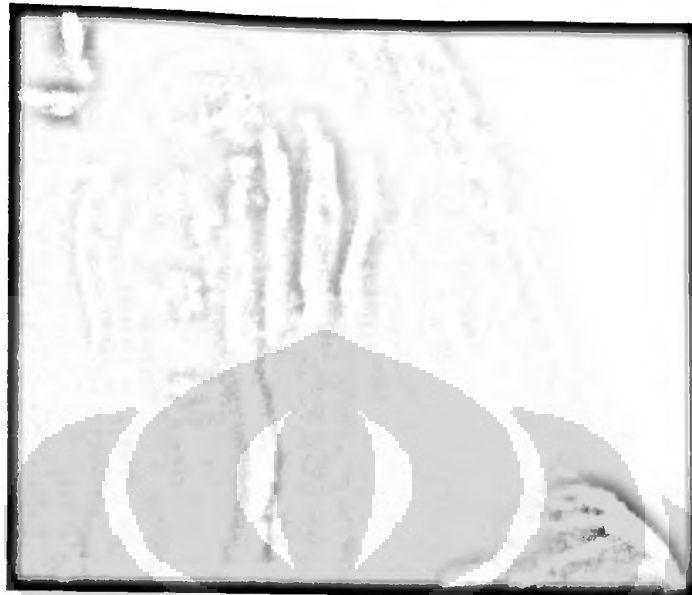


**Penembakan terhadap Jenderal M.T Haryono
(Sumber Film Pengkhianatan G30S/PKI)**



**Gambar Jenderal Panjaitan yang berdoa sesaat sebelum ditembak di teras
rumahnya**

(Sumber Film Pengkhianatan G30S/PKI)



Seorang Puteri dari Jenderal Pandjaitan yang sedang mandi darah
(Sumber Film Pengkhianatan G30S/PKI)

Pada adegan selanjutnya, setelah adegan penculikan, merupakan adegan penyiksaan di daerah Lubang Buaya yang juga tidak kalah sadisnya. Para Jenderal tersebut digambarkan tidak berdaya dan tangannya terikat oleh seutas tali. Pada saat penyiksaan tersebut terdapat anggota-anggota PKI yang sebagian besar berusia muda menyanyi dan menari dengan iringan lagu 'genjer-genjer'. Kemudian penyiksaan pun dimulai, para Jenderal yang diculki tersebut dipaksa menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa isu Dewan Jenderal itu benar-benar ada. Namun ternyata mereka menolak menandatangani dokumen tersebut, sehingga pada akhirnya mereka dipukuli, wajahnya disilet-silet, dan tangan mereka disundut dengan puntung rokok yang masih menyala. Seluruh adegan penyiksaan yang terbilang cukup detail itu di-*block* dengan latar belakang warna biru. Dengan begitu gambar penyiksaan, suara massa bernyanyi dan berteriak-teriak serta *blocking* warna biru mengisi seluruh adegan penyiksaan tersebut.



Pesta Pora Anggota PKI di Lubang Buaya
(Sumber Film Pengkhianatan G30S/PKI)

IV.2.7.3 Penggambaran Penghasut

Verbal

Penggambaran PKI sebagai penghasut dalam beberapa adegan menunjukkan sasaran hasutan kepada para petani serta masyarakat umum. Dalam adegan ketiga, yaitu pada saat narator menjelaskan aksi-aksi PKI di desa-desa dengan kamera menangkap klipring koran, narator menjelaskan :

Narator :

*“Tetapi kaum tani kemudian **dihhasut** oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak, melawan pemerintah.”*

Yang menjadi fokus penjelasan narator tersebut adalah hasutan yang dilakukan oleh PKI kepada para petani untuk melawan pemerintah. Secara verbal ucapan D.N. Aidit pada saat membicarakan isu Dewan Jenderal juga menggambarkan indikasi adanya hasutan, seperti pada pernyataannya berikut ini :

D.N. Aidit :

"Isu Dewan Jenderal berhasil kita hembuskan harus disebarakan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar...Pokoknya pers harus mutlak kita kuasai."

Pada saat PKI berhasil menguasai stasiun Radio Republik Indonesia, siaran dari stasiun RRI tersebut menyebarluaskan berita tentang Dewan Jenderal.

Penyiar Radio :

"Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan gerakan ini sangat aktif terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu untuk mencapai tujuannya Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang...Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan kup sebelum 5 Oktober 1965."

Bagian terakhir dari penggambaran PKI sebagai penghasut, secara verbal terlihat dari ucapan Jenderal A.H. Nasution pada saat mengantar jenazah para Jenderal Angkatan Darat :

A.H. Nasution :

"Dan karena itu kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah, bahwa kamu pengkhianat, justru disini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran. Fitnah...fitnah berkali-kali, fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua telah difitnah, dan saudara-saudara telah dibunuh! Diperlakukan demikian!"

Non Verbal

Dari keseluruhan adegan, adegan yang memperlihatkan PKI sebagai penghasut secara non verbal hanya tampil lewat corong radio yang suaranya terdengar sampai ke pelosok-pelosok kota. Tampak yang menjadi sasaran penghasutan itu adalah masyarakat luas terutama masyarakat yang ada di pelosok kota Jakarta.

Keberadaan film Pengkhianatan G30S/PKI memang memberikan suatu medium bagi masyarakat dalam memahami peristiwa 30 September 1965 dengan berbagai intrik dan penggambaran peristiwa tersebut didalamnya. Seperti diketahui juga melalui penggambaran audio visualnya, film memiliki kekuatan dalam mengajak penontonnya untuk terjun ke dalam khayali mereka dan merespon setiap penggambaran sebuah peristiwa atau adegan yang dimunculkan pada film Pengkhianatan G30S/PKI dan memahaminya dengan lebih mudah. Namun kelemahan dari sebuah film dalam mengangkat sebuah peristiwa atau kejadian adalah dengan keterbatasannya merangkum setiap peristiwa ataupun kejadian sesuai dengan kenyataan. Sehingga secara umum film hanya menampilkan sisi luarnya saja dari sebuah peristiwa atau kejadian tanpa memperhitungkan kedalaman kualitas dari sisi sejarahnya secara detail dan menyeluruh. Sehingga dengan begitu pada penelitian ini mencoba untuk menampilkan juga aspek historis lain yang melatarbelakangi peristiwa 30 September 1965 sebagai perbandingan dengan sejarah peristiwa yang dimunculkan pada film Pengkhianatan G30S/PKI.

IV.3 Anggapan Masyarakat Mengenai Penggambaran Komunisme dalam Film Pengkhianatan G30S/PKI

Setelah runtuhnya era Orde Baru dengan ditandai berbagai insiden yang melatarbelakanginya, kemudian muncullah era reformasi sebagai pengganti rezim otoriter Soeharto. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan di segala aspek dan juga pembaruan di segala bidang. Lahirnya era reformasi agaknya menjadi batu loncatan bagi praktik demokrasi di Indonesia. Pada sub bab ini penulis tidak akan banyak membahas mengenai era reformasi di Indonesia, tetapi lebih ditekankan

pada respon masyarakat di era reformasi mengenai wacana G30S yang cukup *booming* di era Orde Baru. Di sini penulis mencoba mendapatkan respon ataupun tanggapan mengenai peristiwa G30S melalui wawancara dengan beberapa informan yang pada era Orde Baru pernah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada lima informan yang pernah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI, penulis mendapati bahwa hampir semua informan mengalami ketakutan saat menonton film tersebut dengan berbagai adegan kekerasan yang dimunculkan. Dari sini dapat dikatakan bahwa setiap adegan kekerasan yang ada memang sengaja dibuat untuk menimbulkan ketakutan atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang (dalam hal ini PKI). Sehingga gambaran atas orang ataupun kelompok tertentu pada film tersebut menimbulkan kesan yang jahat, amoral, anarki, dan lain sebagainya. Dan agaknya melalui film tersebut, pembuat film berhasil merealisasikan tujuannya membentuk citra PKI sekaligus memberikan ketakutan kepada masyarakat akan PKI setelah menonton film tersebut. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan oleh lima informan tersebut.

Informan pertama bernama EN dengan umur 24 tahun. Informan pertama adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Informan tersebut juga pernah aktif menjadi anggota sebuah organisasi politik kemahasiswaan di kampusnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, informan mengaku pernah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di era Orde Baru terakhir saat duduk di kelas 6. Anggapan informan pada waktu itu setelah menonton film tersebut, PKI merupakan partai yang kejam, bengis, dan sadis sesuai dengan penggambaran dari aksi penculikan, penembakan, pembunuhan, dan penyiletan Jenderal-Jenderal sampai dimasukkan ke lubang.

"Pada waktu itu gw anggepnya PKI partai yang kejam, dari film kan siletin jenderal2, nyulik, nembakin, bunuh, masukin ke lubang ya kejam, bengis sadis.. Pngen ngerubah idelologi pancasila." (Hasil wawancara dengan EN)

Selain itu anggapan lain adalah bahwa PKI ingin merubah ideologi Pancasila. Menurutnya, setelah keruntuhan Orde Baru, dimana pada akhirnya film tersebut dihapuskan, terdapat kejanggalan dalam aspek historis dalam film tersebut yang dianggap tidak sepenuhnya benar.

“klo menurut gw begitu reformasi mulai 98 ke atas langsung diapus tuh, koq knp tiba2 diapus klo mang film itu mang bener, ternyata setelah gw belajar2 ternyata ga sepenuhnya bener” (Hasil wawancara dengan EN)

Anggapan seperti itu didapatnya setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber seperti dari membaca sebuah artikel ataupun setelah berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya. Kemudian yang menarik untuknya adalah mengenai tidak ada supersemar sebenarnya, menurutnya orang-orang yang benar-benar terlibat langsung dalam pembasmian PKI tidak ada yang berani menulis tentang isi sebenarnya supersemar tersebut dan dia pun mempertanyakan apakah supersemar itu ada atau tidak, dan walaupun tidak ada menurutnya tidak ada wewenang untuk membasmi PKI dan belum tentu PKI yang memiliki tujuan untuk mengukudeta negara.

“Soalnya dari gw baca2 dikit sama ngobrol sama orang2 mereka bilang itu semua rekayasa” (Hasil wawancara dengan EN)

“yang paling menarik buat gw tentang tidak adanya supersemar sebenarnya...ya kan orang2 yang bener2 terlibat langsung yang katanya membasmi PKI ga ada yang berani nulis apa sih sebenarnya isi supersemar itu sebenarnya, dan apa bukti adanya supersemar? dan itu yang menjadi pertanyaan buat gw...klo mang ga ada supersemar berarti ga ada urusan buat membasmi PKI jadi pki itu belum tentu dia beneran mau mengukudeta negara” (Hasil wawancara dengan EN)

Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan bentuk pemerintahan Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian di era Reformasi ini informan menganggap belum tentu PKI yang melakukan pemberontak, dan walaupun ingin memberontak tidak mungkin melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI. Menurutny, walaupun di era Reformasi ini muncul kembali paham komunis di Indonesia tidak menjadi masalah, dan menurut pengamatannya organisasi/kelompok mahasiswa pun sekarang sudah ada yang mengarah pada ideologi komunis, contohnya LMND dan menurutny sekarang bukan saatnya lagi untuk takut terhadap bahaya laten komunis seperti yang digembar-gemborkan pada era Orde Baru.

“Film pki itu menurut gw bentuk pemerintahan orde baru untuk mempertahankan kekuasaannya, jadikan pas jaman era 66, 65 gitu pki kan mulai banyak pendukungnya basis massanya mulai kuat jadi mereka takut untuk disaingi dan dijatuhin sama pki jadi mereka membuat peristiwa pki untuk menghabisi petinggi2 pki berikut pendukung2nya...” (Hasil wawancara dengan EN)

“Pada dasarnya klo gw liat sebenarnya lebih cenderung ke rakyat2 jelata, buruh, cuman ideologinya komunis, ga ada yang salah si sama ide komunis itu sendiri asal dia tetep ke pancasila, jadi setelah era reformasi anggapan gw ga kayak dulu karena menurut gw pki itu belum tentu pengen memberontak, klo pun mereka pengen ngeberontak ga mungkin ngelakuin kayak gitu...” (Hasil wawancara dengan EN)

“Kecenderungan ke arah sana sih gw liat uda ada,,dari ada partai apa?partai rakyat demokratik itu kan lebih ke arah apa ya?klo gw liat,,lebih ke arah kiri gitu sama kayak komunis, mahasiswa pun ada, dan itu banyak contohnya LMND,,, PRD partainya trus apa lagi ya? Gw lupa..” (Hasil wawancara dengan EN)

Informan kedua bernama JBA, 23 tahun. Informan kedua adalah pegawai swasta yang memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi. Informan pernah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di bangku Sekolah Dasar. Pada saat itu informan berpikir bahwa tindakan tersebut tidak selayaknya, biadab, dan tidak berperikemanusiaan seperti yang dilihatnya di televisi.

“Ya, pada saat itu saya hanya berpikir bahwa itu tindakan yang tidak selayaknya, biadab, dan tidak berperikemanusiaan karena emang seperti itu yang di sajikan ditelevisi” (Hasil wawancara dengan JBA)

Mengenai penghapusan film tersebut informan tidak terlalu memberi anggapan karena pada waktu itu ia tidak terfokus pada perkembangan yang ada dan hanya melihat PKI itu tetap dilarang. Pada era Reformasi ini, menurutnya terdapat perbedaan pandangan setelah membaca buku-buku terbitan yang dulunya dilarang dan banyak menceritakan sejarah sebenarnya mengenai PKI itu sendiri. Dan menurutnya juga, dari apa yang sudah dibaca tersebut, sebetulnya semua telah diatur oleh pihak yang ingin menjatuhkan Soekarno dan masyarakat tetap didorong untuk percaya partai komunis seperti yang digambarkan Orde Baru dan menurutnya hal ini sedikit membingungkan apakah sejarah tersebut benar atau tidak karena belum tentu yang digambarkan di buku tersebut juga benar.

“Ya mungkin saat itu yang digambarkan,,yang saya baca dari buku,,sebetulnya itu semua telah di atur oleh pihak yang ingin menjatuhkan sukarно, jadi masyarakat tetap didorong untuk percaya partai komunis seperti itu jadi dianggap tetap dilarang keberadaannya,,menurut saya saat ini ya agak sedikit membingungkan sejarah yang benar atau tidak,,karena belum tentu yang digambarkan di buku itu benar juga” (Hasil wawancara dengan JBA)

Terkait dengan pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI, informan mengatakan bahwa film tersebut hanya sebagai bentuk fungsi politik untuk mempertahankan kekuasaan dan mengilustrasikan bahwasanya Pak Harto yang

berjasa telah membasmi PKI termasuk untuk menyalahkan Soekarno seperti yang ia baca di buku.

“Menurut saya sih pada saat itu hanya sebagai bentuk fungsi politik untuk mempertahankan kekuasaan bahwa inilah pak harto yang berjasa telah membasmi pki, termasuk untuk menyalahkan sukarso seperti yang saya baca di buku..” (Hasil wawancara dengan JBA)

Berdasarkan buku yang ia baca, ia juga beranggapan bahwa Soeharto merupakan seorang oportunis, dimana kebetulan ia menjabat sebagai petinggi militer untuk memberantas/PKI sehingga namanya naik untuk dapat mencalonkan kedudukan Presiden yang didukung oleh pihak militer, sehingga film tersebut hanya untuk mempertahankan dari segi politik Soeharto saja. Menurutnya di era Reformasi ini masyarakat secara umum masih beranggapan bahwa bahaya laten komunis itu tetap ada.

Informan ketiga adalah T, 25 tahun. Informan adalah seorang pegawai BUMN yang tidak mau menyebutkan profil lengkapnya dalam wawancara. Informan terakhir menonton film Pengkhianatan G30S/PKI saat studi di Sekolah Dasar. Menurutnya penggambaran PKI dalam film tersebut lebih menonjolkan keburukan mereka walaupun menurutnya kita tidak pernah tahu seperti apa yang sebenarnya karena informasi yang simpang siur terkait dengan tragedi 30 September 1965 tersebut.

“Kalo gw liat lebih nonjolin kejelekan mereka sih,, ibaratnya meskipun kita ga tau artinya kayak apa karena emang kita ga pernah tau, datanya ga pernah keluar atau informasinya juga simpang siur dan ga jelas.” (Hasil wawancara dengan T)

Penilaian akan PKI pada waktu itu dilihatnya rusuh dan sadis setelah menonton film tersebut. Kemudian juga menurutnya terdapat hubungan antara

kejadian yang melibatkan PKI dengan Soekarno dan Soeharto, namun tujuan dan musababnya tidak tahu dan cenderung tidak peduli akan hal tersebut.

“Klo menurut gw semuanya pasti ada hubungan dengan kejadian2 yang terkait sama PKI,, Cuma tujuan dan sebab musababnya gw ga tau dan gw sendiri juga ga peduli..” (Hasil wawancara dengan T)

Dalam konteks reformasi, informan beranggapan kalau dulu Soekarno menganut paham tersebut, namun dalam artian Soekarno mencoba menampilkan sisi baik dari komunisme dan yang buruknya tidak diambil, dan setelah berbicara dengan orang-orang menurutnya komunisme bukan hal yang tabu lagi untuk dibicarakan.

“Klo gw sih mandang partai komunis,, klo gw bilang,,dulu soekarno pun nganut paham itu juga kan?!Cuma dalam artian paham komunis disini soekarno coba nampilin dari sisi yang baiknya diambil sama dia yang buruknya ya ga diambil..itu pun setelah gw ngobrol2 sama orang menurut gw sih fine2 aja negara komunis tu baik2 aja,,”

(Hasil wawancara dengan T)

Informan keempat adalah HS, 22 tahun merupakan seorang mahasiswa Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Informan menggambarkan PKI secara umum sebagai karakter yang jahat, pembunuh namun ia berpendapat mungkin saja itu hanya rekayasa Orde Baru. Informan terakhir menonton film Pengkhianatan G30S/PKI sekitar tahun 1995/1996 saat duduk di bangku kelas dua Sekolah Dasar. Pada waktu itu, setelah menonton film tersebut, yang ada dibenaknya adalah PKI jahat seperti penggambaran pembunuhan Jenderal-Jenderal dan ingin meng kudeta Soekarno.

“Karena mindset saya waktu masih kecil, maka anggapan saya waktu itu PKI itu jahat dari setingnya yang membunuh 8 jenderal dan ingin meng kudeta

presiden Soekarno, PKI itu jahat banget pengen ambil alih dan membunuh jenderal2, itu mindset saya waktu menonton film PKI” (Hasil wawancara dengan HS)

Menurutnya Orde Baru sengaja membuat penggambaran PKI yang melakukan pembunuhan, pembantaian, menyilet, dan menembaki orang-orang agar masyarakat menganggap PKI itu kejam, tetapi gambaran secara umum itu benar atau tidak, mereka tidak tahu. Informan mengakui pernah mengalami trauma setelah menonton film tersebut, terutama setelah penggambaran penyiksaan Jenderal-Jenderal yang disilet, dicuci air garam, dan semua yang berbau kekerasan yang dilakukan PKI dalam film tersebut.

“Ketika para jenderal disiksa kayak di siletin lah, dicuci air garam, pokoknya semua yang berbau kekerasan yang dilakukan PKI di film itu” (Hasil wawancara dengan HS)

Menurut pengamatannya, melalui film tersebut Soeharto ingin menunjukkan bahwa dia lah pahlawannya yang menumpas kekejaman PKI. Dalam konteks reformasi ini, setelah membaca beberapa referensi, informan beranggapan peristiwa G30S sebenarnya di-*setting* rezim Orde Baru agar Presiden Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden dan digantikan oleh Soeharto, dan berdasarkan referensi juga ia beranggapan bahwa tidak benar PKI ingin menggulingkan Pancasila yang sakti.

“Kalo suharto itu pengen nunjukin, kalo di bola itu man of the matchnya lah, jadi pahlawannya gambaran umumnya mengesankan kalo ga ada suharto PKI itu ga bisa ditumpas” (Hasil wawancara dengan HS)

Informan terakhir adalah SP, 23 tahun merupakan pegawai LSM yang juga alumni Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Informan mengaku belum lama menonton film Pengkhianatan G30S/PKI, namun pada era Orde Baru ia terakhir film ini saat ia duduk di bangku Sekolah Dasar.

“Yang pasti jahat, sadis, anarkis, anti-Tuhan ya begitu lah kira-kira pandangan gue pada waktu itu, apalagi pas ngeliat jenderal-jenderal pada disiksa, dibunuh, keji banget lah pokoknya.” (Hasil wawancara dengan SP)

Pada waktu itu ia beranggapan bahwa PKI adalah partai yang jahat, keji, sadis, anarkis, anti-Tuhan, terutama ketika melihat penyiksaan dan pembunuhan para Jenderal. Menurutny pada masa Reformasi, pembahasan mengenai komunisme tidak lagi seperti yang terjadi pada era Orde baru, seperti dilihat sudah banyak yang mulai membahas komunisme tanpa harus merasa kuatir layaknya pada era Orde baru dan juga buku-buku yang tadinya dilarang karena terkait dengan komunisme sekarang sudah mulai bermunculan. Ia juga beranggapan bahwa paham komunis mungkin saja bisa berkembang di era Reformasi ini, namun secara praktis agaknya kurang mendapatkan tempat di masyarakat.

“Kalo pahamnya sih mungkin bisa berkembang tapi secara praktis kayaknya kurang bisa deh, tapi sebetulnya gue setuju aja kalo berkembang soalnya bisa ngasi warna aja buat demokrasi di Indonesia.” (Hasil wawancara dengan SP)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa semua informan setelah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI di era Orde Baru beranggapan bahwa PKI adalah partai yang kejam, keji, anti-Tuhan, biadab, dan semua penilaian buruk seperti yang digambarkan pada film tersebut. Namun pada era Reformasi ini, setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru, mereka memiliki anggapan yang berbeda dengan anggapan sebelumnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa terjadi sebuah perubahan pandangan akan anggapan komunisme seiring dengan pergantian kekuasaan dan juga perkembangan informasi yang menambah khasanah pengetahuan dari setiap informan.

Kesimpulan BAB IV

Dengan menggunakan metode *critical discourse analysis* Fairclough, pada bab ini mencoba menganalisis bagaimana sebuah film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai wacana menggambarkan situasi, kejadian, serta peristiwa pemberontakan 30 September 1965 melalui kemunculan teks-teks, simbolisasi, serta tampilan audio-visual yang diungkapkan. Selain itu, penggunaan metode *critical discourse analysis* dibutuhkan juga untuk melihat intertekstualitas dalam film Pengkhianatan G30S/PKI untuk menganalisis secara historis mengenai latar belakang serta runutan peristiwa sejarah yang mempengaruhi terjadinya pemberontakan 30 September 1965. Berdasarkan penjelasan pada bab ini, penulis menyimpulkan bahwasanya film Pengkhianatan G30S/PKI mencoba memunculkan wacana ancaman bahaya komunisme melalui penggambaran PKI yang terkait dengan peristiwa pemberontakan dan menewaskan beberapa perwira tinggi seperti yang dimunculkan pada beberapa adegan di film tersebut. Namun agaknya masih terdapat beberapa kelemahan pada film ini dalam mengkaji aspek historis yang mendalam terkait dengan runutan sejarah yang menaungi peristiwa pemberontakan itu. Hal ini lah yang menjadi kekurangan dari media film sebagai penyebar wacana, dimana film terkadang hanya memunculkan beberapa bagian dari sebuah peristiwa sesuai dengan keinginan dari pembuatnya supaya tujuan pembuatan film tersebut dapat tercapai. Begitulah yang terjadi pada film Pengkhianatan G30S/PKI, film ini sepertinya menurut penulis dijadikan medium untuk menyebarkan wacana ancaman bahaya komunis kepada masyarakat sehingga mayoritas yang ditampilkan pada film tersebut berupa penggambaran-penggambaran negatif dari sisi PKI-nya, sedangkan aspek historis dari peristiwa sebelum peristiwa pemberontakan G30S/PKI kurang banyak dimunculkan walaupun disajikan pada film ini. Untuk itulah pada bab ini mencoba menggali secara lebih mendalam walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek historis mengenai kemunculan komunisme di Indonesia sampai pada kelahiran Orde Baru setelah lengsernya Orde Lama yang terkait juga dengan hubungan politis antara Sukarno, Militer, dan PKI yang berujung pada peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Jika merunut pada aspek historisnya, penulis meyakini

massal. Kelima, upaya yang sudah dilakukan dosen sejarah Universitas British Columbia, Kanada, menyebabkan perdebatan tentang siapa dalang G30S itu sudah sepatutnya diakhiri. Seyogyanya diskusi kini beralih tentang bagaimana proses pembunuhan massal 1965 itu terjadi dan mengapa sampai memakan korban demikian banyak? Jadi yang patut dipertanyakan bukan lagi sekedar “siapa dalang penculikan Jenderal” melainkan “siapa dalang pembantaian 1965”.

Lebih lanjut lagi, terkait kembali dengan siapa dalang pembantaian 1965 pada buku John Roosa dijelaskan bahwa tokoh kunci Gerakan 30 September Sjam Kamaruzzaman bukanlah agen ganda apalagi *triple agent* melainkan pembantu setia Aidit sejak bertahun-tahun. Pelaksanaan Biro Khusus PKI yang ditangkap tahun 1968 ini baru dieksekusi tahun 1986. Dalam dokumen Supardjo juga dijelaskan bahwa kelemahan utama Gerakan 30 September adalah karena tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan yakni kalangan militer (Untung, Latief, dan Sudjono) dan pihak Biro Khusus PKI (Sjam, Pono, Bono dengan Aidit di latar belakang). Disini Sjam memegang peran sentral karena berada dalam posisi penghubung antara kedua belah pihak. Namun ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Sukarno bahkan diminta untuk dihentikan, maka kebingungan terjadi, kedua kelompok ini pecah. Kalangan militer ingin mematuhi sedangkan Biro Khusus tetap melanjutkan, ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dengan kedua dan ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta dijelaskan oleh Asvi sebagai kesalahan besar. Pada pagi hari mereka mengumumkan bahwa Presiden dalam keadaan selamat, sedangkan pengumuman berikutnya siang hari sudah berubah drastis (Pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet). Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang disebutkan itu merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas aksi yang terjadi pada 30 September 1965 dan menewaskan enam Jenderal dan seorang Perwira Angkatan Darat. Secara umum juga dijelaskan bahwa Gerakan 30 September ini menjadi pemicu serangkaian kejadian seperti pemumpasan PKI, Pengambilalihan kekuasaan negara oleh tentara, dan pergeseran tajam posisi strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara.

BAB V

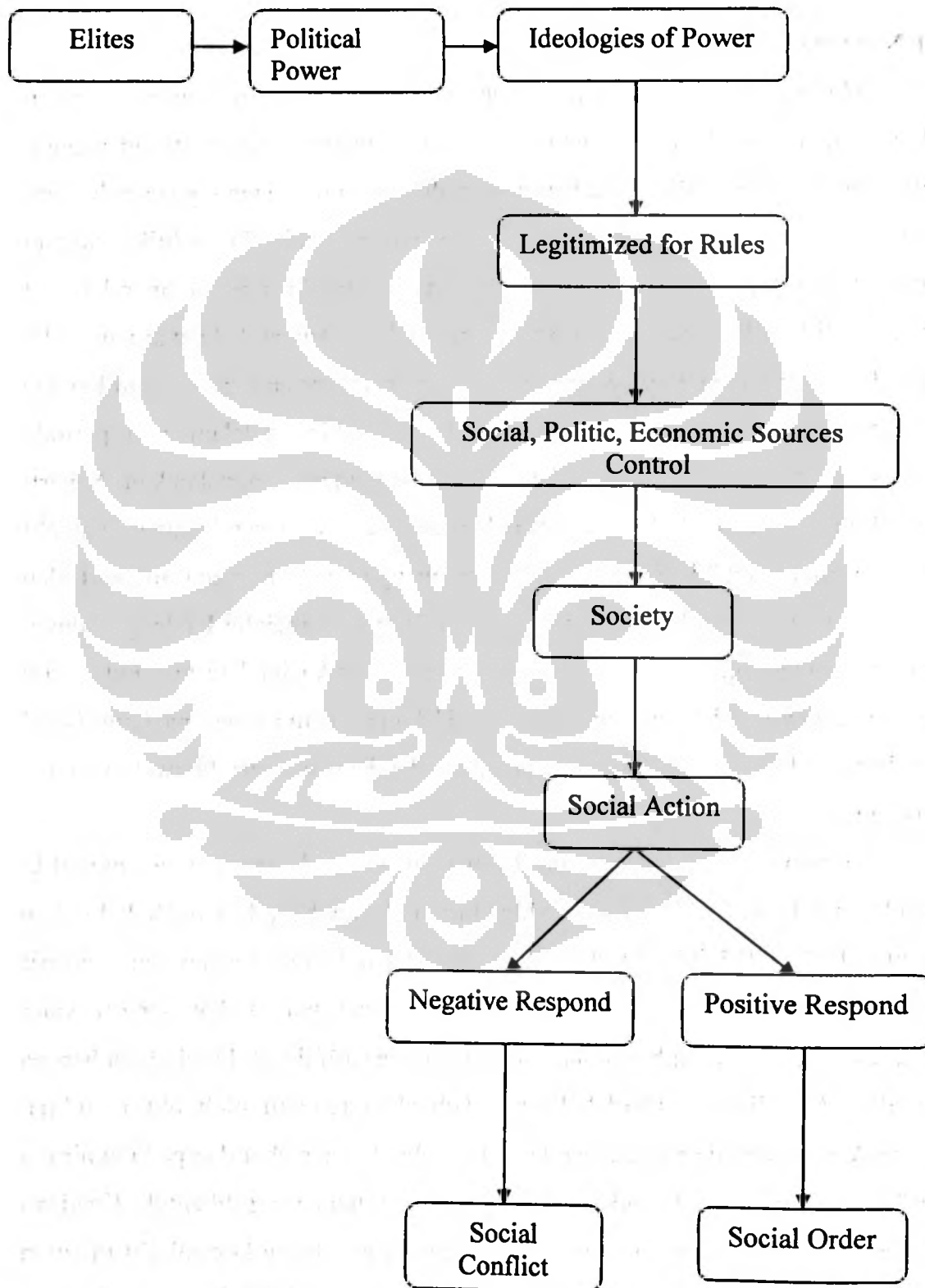
ANALISIS

V.1 Negara dan Kekuasaan Orde Baru

Makna '*Power*' secara harfiah mengandung artian sebagai sebuah kekuasaan, namun di dalam suatu sistem politik maupun pemerintahan negara, makna '*power*' itu sendiri dapat berarti memiliki suatu wewenang, pengaruh, serta penguasaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi elit politik ataupun pemerintah untuk melegalkan kebijakan serta memperkuat posisi mereka saat menjabat di legislatif maupun struktur pemerintahan. Dengan kekuatan yang ada, elit politik dapat menghimpun massa sekaligus memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mendukung karir politik mereka sehingga dalam suatu periode dan kondisi tertentu, posisi serta kedudukan dapat mereka pertahankan. Seperti yang diungkapkan oleh Mosca dalam konsep '*political formula*'-nya, saat elit berkuasa memungkinkan gagasan-gagasan maupun ide-ide yang muncul dan kemudian mendukung kedudukan elit dapat dilegitimasi melalui Undang-undang. Dengan adanya legitimasi gagasan-gagasan yang merekaciptakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dan mau tidak mau suatu proses '*pushing down*' akan berlaku bagi masyarakat pada umumnya dan bagi struktur dibawahnya pada khususnya.

Namun dibalik semua itu, kekuasaan pada dasarnya juga memiliki konsekuensi logis saat kekuasaan dilegitimasi dalam bentuk sebuah kebijakan tertentu. Dalam hal ini konsekuensi tersebut dapat berupa respon yang positif ataupun respon yang negatif dari setiap golongan masyarakat seperti yang dijelaskan pada bagan di bawah ini. Respon yang positif dapat diwujudkan berupa '*social order*' dimana diberlakukannya kebijakan tertentu oleh elit membuat masyarakat memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut dan pada akhirnya memberikan dukungan terhadap sistem maupun struktur yang dibentuk. Keadaan ini dapat berlaku apabila suatu masyarakat dijadikan sebagai kontrol elit maupun sistem pemerintahan yang selalu mengawasi berjalannya kebijakan yang berlaku

atau dalam hal ini masyarakat berperan dalam mengawasi dan menilai sejauhmana elit dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat sendiri.



Selain konsekuensi logis yang bersifat respon positif, kekuasaan juga memiliki konsekuensi logis yang bersifat respon negatif dari setiap golongan masyarakat yang berakibat pada terciptanya '*social conflict*', hal ini terjadi akibat penerapan kebijakan yang diciptakan elit tidak mewakili aspirasi masyarakat bahkan malah terkesan memberikan kebijakan yang 'mengekan'. Keadaan seperti ini kita temui pada rezim otoriter dimana negara memberlakukan keras kebijakan kepada setiap warga negara serta harus tunduk dan patuh terhadap rezim. Dengan kekangan dan penekanan ini, memungkinkan rezim mengatur negara dan masyarakatnya sesuai dengan kehendak rezim, sehingga siapapun yang menentang memiliki konsekuensi logis atas perbuatannya tersebut. Agaknya hal ini seperti yang terjadi pada rezim penguasa pada masa Orde Baru dimana kekuasaan dipegang secara absolut oleh rezim.

Rezim Orde Baru memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas yang ada di masyarakat pada masanya, namun stabilitas tersebut lebih memiliki kecenderungan terhadap kontrol sosial masyarakat yang berujung pada pemantauan kehidupan masyarakat. Mengambil konsep *panopticon* yang dikemukakan oleh Foucault, negara Orde Baru dalam hal ini seperti memberlakukan sistem penjara pada pemerintahannya dimana kekuasaan berhasil membuat rezim mengontrol kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat yang membuat masyarakat patuh dan tunduk terhadap rezim. Sehingga seperti yang dijelaskan juga oleh Foucault, negara diibaratkan seperti menara dalam sebuah penjara dimana setiap gerak-gerik yang dilakukan akan selalu diawasi secara ketat oleh penguasa (rezim) dan perangkatnya dalam rangka membentuk kepatuhan dan ketakutan bagi masyarakat didalamnya.

Negara pada dasarnya memiliki kepentingan untuk mengontrol kehidupan masyarakatnya, tetapi masalahnya adalah bagaimana kontrol tersebut dijalankan. Dengan batasan yang makin kabur antara *state* dan *civil society*, maka kekuatan militer dan polisi tidak memadai lagi sebagai penjaga kepentingan negara atas masyarakat mengingat memang tidak bisa semua aspek kehidupan disusupi oleh kehadiran alat negara. Dalam konteks ini, negara menjalankan hegemoni ideologi

agar masyarakat memiliki pemikiran yang sejalan dengan negara. Negara menjadi sebuah institusi yang reproduksionis yang dapat diartikan terus menerus memproduksi dirinya sendiri melalui hegemoni ideologi. Untuk menjalankan hegemoni ideologi tersebut, negara membutuhkan jaringan yang menyebarkan ideologi dari atas sampai ke bawah. Birokrasi pada negara reproduksionis menjadi tidak memadai lagi untuk menyebarkan ideologi. Maka eksistensi ideologi dijamin tidak lagi lewat birokrasi semata melainkan juga lewat unsur-unsur penting dalam *civil society* itu sendiri seperti lembaga pendidikan, kelompok bisnis, organisasi keagamaan, gerakan buruh, perdagangan, keluarga, kekerabatan, kesenian, dan media massa. Media massa dalam konteks ini termasuk penerbitan, televisi, radio, dan tentunya film. Dengan melihat apa yang tampak dalam muatan suatu media massa maka ideologi serta kepentingan ideologis negara akan tampak.

Adapun untuk membentuk kondisi masyarakat yang seperti itu, banyak yang dilakukan oleh rezim untuk mewujudkannya seperti yang dilakukan dengan pembentukan wacana melalui media. Wacana pada masa rezim Orde Baru telah banyak membantu dalam melanggengkan rezim ini dalam berkuasa, dan salah satunya adalah dengan memproduksi wacana yang membentuk ketakutan massa atas sebuah Partai Komunis Indonesia yang akan dijelaskan selanjutnya pada bab ini.

V.2 Produksi Wacana Orde Baru

Dalam masyarakat biasanya terdapat berbagai wacana yang berbeda, namun kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga menjadi wacana dominan, sedangkan wacana lain menjadi wacana alternatif yang terpendam atau terpinggirkan. Demikian juga halnya yang terjadi dalam wacana tentang PKI dan komunisme. Wacana tersebut sebenarnya bersifat kompleks, namun Orde Baru berkepentingan dengan wacana tersebut untuk kelangsungan rezimnya, maka Suharto memilih dan melanggengkan wacana tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kekuasaannya dan menyingkirkan wacana alternatif yang dinilai akan men-*delegitimasi*-kan kekuasaannya. Strategi wacana yang biasa

dipakai adalah penggambaran diri sendiri secara positif (*positive self presentation*) dan menggambarkan pihak lain secara negatif (*negative other presentation*). Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai pihak yang paling berjasa mengangkat bangsa Indonesia dari keterpurukan dan masa suram Orde Lama serta sebagai pahlawan penumpas komunisme. Orang-orang komunis digambarkan sebagai pemberontak, anti-Tuhan, kejam dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Wacana mengenai PKI hasil bentukan Orde Baru dianggap sebagai wacana yang paling sah dan menyingkirkan wacana lain yang menggambarkan sisi positif maupun aspek humanisme orang-orang PKI serta mengaburkan kekejaman dan diskriminasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Tanpa dukungan kekuasaan, wacana alternatif tentang PKI dan sisi negatif Orde Baru hanya menjadi obrolan yang tercecce di sudut kampung dan menjadi wacana yang diragukan kebenarannya.

Wacana tentang Partai Komunis Indonesia yang ada pada media massa secara umum adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu, selain melihat wacana dalam media juga perlu dilakukan kajian terhadap literatur dan bahan lain yang ada untuk melihat bagaimana proses produksi dan reproduksi wacana tentang PKI dalam masyarakat serta melihat bagaimana wacana tersebut diangkat kembali oleh media massa.

Untuk melihat proses produksi dan reproduksi wacana dalam masyarakat, van Dijk menawarkan apa yang disebutnya sebagai analisis sosial, sebuah model analisis sederhana untuk menguraikan bagaimana kelompok dominan membentuk wacana yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa menopang dominasi serta kekuasaannya. Menurut van Dijk, ada tiga hal penting yang dilihat dalam analisis sosial yaitu kekuasaan, dominasi dan akses (Elemen-elemen analisis sosial diambil dari Teun A van Dijk. "*Discourse and Cognition in Society*" dalam David Crowley & David Mitchell. 1994. Hal: 108-110 dan Eriyanto. 2001. Hal: 271-274). *Kekuasaan* didefinisikan oleh van Dijk sebagai kepemilikan yang dimiliki suatu kelompok untuk mengontrol kelompok lain. Kekuasaan ini umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai, semisal uang, status, dan pengetahuan. Selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan bersifat fisik,

kekuasaan juga bisa berbentuk persuasif yakni tindakan seseorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap dan pengetahuan.

Dominasi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan sosial. Pada kelompok yang berkuasa, dominasi menghasilkan berbagai macam bentuk ketidakadilan sosial. Dominasi direproduksi lewat pemberian akses khusus terhadap sumber-sumber sosial secara diskriminatif. Dominasi juga direproduksi dengan melegitimasi akses tertentu lewat bentuk-bentuk kontrol pikiran yang manipulatif dan cara lain agar kelompok yang didominasi bisa menerima keadaan tersebut secara suka rela.

Teun van Dijk juga melihat *akses* sebagai faktor penting dalam produksi wacana, bagaimana akses yang dimiliki setiap kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit biasanya mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Misalnya kelompok yang berkuasa mempunyai akses lebih besar terhadap media sehingga bisa mempengaruhi kesadaran khalayak dan bisa menentukan topik serta isi wacana apa yang dapat disebarkan kepada khalayak. Khalayak dan kelompok lain yang tidak mempunyai akses hanya akan menjadi konsumen dari wacana yang telah ditentukan, bahkan bisa memperbesar wacana tertentu lewat reproduksi dari apa yang telah mereka terima dari kelompok dominan.

Ketiga hal tersebut saling terkait, karena itu uraian analisis ini tidak dipilah-pilah berdasarkan elemen analisis sosial tapi berusaha menjelaskan bagaimana kekuasaan, dominasi, dan akses direpresentasikan dalam berbagai medium dan mempengaruhi wacana yang ada di dalamnya. Namun dominasi wacana tidak pernah terjadi secara mutlak, selalu ada celah bagi wacana lain untuk bertahan di tengah dominasi, meskipun hanya berskala kecil dan menjadi minoritas. Wacana alternatif mengenai PKI hidup di sela-sela dominasi wacana Orde Baru melalui medium yang tidak terkontrol oleh Orde Baru. Seberapa besar andil Suharto dan militer dalam hiruk-pikuk G30S masih belum menemukan titik terang, namun satu hal yang pasti, embrio Orde Baru lahir berpangkal dari tragedi tersebut. Lewat Supersemar Suharto memegang kendali dalam pembubaran PKI,

kemudian Orde Baru yang dikomando oleh Suharto memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Terpuruknya sektor ekonomi dan gonjang-ganjing politik yang terjadi pada masa Sukarno menjadi titik tolak Orde Baru untuk membangun Indonesia. Berbeda dengan Sukarno yang menjadikan politik sebagai panglima, Suharto justru menjadikan sektor ekonomi sebagai titik sentral pembangunan. Syarat utama pembangunan adalah adanya jaminan keamanan serta stabilitas nasional, tanpa jaminan keamanan, tidak akan tercipta ketertiban dan pembangunan tidak akan terwujud. Selama masa kekuasaannya, Orde Baru mendefinisikan beberapa hal yang dianggap sebagai musuh pembangunan. Kelompok atau perseorangan yang melancarkan kritik terhadap kebijakan Orde Baru dianggap mengganggu stabilitas nasional dan mengganggu proses pembangunan sehingga harus dibungkam.

Namun Orde Baru mempunyai musuh utama sejak orde tersebut lahir, yakni komunisme. Orde Baru dianggap sebagai pahlawan karena berhasil menumpas PKI yang menjadi sumber masalah pada masa Orde Lama, maka wacana tersebut terus diawetkan. Komunisme dilihat sebagai sosok yang menakutkan dan terus-menerus membayangi kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa ini tidak akan bisa membangun jika kelompok komunis ada di sekitar kita, mereka adalah orang-orang yang anti Tuhan, pemberontak, suka mengadu domba, dan menikam dari belakang. Kehadiran orang-orang komunis hanya akan mengacaukan tertertiban, menciptakan instabilitas. Orde Baru berhasil menanamkan “sisi gelap komunisme” dalam benak sebagian besar rakyat Indonesia lewat kontrol secara fisik maupun mental. Lewat berbagai medium yang ada, Orde Baru terus menerus menyebarkan wacana tentang bahaya laten komunis sehingga terbentuk semacam pengetahuan dalam masyarakat bahwa komunisme adalah ideologi yang sangat berbahaya. Wacana komunisme versi Orde Baru menjadi wacana dominan karena Orde Baru mempunyai akses khusus terhadap berbagai medium penting. Orde Baru mempunyai akses lebih besar terhadap berbagai medium wacana dibandingkan kelompok lain. Besarnya akses yang dimiliki Orde Baru menghasilkan dominasi wacana sehingga sebagian besar

masyarakat hanya mengetahui masalah G30S dan komunisme versi Orde Baru dan menghalangi wacana lain seputar masalah tersebut. Berikut diuraikan secara singkat beberapa medium yang dikuasai Orde Baru serta wacana tentang Partai Komunis Indonesia dan komunisme yang ada di dalamnya.

V.2.i Undang-Undang

Orde Baru melihat partai Komunis Indonesia benar-benar sebagai sosok yang sangat menakutkan sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada mereka untuk hidup. Setelah dibubarkan oleh Suharto lewat Supersemar, larangan terhadap penyebaran ajaran komunisme dikukuhkan dalam ketetapan MPRS Nomor XXV/1966. Tidak cukup sampai di situ, lewat berbagai undang-undang yang disusun, orang-orang yang dituduh terlibat baik secara langsung maupun tak langsung dengan PKI tidak boleh masuk dalam semua institusi pemerintahan maupun lembaga pelayanan publik lainnya dan dihilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

Larangan terhadap orang-orang ekS/PKI untuk berperan serta dalam Pemilu dikukuhkan dalam beberapa undang-undang yang disusun pada masa Orde Baru. Bahkan tradisi diskriminasi terhadap orang-orang ekS/PKI pun masih terjadi pasca reformasi, masih ada beberapa undang-undang yang disusun pasca tahun 1999 yang masih mencantumkan larangan terhadap orang-orang komunis.

Dalam UU No 15/1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Rakyat yang disusun pada awal kekuasaan Orde Baru, pasal 2 menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih. Kuatnya pengaruh wacana mengenai bahaya komunis yang disebarkan oleh Orde Baru pun masih dirasakan pada era reformasi. Dalam UU No. 3/1999 pasal 43 ayat 11 menyebutkan bahwa seorang calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya bukan yang terlibat secara langsung

atau tidak dalam G30S/PKI (Pasca Putusan MK soal Eks Anggota PKI, Perjalanan Masih Panjang. *Kompas*. 1 Maret 2004. Hal:8).

Dalam undang-undang lain disebutkan, jika pemerintah membutuhkan pendapat rakyat secara langsung melalui referendum, orang-orang eks komunis juga tidak berhak mengutarakan sikapnya karena tidak mempunyai hak suara. Seperti tercantum dalam UU No.5/1985 tentang referendum, pasal 11 ayat (2a) menyebutkan bahwa untuk dapat dari daftar dalam pemberi pendapat rakyat, harus dipenuhi syarat-syarat: bukan bekas anggota partai terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung/tak langsung dalam G30S/PKI (Pasca Putusan MK soal Eks Anggota PKI, Perjalanan Masih Panjang. *Kompas*. 1 Maret 2004. Hal:8).

Mengenai masalah peradilan, orang-orang eks komunis pun tidak diberi kepercayaan dan kewenangan untuk menjadi juru pengadil, baik dalam peradilan umum, peradilan tata usaha negara maupun peradilan agama. UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum, pasal 14 ayat (1d) menyebutkan, untuk diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, seorang calon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI. Dalam UU No. 5/1986 pasal 14 ayat (1d) disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan TUN seorang hakim bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan yang terlibat langsung/tak langsung dalam G30S/PKI. mengenai peradilan agama, UU No. 7/1989 pasal 13 ayat (1e) menyebutkan, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama seseorang tidak boleh bekas anggota partai terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI (Pasca Putusan MK soal Eks Anggota PKI, Perjalanan Masih Panjang. *Kompas*. 1 Maret 2004. Hal:8).

V.2.ii Pidato Kenegaraan

Suharto memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menyebarkan wacana yang memperkuat kekuasaan. Setiap medium yang tersedia baginya selalu dimanfaatkan untuk terus memupuk berbagai wacana yang menonjolkan

kepahlawanan Suharto dan mengingatkan kepada rakyat tentang bahaya yang dihadapi bangsa Indonesia. Salah satu medium yang memanfaatkan Suharto untuk mengingatkan rakyat akan bahaya komunisme adalah Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI. Setiap tanggal 16 Agustus ada suatu tradisi dimana Presiden RI menyambut hari kemerdekaan dengan pidato kenegaraan, materi yang disampaikan biasanya mengingatkan jasa para pahlawan serta tanggapan terhadap masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. ketika berkuasa, peringatan HUT Kemerdekaan RI juga dipakai oleh Suharto untuk mengingatkan kepada rakyat Indonesia akan bahaya laten komunis. Misalnya dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT Kemerdekaan RI pada tahun 1996, Suharto menyatakan bahwa pemberontakan PKI tahun 1965 merupakan tragedi nasional, kejadian tersebut meninggalkan luka-luka yang dalam dan lama pada tubuh bangsa kita. Itulah sebabnya, secara konstitusional PKI dan ideologi yang mendukungnya dilarang untuk selamanya di bumi Indonesia agar pemberontakan PKI dan sejenisnya tidak akan terulang kembali di tanah air (Eriyanto. 2000. Hal:105).

Suharto juga menjelaskan bahwa malapetaka nasional yang disebabkan oleh PKI telah membangkitkan kesadaran bangsa dan mengajak kita untuk merenungkan kembali perjalanan sejarah bangsa yang terjadi pada masa lampau. Iklim revolusioner yang terjadi pada masa Sukarno adalah hasil kerja PKI dan telah menciptakan suasana saling curiga, perpecahan, ketegangan, ketidakstabilan, kemerosotan ekonomi dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Ringkasnya suasana nasional pada masa itu sama sekali tidak mendukung iklim pembangunan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Suharto menyimpulkan bahwa semuanya terjadi karena kita tidak setia dan menyimpang dari Pancasila dan UUD 45 (Eriyanto. 2000. Hal:105). Pada kesempatan lain, dalam Amanat Kenegaraan Suharto mengemukakan beberapa masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia, salah satunya adalah bahaya laten komunisme yang harus tetap diwaspadai karena unsur-unsur laten komuis masih tersisa (Virginia Matheson Hooker. 1996. Hal:57).

V.2.iii Buku

Penghancuran terhadap kelompok komunis dilakukan secara sistematis oleh Orde Baru, semua aspek yang berbau kiri dimusnahkan, termasuk lembaga-lembaga politik dan kebudayaan. Buku menjadi salah satu pusat perhatian Orde Baru dalam menangkal tumbuhnya komunisme, buku-buku yang dianggap berbau kiri atau ditulis oleh penulis dari kelompok kiri dimusnahkan. Selain itu, penguasa juga menerbitkan buku pelajaran dan buku putih yang menggambarkan keburukan orang-orang komunis.

Sejak periode 1965-1996, Orde Baru diperkirakan telah melarang 2.000 buku. Dua bulan pasca kudeta 1 Oktober, Kolonel K. Setiadi Kartohadikusumo dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan melarang peredaran 70 buku di semua lembaga pendidikan secara nasional. Kebijakan tersebut diikuti dengan serangkaian larangan terhadap semua karya 87 orang pengarang yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI. Pada tahun-tahun berikutnya, berbagai lembaga pemerintah melarang dan memusnahkan buku-buku yang ditulis dan diterbitkan oleh orang-orang yang dicurigai berhaluan kiri. Pada tahun 1967, Tim Pelaksana/Pengawasan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dan Marxisme-Mao Tse Tungisme melarang kepemilikan, peredaran atau penjualan 174 judul buku dan majalah di dalam wilayah kota Jakarta (Krishna Sen dan David T. Hill. 2001. Hal:44). Pada tahun-tahun berikutnya di masa kekuasaan Orde Baru, pelarangan buku masih terus berlangsung namun jumlahnya semakin mengecil.

Selain melarang dan memusnahkan buku-buku yang dinilai berhaluan dan ditulis orang-orang yang berhaluan kiri, Orde Baru juga menyusun buku yang menggambarkan bagaimana peran PKI dalam peristiwa G30S. Buku pelajaran sejarah Indonesia dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi juga diisi dengan penggambaran tentang PKI dan peristiwa G30S menurut versi Orde Baru. Salah satu buku yang menggambarkan secara detil tentang PKI adalah buku putih berjudul "Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia". yang diterbitkan Sekretariat Negara RI. Buku tersebut menjelaskan secara rinci pertumbuhan PKI sebelum dan pasca kemerdekaan, aksi subversi yang pernah

dilakukan serta menguraikan bagaimana kudeta G30S yang dilakukan oleh PKI telah dipersiapkan jauh hari secara matang.

Dalam buku tersebut digambarkan bahwa sejak awal berdirinya PKI, yakni sebelum masa kemerdekaan sampai dengan dibubarkan, orang-orang komunis lebih banyak merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. PKI juga dinilai sama sekali tidak mempunyai andil dalam persiapan proklamasi kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan. Setelah gagal dalam pergolakan melawan pemerintah Belanda tahun 1926-1927, tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang PKI sampai RI merdeka. Karena itu, tidak ada orang-orang komunis yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) maupun aktivitas lain dalam memperjuangkan kemerdekaan dan tercetusnya Proklamasi Kemerdekaan RI. Dengan demikian, baik dalam persiapan proklamasi maupun penyusunan Pembukaan dan UUD 1945 serta selama perang kemerdekaan tahun 1945-1949, PKI tidak pernah ikut serta (Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. hal: 15-16).

Setelah Indonesia merdeka, kehadiran PKI hanya mengacaukan kehidupan bangsa Indonesia. Pada tahun 1948, tokoh-tokoh komunis mengadakan pidato-pidato yang bernada membakar emosi massa di Yogyakarta dan Madiun. Aksi-aksi yang mendiskreditkan pemerintah RI dilancarkan, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) melakukan aksi pemogokan di Delanggu, pegawai-pegawai pemerintah dan tokoh-tokoh partai yang bukan komunis diteror, dan di depan rakyat banyak Muso senantiasa menggembarkan janji-janji muluk PKI. Pada 18 September 1948 kaum komunis melakukan perebutan kekuasaan di Madiun dan memproklamirkan berdirinya "Soviet Republik Indonesia". Sehari kemudian, Muso membentuk Pemerintah Front Nasional, PKI juga merebut obyek-obyek vital seperti kantor pemerintah, kantor pos, bank dan markas polisi serta militer. Dua minggu kemudian, pasukan TNI berhasil menguasai kembali kota Madiun dan menumpas pemberontakan PKI (Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan

Penumpasannya.. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. hal: 21-22).

Setelah gagal dalam pemberontakan Madiun, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Namun setelah direhabilitasi pada tahun 1950, Alimin mengaktifkan kembali PKI dan mulai menyusun kekuatan lagi. Pada tahun yang sama D.N. Aidit mengambil alih pimpinan PKI, terus berusaha merehabilitasi nama PKI dan menyatukan seluruh potensi partai. Pada tahun 1954 PKI melancarkan strategi “Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan” (MKTBP) untuk memperluas pengaruhnya di kaum buruh tani, petani miskin dan buruh kota, menetralsir lawan-lawan politiknya dengan menyusup ke dalam Angkatan Bersenjata, aparat negara, partai politik dan organisasi massa serta menyiapkan dukungan yang luas di kalangan rakyat Indonesia terhadap program-program PKI.

Sebelum melakukan pemberontakan G30S, PKI melakukan kegiatan untuk meningkatkan situasi ofensif revolusioner, antara lain dengan melakukan sabotase terhadap transportasi umum Kereta Api oleh Serikat Buruh Kereta Api sehingga menyebabkan tabrakan kereta api di stasiun Purwokerto, Kaliyasa, Kroya, Cirebon, Semarang dan Cipapar Jawa Barat (Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya.. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. Hal:49). Selain aksi sabotase, Barisan Tani Indonesia (BTI) juga melakukan Aksi Sepihak, menuntut pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang No.2/1960 yang mengatur tentang bagi hasil tanah pertanian dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960. Terkait dengan hal ini, Pramoedya Ananta Toer mengatakan :

“saya sendiri pernah berhadapan dengan Aidit, waktu membicarakan persoalan UUPA. Menurut Undang-undang itu orang Indonesia tidak boleh mempunyai tanah lebih dari tiga sampai lima hektar. Lebih dari itu, tanah harus diserahkan kepada petani yang tidak mempunyai tanah. Tapi yang mempunyai tanah kan melawan. Ketika bicara soal ini saya berhadapan dengan Aidit berdua.

Aidit bangga bahwa dalam mempertahankan UUPA petani Kabupaten Bandung berani mencabut golok. Saya bilang "itu tidak betul. PKI belum berkuasa. Kalau terjadi apa-apa bagaimana?" ternyata betul. Betapa banyaknya petani yang dibunuh pada tahun 1965 hanya karena mereka menyetujui gerakan kiri dan ikut dalam gerakan kiri, terutama ikut mendapat keuntungan dari UUPA. Ini pembucaraan berdua, tidak ada saksinya. Sebelumnya saya sudah mengingatkan, "PKI belum berkuasa, kalau terjadi apa-apa bagaimana?". (Wardaya, 2001 : 56)

Akibatnya, Di Klaten ratusan anggota BTI mengeroyok seorang petani karena masalah sewa-menyewa tanah pertanian, dan di desa lainnya sekitar 200 orang anggota BTI membabat padi milik seorang petani dengan paksa. Di Sumatra Barat, BTI menyerobot tanah perkebunan milik Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) dan menanaminya dengan pohon pisang. Ketika berusaha menertibkan aksi tersebut dan membersihkan pohon pisang yang ditanam, seorang Pelda TNI AD dikeroyok hingga tewas oleh sekitar 200 anggota BTI dan PR (Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya.. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. hal:51-52).

Setelah tercipta situasi ofensif seperti yang diinginkan, menjelang dini hari tanggal 1 Oktober 1965 PKI melakukan aksi perebutan kekuasaan. Pasukan yang telah ada di bawah kendali PKI dikerahkan untuk menculik tujuh jenderal dari kediamannya masing-masing. Ketujuh jenderal tersebut di bawa ke basis gerakan di Lubang Buaya. Tiga jenderal dibawa ke Lubang Buaya dalam keadaan telah tewas, sedangkan empat orang lainnya yang masih hidup disiksa oleh anggota Gerwani hingga tewas dan semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur, ditimbun dengan sampah dan tanah, kemudian di atasnya ditanami pohon pisang untuk menghilangkan jejak (Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya.. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. hal:103).

Pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.00 WIB, siaran RRI mengumumkan adanya Gerakan 30 September. Pukul 14.00 WIB pada hari yang

sama, Letkol Inf. Untung sebagai Komandan Gerakan Militer mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, nama-nama tokoh PKI dan non PKI mengisi jabatan Dewan revolusi. Dewan Revolusi yang dibentuk oleh Gerakan 30 September merupakan upaya PKI untuk menipu rakyat dengan memanipulasi nama tokoh-tokoh, baik politik maupun ABRI yang anti komunis.

Setelah mengumpulkan berbagai informasi tentang G30S Mayjen Suharto menyimpulkan bahwa G30S adalah gerakan PKI yang bertujuan menggulingkan dan merebut kekuasaan dari pemerintah RI yang sah. Berdasarkan keyakinan itu, Suharto mengkonsolidasikan kekuatan militer yang tidak mendukung G30S dan mulai bergerak menguasai obyek-obyek vital yang telah dikuasai oleh kelompok pemberontak. Setelah diketahui secara jelas bahwa dalang G30S adalah PKI, berbagai kelompok massa pemuda, pelajar dan mahasiswa secara spontan mengadakan aksi-aksi penyerbuan gedung-gedung milik PKI serta ormasnya, bentrokan fisik tidak dapat dihindarkan. Pada akhir 1965 pemerintah membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang salah satu tugasnya adalah memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat-akibat peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI, kegiatan-kegiatan ekstrem dan kegiatan subversi lainnya (Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya.. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. hal:137). Puncak pembekuan kegiatan PKI adalah dengan disahkannya Tap MPRS Nomor XXV/1966 yang melarang PKI dan komunisme hidup di Indonesia.

V.2.iv Penataran P4

Orde Baru menilai pemerintahan yang dijalankan oleh Sukarno tidak menjalankan Pancasila secara benar. Ajaran Nasakom yang diperkenalkan oleh Sukarno dinilai sebagai bentuk penyelewengan terhadap ideologi negara. Pancasila disalahtafsirkan sebagai gabungan dari paham Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Nasakom). Karena itu, setelah berkuasa Orde Baru memandang perlu diadakan usaha-usaha untuk memurnikan kembali Pancasila agar tidak tercemar dengan unsur komunisme. Tugas pemurnian Pancasila selesai pada tahun

1978 dengan keluarnya ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” (P4). Wujud implementasi Tap tersebut adalah diadakan penataran P4 untuk pegawai negeri, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa.

Karena pertimbangan bahwa ajaran yang bersumber dari paham komunisme adalah ancaman laten bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan karena kegiatan mempelajari paham komunisme/Marxisme-Leninisme secara ilmiah dalam rangka mengamankan Pancasila harus dilakukan secara dipimpin di bawah kendali pemerintah, maka dikeluarkan Instruksi Presiden No.10 Tahun 1982 kepada Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk menyelenggarakan Penataran Kewaspadaan Nasional bagi pejabat Eselon I pada departemen dan instansi pemerintah lainnya. Pelaksanaan Penataran Kewaspadaan Nasional kemudian diperluas kepada berbagai lapisan masyarakat lainnya, baik secara khusus maupun sebagai bagian dari penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) (Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya.. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. hal:4).

V.2.v Film

Setelah Suharto menduduki puncak pimpinan Pasca tragedi G30S, dunia perfilman Indonesia juga tidak luput dari pembersihan terhadap unsur-unsur komunis. Para pembuat film beraliran kiri yang terkemuka dipenjarakan, atau minimal dikucilkan dan dijauhkan dari dunia perfilman, semua media organisasi kebudayaan kiri dihancurkan dan film-film mereka pun dilarang. Pasca G30S, lembaga sensor yang masih bernama Badan Sensor Film (BSF) juga dibersihkan dari anggota yang dinilai berhaluan komunis. Pada dekade awal kekuasaan Orde Baru, banyaknya aturan pra-sensor yang ditambahkan oleh BSF membuat produksi film lokal semakin ketat disensor dibandingkan dengan semua film impor. Sensor yang dilakukan BSF (pada tahun 1992 berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film) lebih ditekankan pada masalah seks dan kekerasan serta

perlindungan terhadap kebudayaan nasional dari budaya asing. Tak ada petunjuk lebih jauh mengenai apa yang disebut kebudayaan asing, namun dalam aturan tersebut mencantumkan ideologi kolonialisme, imperialisme, fasisme dan semua bentuk komunisme dalam daftar kriteria budaya asing yang harus ditolak (Krishna Sen dan David T. Hill. 2001. Hal:164). Semua film harus dilarang jika memiliki kemungkinan menghancurkan kesatuan dan persatuan agama di Indonesia, mengancam pembangunan kesadaran nasional, mengeksploitasi perasaan etnis, agama, gender dan ketegangan sosial, termasuk antar kelas sosial. Film dilarang mengungkapkan rasa ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah atau apapun yang dapat menyebabkan kerusakan bagi orang atau lembaga yang berhubungan dengan pemerintah (Krishna Sen dan David T. Hill. 2001. Hal:164).

Pada tahun 1981, Pusat Produksi Film Negara menugaskan Arifin C. Noer untuk membuat film tentang pemberontakan PKI dengan judul “Pengkhianatan Gerakan 30 September”. Film kolosal yang berisi kekerasan dan pidato politis ini diproduksi dengan biaya besar yang ditanggung oleh Orde Baru dan menceritakan tentang peristiwa G30S tahun 1965. Isi cerita film ini sama dengan apa yang sudah digambarkan oleh pejabat Orde Baru dan sejarawan mengenai peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 dan setelahnya. Film tersebut menggambarkan Sekelompok anggota TNI yang ada dalam pengaruh Letkol Untung merencanakan kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan Sukarno dan memasang Partai Komunis Indonesia ke pucuk pimpinan kekuasaan. Mereka menculik enam jenderal serta seorang perwira Angkatan Darat dan bersama anggota Gerwani mereka menyiksa para jenderal secara brutal dan membunuhnya. Dalam film tersebut digambarkan bagaimana Mayjen Suharto mengkonsolidasikan kekuatan TNI yang terpengaruh oleh orang-orang PKI, kemudian merebut kembali obyek-obyek vital yang dikuasai pemberontak, menghancurkan kepemimpinan PKI serta berhasil membunuh Letkol Untung.

Orde Baru kemudian mewajibkan film “Pengkhianatan Gerakan 30 September” diputar di sekolah-sekolah dan departemen pemerintah. Bahkan sejak 1981-1997 film tersebut disiarkan oleh TVRI setiap tahun menjelang peringatan G30S dan hari Kesaktian Pancasila serta di-*relay* oleh stasiun televisi swasta. Hal

ini bertujuan agar semua masyarakat menyadari akan bahaya laten komunis jika berkembang di Indonesia sekaligus menanamkan kesadaran akan pentingnya stabilitas seperti yang digembar-gemborkan oleh Orde Baru selama pemerintahannya berkuasa.

V.3 Sinema Indonesia dalam Periode Orde Baru

Merujuk pada definisi Ben Anderson bahwa bangsa adalah “sebuah komunitas politik yang dibayangkan – dan dibayangkan sebagai secara alamiah terbatas dan berdaulat” (1996.Hal:6). Meskipun Anderson sangat berfokus pada budaya cetakan, ia juga menyentuh pentingnya visualitas dalam proses pembuatan mitos nasional. Dalam diskusinya mengenai serangkaian lukisan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia di tahun 1950an dan didistribusikan ke sekolah-sekolah, Anderson menyingkap bagaimana lukisan Borobudur menandai identitas nasional dengan menciptakan rasa nostalgia dari ‘masa lalu’ ideal bangsa, bahkan sebelum Indonesia dibentuk (1991. Hal:184) Namun terdapat anggapan yang mengkritik asumsi dasar Anderson bahwa kebangsaan tidak berubah setelah terbentuk dan Anderson gagal untuk melihat sifatnya yang berubah (Lihat Alan Williams. 2002. Hal:1-4). Analisis penulis terhadap film *Pengkhianatan G30S/PKI* akan mendemonstrasikan bagaimana ide Suharto terhadap nasionalisme. Sadar sepenuhnya akan kekuatan citra, rezim Suharto mengontrol sinema melalui peraturan film dan penyensoran. Dalam peraturan Orde Baru tahun 1992, sinema didefinisikan sebagai bentuk komunikasi massa untuk mengembangkan budaya nasional dan untuk meningkatkan keamanan nasional (Undang-Undang Film Indonesia no. 8/ 1992).

Menekankan pada fungsi sinema dalam istilah komunikasi dan bukan sebagai seni, pemerintah menempatkan film di bawah Departemen Penerangan, bersama radio dan televisi, sedangkan literatur dan seni ditempatkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Politisasi sinema tidaklah unik maupun baru bagi rezim Suharto (Berlaku sejak periode kolonial, ketika perusahaan film pertama dan Badan Sensor Film didirikan tahun 1925. Di antara 1942-1945, Jepang melatih orang Indonesia untuk membuat film-film dokumenter dan

propaganda untuk tujuan politik. Fungsi politik sinema tetap bertahan di rezim Sukarno. Sukarno mempertahankan Pusat Produksi Film Negara, yang sekarang dinamai Pusat Produksi Film Negara (PFN), dan ia juga mempertahankan Badan Sensor Film (BSF) untuk melindungi film Indonesia dari pengaruh luar. Di tahun 1964, film Amerika dilarang sama sekali). Perbedaan utama antara kebijakan film Suharto dengan era sebelumnya bersandar pada isu “keamanan nasional”. Sementara Sukarno berfokus pada penjagaan budaya nasional dari pengaruh luar atau impor dari luar, gagasan Suharto mengenai “keamanan nasional” adalah untuk mengatur film-film lokal. Disini Suharto mengimplementasikan kebijakan pintu terbuka, membiarkan film-film Amerika memasuki pasar Indonesia dan mengancam produksi lokal. Film-film import tidak dianggap sebagai representasi lokal yang berbahaya terhadap etnik, kelas dan konflik religius. Film Indonesia harus setia pada “Bhineka Tunggal Ika”, dan maka representasi tekanan sosial yang mengganggu persatuan harus dihindari. Ben Anderson berargumen bahwa Indonesia ditemukan pada tahun 1928, ketika orang-orang dari koloni Hindia Belanda berkumpul dalam kongres pemuda dan bersumpah untuk mengakui satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. (1991. Hal:119). Motto “Bhineka Tunggal Ika” adalah strategi untuk mengikat 3000 pulau, agama-agama yang berbeda (Islam, Buddha, Katolik, Protestan, Hindu), dan lebih dari 100 kelompok etnis Indonesia. Sebuah ideal diajarkan sejak sekolah dasar, yang dapat dianggap sebagai teks yang memproduksi apa yang disebut Anderson sebagai “sebuah jagat pengalaman yang bertahan sendiri dan koheren”.

Kekhawatiran rezim terhadap isu stabilitas dapat dimengerti karena Suharto berkuasa setelah serentetan krisis ekonomi dan politik, yang mencapai puncaknya pada tragedi 1965. Berdasarkan versi sejarah Orde Baru, sebagaimana dinarasikan dalam film *Pengkhianatan G30S/PKI*, anggota PKI merencanakan kudeta dan berakhir dengan keberhasilan membunuh enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat. Jenderal Suharto memobilisasi tentara untuk menyelamatkan bangsa dari komunis yang ‘jahat’. Diantara 1965 dan 1966, tentara membunuh dan memenjarakan orang-orang yang dicurigai menjadi anggota PKI untuk ‘menstabilkan’ situasi (Lebih dari 500.000 orang dibunuh dan

700.000 orang dikirim ke penjara tanpa pengadilan. Lihat Greg Poulgrain, "Who Plotted 1965 Coup," dalam *Inside Indonesia* No. 57. January-March. 1999). "Stabilitas" kemudian menjadi kata kunci bagi Suharto untuk membedakan rezimnya dari periode sebelumnya yang tidak stabil. Di era dimana negara menaklukkan bangsa (Ben Anderson. Hal:109), "keamanan nasional" yang merujuk pada "keamanan internal" muncul sebagai kontrol ketat pemerintah di semua sektor masyarakat.

Sinema dalam periode Orde Baru dikontrol melalui berbagai tingkat produksi. Sementara penyensoran bukan fenomena yang baru dalam industri film, institusionalisasi sinema Orde Baru juga sangat bergantung pada pra-penyensoran. Sebelum syuting dimulai, naskah harus diajukan untuk persetujuan kepada Direktorat Film di Departemen Penerangan Krishna Sen dan David T. Hill. Hal:66). Kadang-kadang Dewan akan menyarankan pembuat film untuk memodifikasi bagian-bagian dari film agar melewati sensor. Penyensoran yang ketat tidak berarti selalu menghasilkan tema film dan representasi yang homogen (Selera pasar juga berkontribusi terhadap isi film, yang menjelaskan mengapa adegan pemerkosaan sering diluncurkan untuk menunjukkan tubuh perempuan karena penggambaran tindakan seksual sukarela tidak didukung. Faktor lain yang mengkomplikasi hegemoni Orde Baru dalam industri film adalah perlawanan halus dari para pembuat film. Film *Syumanjaya* di tahun 1970an, sebagai contoh, selalu berputar pada tekanan kelas, isu sensitif selama masa Orde Baru. Sebagai sutradara, *Syumanjaya* berhasil memasukan pandangan Marxisnya). Namun, proses ini telah secara signifikan mendefinisikan batas-batas dari apa yang penonton Indonesia boleh bayangkan dan konsumsi, yang menggiring pada penyensoran-diri atas nama pembuat film- bahkan sebelum penyensoran resmi dijalankan. Karena politik adalah topik yang tabu, sinema Indonesia dalam Orde Baru semestinya diisi oleh film-film yang apolitis. Film-film ini bisa mengenai keluarga, percintaan remaja, atau apapun yang terlihat tidak terkait dengan politik, namun batas antara politik dan bukan politik dapat ditembus, banyak diantara film-film ini sesungguhnya mempromosikan ideologi Orde Baru. Politik mungkin muncul dalam film-film sejarah yang merepresentasikan bangsa dalam

perjuangan, namun kompleksitas sejarah politik telah dihapus dan dibingkai dengan paradigma monolitik Orde Baru. *Pengkhianatan G30S/PKI* ada di antara film-film berbiaya besar yang diproduksi oleh Perusahaan Film Nasional (PFN) untuk mempromosikan citra Suharto sebagai pahlawan dan peran penting militer dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan penjelasan ini dapat dikatakan bahwa media film telah menjadi sebuah alat komunikasi bagi rezim Orde Baru dalam rangka penguatan citra kepahlawanan Suharto dan sekaligus memendam citra Partai Komunis Indonesia dengan *image* penuh dengan kekejaman dan jahat. Agaknya strategi Orde Baru menciptakan film dokumenter mengenai peristiwa G30S ini telah berhasil memantapkan kekuasaannya selama beberapa dekade sampai kerutuhannya di tahun 1998. Dari sini dapat dilihat bahwa film menjadi media yang cukup efisien dalam menanamkan pandangan masyarakat akan sosok seseorang maupun sekelompok orang tertentu.

V.4 Peran Negara Orde Baru Pada Film Pengkhianatan G30S/PKI

Melihat kembali ke belakang, terdapat indikasi bahwa kekuatan sejarah yang berkembang pada era tahun 1960-an memiliki andil dalam menggulingkan Orde Lama dan melahirkan Orde Baru (*The flamboyant of what now is called "Old Order" has been replaced by the muted desperation of the "New Order"*). Clifford Geertz. *"Afterword : The Politics of Meaning"* dalam Claire Holt (ed). Siegel, James. Benedict R. O'G Anderson. 1972). Oleh karena itu dalam memahami Orde Baru, adakalanya kita juga harus menengok kembali rezim Demokrasi Terpimpin. Dalam hal ini Mochtar Mas'ood menyatakan bahwa munculnya kembali politik otoritarian pada masa Orde Baru paling tepat dijelaskan dengan melihat warisan rezim sebelumnya, sifat koalisi kekuasaan dominan yang mendukung rezim baru itu dan cara pimpinan baru memahami serta memberi tanggapan terhadap tantangan dan kesempatan tertentu (Mas'ood, Mochtar. 1989. Hal:19).

Pada masa periode awal Orde Baru, watak kebudayaan politik berkembang dari kepemimpinan baru yang perhatiannya terus-menerus diarahkan untuk menciptakan mekanisme yang dapat meminimalkan konflik-konflik sosial dan

pada saat yang sama memaksimalkan produktifitas ekonomi. Atau secara harfiah mengenai bagaimana menyusun kembali sistem politik menjadi politik yang tertib. Namun, pada perkembangan selanjutnya kebijaksanaan penertiban politik ketat itu tentu mengecewakan orang-orang yang melihat Orde Baru sebagai upaya pembebasan otoriterisme Demokrasi Terpimpin. Agaknya pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru memang sepertinya memiliki andil dalam pembebasan otoriterisme Orde Lama, namun ternyata kemunculan Orde Baru justru membentuk adanya otoriterisme baru yang bertahan selama tiga dekade kepemimpinan Suharto tersebut. Disini dapat dilihat bahwa otoriterisme Suharto dengan kekuasaannya telah memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan Indonesia namun di sisi lain juga memberikan efek negatif bagi kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara.

Langgengnya kekuasaan Orde Baru pada masa itu banyak didukung oleh penciptaan kondisi yang membuat masyarakat patuh dan tunduk terhadap rezim, dan agaknya hal tersebut diwujudkan oleh rezim Suharto dengan menguasai wacana atas 'kebenaran' seperti yang dituangkan dalam Undang-undang, kebijakan, kurikulum pendidikan, dan yang terakhir melalui media film seperti yang tertuang pada film Pengkhianatan G30S/PKI dimana 'kebenaran' atas realitas peristiwa itu telah dibuat untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya laten komunis sekaligus membuat masyarakat mempercayai rezim Orde Baru sebagai penguasa yang melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman komunisme.

Mills mencoba mengelompokkan wacana menjadi tiga, yaitu : wacana dilihat dari level konseptual teoritis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan (Drs. Alex Sobur, M.Si. Hal:11). Level konseptual teoritis merujuk pada wacana sebagai domain umum dari semua pernyataan yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata. Wacana dalam konteks penggunaan diartikan sebagai sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu, dan terdapat suatu struktur dalam wacana; wacana ditekankan untuk dapat mengidentifikasi struktur tersebut, sedangkan pada metode penjelasan, wacana dinyatakan sebagai suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.

Film pada era Orde Baru digunakan sebagai sebuah media dalam menyebarkan wacana ancaman bahaya komunisme melalui produksi film yang bertajuk Pengkhianatan G30S/PKI. Seperti pada penjelasan pada bab-bab sebelumnya, konteks dan situasi dalam sebuah wacana membawa hubungan antara teks (bahasa) dengan proses produksi, penggunaan serta penerimaan, sehingga membawa sebuah objek yang digambarkan dari sebuah teks menjadi bermakna. Sesuai dengan pernyataan tersebut, konteks dan situasi yang terkait dengan peristiwa G30S/PKI dirangkum dalam sebuah teks (dalam sebuah skenario) yang kemudian diwujudkan menjadi tampilan audio visual dengan menampilkan berbagai adegan terkait sehingga maksud dan tujuan dari pembuatan film tersebut dapat tercapai, yakni menggambarkan ancaman bahaya komunisme.

Sesuai dengan pernyataan Mills dengan mengacu pada Foucault, tampilan audio visual pada film Pengkhianatan G30S/PKI pada level konseptual teoritis merujuk pada wacana ancaman bahaya laten komunisme yang mempunyai makna dan efek dalam kehidupan nyata. Menurut pemahaman penulis, film produksi era Orde Baru ini memiliki makna tersendiri dalam mendiskriminasikan Partai Komunis Indonesia dan dalam sisi lain mencoba menampilkan citra pahlawan Orde Baru sebagai penumpas komunisme di Indonesia. Kemudian efek dalam kehidupan nyata dibalik pembuatan film tersebut sampai pada level konsumsi di masyarakat, film ini mencoba membentuk opini publik (*public opinion*) tentang ancaman bahaya komunisme sesuai yang digambarkan film tersebut sehingga masyarakat menggantungkan keselamatannya kepada rezim dari ancaman tersebut dan serta merta melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Kemudian pada konteks penggunaannya, pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI melalui sebuah adegan, prolog, maupun gambar dan tulisan merupakan struktur dalam wacana ancaman bahaya komunisme dan wacana tersebut ditekankan untuk dapat mengidentifikasikan struktur-struktur yang ada seperti dalam kategori penggambaran biadab, anti-Tuhan, dan penghasut sesuai dengan hasil pengamatan dalam film ini.

Film merupakan sebuah bentuk komunikasi dengan tanda karena dalam proses produksinya, film menciptakan tanda (*sign*) dan simbol dengan makna tertentu. Dimana simbol dan tanda itu terkait dengan bahasa. Dalam prosesnya, film layaknya sebuah bahasa yang dirangkai dalam bentuk simbol dan tanda yang membawa pesan didalamnya (Larry Gross. *Sol Worth and The Studie of Visual Communication*, pada *chapter one : The Development of a Semiotic of Film*. <http://astro.temple.edu/~ruby/wava/worth/sintro.html>). Sehingga film dapat dilihat sebagai penerimaan sinyal (*signal*) melalui penerimaan visual, dan juga bisa perlakuan sebagai pesan dengan menarik pesan yang ada didalamnya. Pernyataan Defelur dan Dennis Malvin memperkuat pernyataan ini dimana mereka mengatakan bahwafilm dari sisi produksi dapat dikatakan sebagai wahana untuk menuangkan ekspresi yang dapat mempengaruhi ataupun menghibur. Bahkan sebuah film dapat dijadikan media penyampaian pernyataan politik dan sosial. Begitu pula yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, film Pengkhianatan G30S/PKI dijadikan wahana untuk mempengaruhi masyarakat dalam menanamkan pemahaman akan ancaman bahaya komunisme sebagai penyampaian pernyataan politik rezim. Adapun makna yang dimiliki oleh film tersebut berasal dari hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai penonton.

Pemaknaan film dibentuk dalam proses produksi dari sebuah film, sesuai dengan model komunikasi Jakobson, proses produksi dari sebuah film terkait dengan pemberi pesan, yakni pemerintah Orde Baru, dimana proses produksi ini akan menentukan bagaimana pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Dalam pembuatannya, pembuat film mengemas film sehingga mampu untuk menarik penerima pesan secara emosional, bahkan sebuah film dalam mencapai tujuan tersebut mengambil realitas masyarakat sebagai yang diyakini sebagai 'kebenaran' untuk menjadi landasan film Edward Jay Whetmore. 1989. Hal:229). Sesuai dengan pernyataan tersebut, pembuat film Pengkhianatan G30S/PKI mencoba membuat film yang dapat menarik emosi masyarakat sehingga dapat terbentuk sebuah pemahaman akan peristiwa 30 September 1965 dan meyakinkannya sebagai sebuah 'kebenaran'.

Dalam model komunikasi Jakobson, dilihat bahwa sebuah film mengandung unsur komunikasi karena selain terkait dengan aktor utama komunikasi yaitu *addressor* (pembuat film) dan *addressee* (penonton), film juga dapat dilihat memiliki pesan tersendiri, baik berupa pesan yang memberikan informasi ataupun hal lainnya. Pada film Pengkhianatan G30S/PKI, film menjadi alat komunikasi antara rezim Orde Baru dengan masyarakat, film ini juga memiliki pesan yang informatif sekaligus mempengaruhi masyarakat, khususnya yang terkait dengan ancaman bahaya komunisme. Dan dengan sistem makna yang terdapat dalam film tersebut, pesan yang ada dalam film dapat dikomunikasikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rezim Orde Baru, melalui film Pengkhianatan G30S/PKI mencoba memberikan pesan kepada masyarakat mengenai ancaman bahaya komunisme terkait pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan pemberontakan yang dilakukan pada 30 September 1965.

Lebih lanjut lagi, kekuatan media dalam mengkonstruksi pengetahuan masyarakat menjadi perhatian juga dalam tulisan ini. Seperti diketahui, pesan-pesan yang dituangkan oleh rezim Orde Baru melalui film Pengkhianatan G30S/PKI telah banyak mempengaruhi pengetahuan masyarakat akan realitas peristiwa yang banyak mendiskriminasikan Partai Komunis Indonesia. Seperti tertuang dalam penjelasan tentang realitas sosial dalam buku Berger dan Luckmann yang dimulai dengan memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Kenyataan (realitas) oleh Berger dan Luckmann dijelaskan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam realitas-realitas, yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik secara spesifik.

“...to define reality as a quality appertaining to phenomena that we recognize as having a being independent of our own volition (we cannot ‘wish them away’), an to define knowledge as the certainty that phenomena are real and that they proses specific characteristic.” (Peter I. Berger, Thomas Luckmann. 1966. Hal:13)

Sesuai dengan pernyataan tersebut, realitas-realitas yang terkait dengan ancaman bahaya komunisme dikemas sedemikian rupa sehingga realitas tersebut dapat diyakini masyarakat sebagai sebuah pengetahuan yang sah kebenarannya. Hal ini lah yang menjadi keberhasilan Orde Baru dalam menanamkan 'kebenaran' tersebut dalam benak masyarakat selama kepemimpinan Suharto berlangsung. Dan terbukti kekuatan media yang digunakan rezim telah berhasil mengkonstruksi pengetahuan masyarakat akan sebuah peristiwa ataupun aktor dibalik semua tragedi itu. Melalui konsep konstruksi Berger ini, dapat dianalisis bahwa pengetahuan sejarah mengenai peristiwa 30 September 1965 menjadi realitas dalam memahami peristiwa tersebut yang dikonstruksi melalui sebuah media film yang bertajuk Pengkhianatan G30S/PKI. Dan seperti yang dijelaskan juga oleh Berger, realitas-realitas yang diungkapkan pada film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan hasil konstruksi pengetahuan Orde Baru yang ditujukan untuk melibatkan pemahaman masyarakat dalam menafsirkan peristiwa G30S/PKI dan juga memberikan penggambaran akan ancaman bahaya komunisme di Indonesia.

Pada pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa pada dasarnya sebuah wacana tidak lepas dari adanya unsur kekuasaan. Seperti yang diungkapkan oleh Foucault bahwa praktik kekuasaan mempengaruhi pengetahuan manusia tentang 'kebenaran'. Dalam artian, apa yang manusia anggap sebagai 'kebenaran', merupakan hasil dari relasi-relasi kekuasaan yang membentuk sistem pengetahuan manusia tentang 'kebenaran' itu sendiri. Disini Foucault mencoba menjelaskan bahwa aspek kebenaran sebuah wacana akan selalu terkait dengan konteks kekuasaan yang meliputinya, sehingga kebenaran yang menjadi pengetahuan manusia merupakan bentukan dari kekuasaan yang berlaku.

Praktik wacana yang muncul dalam film Pengkhianatan G30S/PKI pada dasarnya juga tidak luput dari pengaruh kekuasaan Orde Baru yang memiliki andil besar dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi film ini. Jadi secara garis besar dalam proses-proses tersebut pengaruh kekuasaan Orde Baru berperan dalam membentuk ideologi yang dimunculkan pada film tersebut serta menciptakan 'kebenaran' atas dasar kekuasaan yang dimiliki. Adapun berdasarkan pengamatan penulis mengenai isi dari film tersebut, terdapat tiga penggambaran

umum yang ditampilkan terkait dengan *image* sebuah partai komunis yang selama Orde Baru ditentang keberadaannya. Penggambaran yang ditampilkan tersebut antara lain : Penggambaran Atheis, Penggambaran Biadab, dan Penggambaran Penghasut. Pada penggambaran Atheis, film Pengkhianatan G30S/PKI ini mencoba memberikan kesan atas Partai Komunis Indonesia yang tidak berlandaskan Agama dimana pada film tersebut digambarkan praktik-praktik perusakan simbol keagamaan dan juga pelecehan terhadap prosesi ibadah keagamaan. Kemudian penggambaran biadab tergambar melalui penampilan berbagai tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI terhadap enam jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat. Dan penggambaran penghasut ditampilkan melalui berbagai hasutan kepada masyarakat yang bertujuan mencari massa sebanyak-banyaknya dan terkesan mencuci otak masyarakat akan suatu realitas. Keberhasilan film ini dalam menciptakan *image* sebuah partai komunis di Indonesia telah banyak mempengaruhi masyarakat yang menontonnya setiap tanggal 30 September dengan kesan sebagai partai yang menakutkan dan mengancam stabilitas keamanan. Dan selama Orde Baru berlangsung ketakutan masyarakat akan keberadaan partai komunis mendarah daging dan membuat masyarakat menggantungkan keselamatan dan keamanannya kepada rezim Suharto.

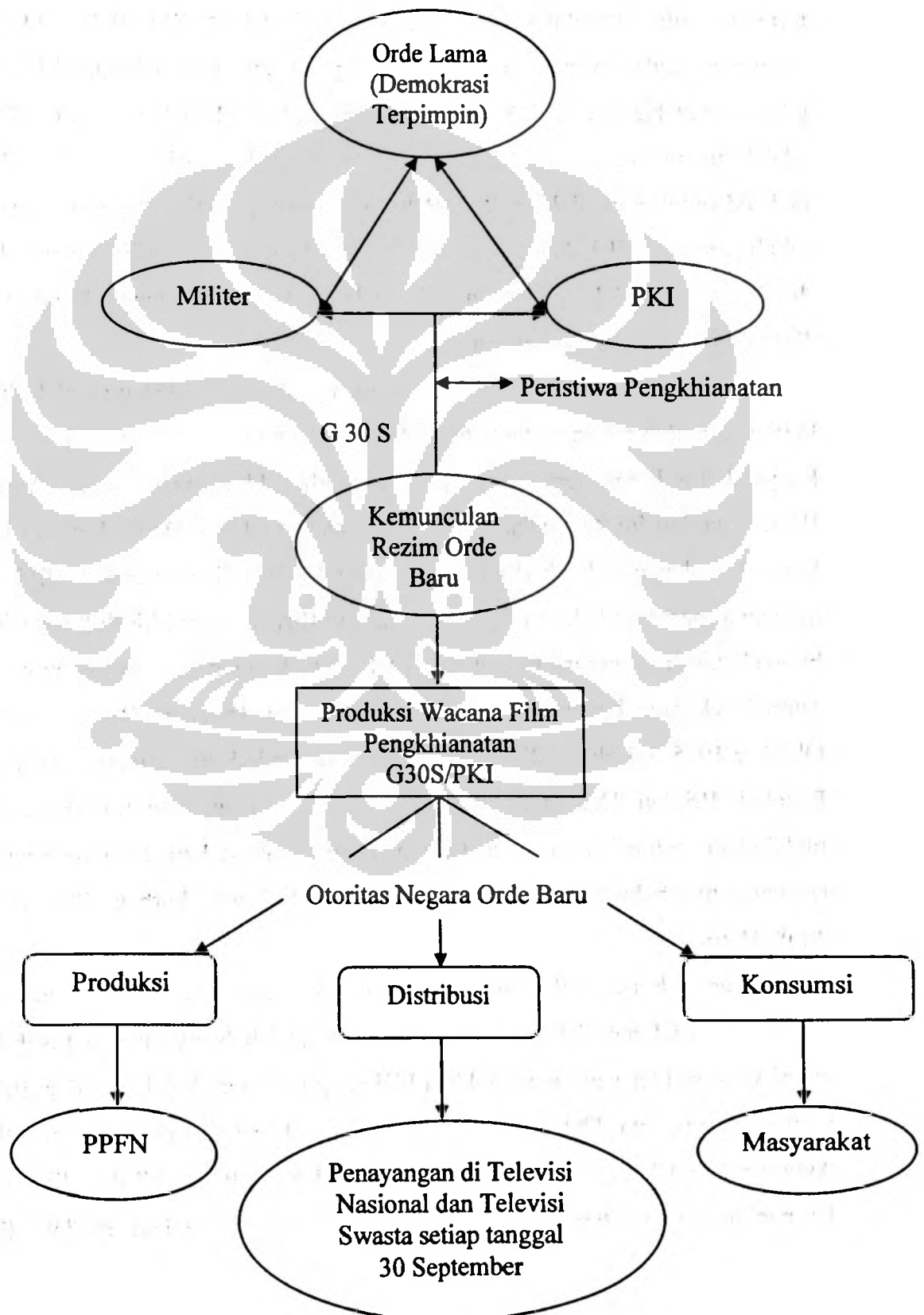
Adapun keberadaan film Pengkhianatan G30S/PKI juga banyak dipengaruhi dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang menguasai berbagai aset negara, seperti halnya penguasaan terhadap perusahaan produksi film yang dalam hal ini dinaungi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) serta penguasaan akses terhadap stasiun televisi nasional yang dalam hal ini dinaungi oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sebagai perusahaan produksi film negara, PPFN berperan dalam proses produksi film yang bertajuk Pengkhianatan G30S/PKI ini, dimana pada saat itu film ini menjadi salah satu film dengan biaya produksi yang sangat tinggi pada masanya. Kemudian berfokus pada area distribusi dipercayakan sepenuhnya oleh TVRI sebagai media penayang film ini untuk menampilkan film tersebut setiap tanggal 30 September pada masa Orde Baru sebagai peringatan

terhadap peristiwa berdarah Pengkhianatan PKI, yang kemudian juga diikuti oleh beberapa stasiun swasta setelah keberadaannya di Indonesia.

Penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI pada tanggal 30 September setiap tahunnya memberikan kesan bahwa masyarakat wajib menontonnya sebagai ilustrasi akan keberadaan Partai Komunis Indonesia yang telah banyak memberikan kerugian bagi negeri ini dan juga menjatuhkan korban dimana-mana. Selain itu film ini juga mencoba mengilustrasikan bagaimana Suharto yang pada saat itu menjabat sebagai salah seorang ‘petinggi’ Angkatan Darat dengan gagah beraninya menumpas kekejaman PKI, sehingga dengan kata lain film ini mencoba untuk menampilkan bagaimana konflik yang terjadi antara PKI dengan militer Angkatan Darat yang khususnya terkait dengan Suharto. Dapat dilihat bahwa disini rezim Orde Baru telah berhasil menciptakan sebuah wacana media yang bertujuan untuk mendiskriminasikan kelompok tertentu, dalam hal ini PKI, dengan berbagai perspektif negatif yang dimunculkan dan disisi lain bertujuan untuk memberikan citra pahlawan dengan memunculkan perspektif positif seorang sosok Suharto yang gagah berani menumpas kekejaman PKI. Bagan di bawah ini merupakan gambaran atas pengaruh kekuasaan Orde Baru akan kemunculan wacana komunisme yang diwujudkan ke dalam sebuah film Pengkhianatan G30S/PKI serta ilustrasi kemunculan era Orde Baru.

Dari bagan di bawah ini dapat dilihat bahwa kemelut yang terjadi pada era tahun 1965 yang menggulingkan pemerintahan Sukarno, yakni kemelut yang memunculkan peristiwa pengkhianatan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI telah memberikan andil atas kemunculan rezim Orde Baru yang berkuasa setelahnya. Kemudian seiring dengan berjalannya kekuasaan Orde Baru, dan untuk memberikan kelanggengan atas kekuasaannya itu diperlukan suatu upaya yang dapat memberikan kekuatan dalam mengontrol masyarakat yang dalam hal ini diwujudkan dalam membentuk wacana komunisme di Indonesia. Penciptaan wacana ini bertujuan untuk menanamkan ideologi Orde Baru kepada publik terkait dengan wacana komunisme, khususnya peristiwa Pengkhianatan G30S/PKI melalui sebuah film yang berjudul sama dan menayangkan film tersebut setiap tanggal 30 September tiap tahunnya sehingga masyarakat memiliki pandangan

yang sama atas peristiwa tersebut serta memiliki anggapan yang sama mengenai PKI sebagai partai ataupun kelompok yang penuh dengan kekejaman dan amoral atau dalam hal ini pemerintah Orde Baru mencoba untuk memojokkan PKI atas tragedi yang banyak menjatuhkan korban.



Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya di atas, tak dapat dipungkiri bahwa sepertinya memang terdapat unsur kesengajaan untuk mengarahkan atau bahkan memproduksi opini publik dan ingatan (*memory*) akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu menurut versi tertentu demi tujuan-tujuan tertentu pula. Misalnya saja penggunaan istilah “G30S/PKI”. Meskipun sebenarnya dalang yang sesungguhnya dari pembunuhan para Jenderal itu belum jelas – atau bahkan setelah diketahui bahwa tokoh-tokoh kunci dari G30S itu adalah justru anggota militer – tetap saja digunakan istilah tersebut dengan maksud untuk memojokkan PKI. Bahkan penggunaan istilah “Gestapu” tampak sekali sengaja dilakukan untuk mengasosiasikan operasi militer yang konon didalangi oleh PKI itu dengan polisi rahasia Jerman Gestapo (*Geheime Stat Polizei*) yang terkenal kejamnya.

Produksi ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu sudah dimulai ketika pada dua pekan pertama bulan Oktober hampir semua koran disensor, dan hanya koran-koran tertentu yang boleh terbit, khususnya harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang dikelola oleh Angkatan Darat. Melalui koran-koran ini, dan melalui berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dikisahkan mengenai berbagai kekejaman PKI di Lubang Buaya, seperti kisah “pesta harum bunga”, kisah pemotongan alat-alat vital, serta kisah pencungkilan mata yang sampai sekarang belum terbukti itu. Dalam koran Angkatan Bersejata edisi 7 Oktober 1965, misalnya, dikatakan bahwa para Jendral itu “matanya dicongkel”. Padahal, Brigjen TNI dr Rubiono Kertapati yang mengetuai tim dokter yang melakukan autopsi atas para korban menyatakan dalam laporan *visum et repertum*-nya bahwa tak ada penyiksaan atas tubuh para korban (Roosa, John. 2008. Hal:xx).

Lepas dari apakah orang setuju atau tak setuju dengan PKI, atau apakah sebenarnya PKI bersalah atau tidak, faktanya adalah bahwa hanya kisah-kisah resmi versi militer yang memojokkan PKI yang waktu itu boleh beredar. Bahkan ketika ada anggota TNI AD yang ditugaskan sebagai wartawan Kantor Berita Antara meliput kekejaman terhadap PKI ia malah “di-PKI-kan” dan dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun. Akibatnya, rakyat menjadi mudah disulut

untuk melakukan tindakan massal dalam rangka menghabisi para anggota PKI atau yang diduga anggota PKI. Slogan yang beredar di masyarakat adalah “membunuh atau dibunuh” – persis slogan militer dalam perang. Pembunuhan massal pun terjadi, dan bagaikan Perang Baratayudha, bangsa Indonesia “mandi darah” saudara sendiri. Kemudian pembunuhan itu diikuti dengan pemenjaraan massal di Jawa mau pun di luar Jawa, dan hampir semuanya tanpa didahului oleh proses pengadilan yang memadai.

Selanjutnya, ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menurut versi resmi itu tidak hanya diproduksi melainkan juga terus direproduksi, karena produksi dan reproduksi macam itu menguntungkan sejumlah pihak, baik dari kalangan militer maupun sipil. Pembuatan, pemutaran dan pemaksaan untuk menonton film yang berjudul Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer pada tahun 1980-an hingga 1990-an hanyalah salah satu contoh. Dalam film yang berat sebelah dan bernada propaganda atas versi resmi itu ditunjukkan kekejaman yang terjadi pada dinihari 1 Oktober 1965 yang menurut film tersebut jelas-jelas dilakukan oleh PKI.

Oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu produksi dan reproduksi ingatan menurut versi resmi atas peristiwa G30S itu dipandang penting, karena hal itu dapat digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah dikontrol. Ia menjadi semacam menara *panopticon*-nya Foucault yang berfungsi sebagai sistem pengawasan yang dominan tapi tak mudah diduga. Pembubuhan kode “ET” (Eks Tapol) pada KTP milik orang-orang yang melawan kebijakan penguasa, misalnya, membuat orang-orang itu ketakutan dan berpikir dua kali kalau tak mau tunduk pada pemerintah.

Lebih lanjut lagi, selama kepemimpinan Orde Baru, masyarakat sepertinya diajak untuk menerima cekokan-cekokan wacana yang dibuat rezim dengan dalih demi suksesnya ‘Pembangunan’ dan peningkatan ‘Stabilitas’ keamanan masyarakat. Pada masa itu sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengikuti keinginan rezim daripada keselamatannya terancam seperti yang dialami oleh orang-orang yang mencoba melawan rezim. Agaknya kekuatan rezim Orde Baru pada masa itu tidak dapat ditandingi oleh kekuatan manapun dan masyarakat pun

pada akhirnya patuh dan tunduk terhadap rezim. Dominasi pemerintah melalui berbagai UU, kebijakan, kurikulum pendidikan, wacana media, dan lain sebagainya menjadi strategi yang kuat dalam mengokohkan kekuasaan Orde Baru dan mengekang masyarakat dari kebebasan berpendapat maupun beraspirasi sesuai dengan UUD '45. Dan seperti itu UUD '45 pada masa itu hanya sebagai aturan yang harus dihapal oleh anak sekolah sesuai dengan kurikulum dibanding untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena negara dalam hal ini telah mengatur/mengontrol masyarakat secara tidak langsung melalui berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang diciptakannya.

Kemudian kembali pada produksi wacana yang diciptakan Orde Baru melalui film Pengkhianatan G30S/PKI, seperti diketahui bahwa pada masa itu masyarakat mau atau tidak mau harus menonton film tersebut setiap tahun karena hal ini juga diwajibkan bagi para siswa sebagai bagian dari kurikulum pendidikan sejarah di sekolah. Kewajiban menonton film tersebut berlangsung cukup lama selama kepemimpinan Suharto sampai jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Dengan mewajibkan masyarakat menonton film tersebut setiap tahunnya pada tanggal 30 September, pada dasarnya rezim Orde Baru mencoba untuk membentuk pemahaman masyarakat akan peristiwa yang mengacaukan stabilitas keamanan nasional dan mengatasnamakan PKI sebagai dalang dibalik itu semua. Disini pemerintah ingin membuat pandangan masyarakat akan PKI sebagai partai yang penuh dengan kekejaman dan sangat jahat dengan berbagai tampilan kekerasan dan kebiadaban yang dimunculkan dalam film tersebut. Jika mengingat kembali berbagai adegan yang terdapat pada film Pengkhianatan G30S/PKI maka yang terlintas dalam benak kita antara lain terdapatnya peran antagonis dan protagonis, dimana peran antagonis dimainkan oleh PKI sebagai pelaku penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat dalam peristiwa 30 September 1965 dan peran protagonis dimainkan oleh Mayjen Suharto sebagai pahlawan penumpas pemberontakan yang dilakukan PKI. Dari kemunculan kedua peran tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan film ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa sosok Suharto lah yang telah berjasa dalam menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang sekaligus menguatkan

citra Suharto sebagai seorang pahlawan, sedangkan sosok PKI dianggap sebagai sekelompok orang yang berbahaya dan mengganggu stabilitas negara dan citra buruk yang digambarkan dalam film tersebut mencoba untuk mendiskriminasi PKI dan memendam citra PKI dalam-dalam. Dengan demikian fungsi film sebagai media komunikasi masyarakat telah dimanfaatkan dengan baik oleh rezim untuk membentuk pemahaman masyarakat akan 'buruknya' Partai Komunis Indonesia.

Merujuk pada pernyataan Berger dalam penjelasannya mengenai teori konstruksi, dimana media berada diantara dua kutub yakni pada satu sisi terdapat teori fakta sosial dan di sisi lain terdapat teori definisi sosial yang merupakan kekuatan dari media itu sendiri. Dalam hal ini media menjadi produk dari kekuasaan yang kemudian dijadikan alat untuk mempengaruhi masyarakat. Menurut penulis hal ini lah yang terjadi pada wacana yang diproduksi film Pengkhianatan G30S/PKI. Seperti diketahui, film ini merupakan produk penguasa, yang dalam hal ini adalah Orde Baru, dan melalui media film ini Orde Baru mencoba untuk membentuk pemahaman masyarakat akan sebuah tragedi yang menelan banyak korban serta membuat keseragaman persepsi terhadap Partai Komunis Indonesia yang konon bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Kembali pada pernyataan Berger mengenai konstruktivisme, agaknya film Pengkhianatan G30S/PKI pada satu sisi berperan sebagai produk dari kekuasaan rezim dan di satu sisi produk kekuasaan rezim ini berperan dalam mewujudkan cita-cita rezim menguburkan komunisme dan mengangkat nama Orde Baru di benak masyarakat secara seragam. Sehingga tepat bila dikatakan bahwa Orde Baru memanfaatkan kekuatan sebuah film sebagai media dalam mengkonstruksi setiap realitas yang diinginkan rezim dan menanamkannya kepada masyarakat dengan tujuan membentuk pemahaman yang seragam akan sebuah realitas tertentu dan tentu sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa media menjadi alat yang efektif dalam mengkomunikasikan ide dan pandangan kepada masyarakat serta menjadi alat yang efektif dalam membentuk pemahaman masyarakat akan suatu peristiwa, tragedi, sampai pada sosok seseorang ataupun sekelompok orang

tertentu. Film, dengan audio visualnya, mampu menyampaikan pesan yang disampaikan pemberi pesan kepada penerima pesan secara baik karena melalui audio visualnya penonton film dibawa masuk lebih dalam ke setiap adegan yang ditampilkan sebagai sebuah pesan dan penonton dapat mencernanya dengan lebih baik dan memahaminya dengan seksama. Dan pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI didasarkan pada tujuan yang sama agar yang menonton film tersebut dapat lebih mengerti apa yang terjadi pada peristiwa 30 September 1965 dan melalui adegan-adegan yang ditampilkan pada film tersebut, penonton diajak lebih dalam memahami serangkaian peristiwa dan menyimpulkan sendiri bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pemberontakan kejam yang dilakukan PKI dan PKI bertanggung jawab atas semua akibat yang muncul setelahnya. Dengan penguasaan berbagai aset produksi film dan pendistribusiannya, Orde Baru dengan mudah menyampaikan visi dan misinya melalui film yang disutradarai oleh Arifin C. Noor itu. Dan selama masa kekuasaan Orde Baru masyarakat berada dalam bayang-bayang kekejaman PKI dan sepenuhnya mempercayai rezim sebagai pahlawan penumpas kekejaman PKI dalam mengatasi stabilitas keamanan negara.

V.5 Film, Otoritas Negara, dan Reproduksi Wacana Ancaman Bahaya Laten Komunis

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, wacana secara umum digunakan untuk menyampaikan ide maupun gagasan kepada khalayak ramai dengan maksud dan tujuan tertentu. Seperti halnya wacana ancaman bahaya laten komunis yang digembar-gemborkan oleh rezim Orde Baru dalam mematikan ideologi komunis di Indonesia sekaligus digunakan untuk menghegemoni pengetahuan masyarakat melalui berbagai medium yang digunakan dalam menyebarkan wacana tersebut. Berbicara mengenai wacana, tentunya terkait dengan teks-teks yang dikemas dengan gaya bahasa tertentu sehingga wacana tersebut dapat menyampaikan pesan, ide, maupun gagasan pembuatnya. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, wacana dapat disebarluaskan melalui berbagai medium yang ada, bisa melalui tulisan, ucapan, perkataan, dan medium-

medium efektif lainnya. Sesuai dengan tema penelitian pada tulisan ini, medium penyebaran wacana yang digunakan adalah film yang diproduksi pada era Orde Baru yang penayangannya dianggap sebagian besar masyarakat merupakan kontroversi sejarah pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Adapun film tersebut bertajuk Pengkhianatan G30S/PKI. Alasan mengapa film dianggap sebagai salah satu medium yang paling efisien dan efektif karena dengan karakteristik audio visualnya, film mampu memberikan suatu gambaran secara lebih jelas akan suatu kejadian maupun peristiwa tertentu. Dan melalui film, penonton agaknya diajak untuk dapat memahami secara lebih mendalam ketika dihadapkan pada sebuah adegan dengan menggunakan imajinasi dan emosinya. Contohnya ketika kita melihat film sedih, maka sebagian besar dari kita ketika melihat berbagai adegan yang mencerminkan kesedihan terkadang kita larut dalam situasi tersebut dan bahkan secara emosi kita dapat meneteskan air mata. Begitu pula ketika kita melihat film horor, maka yang terjadi adalah selama film itu diputar, rasa ketakutan akan menghantui kita bahkan terkadang sampai terbawa dalam mimpi. Disinilah keunggulan film sebagai medium penyebar wacana, dimana melalui film kita justru dapat lebih menggambarkan sebuah situasi dengan menggunakan imajinasi kita dan sampai pada penggunaan emosi kita. Namun pada dasarnya keunggulan film sebagai media penyebar wacana juga memiliki kelemahan dalam merangkum berbagai kejadian yang diangkat dalam aspek historisnya. Terkadang film hanya menampilkan sisi kulitnya saja tanpa memunculkan secara mendalam kondisi-kondisi maupun kejadian yang melatarbelakangi suatu peristiwa ataupun kejadian tertentu. Hal ini seperti yang digambarkan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI dimana pada film ini hanya menampilkan sebagian besar konteks sejarah yang melatarbelakangi peristiwa 30 September 1965, sehingga penggambaran yang ada tidak secara mendalam ditampilkan.

Terkait kembali dengan penggunaan film sebagai alat untuk menghegemoni pengetahuan masyarakat, disini negara memiliki andil besar dalam hal produksi wacana melalui film sampai pada penyampaiannya kepada masyarakat. Melalui otoritasnya, negara menguasai aset-aset terkait dengan

produksi film, yang dalam hal ini seperti yang dilakukan Orde Baru dengan menempatkan Perusahaan Film Negara dibawah Departemen Penerangan secara struktural. Tujuannya disini adalah agar pemerintah Orde Baru dapat mengontrol segala kegiatan yang terkait dengan produksi film dan juga sekaligus memberikan dominasi atas wacana-wacana dalam film yang akan disebarluaskan ke masyarakat. Hegemoni negara dalam hal penyebarluasan wacana ancaman bahaya komunis seperti pada penelitian ini, disini negara mencoba untuk memberikan wacana yang dominan dan mengarahkan bagaimana subyek harus dipahami sehingga pandangan yang lebih luas menjadi terhalang karena yang diberikan adalah pilihan yang paten. Hal ini seperti yang terjadi pada wacana dominan atas ancaman bahaya komunis yang diproduksi oleh Orde Baru dengan mengarahkan masyarakat pada pemahaman seperti yang diinginkan oleh rezim dan tentunya memberikan pandangan yang sempit tentang wacana komunisme seperti apa karena pandangan lainnya tidak diberikan ruang gerak sedikit pun.

Kemudian pada wacana yang dominan, terdapat suatu karakteristik dimana struktur diskursif yang tercipta atas suatu obyek tidak berarti sebuah kebenaran. Dalam hal ini batasan yang tercipta tidak hanya membatasi pandangan kita, tetapi menyebabkan wacana lain menjadi tidak dominan. Kembali pada wacana ancaman bahaya komunisme sebagai sebuah wacana dominan, yang penulis pahami disini agaknya sebuah wacana merupakan sebuah pertentangan antara “realitas” (tidak nyata) dengan kenyataannya. Dan pada era Orde Baru agaknya “realitas” yang dibuat oleh rezim mengenai ancaman bahaya laten komunis melalui film Pengkhianatan G30S/PKI telah banyak mendominasi wacana-wacana lain yang terpinggirkan selama pemerintahan Orde Baru berlangsung. Berdasarkan penjelasan mengenai dominasi wacana tersebut, hal ini seperti sebuah simulakrum yang pada akhirnya melahirkan sebuah wacana dominan yang semu atau disebut juga dengan *hyperreality*. Kemudian bagaimana rezim Orde Baru dapat mempertahankan wacana mengenai ancaman bahaya komunis, disini penulis mencoba menggunakan konsep wacana dan kekuasaan yang dipaparkan oleh Foucault. Menurut pemahaman penulis mengenai konsep wacana dan kekuasaan Foucault ini, dijelaskan bahwa sebuah kekuasaan tidaklah selalu

diibaratkan pada suatu ditekankan dari atas ke bawah (secara vertikal) namun kekuasaan disini merupakan kekuasaan yang menyebar dan menunjukkan hubungan antara wacana dengan masyarakat. Namun agaknya hal tersebut tidak sesuai dengan konsep kekuasaan negara Orde Baru dalam menyebarluaskan wacana ancaman bahaya komunisme di Indonesia sekaligus menjadi kritik terhadap Foucault akan konsep wacana dan kekuasaan. Pada hakikatnya, kekuasaan yang terjadi pada era Orde Baru bukanlah suatu kekuasaan yang menyebar melainkan kekuasaan yang menekan secara vertikal dimana melalui pengawasan Orde Baru, wacana dipelihara sesuai dengan *stock of knowledge* versi Orde Baru untuk meminggirkan wacana lain dalam konteks sama dan sekaligus memunculkan wacana dominan yang dibuat oleh Orde Baru. Dan dengan kekuasaannya itu, negara Orde Baru mereproduksi wacana ancaman bahaya laten komunisme melalui berbagai medium yang dikuasainya. Disini dapat dilihat bahwa negara Orde Baru mencoba untuk tetap mempertahankan wacana ancaman bahaya komunisme untuk menekan perkembangan ideologi komunis di Indonesia dengan berbagai penggambaran yang tertuang dalam peristiwa 30 September 1965 seperti yang diwujudkan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI.

Wacana ancaman bahaya komunis yang dipahami oleh masyarakat melalui film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai bentuk hegemoni pemerintah terhadap masyarakat akan suatu *hyperrealitas* membuat wacana lain yang sejenis dalam hal ini negara dengan otoritasnya membuat wacana dominan yang bertujuan untuk menghegemoni masyarakat sekaligus memarginalkan wacana lain yang sejenis dalam upaya melegitimasi kekuasaannya. Dan untuk memantapkan kedudukan wacana tersebut di masyarakat, maka negara Orde Baru pada masanya selalu mereproduksi wacana tersebut dan menutup ruang gerak bagi wacana lain sejenis yang mencoba berkembang. Sehingga pada dasarnya maksud dan tujuan negara Orde Baru dalam memproduksi wacana bahaya laten komunis melalui film Pengkhianatan G30S/PKI salah satunya bertujuan untuk mencitrakan komunis di Indonesia menurut versi rezim dan juga mematikan perkembangan ideologi komunis dengan mempertahankan wacana anti-komunismenya, pola-pola hegemoni kemudian digunakan dalam rangka membentuk pengetahuan

masyarakat akan sebuah realitas peristiwa G30S/PKI yang mengatasnamakan PKI sebagai dalangnya padahal realitas yang dipaparkan oleh negara Orde Baru tersebut bisa saja hanya sebuah realitas semu (*hyperreality*) yang muncul sebagai wacana dominan. Dan pada akhirnya wacana yang terkait dengan ancaman bahaya komunis di Indonesia dipelihara dan direproduksi oleh rezim sebagai bentuk legitimasi kekuasaan Orde Baru.

V.6 Wacana G 30 S Pada Era Reformasi

Kemunculan era reformasi ditandai oleh beberapa peristiwa yang terjadi di tahun 1997-1998. Awal peristiwa ditandai dengan krisis finansial di Asia yang dimulai pada Juli 1997 di Thailand yang mempengaruhi ikut terjadinya krisis finansial di berbagai negara di Asia Tenggara, seperti yang terjadi di Indonesia. Krisis finansial atau yang biasa disebut dengan krisis moneter ini membuat kurs rupiah terhadap dollar menurun secara drastis, dimana kurs rupiah yang tadinya Rp 2,500/US\$ turun drastis menjadi Rp 17,000/US\$. Kondisi perekonomian Indonesia pada waktu itu mendukung terjadinya peristiwa lain seperti kerusuhan sampai tragedi Trisakti yang menelan korban empat orang mahasiswa Trisakti meninggal akibat ditembak oleh aparat yang berjaga di atas jembatan layang (*fly over*). Setelah kejadian itu, pada tanggal 19 Mei 1998 ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan menuntut Presiden Suharto untuk mundur dari jabatannya. Kemudian barulah pada 21 Mei 1998 jabatan Presiden Suharto resmi digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Masa setelah kemunduran era orde baru inilah yang disebut dengan era reformasi.

Sepertinya setelah keruntuhan Orde Baru, kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan beraspirasi menjadi lebih terbuka lebar apalagi dengan kesimpangsiuran sejarah mengenai peristiwa 30 September 1965, masyarakat dipaksa untuk lebih mengkritisi aspek-aspek sejarah terutama yang terkait dengan pemerintahan rezim Orde Baru. Dan pada pembahasan berikutnya ini, penulis mencoba untuk memaparkan sejauhmana anggapan masyarakat saat ini dalam menanggapi peristiwa 30 September 1965 serta bagaimana anggapan masyarakat saat ini mengenai Partai Komunis Indonesia yang pada masa Orde Baru telah

menjadi partai yang di-‘haram’kan di Indonesia berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada lima orang informan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda.

Merujuk pada hasil wawancara, penulis mendapati bahwa setiap informan yang ditanya mengakui bahwa pada era Orde Baru berkuasa mereka hampir setiap tahun pada tanggal 30 September menonton film Pengkhianatan G30S/PKI yang ditayangkan melalui TVRI maupun televisi swasta lain, adapun alasan mereka menonton film tersebut karena diwajibkan untuk menonton film itu baik oleh pihak sekolah maupun secara tidak langsung terdapat unsur keterpaksaan karena selalu ditayangkan di televisi setiap tahunnya. Adapun gambaran yang ditampilkan film tersebut pada waktu itu akan sebuah Partai Komunis Indonesia telah mempengaruhi pandangan mereka selama kekuasaan Orde Baru. Setiap informan mengatakan bahwa pada waktu itu mereka menganggap PKI merupakan partai yang kejam, biadab, tidak berperikemanusiaan, anti-Tuhan, penghasut, sadis, dan jahat. Anggapan tersebut didasarkan pada setiap adegan yang dimunculkan pada film Pengkhianatan G30S/PKI seperti tindakan penculikan, penyiletan, sampai pembunuhan terhadap Jenderal-jenderal dan perwira Angkatan Darat dan juga penggambaran atheis yang diilustrasikan dengan merusak tempat peribadatan dan kitab suci, serta penggambaran penghasut yang kerap kali menghasut rakyat kecil untuk menerima ideologi komunisme. Namun di sisi lain, setiap informan beranggapan pada waktu itu bahwasanya dibalik kekejaman PKI dan pengkhianatan ideologi Pancasila, terdapat satu sosok Suharto yang menjadi pahlawan dalam membasmi setiap tindakan kekejaman yang dilakukan oleh PKI berdasarkan film tersebut.

Dari setiap adegan tersebut, sepertinya pembuat film telah berhasil menyampaikan pesannya kepada masyarakat akan penggambaran komunisme dan khususnya Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, memang media film (audio visual) menjadi media yang efektif dalam penyampaian pesan kepada khalayak ramai karena melalui audio visual penonton diajak untuk ikut masuk ke dalam setiap adegan yang dimunculkan dan membayangkan apabila hal tersebut dialami penontonnya. Sehingga dari fungsi

film sebagai media audio visual sepertinya banyak mempengaruhi pengetahuan masyarakat akan suatu peristiwa sekaligus mematenkan anggapan masyarakat akan citra seseorang ataupun kelompok tertentu, seperti anggapan negatif masyarakat dan pendiskriminasian terhadap Partai Komunis Indonesia setelah menyaksikan setiap adegan pada film Pengkhianatan G30S/PKI. Anggapan negatif mengenai PKI bagi setiap informan agaknya telah membayang-bayangi benak mereka selama pemerintahan Orde Baru berlangsung. Dari sini dapat dikatakan bahwa penyampaian informasi dari film tersebut dianggap berhasil mempengaruhi anggapan masyarakat yang menontonnya, dan sepertinya rezim Orde Baru telah menerapkan strategi yang tepat dalam membentuk pengetahuan masyarakat yang bertujuan bagi langgengnya kekuasaan Orde Baru dengan mendiskriminasikan PKI dan memunculkan sosok pahlawan Orde Baru..

Kemudian setelah era reformasi berlangsung terdapat perbedaan pandangan akan wacana komunisme, khususnya yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Menurut wawancara penulis dengan informan, penulis mendapati bahwa perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh informasi yang berkembang mengenai wacana komunisme setelah keruntuhan Orde Baru dan juga penghapusan film Pengkhianatan G30S/PKI dari penayangannya setiap tanggal 30 September. Ternyata penghapusan film Pengkhianatan G30S/PKI telah memberikan tanda tanya besar bagi sebagian besar masyarakat, seperti yang dialami oleh informan. Bahkan salah satu informan beranggapan bahwa penghapusan film tersebut dari penayangannya di berbagai stasiun televisi karena informasi yang ada tidak sesuai dengan fakta sebenarnya (*Hasil wawancara dengan EN*). Kemudian akses informasi mengenai komunisme yang mulanya tertutup setelah era reformasi ini agaknya banyak mempengaruhi pandangan mereka mengenai Partai Komunis di Indonesia seperti yang dibahas di majalah, obrolan dengan orang lain, atau pun forum-forum yang mereka temui saat ini. Sebagian besar informan pada era reformasi ini telah banyak mempelajari tentang komunisme di Indonesia dan peristiwa 30 September 1965 melalui buku-buku yang mereka temui, media internet, artikel, serta diskusi-diskusi antar teman ataupun di lingkup luar (*Hasil wawancara dengan semua informan*). Sehingga

dapat dikatakan bahwa keberadaan wacana komunisme saat ini bukanlah hal yang *tabu* lagi untuk dibicarakan apalagi didiskusikan oleh sebagian besar masyarakat tidak seperti yang terjadi pada masa rezim Orde Baru. Dan kini masyarakat telah bersifat kritis terhadap peristiwa sejarah khususnya sejarah yang terkait dengan rezim Orde Baru, apalagi ‘kebenaran’ akan sejarah Orde Baru sepertinya masih perlu digali lebih mendalam lagi.

Selain wawancara dengan beberapa informan, penulis juga menggunakan buku John Roosa yang dirilis tahun 2008 untuk melihat sejauh mana wacana mengenai Peristiwa 30 September 1965 diungkapkan kembali. Selanjutnya, merujuk pada buku yang ditulis oleh John Roosa pada prakatanya, buku yang dibuat oleh John Roosa ini sebelum tahun 2008 tidak dapat dirilis karena tidak mencantumkan kata “PKI” setelah kata “G30S”.

Mengacu kepada surat keputusan Jaksa Agung setahun lalu, bukubuku teks sejarah yang tidak mencantumkan akhiran “/PKI” setelah singkatan G-30-S harus dibakar. Buku ini tidak menggunakan akhiran tersebut. Tak akan ada gunanya menulis buku ini seandainya saya menambahkan “/PKI.” Akhiran tersebut mencerminkan jawaban terhadap pertanyaan tentang siapa yang mendalangi gerakan itu. Ia adalah simbol pernyataan: “PKI mendalangi G-30-S.” (Roosa, John. Prakata)

Berdasarkan pernyataan ini, agaknya pada tahun sebelum 2008 warisan wacana PKI masih tetap berlaku walaupun tidak seperti pada masa rezim Suharto, namun apa yang membuat buku ini dapat dirilis pada tahun 2008 walaupun tidak mencantumkan kata “PKI” setelah “G30S” belum dapat diketahui. Apakah surat keputusan jaksa agung tersebut dihapus ataukah lemahnya hukum/peraturan di Indonesia. Namun kemunculan buku ini memberikan suatu variasi mengenai informasi sejarah Pengkhianatan 30 September 1965. Dan lebih lanjut lagi, agaknya ‘kebenaran’ atas peristiwa ini masih perlu ditelaah lebih dalam mengingat sejarah yang ditampilkan masih merupakan sejarah kekuasaan rezim terdahulu.

Kemudian, penulis juga mendapati sebuah film yang diproduksi pada tahun 2002 yang berjudul "*Shadow Play : Indonesia's Year of Living Dangerously*", yang merupakan film buatan Australia dan dinarasikan oleh Linda Hunt. Film ini mengisahkan hal tragis yang ingin tetap dipendam oleh banyak kalangan sebagai akibat Perang Dingin yang dilupakan begitu saja. Orang yang disebut merebut kekuasaan itu adalah Jenderal Suharto, membangun salah satu rezim keluarga paling korup. Ia dan tentaranya memiliki sejarah yang menyeramkan dengan membunuh rakyatnya sendiri melebihi rezim dimanapun yang didukung oleh Barat. Lebih dari 30 tahun kemudian, setelah massa besar-besaran, Jenderal Suharto akhirnya jatuh dari kekuasaannya. Dengan jatuhnya kepemimpinan Suharto, sebagian masyarakat Indonesia menjadi lebih berani mempertanyakan sejarah bangsanya yang selama ini direkayasa.

Film *Shadow Play* ini merupakan sebuah film dokumenter yang didalamnya banyak mengulas kesaksian dari orang-orang yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa 30 September 1965, serta tanggapan mengenai peristiwa tersebut oleh beberapa tokoh penting di Indonesia dan di luar Indonesia. Agaknya film ini mencoba untuk menguak berbagai fakta dibalik runtuhnya kekuasaan Sukarno sampai keruntuhan Orde Baru, dan lebih khususnya mengulas banyak mengenai Peristiwa 30 September 1965. Melalui setiap wawancara saksi mata dan beberapa ahli, film ini sepertinya mencoba untuk menginvestigasi atas apa yang terjadi dengan kondisi di Indonesia pada waktu itu sekaligus memberikan kritik atas sejarah Orde Baru yang selama ini dimanipulasi oleh rezim itu sendiri. Berdasarkan pengamatan penulis, film arahan sutradara Chris Hilton ini menjadi sebuah wacana tandingan bagi film Pengkhianatan G30S/PKI dengan menampilkan sisi lain dari 'kebenaran' yang diciptakan rezim Orde Baru. Selain itu penulis juga melihat bahwa setiap penggambaran yang dimunculkan pada film tersebut lebih kepada kritik atas efek terjadinya Perang Dingin yang berujung pada pembasmian komunisme di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, dan juga keterlibatan pihak asing atas segala sesuatunya yang terjadi di Indonesia pada masa itu termasuk peristiwa G30S. Jika ditelaah kembali, terdapat perbedaan mendasar antara film yang dibuat pada masa Orde Baru

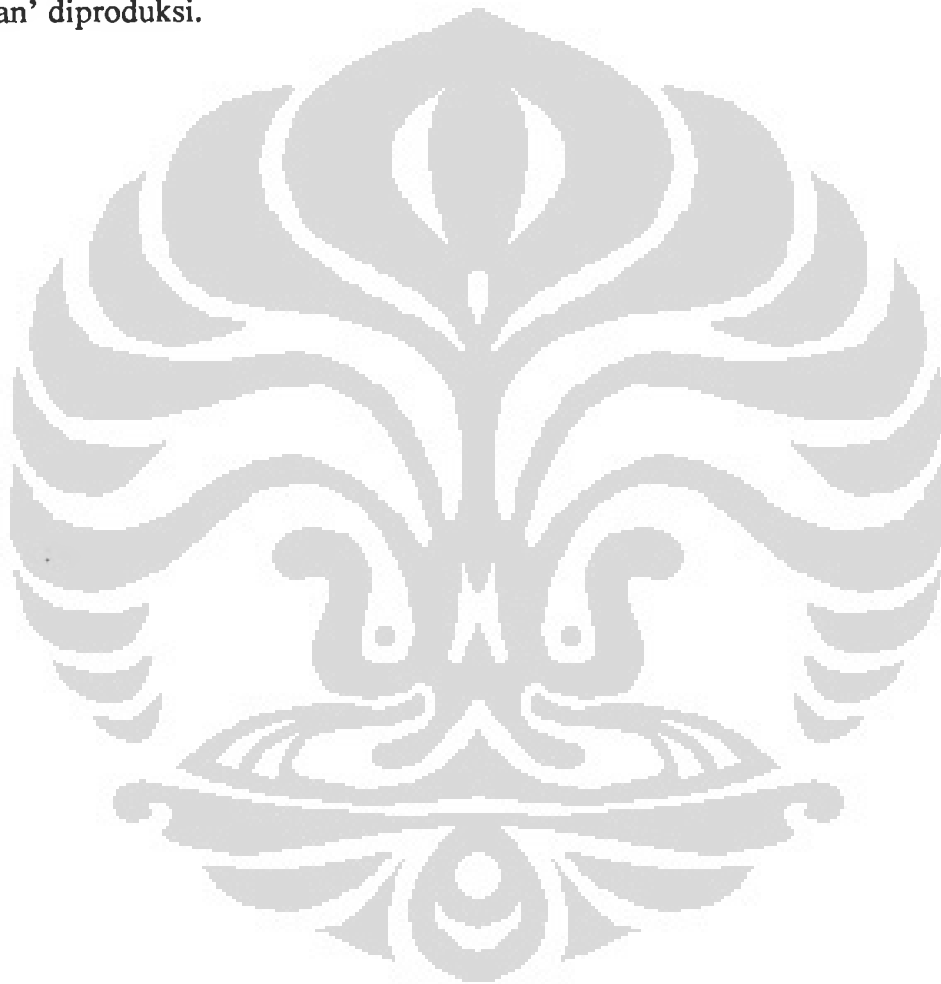
dengan film ini, dimana terdapat dua pandangan dalam menanggapi peristiwa G30S. Pada film produksi Orde Baru, PKI dipandang sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S yang pada akhirnya mendiskriminasi PKI itu sendiri. Namun lain halnya dengan film *Shadow Play* ini, justru film ini malah mengkritik Suharto dan militer atas berbagai intrik yang terjadi sepanjang tahun 1965 sampai keruntuhan rezimnya. Penulis melihat film ini mencoba menampilkan hasil wawancara-wawancara yang dilakukan kepada saksi-saksi sepanjang peristiwa G30S serta wawancara kepada beberapa tokoh penting sehingga terkesan film tersebut menampilkan berbagai fakta dibalik peristiwa G30S. Jadi menurut penulis, kemunculan film *Shadow Play* memberikan sentuhan baru bagi keberadaan wacana komunisme di Indonesia di era Reformasi ini mengingat setiap aspek sejarah berkaitan dengan tragedi yang menjatuhkan banyak korban.

Dari pembahasan bab ini dapat diambil kesimpulan bahwa kemunculan sebuah 'kebenaran' atas suatu wacana, khususnya wacana yang berkaitan dengan PKI ini telah banyak dipengaruhi oleh faktor kekuasaan rezim yang berkuasa pada masa itu, yang dalam hal ini kekuasaan otoriter Orde Baru. Orde Baru telah berhasil dalam menanamkan ketakutan massal atas keberadaan Partai Komunis Indonesia dengan menciptakan wacana-wacana seperti pengukuhan kebijakan, penataran P4, sampai pada pembuatan film yang banyak membahas masalah tragedi pengkhianatan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI. Dan agaknya strategi politik yang dilancarkan oleh pemerintahan Suharto melalui wacana komunismenya memiliki andil dalam menciptakan kondisi sosial masyarakat yang penuh dengan ketakutan akan bahaya laten komunis serta menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan perlindungan rezim untuk mengatasinya. Secara tidak langsung dengan pembuatan wacana tersebut membuat rezim memiliki kontrol penuh terhadap masyarakat sehingga tanpa disengaja masyarakat pada dasarnya telah dipantau 'gerak-gerik'-nya oleh penguasa Orde Baru serta patuh dan tunduk terhadap rezim. Sehingga pada akhirnya 'kebenaran' atas wacana yang muncul merupakan sebuah taktik politik dalam melanggengkan kekuasaan rezim melalui propaganda

yang diciptakan, dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh kekuasaan memberikan dampak terhadap kemunculan 'kebenaran' atas wacana dimana wacan yang muncul merupakan bentukan dari kekuasaan yang ada dengan tujuan-tujuan tertentu yang tidak tersirat didalamnya.

Hal tersebut di atas seperti yang diungkapkan oleh Foucault mengenai kekuasaan, menurut Foucault kekuasaan bukanlah merupakan suatu entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu orang atau lembaga, melainkan dapat diibaratkan dengan sebuah jaringan yang tersebar dimana-mana. Jadi kekuasaan tidak datang secara vertikal dari penguasa terhadap yang ditindas, dari pemerintah ke rakyat, melainkan datang dari semua lapisan masyarakat, ke segala arah. Penulis mencoba memahami bahwa kekuasaan menurut Foucault tidak lagi dimaknai secara vertikal dari atas ke bawah, atau dari institusi penguasa kepada individu yang dikuasai, melainkan datang dari semua lapisan tetapi ia menyebar secara kompleks kepada segenap individu sebagai subjek yang kecil dan menyebabkan praktik kuasa ada dimana-mana. Lebih lanjut lagi, Foucault mencoba menjelaskan bahwa sebuah wacana pada dasarnya merupakan praktik dari relasi kekuasaan dengan pengetahuan, dimana jika dipahami pengetahuan merupakan produk dari kekuasaan dan kemudian pengetahuan tersebut dirangkum dalam sebuah wacana yang diproduksi oleh penguasa dengan berbagai tujuan dan dianggap sebagai sebuah 'kebenaran' oleh masyarakat. Hal ini yang terjadi dengan wacana yang muncul pada Film Pengkhianatan G30S/PKI. Disini Orde Baru menciptakan sebuah pengetahuan akan peristiwa 30 September 1965 dan dengan kekuasaannya, rezim menguasai akses-akses yang terkait dengan produksi film sehingga film tersebut dapat muncul sebagai sebuah sumber pengetahuan masyarakat yang dianggap sebagai 'kebenaran' penguasa. Jika ditelaah kembali, rezim Orde Baru menggunakan kekuasaannya dalam menciptakan suatu pengetahuan tertentu terkait dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, dan melalui kekuasaannya pula pengetahuan tersebut dipresentasikan melalui sebuah film dimana proses produksi dan distribusinya dikontrol oleh pemerintah hingga sampai kepada khalayak ramai. Kemudian masyarakat diwajibkan menontonnya melalui televisi setiap tahunnya untuk mengingat kembali kekejaman PKI dan

menanamkan pengetahuan rezim tersebut sebagai sebuah 'kebenaran'. Sehingga dengan begitu masyarakat cenderung akan memiliki pendapat bahwa bahaya laten komunis itu memang ada dan sepatutnya kita berlindung pada rezim yang senantiasa menanamkan nilai-nilai stabilitas sebagai mottonya. Sehingga antara wacana, kekuasaan, dan pengetahuan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan mengingat ketiga unsur tersebut mempengaruhi bagaimana 'kebenaran' diproduksi.



BAB VI

KESIMPULAN

Orde Baru memiliki sifat yang jauh lebih kompleks dari sekedar sebuah konsep negara. Dari segi proses kelahirannya, keunikan Orde Baru terletak pada aktor-aktor yang bermain untuk mendapatkan kekuasaan pada pertengahan tahun 1960-an. Pada tahun-tahun itu kekuatan partai politik semakin melemah sebagai akibat kebijakan Soekarno dalam hal mengubur partai-partai. Kekuatan politik yang sangat menonjol pada saat-saat terakhir periode Orde Lama adalah Soekarno sebagai Presiden, militer, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai yang didukung penuh oleh Soekarno. Kekuatan-kekuatan ini justru kemudian memunculkan konflik diantaranya, khususnya antara militer dengan PKI. Konflik tersebut kemudian berkembang sampai meletusnya peristiwa yang dianggap “dramatis” oleh militer dan dianggap sebagai titik tolak kelahiran Orde Baru, yakni peristiwa pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa tersebut lebih dikenal dengan nama “Gerakan 30 September 1965” atau “G30S/PKI”.

Latar belakang historis tersebut telah menjadi dasar legitimasi Orde Baru dalam menapaki tangga kekuasaan. Orde Baru mencoba mengembalikan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dalam rangka mencapai tujuan politisnya tersebut, Orde Baru sangat berkepentingan dalam menjaga keutuhan kekuasaan lewat penekanan akan bahaya komunisme. Dalam perkembangannya, Orde Baru tumbuh menjadi negara yang kuat dengan cara memasuki sektor kehidupan privat serta memperlemah kekuatan-kekuatan politik masyarakat. Untuk menjalankan kontrol tersebut, cara yang digunakan tidak hanya mengandalkan alat negara seperti militer, polisi, dan jaringan birokrasi. Sesuai dengan konsep negara reproduksionis, maka Orde Baru menggunakan hegemoni ideologi melalui media massa berupa film. Dengan landasan historis pertentangan antara militer dengan PKI, seperti yang disimbolkan dalam Peristiwa G30S, maka beralasan bila Orde Baru mengangkat tema komunisme sebagai tema yang berlawanan dengan kehidupan politik Orde Baru.

Melihat perspektif negara Orde Baru yang reproduksionis, maka yang ditampilkan Orde Baru melalui film Pengkhianatan G30S/PKI mencerminkan kepentingan Orde Baru untuk mendapat legitimasi yang terus menerus akan eksistensi negara Orde Baru melalui penggambaran komunisme. Dalam hal ini, karena film tersebut menjadi alat hegemoni ideologi, maka kepentingan Orde Baru dalam menggambarkan komunisme adalah kepentingan ideologis.

Peristiwa G30S sepertinya menjadi tonggak bagi kemunculan Orde Baru sebagai pengganti Orde Lama, istilah tersebut digunakan untuk mengoreksi Orde Lama sebagai periode yang penuh *chaos*, kekacauan, dan penuh dengan kekerasan massal. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, era 1965 mungkin menjadi masa yang paling tidak disukai mengingat berbagai kondisi yang kerap meresahkan masyarakat dengan berbagai konflik sosial, politik, dan ekonomi yang menaunginya. Kondisi ini yang pada akhirnya memunculkan orientasi utama berupa ketertiban, stabilitas, keamanan, dan pembangunan ekonomi bagi kelahiran Orde Baru dan secara intrinsik terdapat dalam penjabaran ideologi 'Pembangunan'. Lebih lanjut lagi, negara Orde Baru dibangun di atas perannya sebagai pemulih ketertiban. Peristiwa pembunuhan massal pada tahun 1965 dimanfaatkan dengan baik oleh rezim Orde Baru untuk menanamkan ke dalam benak publik sebuah citra Orde Lama sebagai periode yang penuh dengan kekacauan. Dapat dikatakan bahwa Orde Baru mengatasnamakan kekacauan yang ada pada masa Orde Lama sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya.

Dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia seperti yang dibentuk rezim Soeharto, peristiwa G30S merupakan tindakan kekerasan yang sangat kejam, sehingga kekerasan massal terhadap siapa pun yang terkait dengannya dilihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan bahkan terhormat. Diduga ada hubungan sebab-akibat langsung, represi terhadap PKI merupakan jawaban sepatutnya terhadap ancaman yang diajukan G30S. Memang dalam wacana politik di Indonesia menjadi lazim menggabungkan G30S dengan kekerasan massal yang mengikutinya, seakan-akan keduanya merupakan suatu peristiwa tunggal; satu istilah, "Gerakan 30 September," digunakan untuk merujuk ke dua peristiwa. Kendati demikian sejak awal serangan Soeharto terhadap PKI, sesuatu yang tidak

benar sudah terasa dengan pelekatan erat kedua peristiwa tersebut. Pada dasarnya G30S merupakan suatu peristiwa yang relatif berskala kecil di Jakarta dan Jawa Tengah, yang sudah berakhir paling lambat 3 Oktober 1965. Berjuta-juta orang yang berhubungan dengan PKI, bahkan para petani buta huruf di dusun-dusun terpencil, ditampilkan sebagai gerombolan pembunuh yang secara kolektif bertanggung jawab atas G30S. Setiap orang yang ditahan militer dituduh sebagai pihak yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam Gerakan 30 September. Kekerasan yang terjadi sepanjang akhir 1965 sampai awal 1966 harus dilihat lebih sebagai saat awal pembangunan sebuah rezim baru, ketimbang sebuah reaksi wajar terhadap G30S. Soeharto dan para perwira tinggi Angkatan Darat lainnya menggunakan G30S sebagai dalih untuk menegakkan kediktatoran militer di negeri ini. Mereka perlu menciptakan keadaan darurat nasional dan suasana yang sama sekali kacau jika hendak menumbangkan seluruh generasi kaum nasionalis dan menyapu bersih cita-cita kerakyatan Presiden Sukarno. Mereka mengetahui bahwa mereka harus melawan pendapat umum. Soeharto saat itu relatif bukan siapa-siapa, seorang pejabat biasa, yang bersiasat untuk menggeser sang pemimpin karismatik bangsa. Ia dan para pemimpin militer lainnya mengetahui bahwa mereka akan menghadapi perlawanan hebat jika militer melancarkan kudeta terhadap Sukarno secara langsung tak berselubung.

Setelah keruntuhan Orde Lama, Orde Baru berhasil mengontrol mental mayoritas rakyat Indonesia mengenai masalah komunisme dan berhasil mendominasi pengetahuan rakyat tentang PKI seperti yang diinginkannya. Kontrol dan dominasi tersebut berhasil dilakukan sebab penguasa mempunyai akses yang sangat besar terhadap medium-medium penting dan potensial yang bisa memproduksi dan reproduksi wacana, sehingga Orde Baru bisa menanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang komunisme kepada masyarakat sebagaimana yang dikehendaki.

Setiap menjelang bulan Oktober, semua stasiun televisi Indonesia menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI. Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, hilang pula satu ritual politik melalui layar kaca. Sebagai teks media (istilah untuk informasi sebagai produk kultural), wacana film mengenai Partai Komunis

Indonesia (PKI), bagi sebagian orang dipandang sebagai pendidikan politik mengenai bahaya komunisme. Kemudian yang ditawarkan pada film ini terdapatnya rivalitas antara militer vs militer, militer vs/PKI, dan Soekarno yang diwacanakan mengambang.

Menggabungkan wacana ideologis dengan tujuan politik pragmatis menjadikan film G30S/PKI mengandung banyak ruang bolong yang menyimpan pertanyaan terbuka. Padahal sesuai kaidah film propaganda, tidak boleh membuka ruang yang menisbikan wacana. Teks propaganda harus bersifat dimensi tunggal. Pembuatan film ini di bawah pengawasan yang ketat dari militer yaitu Nugroho Notosusanto dan G Dwipayana, keduanya orang kepercayaan Presiden Soeharto di bidang sejarah dan media massa.

Kembali pada adegan-adegan kunci penggambaran PKI dalam film G30S/PKI, tampak dua ciri pemeranan, pertama adalah orang sipil yang terkesan *nervous*, dan kedua adalah perwira militer yang terkesan *cool*. Orang sipil itu dikonstruksikan sebagai PKI. Sedang yang militer adalah yang terkena pengaruh PKI. Tetapi apa wacana ini tidak bisa dibalik? Bagaimana bisa militer yang dicitrakan sebagai sosok yang berdisiplin dan tangguh, dapat dipengaruhi sejumlah orang sipil yang terkesan senewen?

Fokus penting dari film G30S/PKI adalah rangkaian adegan (*sequence*) penculikan dan pembunuhan para jenderal (dan seorang perwira pertama yang salah sasaran). Seluruh wacana dapat dikembalikan ke sekuel yang dibuat oleh Arifin C. Noor dalam film itu. Secara eksplisit, penculikan dan penembakan dilakukan oleh militer, dan secara asosiatif melalui *close-up* atas *badge*-nya adalah pasukan elite kePresidenan Cakrabirawa. Bagaimana menjelaskan ke-PKI-an anggota pasukan ini? Dengan nalar sederhana sebenarnya dapat dikembangkan dekonstruksi terhadap wacana yang dibangun rezim Orde Baru. Yaitu: mengapa pengusutan seluruh mata rantai kasus ini tidak dimulai dari pelaku anggota pasukan penculik itu? Dari mana asal kesatuannya, bagaimana perekrutannya menjadi pasukan elite itu, dan siapa komandan langsungnya. Dengan penyelidikan secara bertingkat ke atas (induktif), baru dapat tiba pada kesimpulan hubungan militer dan PKI. Tetapi ini tidak dilakukan Soeharto sebagai pelaksana pemulihan

keamanan, sebab dia mengambil langkah deduksi, dengan mengajukan ke Mahmillub sejumlah tokoh untuk membenaran wacana tentang pemberontakan PKI.

Selama bertahun-tahun masa pemerintahan Orde Baru setiap tanggal 30 September masyarakat dicekoki dengan tampilan tentang penyiksaan oleh pasukan paramiliter PKI yang ada di Lubang Buaya. Tetapi secara berangsur muncul wacana bahwa para jenderal meninggal akibat tembakan regu penculik. Di film G30S/PKI digambarkan bekas-bekas darah di lantai dan dinding rumah para jenderal berasal dari percikan luka tembak.

Gambaran ke-PKI-an dalam film G30S/PKI tidak berhasil melahirkan wacana antikomunisme sebagai makna publik (*public meaning*) tentang apa yang dianggap sebagai kebenaran. Tujuan utama yang berhasil adalah delegitimasi Soekarno dan legitimasi kekuasaan Soeharto. Legitimasi kekuasaan Soeharto terkesan lama, lebih 30 tahun sebab kebenarannya dipercaya. Tetapi sebagai hasil dari media propaganda dengan kekuatan hegemoni, daya tahan kebenaran itu pada hakikatnya dibatasi oleh kekuasaan kalah atau menang. Ini yang membedakannya dengan kebenaran yang berasal dari sintesis antara realitas dan rasionalitas.

Makna realitas dan rasionalitas tidak dapat dimusnahkan, kendati suatu kekuasaan dapat meredamnya sementara. Realitas dapat disembunyikan, dan rasionalitas dapat dihegemoni oleh kekuasaan. Tetapi dalam perjalanan waktu, terutama manakala kekuasaan kalah, makna ini akan muncul. Inilah yang memelihara peradaban manusia, kendati dalam sejarah selalu ada kekuatan perusak silih berganti berkuasa. Karenanya saat berpolitik, seseorang akan dihadapkan dengan pilihan: apakah kekuasaan demi kepentingan pragmatis, ataukah kekuasaan dalam konteks kultural. Sintesis realitas dan rasionalitas merupakan inti peradaban (*civility*) manusia, sebagai dasar dalam kehidupan negara (*civil state*) maupun masyarakat (*civil society*). Adab yang mendasari kehidupan warga dalam konteks negara maupun masyarakat, tidak dapat dibentuk melalui propaganda, melainkan melalui proses panjang dalam pendidikan kewarganegaraan dalam menghayati nilai-nilai kultural.

Dari sinilah arti penting kebebasan pers, yaitu ruang publik (*public-sphere*) yang berdasarkan acuan nilai bersama (*shared values*) yang menghargai hak warga untuk mengetahui masalah publik dan hak warga untuk mengekspresikan kepentingan dan aspirasinya di ruang publik. Untuk mewujudkannya secara imperatif diperlukan adanya pers (media) bebas. Jadi pers bebas hanya mungkin terwujud jika ada *shared values* mengenai hak publik. Media film dalam tuntutan kaidah sinematografi, sarat dengan tanda dalam representasi makna. Sebagai media propaganda, film G30S/PKI dalam rentang waktu tertentu berhasil memonopoli makna publik guna menyangga kekuasaan. Dan strategi politik yang dilancarkan oleh Orde Baru memang benar-benar berjalan dengan baik dalam tujuan menghegemoni ideologi masyarakat. Ketakutan akan bahaya laten komunis tersebut tercermin dari anggapan masyarakat secara umum yang menilai Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai yang penuh dengan aksi kekejaman, kebiadaban, partai penghasut, serta atheis. Anggapan tersebut tentunya dirasakan oleh masyarakat setelah melihat berbagai adegan yang ditampilkan pada film Pengkhianatan G30S/PKI, dimana pada film tersebut dimunculkan adegan-adegan penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat, kemudian juga dimunculkan adegan perusakan terhadap tempat peribadatan dan perusakan kitab suci Al-Qur'an sebagai gambaran atheis sebuah Partai Komunis Indonesia, adapun gambaran penghasut diilustrasikan melalui adegan dimana PKI mencoba mencuci otak masyarakat melalui ideologi komunisnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada lima orang informan, ternyata ketiga kategori tersebut juga menjadi anggapan kesemua informan terhadap Partai Komunis Indonesia setelah menonton film tersebut pada era Orde Baru.

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapat, anggapan setiap informan di era reformasi (setelah film Pengkhianatan G30S/PKI dihapuskan dari penayangannya) mengalami perubahan. Disini setiap informan menjelaskan bahwa anggapan 'buruk' tentang komunisme dan Partai Komunis Indonesia dirasa tidak relevan lagi pada era Reformasi sekarang ini. Dengan informasi yang mereka dapatkan baik itu melalui media massa, buku, majalah, forum, ataupun

pembicaraan dengan orang-orang menjadi faktor perubahan pandangan mereka terhadap Partai Komunis Indonesia, khususnya terkait dengan peristiwa G30S. Lebih lanjut lagi, setiap informan justru mempertanyakan mengenai keabsahan informasi dan penggambaran peristiwa G30S seperti yang diilustrasikan pada film Pengkhianatan G30S/PKI. Dapat dikatakan bahwa peran Orde Baru dalam menciptakan sebuah wacana komunisme di Indonesia terbilang berhasil mempengaruhi pengetahuan masyarakat selama pemerintahan Orde Baru berlangsung. Namun setelah keruntuhan Orde Baru, yang diikuti dengan penghapusan film Pengkhianatan G30S/PKI, masyarakat justru lebih mengkritisi mengenai 'kebenaran' yang terkait dengan PKI dan peristiwa G30S apalagi dengan mulai beredarnya kembali informasi-informasi terkait dengan peristiwa tersebut melalui buku, tulisan (artikel), majalah, dan medium-medium lainnya. Dan menurut beberapa informan, jika ideologi komunis muncul kembali di era Reformasi bukan menjadi suatu hal yang dipermasalahkan kembali karena keburukan yang coba diungkapkan pada film Pengkhianatan G30S/PKI belum tentu semuanya benar. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kemunculan wacana komunisme di era Reformasi ini bukanlah suatu hal yang perlu digunjingkan seperti pada era Orde Baru, kemudian menurut penulis, sebagian besar masyarakat dalam menanggapi masalah komunisme di Indonesia dan anggapan terhadap Partai Komunis Indonesia tidak seperti anggapan mereka ketika hidup di zaman Orde Baru. Dengan demikian, terdapat perubahan pandangan masyarakat akan wacana komunisme dan perubahan anggapan mereka terhadap Partai Komunis Indonesia jika melihat hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kelima informan.

Selanjutnya, pada kesimpulan akhirnya, tulisan ini mencoba menjawab setiap pertanyaan yang tercantum pada permasalahan penelitian. Peran negara yang sedemikian rupa mendominasi setiap akses kehidupan masyarakat agaknya telah menjadi tolak ukur keberhasilan rezim Orde Baru dalam menanamkan pengetahuan masyarakat akan ancaman bahaya komunisme. Hal ini dibuktikan melalui pembuatan wacana baik dengan jalan menetapkan Undang-Undang, kebijakan, pidato kepresidenan, sampai pada produksi wacana media film seperti

yang dianalisis dalam tulisan ini. Pengaruh kekuasaan rezim terhadap proses produksi sampai pada penyampaian film Pengkhianatan G30S/PKI setiap tahun menjelang bulan Oktober dimasyarakat, membuat wacana seputar ancaman bahaya komunisme dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat selama kekuasaan Orde Baru berlangsung. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis, penulis kemudian mendapati beberapa aspek yang dijadikan penggambaran Partai Komunis Indonesia, antara lain penggambaran biadab, anti-Tuhan, serta gambaran penghasut. Penggambaran tersebut agaknya telah tertanam dibenak masyarakat selama beberapa dekade kepemimpinan Suharto sehingga masyarakat memiliki opini yang sama mengenai ancaman bahaya komunisme dan menganggap Orde Baru sebagai pahlawan yang telah menumpas kekejaman Partai Komunis Indonesia seperti yang tertuang dalam film Pengkhianatan G30S/PKI. Namun pandangan masyarakat akan ancaman bahaya komunis pada era Orde Baru agaknya tidak lagi digunjang-ganjingkan pada pasca reformasi ini. Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kelima informan, penulis mendapati bahwa wacana ancaman bahaya komunisme pada era reformasi mengalami sebuah perubahan, dimana masyarakat agaknya kini lebih berpikir kritis terhadap setiap sejarah pengetahuan yang diungkapkan pada masa kepemimpinan Suharto. Menurut penulis, dengan mulai bermunculan kembali tulisan-tulisan dan bahkan sebuah film (*Shadow Play : Indonesia's Year of Living Dangerously*) yang mengangkat tema komunisme maupun yang terkait dengan peristiwa G30S/PKI menjadi suatu acuan dalam pembentukan kembali pengetahuan masyarakat mengenai komunisme dan peristiwa tersebut. Kemudian pada era reformasi ini, perbincangan mengenai Partai Komunis Indonesia dan seputar ideologi komunisme tidak lagi menjadi suatu hal yang tabu. Sehingga wacana ancaman bahaya komunisme sepertinya sudah tidak berlaku lagi pada era reformasi ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Alan Williams. 2002. *Film and Nationalism*. New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press.
- Birowo, M. Antonius, M.A. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gitanyali.
- Budiarjo, Miriam. 1983. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Claire Holt (ed). Siegel, James, Benedict R, O'G Anderson. 1972. *Culture and Politics in Indonesia*. London : Cornell University Press.
- Daniel, S. Lev. 1988. *Partai-Partai Politik di Indonesia Pada Demokrasi Parlementer (1950-1957) dan Demokrasi Terpimpin (1957-1965), dalam Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Edward Jay Whetmore. 1989. *Media, Form, Content and Consequence of Mass Communiation*. California : Wadsworth Publishing Company.
- Eriyanto. 2000. *Kekuasaan Otoriter, Dari gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni, Studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*. Yogyakarta: Insist.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LkiS.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca : Cornell University Press.
- Feith, Herbert dan Lance Catles. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Foucaultt, Michel. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction: Volume I*. Vintage Books.
- Ingleson, John. 1983. *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta : LP3ES.
- John Fiske. *Introduction To Communication Studies*.
- John W. Creswell. 1994. *Research Design : Quantitative and Qualitative Approaches*. London : Sage Publications.

- J. Shoemaker, Pamela dan Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*.
- Kahin, George McTurnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. Jakarta : UNS-Pustakan Sinar Harapan.
- Krisna, Sen. 1987. *Indonesian Films 1965-1982 : Perceptions of Society and History*. Doctoral Thesis : Monash University.
- Krishna Sen dan david T. Hill. 2001. *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Institut Studi Arus Informasi.
- Liddle, William. 1994. *Pemilu-pemilu Orde Baru*. Translation. Jakarta : Grafiti Pers.
- L.L. Sitorus. 1983. *Sejarah Pergerakan Kebangkitan Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Margaret N. Poloma. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : CV Rajawali.
- Mas'ood, Mochtar. 1989. *Ekonomi dan Struktur Politik : Orde Baru 1966-1971*. Jakarta : LP3ES.
- Mrazek, Rudolf. 1997. *Sjahir: Politics and Exile in Indonesia*. New York : Cornell University Press.
- Nasution, Abdul Haris. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas : Jilid 8*. Jakarta : Haji Masagung.
- Nasution, Abdul Haris. 1965. *Fundamentals of Guerilla Warfare*. Singapore : Donald Moore Books.
- Nelson Philips, Cynthia Hardy. 2000. *Discourse Analysis, Investigating Process of Social Construction*. Sage Publication.
- Parakitri T. Simbolon. 1995. *Menjadi Indonesia*. Jakarta : KOMPAS.
- Penders, C. L. M. & Ulf Sundhaussen. 1985. *Political Biography*. New York : University of Queensland Press.
- Peter L. Berger, Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality*. New York : Penguin Book.
- Pour, Julius. 1997. *Benny Moerdani : Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta : Gramedia.

- Praktiko, Riyono. 1984. *Kreatif Menulis Feature*. Bandung : Alumni.
- Pusat Sejarah TNI. 2000. *Sejarah TNI, Jilid III (1960-1965)*. Jakarta : Mabes TNI.
- Roeder, O. G. 1969. *Soeharto : Dari Pradjurit Sampai Presiden*. Jakarta : Gunung Agung.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*. Jakarta : Hasta Mitra.
- Rouke, Kevin O. 2003. *Reformasi : The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia*. London : Allen & Unwin Press.
- Said, Salim. 1991. *Profit Dunia Film Indonesia*. Jakarta : Grafitipers.
- Scott, Peter Dale. 2001. *CIA dan Penggulingan Soekarno*. Translation. Yogyakarta : Lembaga Analisis Informasi.
- Sen, Krishna. 1994. *Kuasa dalam Sinema : Negara Masyarakat dan Sinema Orde Baru*. Yogyakarta : Ombak.
- Singh, Bilveer. 1996. *Dwifungsi ABRI*. Translation. Jakarta : Gramedia.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sobur, Alex M.Si. 2004. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framming*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Soe Hok Gie. 1997. *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta : Bentang.
- Sofhian, Manai. 1991. *Apa yang Masih Teringat*. Jakarta : Yayasan Mencerdaskan Bangsa.
- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta : Gramedia.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta : LP3ES.
- Suryadinata, Leo. 1982. *Golkar dan Militer : Studi tentang Budaya Politik*. Translation. Jakarta : LP3ES.
- Suwarsono, Alvin Y. So. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Teun A van Dijk. 1994. *"Discourse and Cognition in Society"* dalam David Crowley & David Mitchell. *Communication Theory Today*. UK Cambridge: Polity Press.

Virginia Matheson Hooker. 1996. *"Bahasa dan pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan Terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru"* dalam Yudi Latif dan Idi Subandi Ibrahim (ed) *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung : Mizan.

Wardaya, Baskara T. 2001. *Menuju Demokrasi : Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : Gramedia.

Widjanarko, Bambang. 1988. *Sewindu Dekat Bung Karno*. Jakarta : PT Gramedia.

Yayasan Piranti Ilmu. 1992. *"Pak Natsir dan Orde Baru"* dalam *Pemimpin Pulang : Rekaman Peristiwa Wafatnya M. Natsir*. Jakarta : Yayasan Piranti Ilmu.

Artikel dan Jurnal :

Adam, Asvi Warman. 2009. *Tinjauan Buku John Roosa Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto dalam Jurnal Sejarah Vol. 14. No.1.*

Budianta, Melani. *Teori Sastra Sesudah Strukturalisme dari Studi Teks ke Studi Wacana Budaya*. Artikel dalam *Bahan Pelatihan Teori dan Kritik Sastra*. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya : Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

Budi Sampurno. 1992. *Peranan Badan Sensor Film dalam Ikut Menjaga Wajah Wanita dalam Film*, dalam jurnal *Media Massa dan Wanita*. Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI dan United Nation Development Fund for Women (UNIFEM).

Drs. Bustanul Arifin. S.H., M.Hum, Drs. Abdul Rani. M.Pd. 2000. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Greg Poulgrain. 1999. *"Who Plotted 1965 Coup"* dalam *Inside Indonesia* No. 57. January-March.

Kompas. 1 Maret 2004. "Pasca Putusan MK soal Eks Anggota PKI, Perjalanan Masih Panjang".

Mh, Nurul Huda. 2004. *Ideologi Sebagai Praktek Kebudayaan*. Artikel dalam *Jurnal Filsafat Driyarkara*, Edisi Th.XXVII No.3.

Tempo edisi 6/14, 7 April 1984

Webster's New Twentieth Century Dictionary, Second Edition. 1983. USA : The World Publishing Company.

Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya. 1994. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-undang :

Undang-Undang Film Indonesia no. 8/ 1992.

Web Site :

<http://astro.temple.edu/~ruby/wava/worth/sintro.html>

<http://www.tamanismailmarzuki.com>

<http://www.marxist.com>

<http://www.wordreference.com/definition/film>

Film :

Pengkhianatan G30S/PKI (1984).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

P : Penulis

I : Informan

Informan 1 : Edward Nimrod

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Profil : Edward Nimrod merupakan informan yang memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi dimana informan tersebut juga pernah menjadi anggota dari salah satu organisasi politik kemahasiswaan.

P : Pada era orde baru pernah nonton film pengkhianatan G 30 S PKI?

I : Pernah

P : Terakhir kapan lo nonton?

I : Uda lupa

I : Sebelum orde baru lengser

P : Umur berapa atau kelas berapa?

I : Reformasi kan 98,,,,,pokoknya klo ga SMP SD kelas 6

P : Pada waktu itu anggapan lo tentang sebuah partai komunis di Indonesia gmn?

I : Pada waktu itu gw anggepnya PKI partai yang kejam, dari film kan siletin jenderal2, nyulik, nembakin, bunuh, masukin ke lubang ya kejam ,bengis sadis...

P : Selain itu ada anggapan lain?

I : Pengen ngerubah idelologi pancasila

- P : Setelah era reformasi ini film tersebut dihapus dari pengayaannya, menurut lo ada ga kaitan penghapusan film tersebut dengan era orde baru?
- I : Ada lah, klo menurut gw begitu reformasi mulai 98 ke atas langsung diapus tuh, koq knp tiba2 diapus klo mang film itu mang bener, ternyata setelah gw belajar2 ternyata ga sepenuhnya bener
- P : Knp lo beranggapan film tersebut ga sesuai dengan fakta yang sebenarnya?
- I : Soalnya dari gw baca2 dikit sama ngobrol sama orang2 mereka bilang itu semua rekayasa
- P : Selain itu ada ga pernyataan yang membuat lo beranggapan klo fakta tersebut ga benar,,,contohnya dari majalah, artikel, atau informasi lain?
- I : Ada,, yang paling menarik buat gw tentang tidak adanya supersemar sebenarnya...ya kan orang2 yang bener2 terlibat langsung yang katanya membasmu PKI ga ada yang berani nulis apa sih sebenarnya isi supersemar itu sebenarnya, dan apa bukti adanya supersemar?dan itu yang menjadi pertanyaan buat gw...klo mang ga ada supersemar berarti ga ada urusan buat membasmu PKI jadi pki itu belum tentu dia beneran mau mengukudeta negara
- P : Klo menurut lo film pengkhianatan g 30 s pki itu apa kaitannya dengan era orde baru?
- I : Film pki itu menurut gw bentuk pemerintahan orde baru untuk mempertahankan kekuasaannya, jadikan pas jaman era 66, 65 gitu pki kan mulai banyak pendukungnya basis massanya mulai kuat jadi mereka takut untuk disaingi dan dijatuhin sama pki jadi mereka membuat peristiwa pki untuk menghabisi petinggi2 pki berikut pendukung2nya...
- P : Anggapan lo setelah reformasi ini tentang PKI ini bagaimana?
- I : Pada dasarnya klo gw liat sebenarnya lebih cenderung ke rakyat2 jelata, buruh, cuman ideologinya komunis, ga ada yang salah si sama ide komunis itu sendiri asal dia tetep ke pancasila, jadi setelah era reformasi anggapan gw ga kayak dulu karena menurut gw pki itu belum tentu pengen memberontak, klo pun mereka pengen ngeberontak ga mungkin ngelakuin kayak gitu...
- P : Bagaimana klo menurut lo tentang Kemunculan artikel buku ttg komunisme yang di larang era orde baru?
- I : Klo gw liat munculnya gara2 uda terlalu kapitalisme sistem di indonesia jadi yang punya modal jadi pemimpin atau yang ga punya apa2 ya mati aja, mungkin yang buat buku atau artikel2 itu uda ga suka sama pemerintah sekarang itu yang cenderung ke barat yang penting bisa melanggengkan kekuasaannya, jadi sebenarnya mereka bikin artikel itu untuk nunjukin ke rakyat kalo sebenarnya pemimpin lo itu ga baik...
- P : Pernah ga lo mengetahui klo saat ini mulai kembali terdapatnya basis2 massa yang berlandasan komunis?
- I : Ya ada

P : Trus tanggapan lo mengenai hal ini bagaimana?

I : Ga ada masalah selama...ini kan negara demokrasi

P : Maksud gw klo misalnya ternyata dari basis massa tersebut muncul kembali paham komunis di indonesia...

I : Kecenderungan ke arah sana sih gw liat uda ada,,dari ada partai apa?partai rakyat demokratik itu kan lebih ke arah apa ya?klo gw liat,,lebih ke arah kiri gitu sama kayak komunis, mahasiswa pun ada, dan itu banyak contohnya LMND,,, PRD partainya trus apa lagi ya? Gw lupa...

P : Lalu klo menurut lo bahaya laten komunisme yang dulu digembor2kan itu bagaimana pada saat ini?

I : Klo gw liat si uda ga berlaku lagi,,ga perlu takut sama bahaya laten komunisme..

P : Klo misalnya ideologinya itu sendiri bagaimana menurut lo?

I : Gw malah setuju klo diterapin sekarang,,soalnya setelah reformasi ternyata,,apa ya?masih banyak aja rakyat miskin di indonesia,,yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya,,klo misalnya paham komunis dipake kan katanya klo misalnya berjalan dengan benar kesejahteraan sama rata di seluruh rakyat di negara itu,,jadi ya gw setuju dengan paham itu klo misalnya itu berjalan...

P : Menurut lo sendiri saat ini pandangan masyarakat secara umum tentang PKI bagaimana?

I : Menurut gw masyarakat pasti ga akan mau ada PKI selanjutnya di indonesia,mungkin yang banyak mendukung PKI di Indonesia ada di kalangan akademisi menurut gw...

P : Oke deh ton trima kasih uda meluangkan waktu buat wawancara dan infonya..

I : Sama-sama...

Informan 2 : Jalu

Umur : 23 tahun

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Profil : Jalu Bayu Adhi merupakan informan yang memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi dimana informan tersebut sekarang bekerja sebagai seorang pegawai swasta di Jakarta

P : Pernah menonton film pengkhianatan g 30 s pki?

I : Pernah, SD tepatnya

P : Tanggapan lo mengenai sebuah partai komunis pada waktu itu gimana jal?

I : Ya, pada saat itu saya hanya berpikir bahwa itu tindakan yang tidak selayaknya, biadab, dan tidak berperkemanusiaan karena emang seperti itu yang di sajikan ditelevisi

P : Berarti menurut lo penggambaran partai komunis di era orde baru itu kejam ya...

P : Setelah era orde baru lengser, pada tahun 1997 film ini dihapuskan bagaimana respon lo mengenai hal ini?

I : Ga ada sih, hanya saja pada waktu itu saya tidak terfokus sama perkembangan yang ada jadi hanya melihat partai yang ada, setau saya sih PKI itu tetap dilarang

P : Pandangan lo setelah reformasi ini bagaimana jika dibandingkan dengan era orde baru?

I : Tentunya beda lah, kan uda ada buku2 terbitan yang dulunya dilarang sekarang timbul yang mengenai latar belakang menceritakan sejarah sebenarnya mengenai pki itu sendiri

P : Jadi tanggapan partai komunis menurut lo saat ini seperti apa?

I : Ya mungkin saat itu yang digambarkan,,yang saya baca dari buku,,sebetulnya itu semua telah di atur oleh pihak yang ingin menjatuhkan sukarno,,jadi masyarakat tetap didorong untuk percaya partai komunis seperti itu jadi dianggap tetap dilarang keberadaannya,,menurut saya saat ini ya agak sedikit membingungkan sejarah yang benar atau tidak,,karena belum tentu yang digambarkan di buku itu benar juga

P : Kaitan orde baru dengan pembuatan film tersebut?

I : Menurut saya sih pada saat itu hanya sebagai bentuk fungsi politik untuk mempertahankan kekuasaan bahwa inilah pak harto yang berjasa telah membasmi pki, termasuk untuk menyalahkan sukarno seperti yang saya baca di buku..

P : Kenapa lo bisa beranggapan klo suharto menyalahkan sukarno atas pemberontakan pki berdasarkan buku yang lo baca?

I : Yang saya temukan dibuku sebenarnya suharto itu orangnya oportunis,,jadi dia hanya kebetulan saja dia menjabat sebagai pejabat militer untuk memberantas pemberontakan pki sehingga nama dia naik untuk dapat mencalonkan presiden, pada saat itu dia didukung mungkin dari pihak militer,,sehingga pemutaran film tersebut hanya untuk mempertahankan dari segi politik suharto saja..

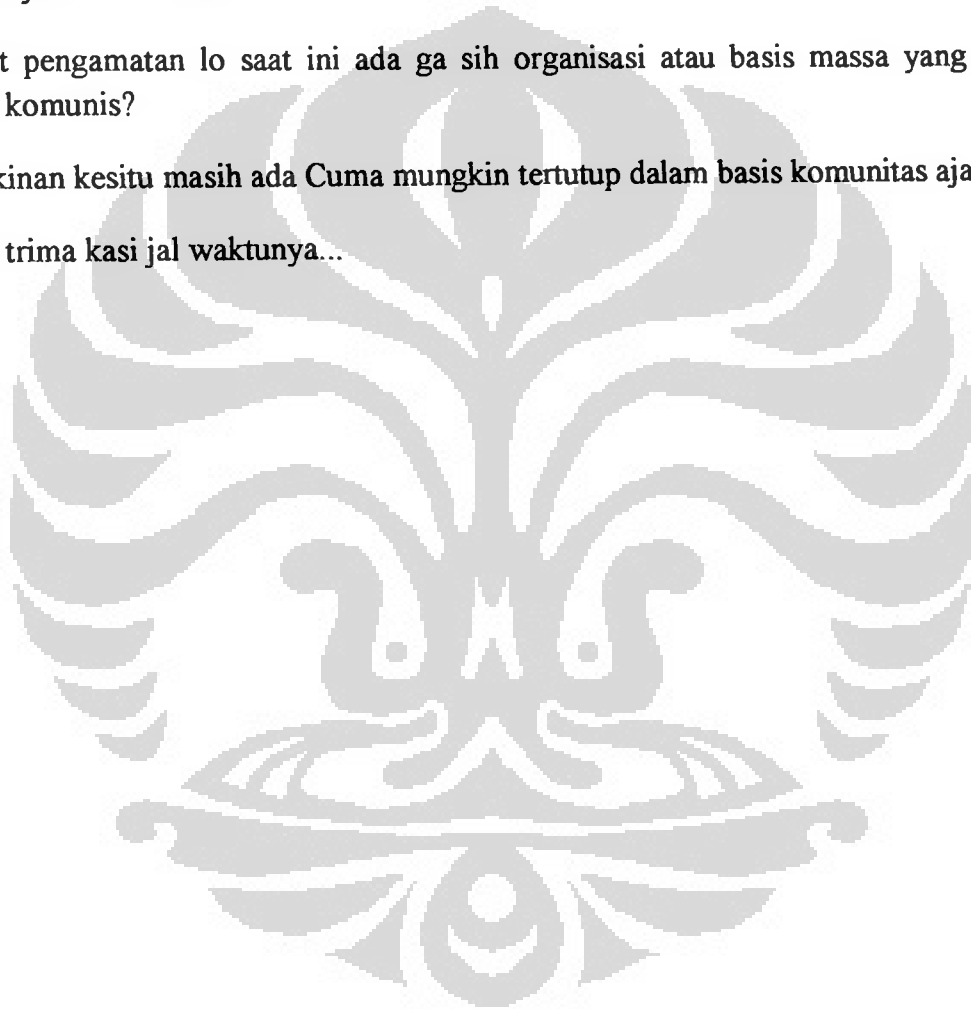
P : Kira2 menurut lo anggapan masyarakat umum pada saat ini tentang PKI seperti apa?

I : Pada dasarnya mungkin karena kebingungan akan fakta sejarah yang dimanipulasi selama orde baru yang mungkin masih tertanam di pikiran nya bahwa komunis itu sendiri merupakan,,,,seperti yang dilihat di stiker2 merupakan bahaya laten tetep dijaga keeksisannya di Indonesia

P : Menurut pengamatan lo saat ini ada ga sih organisasi atau basis massa yang berlatar belakang komunis?

I : Kemungkinan kesitu masih ada Cuma mungkin tertutup dalam basis komunitas aja

P : Oke deh trima kasi jal waktunya...



Informan 3 : Tomi

Umur : 25

Pekerjaan : Pegawai BUMN

P : Pernah nonton film G 30 S/PKI?

I : Pernah lah

P : Kapan terakhir lo tonton?

I : SD

P : Menurut lo penggambaran PKI dalam film tersebut gimana?

I : Kalo gw liat lebih nonjolin kejelekan mereka sih,,ibaratnya meskipun kita ga tau artinya kayak apa karena emang kita ga pernah tau, datanya ga pernah keluar atau informasinya juga simpang siur dan ga jelas.

P : Terus waktu dulu tanggapan lo sendiri tentang partai komunis itu gimana?

I : Rusuh

P : Selain rusuh?

I : Klo dibilang sadis...sadis sih!bis waktu kecil gw ga ngerti sih maksud mereka itu apa?karena dicerita itu Cuma digambarin tanggal sekian taun sekian kejadiannya begitu meskipun kita ga tau hal itu bener apa ga...soalnya itu kan film dan riilnya kita ga tau seperti apa kan?

P : Apa yang lo ketahui dari film tersebut tentang relasi antara Soekarno, Soeharto dan PKI?

I : Klo menurut gw semuanya pasti ada hubungan dengan kejadian2 yang terkait sama PKI,,Cuma tujuan dan sebab musababnya gw ga tau dan gw sendiri juga ga peduli..

P : Bagaimana pendapat lo tentang partai komunis di Indonesia setelah era reformasi ini?

I : Klo gw sih mandang partai komunis,,, klo gw bilang,,,dulu soekarno pun nganut paham itu juga kan?!Cuma dalam artian paham komunis disini soekarno coba nampilin dari sisi yang baiknya diambil sama dia yang buruknya ya ga diambil..itu pun setelah gw ngobrol2 sama orang menurut gw sih fine2 aja negara komunis tu baik2 aja,,

Informan 4 : Henry Suropati

Umur : 22 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa teknik metalurgi

P : Apa yang anda ketahui tentang PKI secara umum?

I : Kalo yang dilihat dari film PKI yang saya tonton, gambaran umumnya jahat, suka membunuh tapi makin lama dipikir belum tentu itu benar bisa aja itu Cuma rekayasa ORBA

P : Tadi anda bilang kalau anda pernah menonton film G 30 S PKI, kapan terakhir anda nonton?

I : Seingat saya sekitar tahun 95/96 pas kelas dua SD lah

P : Bagaimana anda melihat PKI setelah menonton film tersebut pada waktu itu?

I : Karena mindset saya waktu masih kecil, maka anggapan saya waktu itu PKI itu jahat dari setingnya yang membunuh 8 jenderal dan ingin meng kudeta presiden Soekarno, PKI itu jahat banget pengen ambil alih dan membunuh jenderal2, itu mindset saya waktu menonton film PKI

P : Menurut anda gambaran seperti apa yang ingin diungkapkan oleh Orde baru tentang PKI di dalam film tersebut?

I : Itu mindsetnya biar orang2 Indonesia menganggap PKI itu jahat banget sehingga kita harus membenci PKI, disitu digambarkan juga PKI membunuh, membantai, menyilet2, ditembakin dilobang, itu masyarakat Indonesia mindsetnya diarahkan kesitu biar mikirnya kejam banget, tapi secara gambaran umum itu benar atau tidak?

P : Pernah tidak anda mengalami traumatik setelah menonton film tersebut?

I : Pernah sih

P : Apa yang membuat anda traumatik melihat film tersebut?

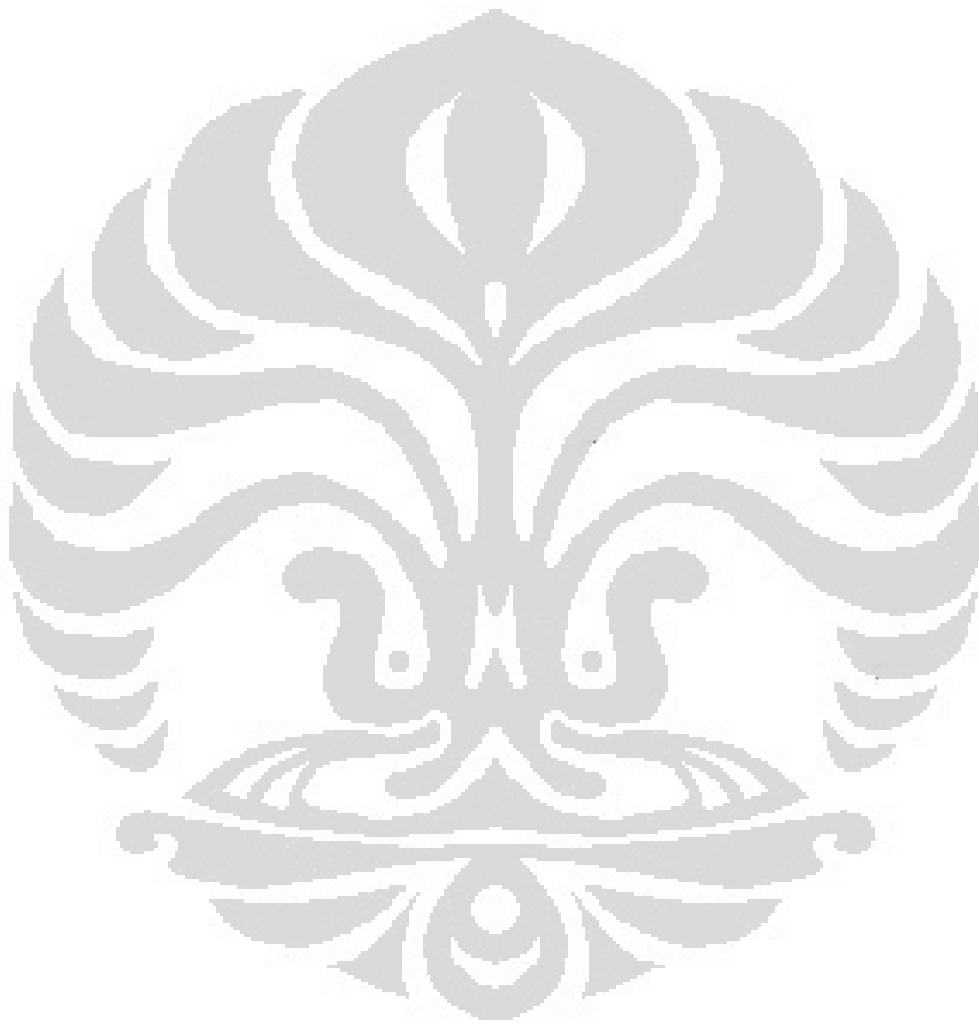
I : Ketika para jenderal disiksa kayak di siletin lah, dicuci air garam, pokoknya semua yang berbau kekerasan yang dilakukan PKI di film itu

P : Menurut anda bagaimana image Soeharto yang coba dimunculkan dalam film tersebut?

I : Kalo suharto itu pengen nunjukin, kalo di bola itu man of the matchnya lah, jadi pahlawannya gambaran umumnya mengesankan kalo ga ada suharto PKI itu ga bisa ditumpas

P : Bagaimana anggapan anda mengenai G 30 S di era reformasi ini?

I : Sebenarnya menurut referensi yang saya baca, G 30 S itu sebenarnya setingan juga dari ORBA biar presiden sukarno itu lengser keluar surat supersemar langsung pak hartono itu naik jadi presiden, itu dari referensi yang saya baca, trus yang saya tangkap dari referensi lain bilang kalo PKI itu ingin menggulingkan pancasila tapi ternyata itu tidak benar



Infroman 5 : Sopar Peranto

Umur : 23

Pekerjaan : Pegawai LSM (Alumni Sosiologi UI)

P : Par pernah nonton film Pengkhianatan G30S/PKI?

I : Pernah lah

P : Kapan terakhir lo nonton?

I : Belom lama lah gue nontonnya..

P : Kalo pas era Orde baru kapan terakhir lo nonton?

I : Wah lupa gue, ya sekitar gue SD lah terakhir nonton

P : Bagaimana lo mengangapi PKI pada waktu itu abis nonton tuh film?

I : Yang pasti jahat, sadis, anarkis, anti-Tuhan ya begitu lah kira-kira pandangan gue pada waktu itu, apalagi pas ngeliat jenderal-jenderal pada disiksa, dibunuh, keji banget lah pokoknya.

P : Bagaimana anggapan lo soal keberadaan wacana komunisme di era reformasi ini?

I : Kalo menurut gue sekarang uda ga kayak pas era Orde Baru, kayak dilihat sendiri aja kita uda mulai ngebahas soal komunisme tanpa harus merasa kuatir kayak pas di era Orde Baru. Trus juga bisa diliat kayak buku-buku yang tadinya dilarang gara-gara terkait sama komunisme sekarang uda mulai muncul juga.

P : Trus menurut lo mungkin ga komunisme bakal berkembang lagi sekarang ini?

I : Kalo pahamnya sih mungkin bisa berkembang tapi secara praktis kayaknya kurang bisa deh, tapi sebetulnya gue setuju aja kalo berkembang soalnya bisa ngasi warna aja buat demokrasi di Indonesia.

P : Oke thanks par atas waktunya.

I : Sip, sama-sama.